



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Situasi pangan global saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks dan multidimensional, di antaranya meliputi perubahan iklim, pertumbuhan populasi global yang pesat, serta meningkatnya ketegangan geopolitik dan perang dagang antarnegara. Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian, ditandai dengan penurunan produktivitas, perubahan pola tanam, serta meningkatnya risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, perubahan iklim juga berkontribusi terhadap menurunnya kualitas lahan pertanian, terbatasnya ketersediaan sumber daya air dan mengganggu rantai pasok pangan global.

Pertumbuhan populasi dunia yang terus meningkat mendorong lonjakan kebutuhan pangan secara global. Lonjakan tersebut tercermin dari meningkatnya permintaan pangan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta produk pangan yang lebih sensitif terhadap pertumbuhan pendapatan terutama di negara-negara berkembang, seperti produk ternak dan minyak nabati. Permintaan terhadap komoditas-komoditas tersebut diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam beberapa dekade mendatang, seiring dengan peningkatan taraf hidup dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Kondisi ini berpotensi semakin kompleks dengan adanya ketegangan geopolitik dan perang dagang yang menyebabkan guncangan signifikan terhadap rantai pasok global serta mendorong peningkatan harga berbagai komoditas pertanian. Hal ini berdampak pada menurunnya nilai dan volume perdagangan internasional, yang pada akhirnya berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Disrupsi ketersediaan pangan di pasar internasional diperkirakan akan semakin sering terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, seiring dengan peningkatan harga pupuk dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga pupuk dan BBM meningkatkan biaya usaha tani secara keseluruhan dan berpotensi menurunkan produktivitas sektor pertanian. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi, dapat menyebabkan kenaikan harga pangan sehingga mengancam ketahanan pangan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Saat ini, sejumlah negara telah mengalami kondisi rawan pangan (*food insecurity*) bahkan krisis pangan (*food crisis*), seperti Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Ethiopia, Yaman, dan beberapa negara di kawasan Jazirah Arab yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.

Perkembangan situasi pangan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, menyebabkan Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional untuk menghindari

dampak buruk dari potensi krisis pangan global. Namun demikian, sektor pertanian nasional masih menghadapi berbagai tantangan struktural, di antaranya peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk, tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, penurunan produktivitas lahan, tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis seperti gandum dan kedelai, serta rendahnya tingkat regenerasi petani.

Ketahanan pangan nasional merupakan pilar strategis dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan pembangunan negara. Pemenuhan kebutuhan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga berperan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Ketahanan pangan yang kokoh memperkuat posisi negara dalam menghadapi tekanan global, menjaga kestabilan harga, serta melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari risiko krisis. Dalam perspektif jangka panjang, ketahanan pangan adalah elemen mendasar untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan.

Swasembada pangan sebagai salah satu indikator penting dalam mencapai ketahanan pangan menunjukkan kemampuan bangsa dalam memanfaatkan potensi domestik secara maksimal, mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Mewujudkan swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional merupakan fondasi utama bagi kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan negara yang inklusif dan berdaulat.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing produk pertanian.

Pembangunan nasional yang di dalamnya termasuk pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar memberikan dampak langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional sektor pertanian yang selaras Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagai rencana jangka menengah pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan.

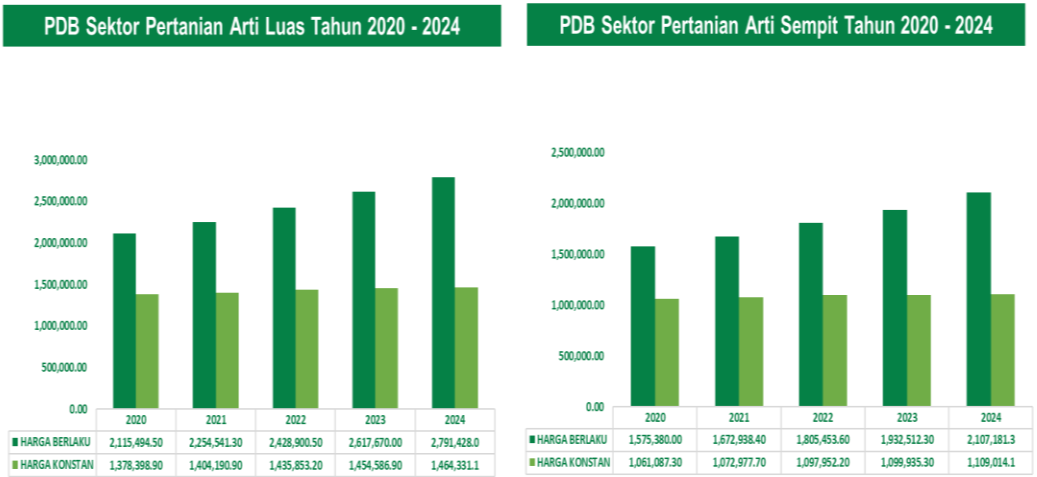
Sebagai wujud kesinambungan pembangunan, maka capaian pembangunan pertanian yang telah diraih pada periode sebelumnya menjadi pembelajaran dan fondasi untuk percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan pada periode selanjutnya. Permasalahan dan kendala yang menjadi tantangan merupakan dasar untuk menentukan langkah antisipatif dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Indikator Makro

Sektor pertanian merupakan tulang punggung peradaban manusia yang tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan populasi dunia tetapi juga memengaruhi ekonomi, lingkungan, dan stabilitas global. Sektor pertanian di Indonesia bahkan mampu bertahan terhadap guncangan pandemi COVID-19 yang mengganggu hampir semua sektor ekonomi. Sektor pertanian telah terbukti menjadi penyangga ekonomi dan ketahanan pangan nasional ketika pandemi tersebut melanda Indonesia dan dunia, tercermin dari pertumbuhan ekonomi (*year on year*) sektor pertanian Indonesia yang secara konsisten positif selama delapan triwulan (dari triwulan I tahun 2020 hingga triwulan IV tahun 2021), sementara pada saat yang sama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) total tahun 2020 negatif. Secara spesifik, kinerja dan ketahanan relatif sektor pertanian dapat diamati pada beberapa indikator makro sektor pertanian lainnya, antara lain: Tenaga Kerja Pertanian, Nilai Tukar Petani, Neraca Perdagangan, Investasi Pertanian, dan Produksi Komoditas Pertanian Strategis, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

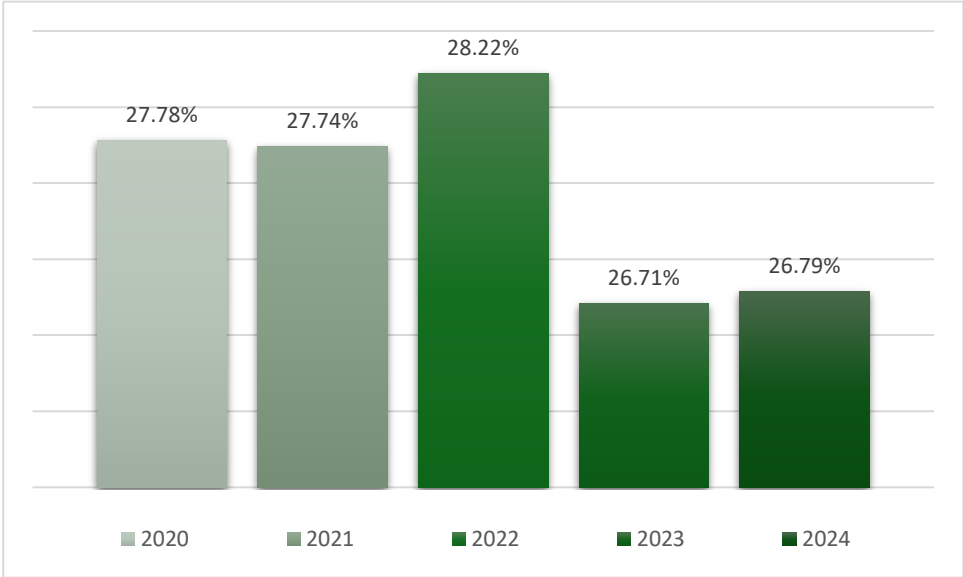
a. PDB Pertanian Indonesia 2020-2024



Gambar 1. 1 Kontribusi PDB Pertanian terhadap PDB Nasional
2020-2024

Pada tahun 2020-2024, PDB Sektor Pertanian menunjukkan tren positif. PDB pertanian arti luas berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 6,64% dan harga konstan naik 0,68%. Sedangkan pertanian arti sempit berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 9,05% dan harga konstan naik 0,9%. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Pada tahun 2020, PDB sektor pertanian tumbuh positif 1,77% di saat yang sama PDB nasional tumbuh negatif -2,07%.

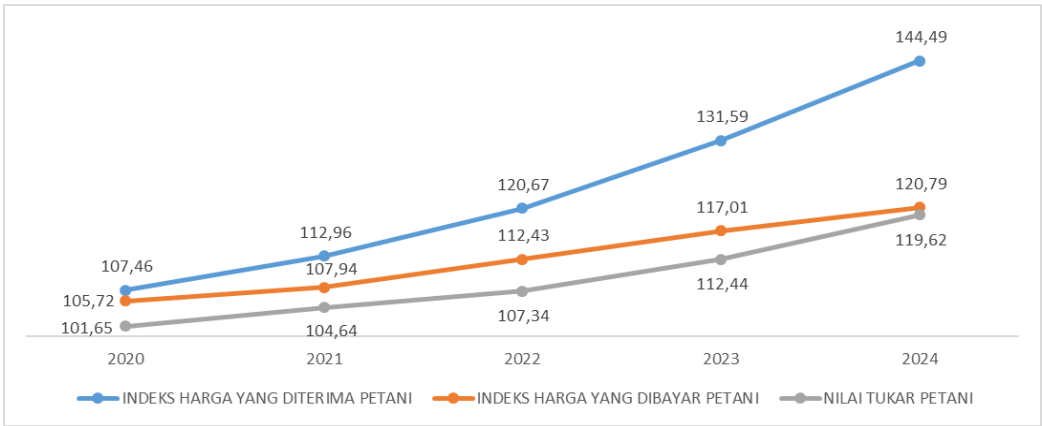
b. Tenaga Kerja Pertanian Indonesia 2020-2024



Gambar 1. 2 Kontribusi Tenaga Kerja Pertanian terhadap Tenaga Kerja Nasional, 2020-2024

Sektor pertanian merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selama 5 tahun terakhir (2020-2024), pangsa tenaga kerja pertanian terhadap total angkatan kerja berkontribusi lebih dari 25% dari total angkatan kerja, dengan nilai rata-rata 27,43%. Nilai rata-rata *share* ini setara dengan 39,72 juta pekerja dari total 144,77 juta jiwa angkatan kerja di Indonesia. Peningkatan tenaga kerja sektor pertanian secara signifikan terjadi pada tahun 2022, salah satunya merupakan akibat dari pemulihan pasca pandemi COVID-19. Sebagian besar tenaga kerja non-pertanian yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau belum bisa kembali ke pekerjaan sebelumnya, kemudian beralih kepada sektor pertanian. Selain itu, banyaknya program pemerintah khususnya Kementerian Pertanian yang memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, alsintan, bahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, termasuk pelatihan untuk petani muda, menyebabkan banyak masyarakat tertarik untuk berusaha di sektor pertanian.

c. Nilai Tukar Petani Indonesia 2020-2024

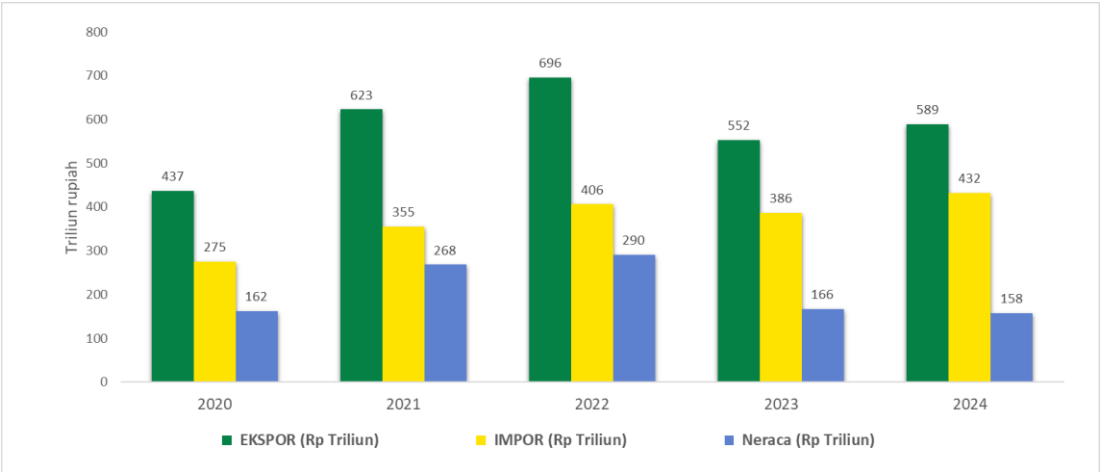


Gambar 1. 3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2020-2024

Selama periode 2020-2024, nilai NTP terus tumbuh mencapai 119,62 pada tahun 2024 dari angka 101,65 pada tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan ini merupakan kontribusi dari kenaikan Indeks yang diterima petani (It), dari 107,46 pada tahun 2020 menjadi 144,49 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga jual komoditas

oleh petani relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran modal untuk produksi pertanian.

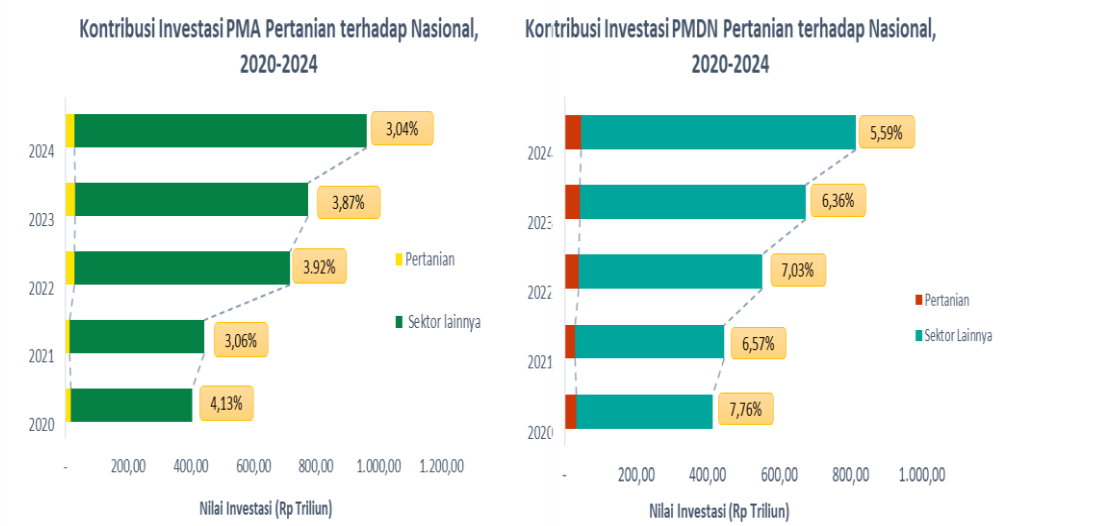
d. Neraca Perdagangan Pertanian Indonesia 2020-2024



Gambar 1. 4 Perkembangan Neraca Ekspor-Impor Pertanian, 2020-2024

Sejak tahun 2020-2024, secara kumulatif neraca perdagangan pertanian (segar dan olahan) menunjukkan surplus. Surplus tersebut, sebagian besar disumbang dari subsektor perkebunan dengan rata-rata kontribusi sebesar 92%, khususnya komoditas kelapa sawit, kakao, karet, kelapa dan kopi. Penurunan nilai ekspor pada tahun 2022-2024 terjadi karena adanya penurunan ekspor kelapa sawit, karet dan kelapa. Tekanan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) mengakibatkan harga global melemah, tentunya memengaruhi nilai ekspor kelapa sawit. Sementara ekspor karet yang menurun terjadi karena melemahnya industri otomotif global pasca pandemi COVID-19.

e. Investasi Pertanian Indonesia 2020-2024



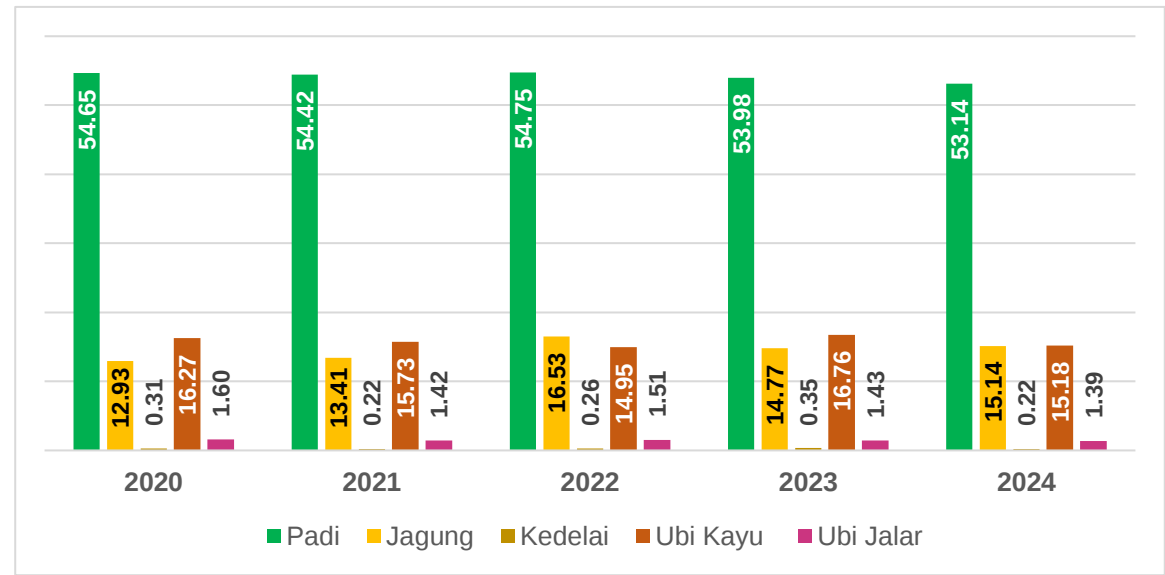
Gambar 1. 5 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Pertanian, 2020-2024

Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pertanian selama 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata kontribusi investasi PMA pertanian terhadap PMA nasional sebesar 3,61%, sementara kontribusi investasi PMDN pertanian terhadap PMDN nasional sebesar 6,66%. Adapun total investasi pertanian (PMA+PMDN) selama 2020-2024 sebesar Rp 306,45 triliun. Kontribusi investasi terbesar pada sektor perkebunan, baik dari PMA maupun PMDN. Oleh karena itu, perlu dorongan investasi pada 3 (tiga) subsektor lainnya yaitu tanaman pangan,

hortikultura serta peternakan, sehingga mampu meningkatkan kinerja produksi maupun hilirisasi pada tiga subsektor tersebut.

1.1.2. **Produksi Komoditas Pertanian Strategis**

Subsektor Tanaman Pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 591.1 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, komoditas tanaman pangan yang ditetapkan sebagai komoditas strategis oleh Kementerian Pertanian antara lain padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar.



Gambar 1. 6 Perkembangan Produksi 5 (Lima) Komoditas Strategis Tanaman Pangan, 2020-2024

Produksi padi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari serangan hama dan penyakit, kondisi iklim, penurunan luas baku sawah, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi pertanian. Pada tahun 2023-2024, Indonesia menghadapi fenomena iklim El Nino yang menyebabkan musim kering berkepanjangan di sejumlah daerah. Kondisi ini menyebabkan penurunan produksi padi di beberapa wilayah.

Luas lahan baku sawah selama periode 2020-2024 mengalami penurunan sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun 2019 luas lahan baku sawah tercatat sebesar 7.463.948 hektar (Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019), menurun sebesar 79.607 ha (1,07%) menjadi 7.384.341 hektar pada tahun 2024 (Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024). Demikian juga dengan luas panen padi kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun dengan persentase penurunan rata-rata 1,46%. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan produksi padi periode 2020-2024.

Produksi jagung di Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sebagai salah satu komoditas pangan strategis, jagung memegang peran penting, khususnya sebagai bahan baku pakan ternak dan konsumsi rumah tangga di beberapa daerah. Secara rata-rata, produksi jagung selama 5 tahun terakhir berkisar di atas angka 14,5 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 4,7%. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pembelian pemerintah, sehingga meningkatkan minat petani menanam jagung.

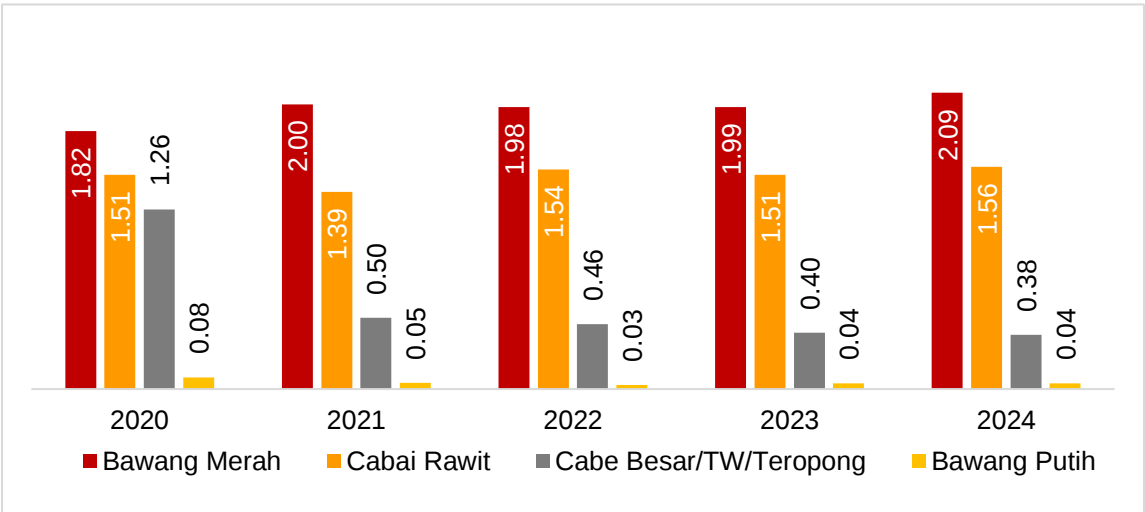
Produksi kedelai di Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan nasional yang berkisar di angka 2,7 juta ton per tahun. Produksi kedelai relatif fluktuatif di kisaran 200-350 ribu ton. Adapun rata-rata produksi selama 2020-2024

berkisar pada volume produksi 270 ribu ton per tahun. Artinya produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 10% dari kebutuhan nasional. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipenuhi sebagian besar dari impor.

Produksi ubi kayu dan ubi jalar di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Produksi ubi kayu dalam 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata di kisaran 15,78 juta ton per tahun, sementara angka kebutuhan dalam negeri rata-rata berkisar 12,5 juta ton. Artinya produksi ubi kayu dalam negeri sudah cukup memenuhi kebutuhan ubi kayu dalam negeri, bahkan cenderung surplus dan menjadi potensi ekspor. Sementara produksi ubi jalar selama 2020-2024 rata-rata mengalami penurunan sebesar 3,4% per tahun, dimana pada tahun 2020 produksi ubi jalar sebesar 1,6 juta ton, menurun menjadi 1,39 juta ton pada tahun 2024.

Selain beberapa komoditas strategis subsektor tanaman pangan yang telah diuraikan di atas, Kementerian Pertanian akan mengembangkan komoditas lain seperti gandum dan sorghum sebagai bahan makanan pokok alternatif, sekaligus untuk substitusi impor.

Subsektor Hortikultura



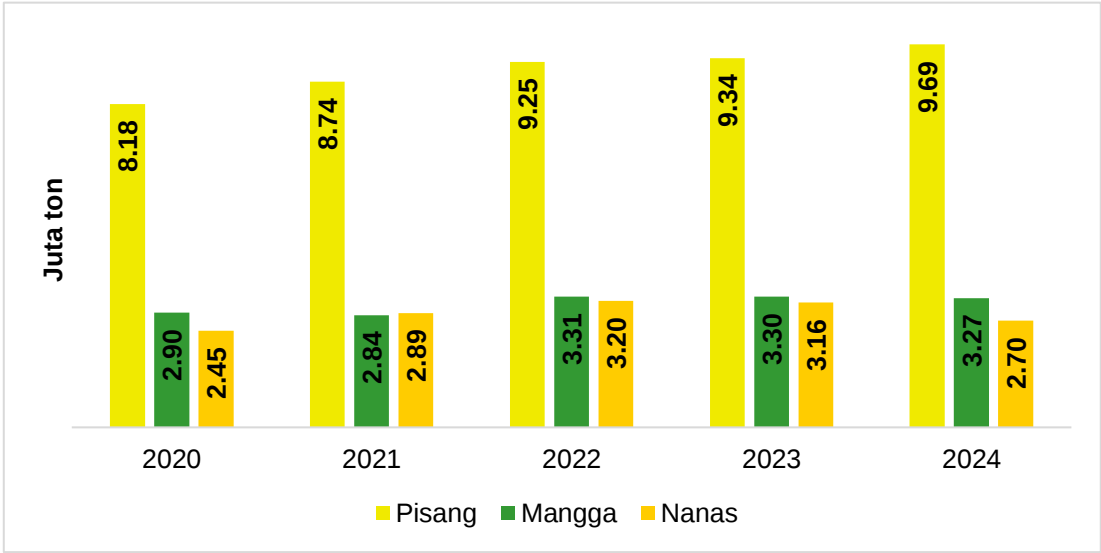
Gambar 1. 7 Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura

Produksi bawang merah mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024, rata-rata peningkatan produksi sebesar 3,63% per tahun. Total produksi tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 2,09 juta ton. Indikasi kenaikan produksi dapat dilihat dari meningkatnya luas panen pada kurun waktu tersebut dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,33% per tahun.

Produksi bawang putih tahun 2020 sebesar 0,08 juta ton, yang terus menurun sampai tahun 2024 dengan produksinya 0,04 juta. Kondisi saat ini, kebutuhan bawang putih sebagian besar dipenuhi dari impor. Kendala budidaya bawang putih di dalam negeri disebabkan oleh minimnya akses petani untuk mendapatkan bibit unggul, disamping itu budidaya komoditas bawang putih dominan ditentukan oleh kondisi geografis suatu wilayah, sehingga tidak mudah dikembangkan secara meluas di wilayah Indonesia. Ke depan, dalam mengurangi impor komoditas bawang putih, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi komoditas ini.

Produksi cabai rawit dan cabai besar. Produksi cabai rawit sepanjang 2020-2024 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan cenderung positif sebesar 1,18%. Produksi cabai besar pada tahun 2020 sebesar 1,26 juta ton, sedangkan tahun 2024 produksinya turun sebesar 0,38 juta ton, dengan rata-rata penurunan produksi sepanjang 2020-2024 sebesar 21,48%. Produksi cabai dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, lahan, air,

bibit, pupuk, dan pestisida. Fluktuasi harga komoditas cabai yang sangat dinamis dan tingkat produktivitas yang tidak stabil secara langsung berkontribusi pada inflasi.

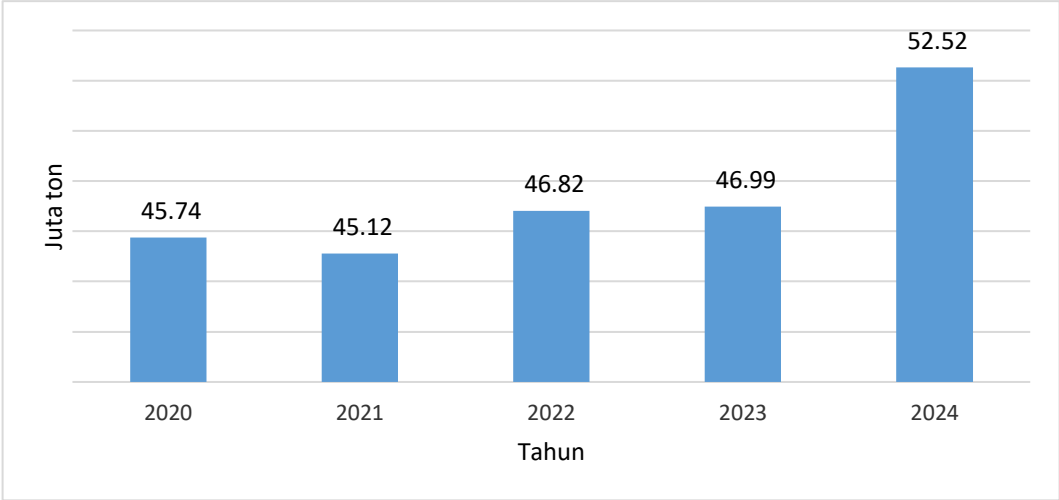


Gambar 1. 8 Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura (Tanaman Buah, 2020-2024)

Produksi tanaman buah. Pisang, mangga dan nanas merupakan 3 (tiga) komoditas hortikultura dalam kelompok tanaman buah yang mempunyai capaian produksi tertinggi. Produksi pisang mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 sebesar 18,38% atau setara dengan peningkatan 1,50 juta ton. Untuk komoditas mangga dan nanas, perkembangan produksinya relatif fluktuatif, namun jika dilihat secara rata-rata perkembangannya tumbuh positif. Rata-rata peningkatan produksi mangga sebesar 3,31% dan nanas sebesar 3,28%. Kedua komoditas ini mengalami produksi tertinggi pada tahun 2022 masing-masing sebesar 3,31 juta ton dan 3,20 juta ton. Ketiga komoditas di atas merupakan komoditas ekspor. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan lebih dari 100% untuk ekspor mangga, sementara untuk manggis meningkat 42% dari tahun 2022. Selain itu, komoditas buah yang memiliki potensi besar adalah durian, seperti terlihat dari data produksi tahun 2023 mengalami peningkatan sampai 152%.

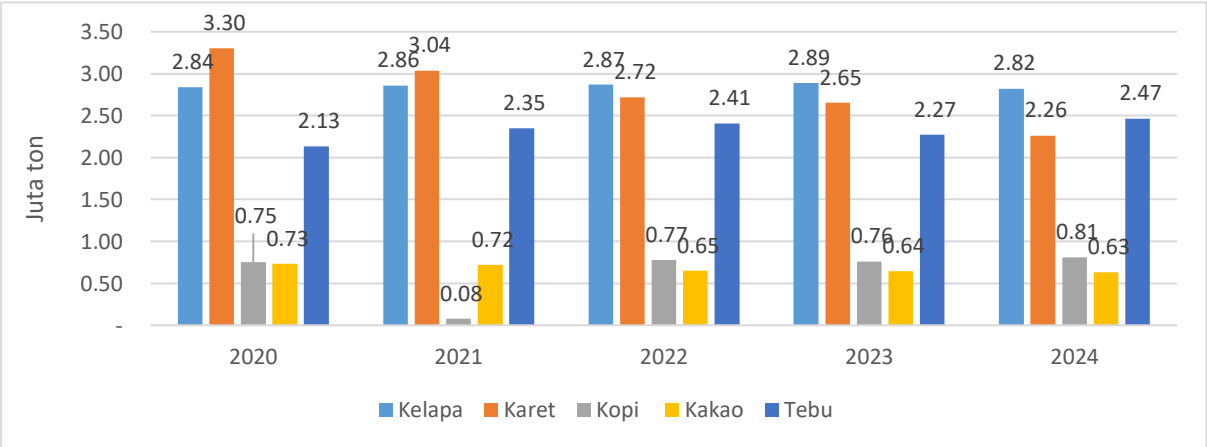
Komoditas hortikultura potensi ekspor selanjutnya adalah florikultura terutama krisan, mawar dan anggrek. Adapun pasar ekspor yang potensial untuk florikultura di antaranya Jepang (penggemar anggrek, bonsai dan bunga potong), Belanda (sebagai hub florikultura dunia, sehingga terbuka untuk bunga tropis), Amerika Serikat sebagai pasar besar untuk anggrek dan tanaman daun serta Singapura yang merupakan pasar regional yang dekat dan mudah dijangkau.

Subsektor Perkebunan



Gambar 1. 9 Perkembangan Produksi Kelapa Sawit 2020-2024 (juta ton)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan sektor perkebunan. Produksi kelapa sawit cenderung meningkat pada kurun waktu 2020-2024. Rata-rata peningkatan produksi sebesar 14,81%, dengan luas areal saat ini sekitar 16,8 juta ha. Upaya peremajaan kelapa sawit terus dioptimalkan guna mendukung peningkatan ekspor dan juga pengembangan produk turunan dalam bentuk biodiesel atau industri hilir mendukung pertanian berkelanjutan dan swasembada energi.



Gambar 1. 10 Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan 2020-2024

Produksi kelapa cenderung stabil dalam kurun waktu 2020-2024. Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan bibit kelapa dalam skala besar untuk dikembangkan di areal lahan sub optimal dalam rangka menjaga stabilitas produksi. Sebaran produksi kelapa berdasarkan pulau untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut: Sumatera (4.723.232 ton), Jawa (2.893.738 ton), Sulawesi (3.445.0554 ton), Kalimantan (641.260 ton), Bali dan Nusa Tenggara (908.104 ton), Maluku (1.547.611 ton) serta Papua (156.615 ton).

Produksi Karet tiap tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan puncaknya pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan anjloknya harga karet dunia yang mengakibatkan turunnya minat petani untuk menanam karet. Upaya pemerintah dalam mengatasi turunnya harga tersebut yaitu melakukan intervensi dalam bentuk menyerap hasil panen karet mentah dari petani dengan harga normal.

Produksi Kopi tiap tahun berfluktuasi dari tahun 2020-2024, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman serta rendahnya

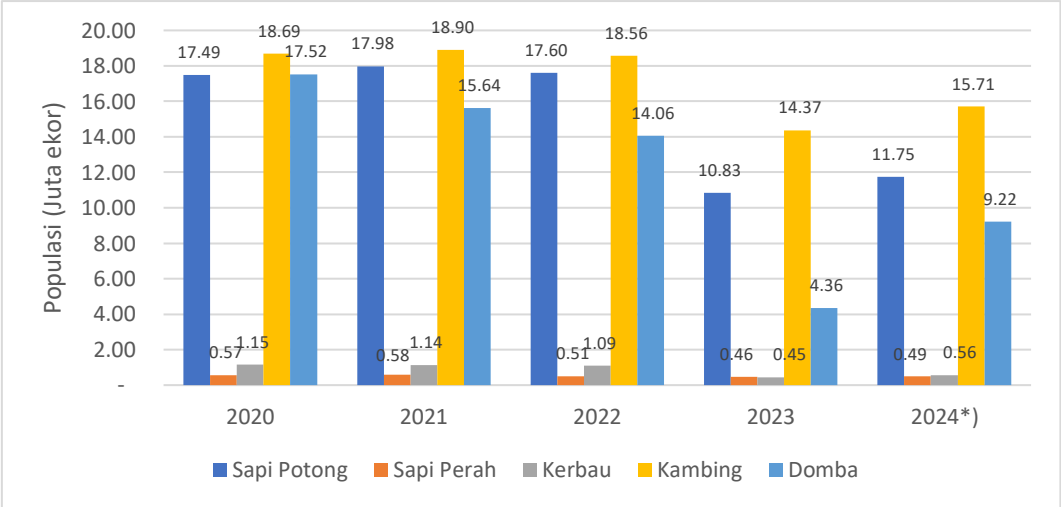
peremajaan tanaman kopi yang sudah tua. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi kopi, peremajaan, ekstensifikasi dan intensifikasi.

Produksi Kakao. Berdasarkan data *International Cocoa Organization* pada tahun 2022/2023, Indonesia merupakan produsen kakao peringkat ke tujuh dunia. Pada tahun 2022-2024, produksi kakao Indonesia terus mengalami penurunan karena menurunnya luas areal tanaman menghasilkan, menurunnya produktivitas kakao karena kurangnya pemeliharaan tanaman dan serangan hama dan penyakit, serta terjadinya konversi perkebunan kakao menjadi usaha pertanian lain dan non pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi kakao, peremajaan, dan rehabilitasi lahan.

Produksi Tebu merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, terutama sebagai bahan utama pembuatan gula. Peningkatan produksi terjadi dari tahun 2020-2022 dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2023. Program bongkar ratoon dan perluasan tanaman tebu merupakan upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tebu serta mencukupi kebutuhan gula dalam negeri. Disamping itu, Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kementerian BUMN dan swasta melakukan revitalisasi pabrik gula di beberapa lokasi sentra produksi tebu.

Komoditas perkebunan yang diarahkan untuk mencukupi kebutuhan ekspor diantaranya adalah kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, dan karet.

Sub Sektor Peternakan



*) angka sementara

Gambar 1. 11 Perkembangan Populasi Komoditas Strategis Peternakan, 2020 - 2024

Populasi sapi potong tertinggi selama periode 2020-2024 terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,98 juta ekor. Pada tahun 2023, terjadi penurunan populasi sapi potong yang disebabkan oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang terutama pada ternak ruminansia. Sebagai upaya mengendalikan penyebaran PMK tersebut, pemerintah telah melakukan vaksinasi secara masif pada seluruh ternak sapi potong yang tersebar di wilayah Indonesia. Pada tahun 2024, mulai terjadi penurunan kasus dengan terbentuknya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi, sehingga secara perlahan kembali meningkatkan pertumbuhan populasi sapi potong di Indonesia. Peningkatan populasi ini juga didukung dengan kegiatan perbaikan manajemen pemeliharaan ternak, kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi serta mendorong peternak untuk terus melakukan pengendalian penyakit hewan menular melalui vaksinasi secara teratur.

Populasi sapi perah yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah jenis sapi *Friesian Holstein* (FH) yang dikenal memiliki produksi susu yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Tahun 2021 menjadi puncak populasi sapi perah tertinggi yaitu sekitar 582.169 ekor, kemudian pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan populasi. Hal ini disebabkan sapi perah merupakan salah satu jenis ternak yang rentan terhadap PMK. Terjadinya wabah PMK tidak hanya menurunkan populasi, tetapi juga menurunkan produktivitas sapi perah.

Sebagaimana komoditas sapi potong, pada tahun 2024 komoditas sapi perah juga mulai mengalami peningkatan populasi karena adanya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi serta didukung dengan kegiatan perbaikan kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi, serta adanya penambahan indukan sapi perah melalui impor, sehingga secara perlahan pertumbuhan populasi sapi perah mulai mengalami peningkatan.

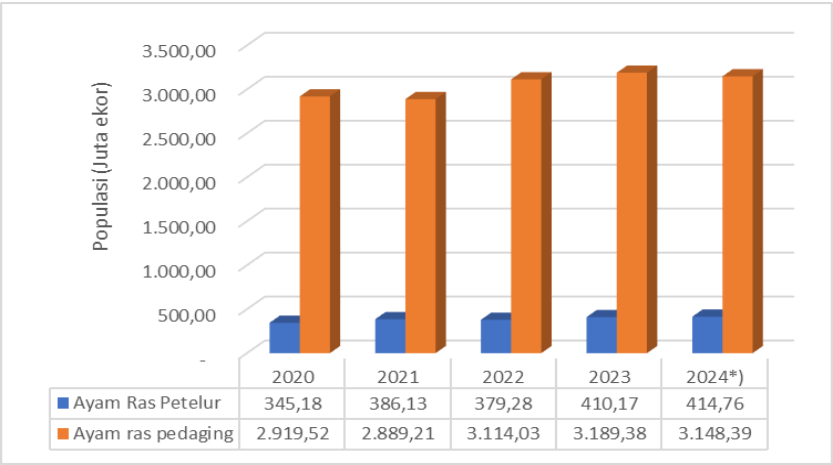
Populasi kerbau pada tahun 2020-2022 berada di atas 1,1 juta ekor, kemudian menurun pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena semakin menurunnya minat petani dan peternak rakyat untuk memelihara kerbau. Selama ini, sebagian besar ternak kerbau tenaganya digunakan untuk membajak sawah, namun dengan kemajuan teknologi, saat ini pembajakan sawah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pertanian. Dari sisi teknis budidaya, ternak kerbau ini memiliki keunikan tersendiri, yakni tingkat reproduksi kerbau yang rendah (tingkat kebuntingan sekitar 45%-55%, tingkat kelahiran sekitar 45%-50%, dan birahi sulit dideteksi), serta sistem manajemen yang belum optimal karena perkawinan kerbau sebagian besar terjadi secara alami dan tidak ada pengaturan pemanfaatan pejantan sehingga kemungkinan terjadinya *inbreeding* cukup besar.

Populasi kambing merupakan ternak yang umum diusahakan di Indonesia, terutama wilayah Pulau Jawa. Populasi kambing pada tahun 2021 sekitar 18,69 juta ekor. Pada tahun 2022-2023, populasi kambing terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pemotongan kambing terutama untuk kebutuhan kurban, sebagaimana data pemotongan ternak pada tahun 2022 sebanyak 756.099 ekor dan pada tahun 2023 jumlah pemotongan meningkat menjadi 819.118 ekor, tanpa diimbangi dengan laju penambahan populasi ternak kambing. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan populasi kambing, hal ini disebabkan adanya dukungan program pemberdayaan peternak dan bantuan bibit kambing.

Populasi babi merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia karena berperan sebagai sumber protein hewani, penyumbang pendapatan ekonomi bagi peternak, dan memiliki nilai budaya yang signifikan di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Masih merebaknya penyakit *African Swine Fever* (ASF) di Indonesia sejak tahun 2019 menyebabkan kematian babi di sejumlah wilayah yang berdampak pada penurunan populasi babi di Indonesia. Populasi babi tahun 2020 sebanyak 7,62 juta ekor dan tahun 2024 sebanyak 4,12 juta ekor atau menurun sebesar 46,02% dengan rata-rata penurunan populasi sebesar 12,25% per tahun. Saat ini kondisi peternakan babi di Indonesia sedang masa pemulihan pasca ASF dengan perbaikan sistem peternakan babi di Indonesia antara lain melalui aturan ketat pada lalu lintas ternak, penguatan biosekuriti di peternakan babi, manajemen pemeliharaan melalui penerapan *Good Farming Practices* (GFP) maupun *Good Breeding Practices* (GBP), revitalisasi pusat pembibitan babi nasional BPTU-HPT Siborong-borong, pengembangan pembibitan babi melalui peran perusahaan swasta serta perbaikan mutu genetik babi melalui importasi bibit dan semen beku babi.

Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging. Ayam ras petelur merupakan ayam ras yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya dan ayam ras pedaging (*broiler*) merupakan ayam yang mempunyai kemampuan produksi daging sangat cepat sehingga saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Ayam *broiler* berproduksi pada umur sekitar 4 – 5 minggu dengan bobot badan antara 1,2 – 1,9 kg/ekor dan ayam petelur berproduksi pada umur 19 minggu.

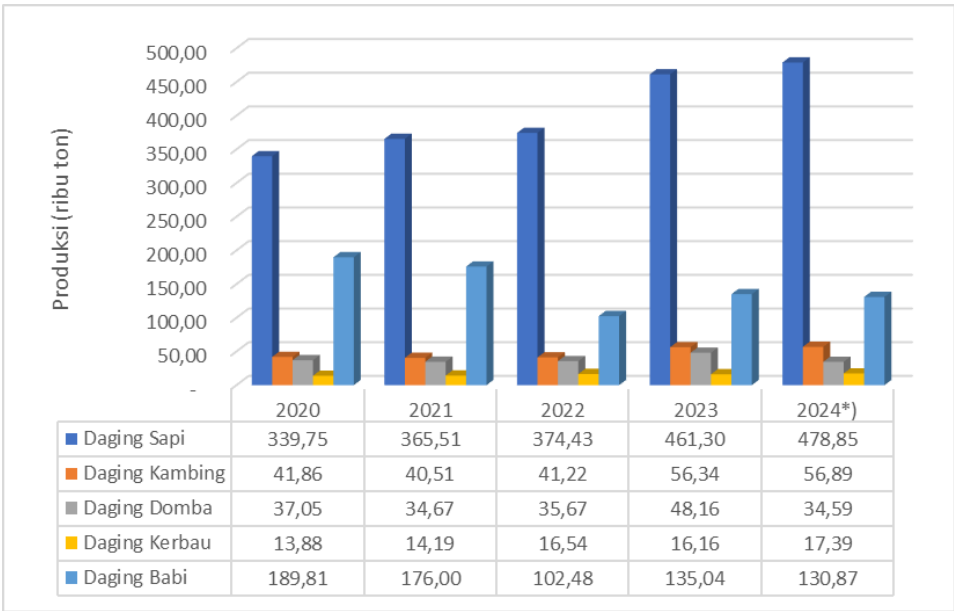


*) angka sementara

Gambar 1. 12 Populasi Ayam 2020-2024 (Juta ekor)

Ayam ras petelur dan ayam ras pedaging populasinya mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2024. Populasi ayam ras petelur paling tinggi tahun 2024 sekitar 414,76 juta ekor, sedangkan populasi ayam ras pedaging paling tinggi tahun 2023 sekitar 3.189,38 juta ekor. Populasi ayam ras petelur dan ayam ras pedaging pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 dimana terjadinya gangguan pada rantai pasok (*supply chain*), turunnya permintaan pasar, *over* produksi dan harga menurun, kesulitan modal dan biaya pakan naik, ditambah lagi dengan adanya keterbatasan tenaga kerja karena pembatasan sosial.

Secara umum, pada tahun 2023, populasi beberapa komoditas peternakan mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya wabah PMK.



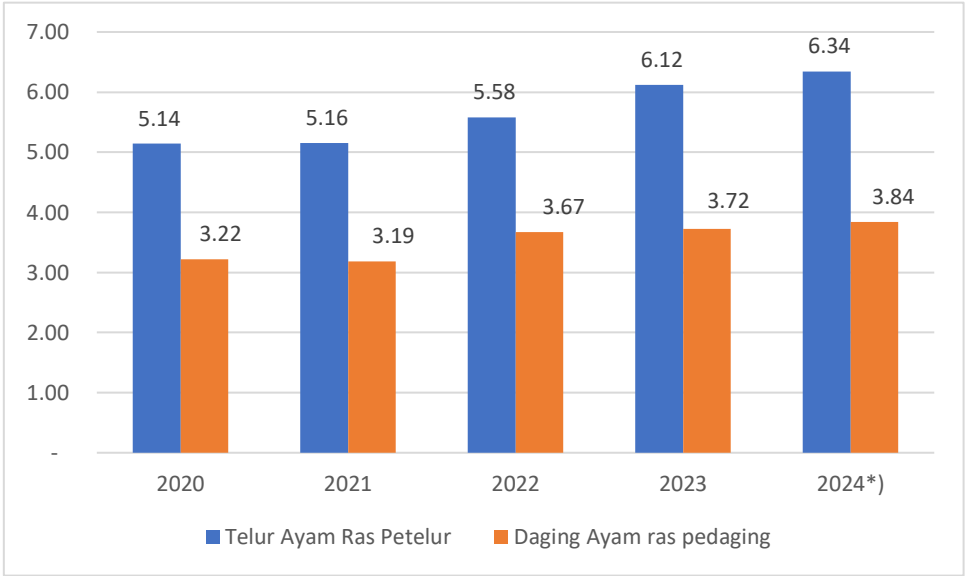
*) angka sementara

Gambar 1. 13 Perkembangan Produksi Daging 2020-2024 (ribu ton)

Produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba dan babi selama periode 2020 hingga 2024 cenderung stabil dan tidak mengalami dinamika yang terlalu signifikan dan peningkatan produksi terjadi pada daging sapi tahun 2020-2024. Produksi daging sapi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2020. Meningkatnya produksi dan produktivitas sapi tersebut antara lain melalui optimasi pemberian pakan berkualitas (termasuk kombinasi hijauan dan konsentrat) serta pengendalian terhadap penyakit hewan menular.

Total produksi daging kerbau, kambing, dan domba tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan total produksi terendah terjadi pada tahun 2021. Penurunan produksi daging kerbau, kambing, dan domba tersebut umumnya disebabkan selain turunnya populasi ternak akibat dari penyakit PMK, juga terjadi penurunan permintaan terhadap daging akibat adanya pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020-2024, rata-rata produksi daging babi mengalami fluktuasi. Produksi daging babi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2022. Penurunan daging babi disebabkan merebaknya wabah ASF di sentra produksi daging babi di Indonesia.



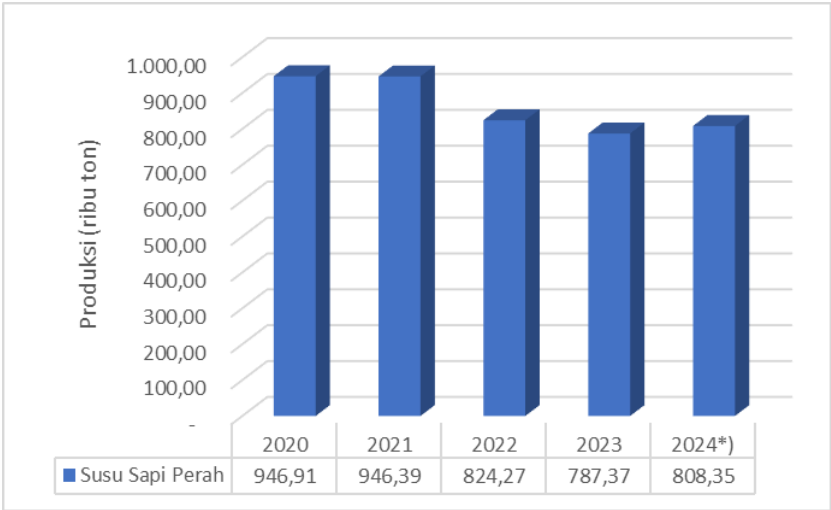
*) angka sementara

Gambar 1. 14 Perkembangan Produksi Telur Ayam Ras Petelur dan Daging Ayam Ras Pedaging 2020-2024 (ribu ton)

Produksi telur ayam ras petelur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 5,14 juta ton, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,39% menjadi 5,16 juta ton pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang lebih signifikan sebesar 8,21% hingga mencapai 5,58 juta ton. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, dengan produksi naik sebesar 9,62% menjadi 6,12 juta ton. Untuk tahun 2024, produksi diproyeksikan meningkat lagi sebesar 3,71% menjadi 6,34 juta ton. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi telur ayam ras petelur meningkat sekitar 23,36%, yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan tingginya permintaan terhadap komoditas telur di Indonesia seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Produksi daging ayam ras pedaging secara umum menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 3,22 juta ton, kemudian turun sekitar 0,9% menjadi 3,19 juta ton pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan turunnya permintaan daging ayam akibat pembatasan

aktivitas masyarakat serta terganggunya rantai pasok. Mulai tahun 2022, produksi kembali meningkat seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, naik sebesar 15% menjadi 3,67 juta ton. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 1,4% menjadi 3,72 juta ton, dan diproyeksikan kembali meningkat 3,2% pada tahun 2024, mencapai 3,84 juta ton.



*) angka sementara

Gambar 1. 15 Perkembangan Produksi Susu 2020-2024 (ribu ton)

Produksi Susu. Selain menghasilkan produksi daging, ternak ruminansia juga memproduksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein asal ternak, sebagai bahan makanan penambah nutrisi. Pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia saat ini sebagian besar masih mengandalkan impor. Produksi susu pada kurun waktu 2020-2023 mengalami penurunan dan penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 di mana produksi turun menjadi 824.273 ton, atau berkurang sekitar 12,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi susu 4,48%, menjadi 787.374 ton. Meski demikian, pada tahun 2024, produksi meningkat sebesar 2,66%, mencapai 808.353 ton. Fluktuasi produksi susu disebabkan oleh penurunan populasi sapi perah, penurunan populasi sapi betina produktif, penurunan produktivitas dengan adanya wabah PMK, cuaca ekstrem serta rendahnya harga jual susu di tingkat peternak.

1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Selama periode 2020-2024, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Keberhasilan pencapaian sasaran dievaluasi dengan membandingkan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan, kendala maupun permasalahan dalam mencapai target kinerja. Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi berikutnya.

Hasil evaluasi kinerja sasaran strategis periode 2020 – 2024 menunjukkan bahwa secara umum target indikator kinerja dapat dicapai dengan baik (capaian di atas 80%). Keberhasilan pencapaian tersebut didorong oleh berbagai faktor penentu baik yang berasal dari lingkungan internal, diantaranya peningkatan kualitas SDM aparatur, efektivitas pelaksanaan

anggaran, perbaikan regulasi, ketepatan sasaran program, maupun yang berasal dari lingkungan eksternal seperti keberpihakan kebijakan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian, dukungan lintas sektor maupun penguatan kerjasama dalam dan luar negeri.

Namun demikian, masih terdapat berbagai sasaran strategis yang belum dapat dicapai secara optimal karena adanya berbagai dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi kinerja Kementerian Pertanian 2020 – 2024. Beberapa dinamika lingkungan strategis tersebut diantaranya dinamika pada lingkungan internal seperti kebijakan *automatic adjustment* yang diterapkan pada pertengahan periode, perubahan struktur organisasi yang mengurangi cakupan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Pertanian, serta dinamika lingkungan eksternal seperti dampak perubahan iklim ekstrem kekeringan (El Niño) dan ekstrem basah (La Niña), serangan hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, pandemi COVID, serta disrupsi terhadap distribusi komoditas pangan strategis akibat ketegangan geopolitik global. Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana strategis pada tahun 2020 dan 2021, yang berdampak pada perubahan sebagian indikator kinerja. Penjelasan terhadap urgensi penyesuaian tersebut sebagai berikut:

- a. Penyesuaian pada Renstra tahun 2020 karena terjadinya pandemi COVID yang melanda dunia menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran, dan kebijakan penting lainnya.
- b. Penyesuaian pada Renstra tahun 2021 akibat adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan direktif Presiden, menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target.

Penyesuaian tersebut menyebabkan adanya penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang secara rinci tahun penggunaan indikator kinerja pada sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Kementerian Pertanian 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERIODE
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri	2020 – 2024
		2	Peningkatan akses pangan	2021
		3	Peningkatan konsumsi pangan berkualitas	2021 – 2022
		4	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	2020 – 2024
		5	Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani	2020 – 2024
		6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	2020 – 2024
		7	Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan	2021 – 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERIODE
		8	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan	2021 – 2023
		9	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian	2021 - 2024
		10	Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian	2021 - 2024
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian	2020 - 2024
		12	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional	2021 - 2024
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	2021 - 2022
		14	Persentase petani yang menerapkan teknologi	2020 - 2024
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	2020 - 2024
		16	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	2021 - 2024
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	2020 - 2024
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	2020 - 2023

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II, diolah

Analisis ketercapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian periode 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

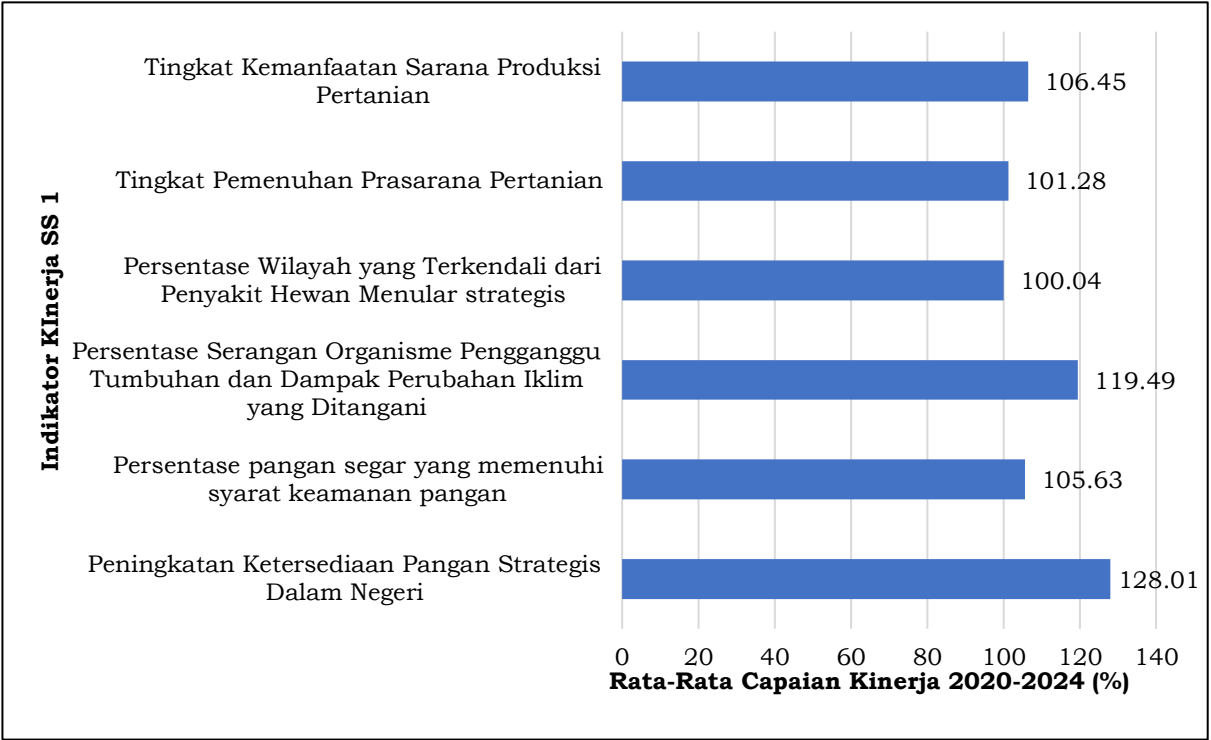
Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas

Sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas” bertujuan untuk menjamin penyediaan pangan baik jumlah dan mutu, didukung dengan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum target sasaran ini rata-rata dapat dicapai melalui pencapaian target produksi komoditas pangan strategis, penyediaan pangan segar yang memenuhi keamanan pangan, penanganan serangan OPT dan DPI, pengendalian wilayah dari penyakit hewan menular strategis, serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

Sasaran strategis ini diukur melalui 10 IKSS, namun, terdapat 2 (dua) indikator yang berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu IKSS2

“Peningkatan akses pangan,” dan IKSS3 “Peningkatan konsumsi pangan berkualitas” yang tidak lagi diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2023 serta 2 (dua) indikator terkait perkarantinaan yaitu IKSS 7 “Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan” dan IKSS 8 “Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan” yang tidak diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2024 karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian, sehingga dalam analisis capaian tidak menyertakan analisis keempat indikator kinerja tersebut. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja dilakukan terhadap 6 (enam) IKSS sebagai berikut.



Gambar 1. 16 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis

Berdasarkan data di atas, sebagian besar rata-rata capaian indikator kinerja periode 2020-2024 berada di atas 100%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Secara rata-rata, pada periode 2020-2024 capaian kinerja IKSS yang tertinggi adalah “Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri” yang mencapai 128,01%. Keberhasilan indikator ini didukung oleh peningkatan produksi komoditas pangan strategis meliputi peningkatan komoditas tanaman pangan terutama jagung, peningkatan komoditas hortikultura terutama bawang merah dan peningkatan sebagian besar komoditas peternakan (daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam, dan telur). Peningkatan produksi ini didorong oleh berbagai faktor diantaranya penyediaan benih dan bibit unggul, penerapan budidaya yang baik, upaya antisipasi perubahan iklim dan pengendalian serangan OPT serta penyakit tanaman dan hewan.

Capaian kinerja IKSS yang terendah adalah “Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis”. Namun demikian, capaian indikator ini sebesar 100,04% yang berarti mampu mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengancam dan menghambat pencapaian target, yaitu masih terdapat wilayah kabupaten/kota yang belum dapat dikendalikan terhadap

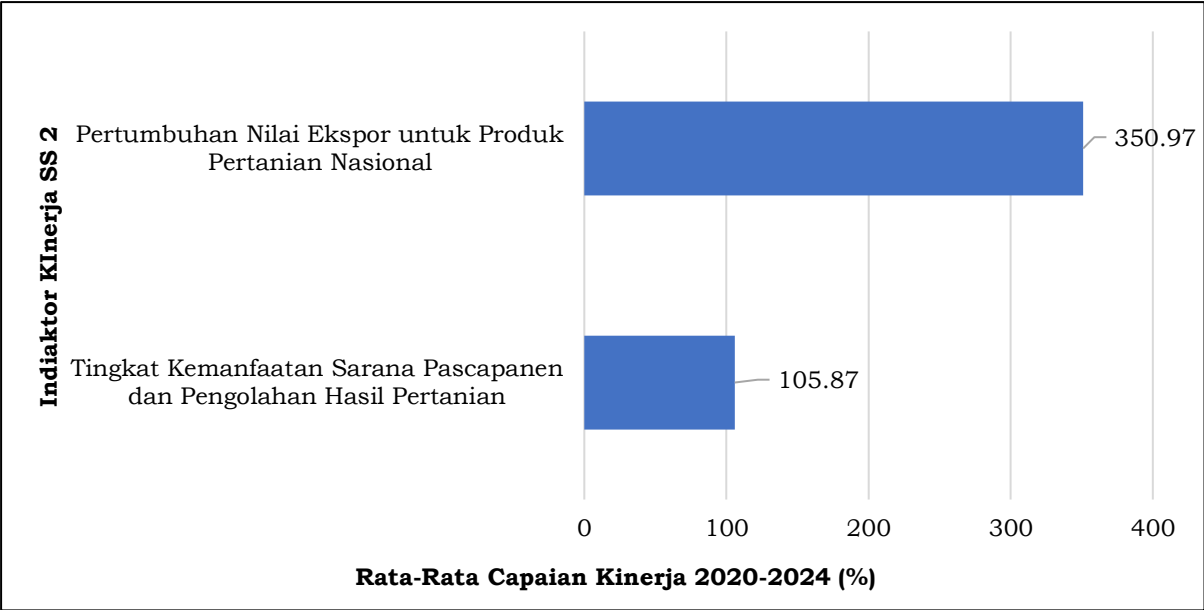
Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Persentase wilayah yang masih rendah pengendaliannya terutama untuk PMK yang mewabah sejak tahun 2022, *Lumpy Skin Disease* (LSD), *Septicaemia epizootica* dan rabies. Untuk itu, masih diperlukan strategi dan upaya yang lebih baik guna memperluas wilayah yang dapat dikategorikan terkendali untuk penyakit-penyakit tersebut.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

Sasaran strategis “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian” bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dengan mendorong penanganan pascapanen yang baik serta pengolahan dan pemasaran hasil komoditas pertanian. Penanganan pascapanen yang baik dapat mengurangi kehilangan hasil, sedangkan pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian ditujukan untuk penyediaan kebutuhan dalam dan luar negeri. Penyediaan sarana prasarana pasacapanen dan pengolahan serta perluasan jaringan pemasaran dapat mendukung keberhasilan sasaran ini.

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS 11 “Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian” dan IKSS 12 yaitu “Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional”. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 17 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

Berdasarkan gambar di atas, kedua IKSS pada sasaran strategis “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian” mencapai di atas 100%. Hal ini berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Capaian kinerja IKSS tertinggi adalah pada indikator kinerja “Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional” dengan rata-rata capaian 350,97%.

Komoditas pertanian yang mengalami peningkatan nilai ekspor cukup signifikan adalah komoditas ubi kayu, kacang hijau, jahe, jamur, durian, bawang merah, cengkeh dan sagu. Selain itu komoditas lain yang cukup konsisten mengalami peningkatan ekspor adalah mangga, nanas, manggis,

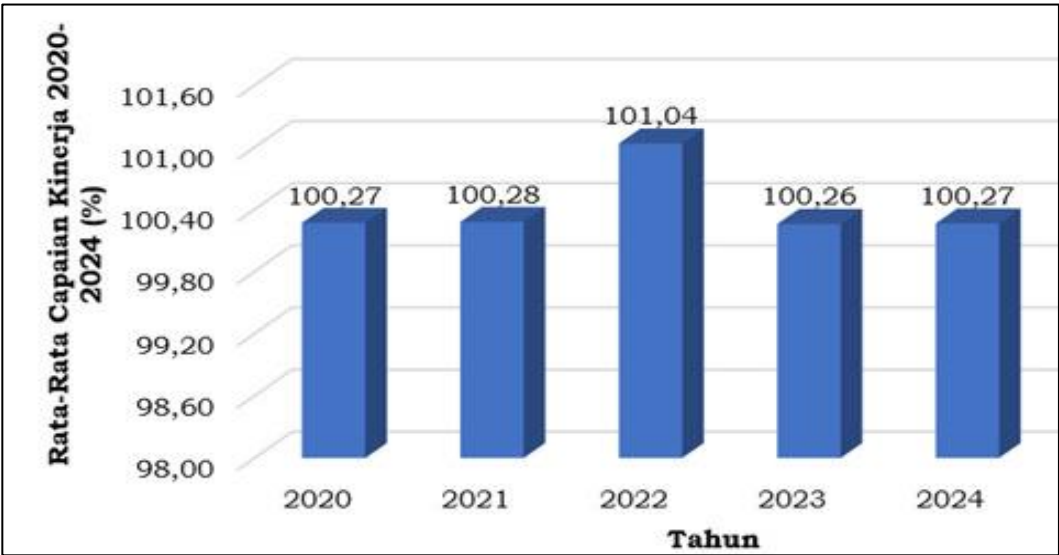
krisan, bawang merah, cabai, lada, kopi, kakao, nilam, hasil ternak, dan produk hewan non pangan.

Capaian indikator kinerja “Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian” juga menunjukkan pencapaian rata-rata di atas 100% dengan rata-rata capaian 105,87% yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah termanfaatkannya sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang diberikan pemerintah kepada petani. Sarana tersebut digunakan petani untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi komoditas pertaniannya.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian” ditujukan untuk memastikan bahwa petani mampu mengakses, memahami, dan mengimplementasikan teknologi pertanian yang telah dihasilkan dalam kegiatan usaha tani mereka. Pemanfaatan inovasi teknologi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan efisiensi dan keunggulan kompetitif, tetapi juga untuk memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar dapat diterapkan oleh petani di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk menjembatani hasil-hasil riset dan inovasi pertanian dengan kebutuhan serta kapasitas petani, sehingga teknologi yang tersedia dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan petani. Sasaran strategis ini memiliki 2 IKSS yaitu IKSS 13 “Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan” dan IKSS 14 “Persentase petani yang menerapkan teknologi”. IKSS 13 tidak lagi diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2023 karena adanya kebijakan sentralisasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan oleh institusi lain. Pembahasan capaian ini hanya menganalisis IKSS14. Hasil analisis terhadap indikator tersebut pada periode 2020-2024 sebagaimana uraian berikut.



Gambar 1. 18 Perkembangan Capaian IKSS Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi

Berdasarkan gambar di atas, capaian IKSS Persentase petani yang menerapkan teknologi periode 2020-2024 selalu mencapai lebih dari 100% dengan rata-rata capaian sepanjang 2020-2024 sebesar 100,42%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Keberhasilan indikator ditandai dengan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta adopsi inovasi dan

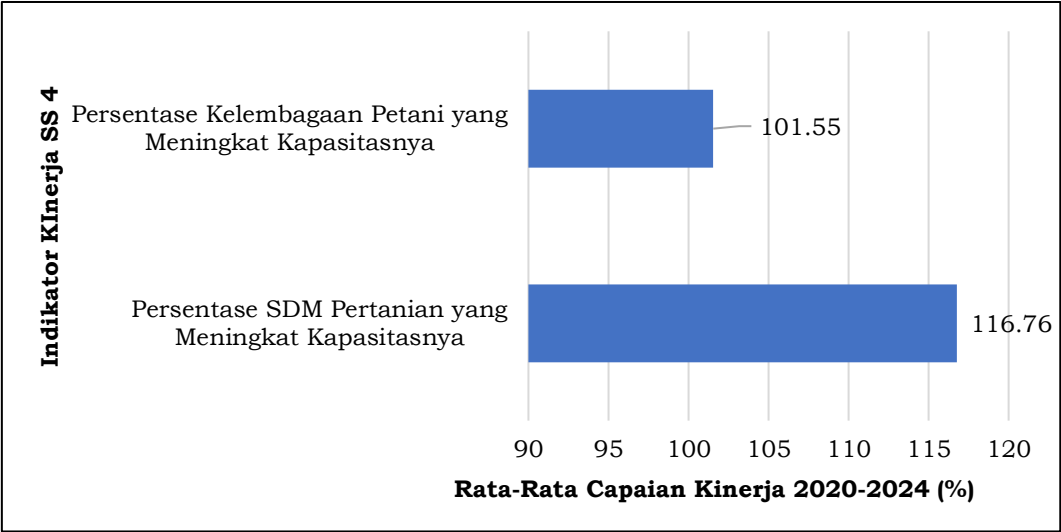
teknologi pertanian sehingga terjadi peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya dalam berusaha tani. Peningkatan kapasitas petani ini didukung melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan penyuluhan pertanian yang meliputi penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB), pengelolaan OPT, mekanisasi pertanian, pengelolaan panen dan pasca panen serta kegiatan Sekolah Lapang (SL) pertanian organik.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional” bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, sekaligus mendorong perbaikan mutu kelembagaan pertanian. Salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, adalah penyediaan SDM pertanian yang kompeten, mengingat sektor ini kini harus bersaing dengan berbagai sektor lain dalam penggunaan tenaga kerja, lahan dan faktor produksi lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pertanian sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian yang semakin kompleks. Di sisi lain, kelembagaan petani juga memegang peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang paling mendasar. Penguatan kelembagaan petani perlu terus didorong agar institusi tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam mengakses faktor-faktor produksi serta berbagai sumber daya pendukung usaha tani lainnya.

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS15 “Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” dan IKSS16 “Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya”. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis ini dilakukan terhadap kedua IKSS tersebut sebagai berikut.



Gambar 1. 19 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Berdasarkan data sebagaimana tersaji pada gambar di atas, rata-rata capaian indikator kinerja kedua IKSS pada periode 2020-2024 adalah lebih dari 100%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Capaian kinerja IKSS yang tertinggi adalah pada indikator kinerja “Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” yang mencapai rata-rata 116,76%. Keberhasilan pencapaian indikator ini

didukung oleh berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas petani melalui masifnya kegiatan pelatihan petani, penentuan metode dan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan petani, peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan widyaiswara, penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pelatihan, dan metode pelatihan yang melibatkan interaksi aktif peserta pelatihan.

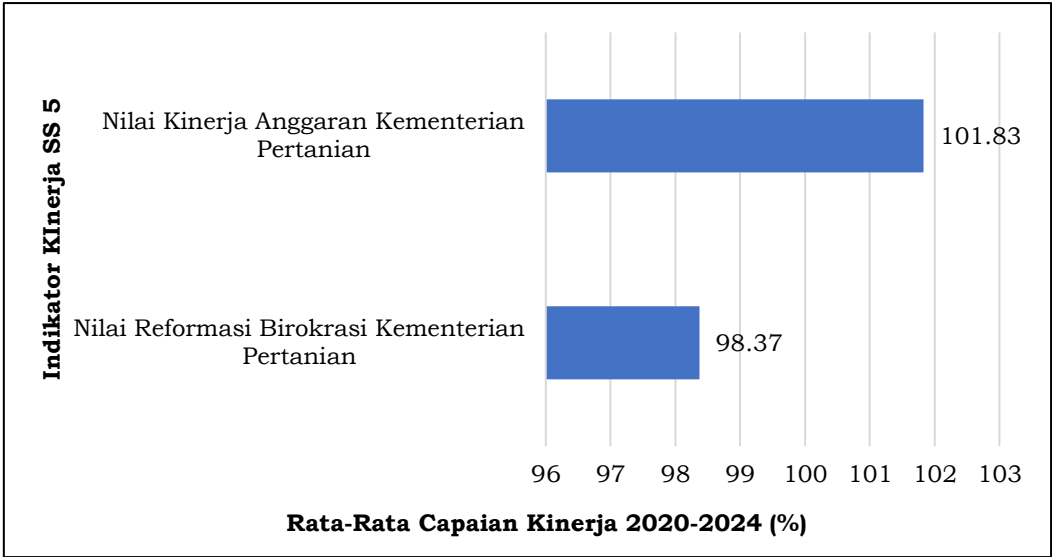
Di sisi lain, indikator “Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya” secara rata-rata capaian kinerjanya pada periode 2020-2024 sebesar 101,55% atau melebihi target yang ditetapkan. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya merupakan poktan/gapoktan yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Sasaran Strategis 5:

Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

Sasaran strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel” bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif serta birokrasi yang profesional dan transparan. Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak akhir 1990-an, dengan tujuan utama meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan perkembangan zaman, reformasi ini terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai kebijakan strategis, seperti *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* serta *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, penataan anggaran juga harus dilakukan dengan akuntabel, yang berarti pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS17 “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” dan IKSS18 “Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian”. Kedua indikator ini selama periode 2020-2024 mengalami dinamika yang cukup mendasar, yaitu: 1) perubahan metode perhitungan nilai reformasi birokrasi sejak tahun 2023; dan 2) indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung berdasarkan kategori pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2024 indikator ini diganti menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hasil analisis capaian kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) IKSS sebagai berikut.



Gambar 1. 20 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

Rata-rata capaian IKSS “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel” pada periode 2020-2024 sebesar 100,01% atau sangat berhasil. Namun demikian capaian ini lebih didominasi oleh capaian IKSS “Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian” yang rata-rata capaiannya sebesar 101,83%, sedangkan rata-rata capaian Nilai RB sebesar 98,37%.

Keberhasilan capaian indikator kinerja NKA Kementerian Pertanian didukung oleh berbagai upaya strategis meliputi pencapaian sasaran strategis, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, melakukan reviu DIPA untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker/K/L, konsolidasi dan koordinasi internal Kementan dan eksternal (Bappenas dan Kementerian Keuangan), percepatan pencairan anggaran, melakukan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun, optimalisasi belanja kontraktual dengan menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) di awal tahun dan memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa ditangani dan didaftarkan paling lambat pertengahan semester, serta penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Di sisi lain, Nilai RB Kementerian Pertanian menjadi satu-satunya indikator yang nilai rata-rata kinerjanya tidak mencapai 100% atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan diantaranya adalah karena adanya perubahan metode perhitungan Nilai RB. Perubahan metode ini berdampak cukup signifikan karena semula menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), kemudian berubah menggunakan hasil perhitungan indikator pada dimensi RB General dan RB Tematik. Hal ini dilakukan karena RB harus dapat mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan RB berdampak.

Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2020-2024
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	%	116,74	133,70	175,82	110	103,76	128,01
		2	Peningkatan Akses Pangan	%	-	18,84	n/a*)	-	-	-
		3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	-	240,97	231,28	-	-	-
		4	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	106,88	106,30	107,05	107,28	100,64	105,63
		5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	120,78	126,23	120,01	127,80	102,61	119,49
		6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis	%	100,25	100,30	99,42	100,09	100,15	100,04
		7	Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran Yang ditetapkan	%	-	100,00	100,00	100,00	-	-
		8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	%	146,34	133,93	232,56	227,27	-	-
		9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	106,29	99,16	102,06	100,82	98,05	101,28
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	109,58	106,25	108,38	105,85	102,18	106,45
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	-	107,69	107,70	106,03	102,06	105,87
		12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	281,71	165,76	74,92	996,00	236,45	350,97

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2020-2024
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	117,03	165,16	162,03	-	-	-
		14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	100,27	100,28	101,04	100,26	100,27	100,42
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	150,64	106,56	113,60	104,68	108,33	116,76
		16	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	-	104,37	101,25	100,29	100,27	101,55
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	99,30	98,18	97,47	96,87	100,05	98,37
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	101,76	102,36	103,34	101,68	100,01	101,83

1.1.4. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra K/L tahun 2025-2029. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Aspirasi Masyarakat, dapat diperoleh melalui:

- Media Cetak
- Media Elektronik
- Forum konsultasi publik; dan/atau
- Metode penjangkauan aspirasi lainnya yang akuntabel

Beberapa aspirasi masyarakat yang didapat dari berbagai media terkait pembangunan pertanian adalah:

1. Harga dan ketersediaan input sarana produksi pertanian (pupuk dan pestisida) yang lebih terjangkau

Petani berharap agar harga input sarana produksi dapat diturunkan sehingga lebih terjangkau. Harga input sarana produksi yang tinggi dapat menjadi beban bagi petani dan memengaruhi biaya produksi mereka.

Selain harga yang terjangkau, petani juga mengharapkan ketersediaan input sarana produksi yang lebih terjamin, sehingga pasokan dapat mencukupi kebutuhan petani dan tidak terjadi kelangkaan yang dapat menghambat aktivitas pertanian.

2. Kepastian kepemilikan lahan pertanian

Para petani sangat membutuhkan kepastian hukum terkait lahan pertanian yang mereka garap. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan mendorong investasi jangka panjang dalam sektor pertanian.

3. Penguatan kelembagaan petani

Penguatan kelembagaan petani seperti Poktan/Gapoktan dan KEP diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dalam negosiasi harga dan akses ke pasar.

4. Jaminan akses pasar dan stabilitas harga komoditas pertanian

Akses pasar yang adil dan inklusi adalah fondasi vital bagi kesejahteraan petani dalam ekonomi pertanian. Stabilitas harga komoditas pertanian memberikan dampak pada peningkatan animo petani untuk berusaha tani. Kedua hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Adopsi teknologi pertanian modern

Adopsi teknologi adalah proses dimana petani atau pelaku usaha pertanian mengadopsi dan menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pertanian mereka. Adopsi teknologi dapat berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian.

6. Kemudahan akses petani untuk mendapatkan bantuan pemerintah

Petani menginginkan kemudahan dalam mendapatkan akses bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana untuk peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian.

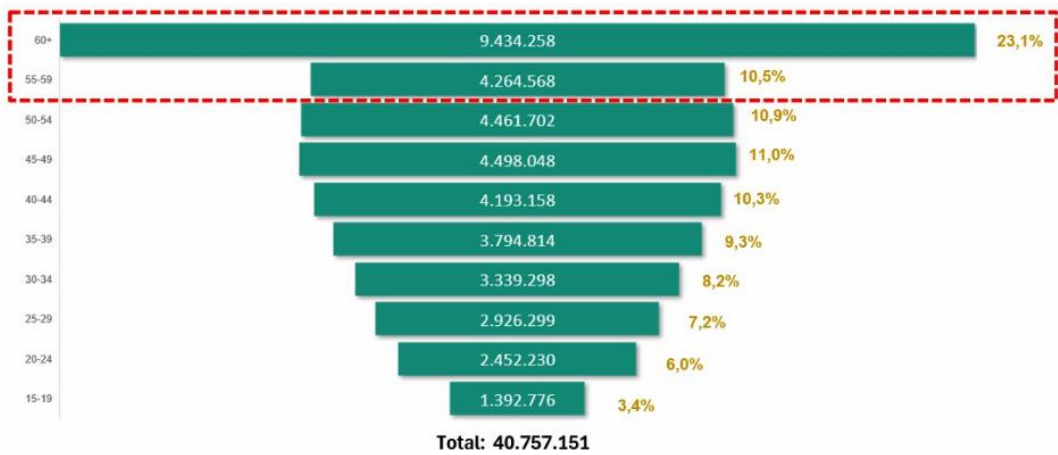
1.1.5. Isu Aktual

1.1.5.1. Sumber Daya Manusia Pertanian

Pembangunan sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memperkuat kapasitas SDM pertanian sebagai tulang punggung transformasi sektor pertanian Indonesia. Petani, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap inovatif agar mampu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan

ketahanan pangan. Pengembangan SDM menjadi kunci dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Sampai saat ini sektor pertanian merupakan penyedia lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Pada tahun 2024, sektor pertanian luas menyerap tenaga kerja sebanyak 40,76 juta orang atau 28 persen dari total orang yang bekerja. Dari yang bekerja pada sektor pertanian tersebut, jika dikelompokkan berdasarkan kelompok umur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tenaga kerja di sektor pertanian menyerupai pola piramida terbalik, dimana kelompok umur tua semakin besar, dan kelompok umur muda relatif sedikit.



Gambar 1. 21 Klasifikasi petani berdasarkan kelompok umur

Terdapatnya perubahan struktural demografi ketenagakerjaan pada sektor pertanian mengarah pada fenomena *aging farmer*. *Aging farmer* didefinisikan sebagai penuaan petani, dimana tenaga kerja sektor pertanian didominasi oleh masyarakat berusia 40-60 tahun (UGM, 2022). *Aging farmer* sebenarnya tidak akan menjadi urgensi yang serius ketika peningkatan usia petani juga diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian. Sayangnya, fenomena peningkatan *aging farmer* dan regenerasi petani berbanding terbalik. Situasi ini akan menyebabkan kekosongan tenaga kerja petani, sehingga akan berpengaruh terhadap produksi pertanian. Oleh karena itu, tantangan yang sesungguhnya dibalik *aging farmer* adalah tingkat regenerasi petani yang masih rendah.

Salah satu fokus utama pengembangan SDM pertanian adalah peningkatan kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Kementerian Pertanian akan memperluas akses pelatihan teknis bagi petani dan generasi muda, termasuk penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), *smart farming*, dan pengelolaan agribisnis. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi akan diperkuat untuk memastikan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, tercipta tenaga kerja pertanian yang terampil, adaptif, dan siap bersaing di era digital.

Selain aspek teknis, penguatan kapasitas SDM juga mencakup pembangunan mental kewirausahaan (entrepreneurship) di kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Program pendampingan dan inkubasi bisnis akan digalakkan untuk mendorong terciptanya usaha pertanian yang bernilai tambah tinggi. Petani tidak hanya diposisikan sebagai produsen, tetapi juga sebagai pengusaha yang mampu mengelola rantai pasok, pemasaran, dan inovasi produk. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di perdesaan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem penyuluhan pertanian, Kementerian Pertanian akan merevitalisasi peran penyuluh sebagai agen perubahan di lapangan. Penyuluh pertanian akan dibekali dengan metode penyuluhan modern, termasuk pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan edukasi. Sinergi antara penyuluh, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lokal akan ditingkatkan guna mempercepat diseminasi inovasi pertanian. Dengan demikian, transfer pengetahuan dan teknologi dapat berjalan lebih efektif, mendorong produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Melalui pengembangan SDM pertanian yang holistik, Kementerian Pertanian berupaya menciptakan generasi petani yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan pertanian Indonesia yang berkelanjutan dan berorientasi global. Pada akhirnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen kuat dan strategi yang terukur, periode 2025–2029 diharapkan menjadi titik lompatan bagi kemandirian dan kemajuan pertanian Indonesia.

1.1.5.2. Penerapan Teknologi

Pertanian modern menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian Indonesia. Transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern telah diakselerasi melalui tiga pilar utama: mekanisasi, digitalisasi, dan *smart farming*. Saat ini pertanian Indonesia berada pada level teknologi *agriculture* 2.0 menuju teknologi *agriculture* 3.0. *Agriculture* 3.0 yang dikenal juga sebagai pertanian presisi, merupakan era pertanian yang memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan praktik pertanian. Teknologi pertanian pada tahun 2029 diharapkan sudah menjadi teknologi pertanian 4.0.

Smart farming telah diimplementasikan untuk mengoptimalkan penggunaan input pertanian seperti air, pupuk, dan pestisida. Teknologi *precision farming* telah diterapkan untuk memastikan dosis pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan tanaman, sehingga mengurangi limbah dan biaya produksi. Selain itu, sistem irigasi cerdas berbasis IoT telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, terutama di daerah rawan kekeringan.

1.1.5.3. Infrastruktur Pendukung Pertanian

Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang memengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi: (1) pengairan lahan pertanian; (2) ketersediaan lahan pertanian; serta (3) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian, pengairan lahan pertanian meliputi:

- a. Rehabilitasi jaringan irigasi.
- b. Pengembangan sumber air yang terdiri irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan.
- c. Bangunan konservasi air.

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau sesuai untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan pertanian dilakukan melalui kegiatan optimasi lahan dan lahan pertanian pangan produktif. Kegiatan optimasi lahan dilakukan pada lahan rawa dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa yang potensial mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa untuk meningkatkan ketersediaan lahan pertanian.

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan bertujuan untuk mempermudah petani dalam memperoleh modal guna menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tani padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar dan pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen atau kematian ternak.

1.1.5.4. Sarana Produksi Pertanian

Sarana yang dimaksud meliputi benih/bibit, pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian. Benih/bibit unggul dan bermutu yang ditandai dengan sertifikasi harus mempunyai keunggulan dari sisi varietas, ketahanan terhadap hama, serta mempunyai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan.

Optimasi distribusi pupuk untuk meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi distribusi pestisida diharapkan berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk yang dimaksud adalah pupuk organik dan pupuk anorganik.

Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu, pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat membantu petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-panen dan pasca panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

1.1.5.5. Pengarusutamaan Gender di Sektor Pertanian

Selama periode 2020-2024 Kementerian Pertanian telah melakukan beragam strategi agar pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan. Kementan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender (PUG) mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan/audit. Kegiatan di Kementerian Pertanian yang berbasis gender di antaranya kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian, serta Program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS).

YESS terus memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di dunia pertanian. Melalui konsep *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI), program ini memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Salah satu capaiannya adalah dari target penerima manfaat YESS tahun 2023 sebanyak 66.990 orang, penerima manfaat kategori GESI untuk perempuan mencapai 26.274 orang.

Kementerian Pertanian selama periode 2020-2024 telah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebanyak 2 (dua) kali. Anugerah penghargaan level tertinggi yaitu level Mentor untuk APE 2020 dan anugerah penghargaan level Utama untuk APE 2023. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kementan dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan kementerian, yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan pertanian.

1.1.5.6. Praktik Pertanian Berkelanjutan

Praktik pertanian berkelanjutan memprioritaskan keseimbangan antara produksi pangan, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi petani, agar dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan). Praktik pertanian berkelanjutan di Kementerian Pertanian di antaranya Desa Organik, Pengendalian Hama Terpadu, Irigasi Hemat Air, Rotasi Tanaman, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan *Climate Smart Agriculture* (CSA).

Pertanian berkelanjutan di Indonesia menjadi strategi penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam. Sebagai negara agraris dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan seperti degradasi lahan, penurunan kesuburan tanah, dan perubahan iklim. Praktik pertanian berkelanjutan mencakup pendekatan agroekologi, penggunaan pupuk organik, integrasi tanaman-ternak, serta diversifikasi tanaman yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem.

Implementasi praktik pertanian berkelanjutan memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, kearifan lokal dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani. Peranan pemerintah dan swasta sangat penting untuk mendukung dan menciptakan ekosistem pertanian berkelanjutan, seperti dukungan dalam pendanaan, penyiapan teknologi, proses hilirisasi produk pertanian ramah lingkungan, dan pendekatan teknologi *Internet of Things* (IoT) dapat mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi input sarana produksi budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Berdasarkan uraian pada sub bab 1.1, maka terdapat beberapa potensi yang meliputi kekuatan yang dimiliki Kementerian Pertanian serta peluang yang dapat dimanfaatkan Kementerian Pertanian dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Kekuatan Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program swasembada pangan di RPJMN 2025–2029. Komitmen Presiden dalam RPJMN 2025–2029 untuk mempercepat swasembada pangan menjadi motor utama penggerak Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan produksi, mengurangi impor, menjaga stabilitas harga, serta membuka lapangan kerja. Swasembada pangan menjadi kunci memperkuat kedaulatan pangan. Program ini mencakup intensifikasi, ekstensifikasi, modernisasi, pemanfaatan benih unggul, *smart farming*, dan peningkatan indeks panen. Sinergi lintas kementerian, optimalisasi KUR, serta dampak sosial bagi sekitar 40 juta pekerja sektor pertanian akan memperkuat ekonomi desa dan regenerasi petani. Di tengah krisis pangan global, upaya mewujudkan ini jadi tonggak transformasi pertanian menuju kemandirian, modernitas, dan daya saing nasional.
2. Keragaman sumber daya di Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia didukung dengan keragaman sumber daya, meliputi luas lahan pertanian sekitar 45 juta hektar, lahan sawah sekitar 7,38 juta hektar, beragam komoditas unggulan, serta plasma nutfah lokal yang strategis. Didukung jaringan kelembagaan yang luas (sekitar 5.700 BPP, 38.000 penyuluh) dan 40,6 juta tenaga kerja, Kementerian Pertanian berharap mampu mendorong inovasi, meningkatkan kapasitas petani, dan mengoptimalkan potensi lokal melalui pendekatan pembangunan berbasis wilayah. Selain itu, peluang ekspor senilai USD 7,44 miliar dari sawit, karet, kopi, kakao, dan komoditas unggulan lain memperkuat daya saing global. Dengan kolaborasi lintas sektor, Kementerian Pertanian berperan penting dalam transformasi pertanian menuju kemandirian, ketahanan, dan kesejahteraan rakyat.
3. Akses kelembagaan organisasi Kementerian Pertanian memiliki jaringan yang tersebar di seluruh provinsi.
4. Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai tahap produksi pertanian, mulai dari penyiapan benih hingga pemanenan dan pengolahan. Perempuan berpotensi dalam mengembangkan inovasi pertanian seperti pertanian organik dan diversifikasi produk pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sedangkan peluang yang dimiliki Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Proyeksi FAO terkait pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita dunia hingga tahun 2050 memberikan beberapa peluang bagi Kementerian Pertanian, meliputi:
 - a. Potensi pasar ekspor Indonesia semakin terbuka seiring dengan proyeksi FAO bahwa permintaan pangan global akan meningkat 60% pada 2050. Banyak negara berkembang akan semakin bergantung pada impor pangan, sementara negara maju mengalami penurunan kapasitas produksi akibat urbanisasi dan perubahan lahan. Indonesia, dengan keanekaragaman hayati dan tren global terhadap produk sehat dan organik, memiliki peluang besar untuk mengembangkan rantai nilai dari produk pangan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah.
 - b. Proyeksi penurunan luas lahan pertanian subur di negara maju menyebabkan penurunan produksi pertanian pada negara tersebut. Sedangkan proyeksi pertumbuhan populasi penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan dalam negeri. Sehingga hal ini menjadi peluang pasar ekspor baru bagi komoditas pangan dan pertanian untuk beberapa komoditas utama dan strategis.
 - c. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang semakin berkurang di wilayah perdesaan pada beberapa negara berkembang menjadi peluang tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga ahli pertanian, untuk bekerja di luar negeri. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kolaborasi

- pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten melalui pendidikan vokasi, sertifikasi keterampilan modern, dan peningkatan kualitas penyuluhan.
- d. Proyeksi peningkatan populasi akan meningkatkan *demand* terhadap produk pangan dan pertanian, sedangkan ketersediaan akan semakin menurun seiring berkurangnya lahan pertanian di dunia. Hal ini selain menimbulkan potensi ekspor juga berpeluang meningkatkan nilai tambah, daya saing dan harga produk ekspor pertanian Indonesia di luar negeri.
 2. Tren pertumbuhan usaha pertanian global berpotensi meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia. Hal ini menimbulkan peluang bagi SDM petani di Indonesia, yaitu:
 - a. Peluang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam mengembangkan usaha pertanian dari hulu ke hilir.
 - b. Peluang peningkatan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM pertanian nasional.
 3. Kemajuan teknologi digital juga menimbulkan peluang bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian Indonesia, yaitu:
 - a. Penerapan teknologi digital sebagai salah satu metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan SDM Pertanian.
 - b. Kementerian Pertanian dapat memenuhi kebutuhan sertifikasi SDM pertanian nasional melalui berbagai kerjasama berbasis pemanfaatan teknologi digital.
 4. Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (*mega biodiversity*). Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

Indonesia memiliki koleksi sumber daya genetik tanaman pangan, khususnya padi sebanyak 6.330 aksesori yang tersimpan di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi dan sebanyak 3.442 aksesori di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Beberapa padi kultivar *Landraces japonica* dari Indonesia, yang memiliki karakter malai besar, daun besar, sistem perakaran kuat, batang tebal, dan sedikit *unproductive tillers* telah digunakan dalam program pemuliaan internasional.
 5. Selain itu, koleksi sumber daya genetik tanaman yang terdiri atas tanaman pangan lainnya, hortikultura, perkebunan, dan tanaman pakan ternak tersebar di UK/UPT di bawah Kementerian Pertanian yang berkedudukan di seluruh Indonesia, meliputi 13.481 aksesori tanaman pangan lainnya, 23.077 aksesori tanaman hortikultura, 8.541 aksesori tanaman perkebunan, dan 117 aksesori tanaman pakan ternak. Sebanyak 10.785 aksesori tanaman tersimpan dalam Bank Gen Pertanian
 6. Visi, Misi, dan Program Kerja Presiden pada Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 memberikan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu peluang:
 - a. Swasembada pangan menjadi salah satu fokus strategis nasional dalam mewujudkan kemandirian pangan. Oleh karena itu, seluruh K/L terkait

- akan terlibat bahu membahu dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden. Kementerian Pertanian otomatis akan terbantu dan mendapat banyak dukungan dari seluruh K/L terkait.
- b. Pembangunan pertanian berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).
 - c. Modernisasi pertanian melalui penerapan *Agriculture 3.0* akan membuat pertanian nasional semakin produktif dan mandiri.
 - d. Penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam meningkatkan produksi pangan asal pertanian untuk komoditas pangan prioritas (padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu dan sukun) serta komoditas pangan bergizi (misal beras, sayur dan buah, susu, karkas, dan lain-lain).
 - e. Sentralisasi penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian.
 - f. Penyuluhan pemanfaatan varietas tanaman dan benih unggul hasil penelitian.
 - g. Penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih melalui kerja sama dan kolaborasi dengan swasta, perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.
 - h. Diklat di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.
 - i. Penyuluhan mengenai pengelolaan dan pengembangan usaha tani.
 - j. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM pengembangan usaha tani (pengembangan akses pasar dan akses informasi).
 - k. Penyuluhan mengenai rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
 - l. Pengembangan kompetensi SDM pertanian dalam memangkas rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
 - m. Penyuluhan dan pengembangan kompetensi SDM pertanian dalam pemanfaatan teknologi digital and *smart farming* berbasis kearifan lokal dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian.
 - n. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang didukung melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan pada kegiatan-kegiatan strategis Kementerian Pertanian.
7. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal tersebut memungkinkan mereka mengadopsi teknologi baru dan mengelola usaha pertanian dengan lebih efektif. Memberikan akses yang lebih adil kepada perempuan dan pihak yang termarginalkan terhadap sumber daya seperti lahan, modal dan teknologi akan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan pertanian.
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan. Alih status penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke pusat adalah langkah strategis yang memperkuat peran Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian nasional. Perubahan ini memungkinkan koordinasi dan standarisasi penyuluhan, memperluas akses penyuluh ke pelatihan, sertifikasi, dan teknologi, serta meningkatkan kualitas pendampingan petani dalam menghadapi tantangan iklim, pasar, dan produksi. Didukung Inpres Nomor 3 tahun 2025, penyuluh kini berperan vital dalam percepatan swasembada pangan, adopsi inovasi, dan modernisasi pertanian. Harmonisasi kelembagaan dan pembiayaan juga membuka peluang peningkatan kapasitas, sarana kerja, dan kesejahteraan penyuluh. Dalam jangka panjang, alih status ini memperkuat sistem penyuluhan profesional.

1.2.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang meliputi kelemahan yang dimiliki Kementerian Pertanian serta tantangan yang perlu dijawab Kementerian Pertanian dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Kelemahan Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kurangnya jenis Jabatan Fungsional Teknis (JFT) Kementerian Pertanian dalam mengakomodir struktur organisasi baru.
2. Beberapa area abu-abu (*grey area*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti pelestarian varietas tanaman berkelanjutan dan perlindungan tanaman menggunakan pestisida, masih menjadi kegiatan lintas unit eselon I, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaannya.
3. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian. Meskipun sudah ada banyak tenaga kerja yang terlibat, jumlah dan kualitas SDM pertanian yang ada saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan baru dalam sektor pertanian yang semakin kompleks, seperti pengembangan teknologi pertanian modern, perubahan iklim, dan kebutuhan global terhadap pangan organik. Kementerian Pertanian memerlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang lebih besar dan serius, terutama dalam bidang teknologi pertanian dan analisis data.
4. Koordinasi yang terkadang kurang efektif antar unit kerja. Kementerian Pertanian terdiri dari banyak unit kerja yang masing-masing memiliki fungsi yang sangat spesifik. Kadang kala, koordinasi antar unit kerja yang berbeda masih kurang berjalan efektif, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tugas atau pengambilan keputusan yang kurang sinkron. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan atau program yang bersifat lintas sektor.
5. Keberagaman program yang belum terintegrasi dengan baik. Kementerian Pertanian memiliki beragam program yang diimplementasikan di lapangan, namun masih ada tantangan dalam memastikan bahwa program-program ini terintegrasi dengan baik dan tidak berjalan secara silo. Program-program yang tidak saling terhubung bisa mengurangi dampaknya, padahal sektor pertanian membutuhkan pendekatan yang lebih holistik untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim.
6. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang terstruktur pada program-program pembangunan pertanian. Meskipun banyak program pembangunan pertanian yang diluncurkan, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa program tersebut dievaluasi secara rutin dan hasilnya bisa diukur. Tanpa evaluasi yang efektif, sulit bagi Kementerian Pertanian untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi sektor pertanian.
7. Tantangan dalam mengelola anggaran yang terbatas dengan prioritas yang beragam. Mengingat anggaran yang terbatas dan banyaknya program yang perlu didanai, Kementerian Pertanian sering kali menghadapi tantangan dalam memprioritaskan program-program yang akan memberikan dampak maksimal. Ini bisa mengarah pada ketidakseimbangan dalam alokasi dana dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Penyempurnaan dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya menjadi penting untuk menghindari ini.
8. Stereotipe gender membatasi perempuan dan pihak termarginalkan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian dan menghambat akses mereka ke sumber daya (modal, lahan dan teknologi) dan peluang.

Sedangkan tantangan yang perlu dijawab Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Proyeksi FAO terkait pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita dunia hingga tahun 2050 memberikan beberapa tantangan bagi Kementerian Pertanian, meliputi:
 - a. Peningkatan *demand* pangan nasional membutuhkan peningkatan produksi komoditas pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan import terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan utama dan prioritas dalam negeri seperti padi, jagung, kedelai, daging, susu, telur, bawang, cabai, tebu, dan lain-lain.
 - b. Peningkatan kebutuhan produksi pertanian akan meningkatkan kebutuhan lahan pertanian. Alih fungsi lahan masih menjadi masalah serius dalam pengelolaan lahan pertanian. Selain itu, tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan masih menjadi masalah nasional yang diharapkan dapat diselesaikan melalui reformasi agraria berkelanjutan.
 - c. Peningkatan kebutuhan produksi pertanian juga akan meningkatkan kebutuhan pengairan lahan pertanian. Ketersediaan sumber daya air pertanian yang semakin berkurang membutuhkan upaya khusus agar lahan pertanian mendapatkan air yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai produksi yang ditargetkan.
Data Kementerian PUPR menunjukkan sekitar 52% jaringan irigasi teknis di Indonesia dalam kondisi rusak ringan sampai berat, sehingga mengurangi efisiensi pengairan. Dengan perubahan iklim, ketersediaan air semakin tidak menentu, sehingga diperlukan peningkatan efisiensi penggunaan air dan pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik.
 - d. Perubahan iklim ekstrem menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi target luas panen dalam mencapai produksi pertanian yang diharapkan. Peramalan iklim yang akurat serta upaya lain diperlukan dalam menciptakan tanaman yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim ekstrem tersebut.
Badan Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan bahwa suhu global terus meningkat, dan Indonesia diprediksi mengalami peningkatan suhu rata-rata 0,8–1,4°C pada 2050. Dampaknya mencakup perubahan pola hujan, peningkatan kejadian kekeringan, banjir, serangan hama, dan penyakit tanaman yang makin sulit diprediksi. Ini menuntut pengembangan varietas tahan iklim ekstrem dan sistem peringatan dini yang lebih canggih.
 - e. Potensi penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di wilayah perdesaan.
2. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan berpotensi menghambat pembangunan pertanian pada Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:
 - a. IKSS 6 “Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis” tidak tercapai sesuai target yang ditentukan pada tahun 2022 dan tahun 2023, walaupun masih dalam batas toleransi 5%. Pada tahun 2022 capaian kinerja IKSS 6 sebesar 99,42% dimana target yang ditetapkan sebesar 80,5% sedangkan realisasi kinerja sebesar 80,03%. Target tahun 2022 ini sama dengan target tahun 2021, dimana kinerja tahun 2021 tercapai sesuai target. Sedangkan tahun 2023 pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 99,47%, dimana target yang ditetapkan sebesar 81% dan hanya tercapai 80,57%.

Berdasarkan realisasi kinerja terhadap target tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja IKSS 6 tahun 2022 dan tahun 2023 cenderung stagnan, sehingga perlu ada peningkatan kinerja pada Renstra periode berikutnya.

- b. IKSS 17 “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”, tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Target tahun 2021 sebesar 79,76% dan tercapai sebesar 79,05%. Target tahun 2021 sebesar 80,71% dan tercapai sebesar 79,4%. Target tahun 2022 sebesar 81,46% dan tercapai sebesar 79,4%. Sedangkan target tahun 2023 sebesar 82,21% hanya tercapai sebesar 79,64%.

Realisasi kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak mencapai 80%, cenderung stagnan antara 79,05% hingga 79,64%. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dan Kementerian Pertanian perlu merumuskan terobosan kreatif agar target RB dapat tercapai melebihi 80%.

- c. Penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab Pemda, namun belum semua Pemda memiliki perhatian bahkan menganggap pertanian bukan prioritas. Hal ini menyebabkan produksi pertanian di beberapa wilayah tidak optimal dikarenakan pengembangan SDM pertanian, khususnya pengembangan penyuluh di daerah tidak merata. Ketimpangan kesejahteraan penyuluh antar daerah juga berpotensi terjadi di masa yang akan datang, dimana tidak semua daerah memiliki perhatian yang sama terhadap pembangunan pertanian di wilayahnya.
 - d. Ketersediaan peralatan dan infrastruktur penyuluhan di Balai Penyuluhan belum optimal, sehingga proses pengembangan dan adopsi teknologi pertanian menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung penyuluhan.
 - e. Adanya keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan lain dalam pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani. Selain itu, KEP belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lain karena keterbatasan akses sumber informasi, teknologi dan pasar. Hal ini menyebabkan pengembangan usaha tani nasional menjadi terhambat dan cenderung stagnan.
3. Sumber Daya Alam Terbatas
- Luas baku sawah Indonesia berkurang dari sekitar 8,1 juta ha (2013) menjadi 7,4 juta ha (2021). Konversi lahan sawah irigasi juga menjadi masalah karena luas lahan sawah terus berkurang, meskipun ada pencetakan sawah baru. Penurunan kualitas tanah akibat erosi, degradasi, dan penggunaan pupuk kimia yang tidak berimbang juga menurunkan produktivitas jangka panjang. Perlu upaya intensifikasi berkelanjutan dan penggunaan teknologi konservasi tanah.
4. Rantai Distribusi Panjang
- Distribusi produk pertanian di Indonesia melibatkan hingga 5–7 rantai perantara dari petani ke konsumen akhir, yang sering kali menyebabkan harga melambung 2–3 kali lipat di tingkat konsumen. Hal ini merugikan petani, rantai pasok panjang dan tidak efisien menyebabkan hilang nilai tambah hasil panen dan mengurangi daya saing produk lokal.
5. Kehilangan Hasil Panen
- FAO memperkirakan kehilangan hasil panen di Indonesia mencapai 20–30% untuk komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, serta sekitar 10–20% untuk beras. Penyebabnya antara lain infrastruktur

pascapanen yang minim, kurangnya fasilitas penyimpanan dingin, dan lemahnya akses pasar.

6. Penetrasi Produk Impor

Volume impor pangan Indonesia pada 2023 mencapai lebih dari USD 22 miliar, dengan kontribusi besar dari komoditas seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan daging. Produk-produk impor yang sering kali lebih murah dan stabil pasokan dapat menurunkan daya saing produk lokal dan membuat petani sulit bersaing.

7. Kerusakan Lingkungan

Deforestasi di Indonesia, menurut *Global Forest Watch*, mencapai 1,1 juta hektar pada 2021, sebagian besar untuk ekspansi perkebunan. Praktik pertanian intensif juga menyebabkan degradasi lahan, penurunan biodiversitas, dan polusi air, dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas, yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian.

8. Masalah Manajemen

Sebagian besar petani kecil kurang memiliki kemampuan manajerial, baik dalam pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, maupun pemasaran. Survei Kementan (2022) menunjukkan hanya sekitar 20% kelompok tani aktif memiliki rencana usaha yang jelas. Kondisi ini bisa mengurangi efisiensi dan produksi.

9. Produktivitas Rendah

Produktivitas padi di Indonesia rata-rata 5,2 ton/ha, lebih rendah dibandingkan Vietnam (5,9 ton/ha) dan Tiongkok (6,9 ton/ha). Produktivitas kedelai nasional sekitar 1,5 ton/ha, jauh di bawah potensi hasil optimal yang bisa mencapai 2,5–3 ton/ha. Rendahnya produktivitas ini menjadi hambatan besar dalam meningkatkan daya saing.

10. Usaha Tani Skala Kecil

Sekitar 93% petani Indonesia menggarap lahan kurang dari 0,5 ha (BPS, 2021), yang membatasi kemampuan mereka untuk mengakses teknologi modern, permodalan, pengetahuan dan pemasaran yang lebih luas. Usaha tani skala kecil rentan terhadap guncangan pasar dan perubahan iklim, yang selanjutnya memengaruhi produktivitas dan daya saing produk yang dihasilkan.

11. Adopsi teknologi dan informasi

Tingkat adopsi teknologi modern oleh petani masih rendah, baik dari sisi pemahaman maupun penguasaan, sehingga mayoritas petani masih mengandalkan cara-cara tradisional dan berskala rumah tangga. Teknologi seperti irigasi presisi, *drone* pemantau lahan, aplikasi cuaca, dan alat pengolahan pasca panen terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga 20–30%. Rendahnya literasi digital, kurangnya pelatihan, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital di perdesaan menjadi hambatan utama dalam mempercepat transformasi menuju pertanian modern dan korporasi petani.

Kecepatan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru dan perubahan dinamika pasar global, terutama terkait dengan keberlanjutan dan ketahanan pangan sangat diperlukan. Lambatnya adopsi teknologi baru atau kesulitan dalam melakukan perubahan kebijakan yang sesuai dengan perubahan pasar dapat menghambat daya saing produk pertanian Indonesia.

12. Kelembagaan petani

Sebagian besar petani di Indonesia masih bekerja secara individual tanpa tergabung dalam kelembagaan seperti koperasi, gapoktan, atau badan usaha milik petani yang kuat. Padahal, kelembagaan berperan penting dalam konsolidasi usaha, penguatan posisi tawar, akses modal, serta efisiensi distribusi input dan hasil panen. Saat ini, kelembagaan petani yang

efektif masih terbatas, sehingga banyak potensi kolektif yang tidak tergarap maksimal dan petani sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

13. Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian

Jumlah petani di Indonesia terus menurun, terutama di kalangan generasi muda. Data Sakernas BPS menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, proporsi tenaga kerja muda di sektor pertanian turun lebih dari 30%. Salah satu penyebab utamanya adalah persepsi atau mindset terhadap pekerjaan tani yang dianggap kurang menjanjikan, penuh risiko, dan tidak bergengsi. Urbanisasi juga memperparah kondisi ini, dengan banyak pemuda desa memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor lain yang dinilai lebih stabil dan berpendapatan lebih baik. Hal ini menimbulkan ancaman regenerasi petani dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi pertanian nasional.

14. Keterbatasan peralatan dan infrastruktur penyuluhan

Ketersediaan peralatan dan infrastruktur di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) masih jauh dari optimal. Banyak BPP yang kekurangan sarana seperti alat peraga, perangkat teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga proses penyampaian materi penyuluhan dan adopsi teknologi pertanian tidak berjalan maksimal. Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya pemahaman dan penerapan teknologi oleh petani di lapangan.

15. Keterbatasan kapasitas kelembagaan ekonomi petani (KEP)

Masih terdapat keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan dalam membentuk serta mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). KEP juga sering kali belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena minimnya akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, dan jejaring usaha. Kondisi ini menyebabkan pengembangan usaha tani nasional berjalan lambat, kurang terkoordinasi, dan sulit tumbuh menjadi usaha yang berdaya saing tinggi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN

2.1. Visi Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini memiliki makna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah:

"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Secara detail, makna Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Pertanian**

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, **Pertanian** bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

- **Pertanian Maju**

Pertanian maju bermakna bahwa pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

- **Pertanian Berkelanjutan**

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 Bab I, Pasal 1, angka 1 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian

yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

- **Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
2. Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
4. Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

2.2. Misi Kementerian Pertanian

Presiden periode 2025-2029 memiliki 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan istilah "Asta Cita" dalam mewujudkan Visi Indonesia tahun 2025-2029. **Asta Cita Presiden periode 2025-2029 adalah:**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden. **Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut adalah:**

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas nasional, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
- Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia

Misi ini menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat memengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah *Monkeypox (Mpox)*, Rabies, Antraks, Flu Burung dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisasi dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

2.3. Tujuan Kementerian Pertanian

Visi dan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 akan menjadi arah strategis (*strategic direction*) pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan strategis atau *destination statement* merupakan penjabaran visi dengan mempertimbangkan misi Kementerian Pertanian. Sehingga, Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi Kementerian Pertanian. Tujuan ditetapkan berdasarkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2029. Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Tujuan ini merupakan peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan kesejahteraan petani diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.1: Indeks Kesejahteraan Petani

2. Tujuan 2: Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas

Tujuan 2 ini adalah terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas, dimana sebagian besar produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Penerapan sistem budidaya pertanian berkelanjutan memastikan produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional ekonomi sirkular dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tujuan ini memiliki 4 (empat) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.2: Indeks swasembada pangan prioritas
- IT.3: Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan
- IT.4: Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian
- IT.5: Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian

3. Tujuan 3: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat

Tujuan 3 adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat. Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.6 : Persentase peningkatan pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energi
- IT.7: Pertumbuhan PDB tanaman Perkebunan
- IT.8: Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura

4. Tujuan 4: Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dari Akibat dan Dampak Penyakit Hewan serta Penyakit Bawaan Pangan

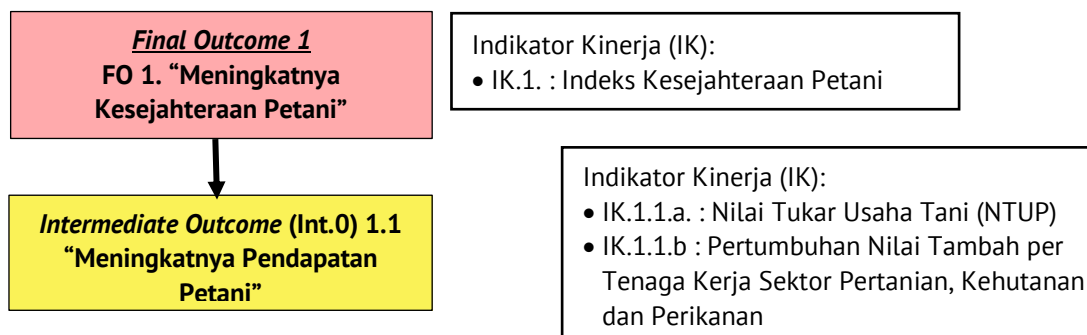
Tujuan 4 adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti Rabies, *Monkeypox*, Antraks, Flu Burung, dan lain sebagainya, memengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT) 9. Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Tujuan 5: Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) merupakan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat makro, meso maupun mikro. Tujuan 5 Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional, merupakan upaya reformasi birokrasi tingkat mikro (K/L) dalam membentuk birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT)10. Persentase Peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian merupakan standar kinerja Kementerian Pertanian di tingkat Kementerian dalam mewujudkan pembangunan nasional. SS Kementerian Pertanian dibentuk berdasarkan Tujuan Kementerian Pertanian serta *outcome* akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai Kementerian Pertanian. SS Kementerian Pertanian sejatinya merupakan *Critical Success Factor* (CSF) atas *outcome* akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional terkait dengan pertanian. *Outcome* akhir (*final outcome*) beserta CSF nya dapat digambarkan sebagai berikut.



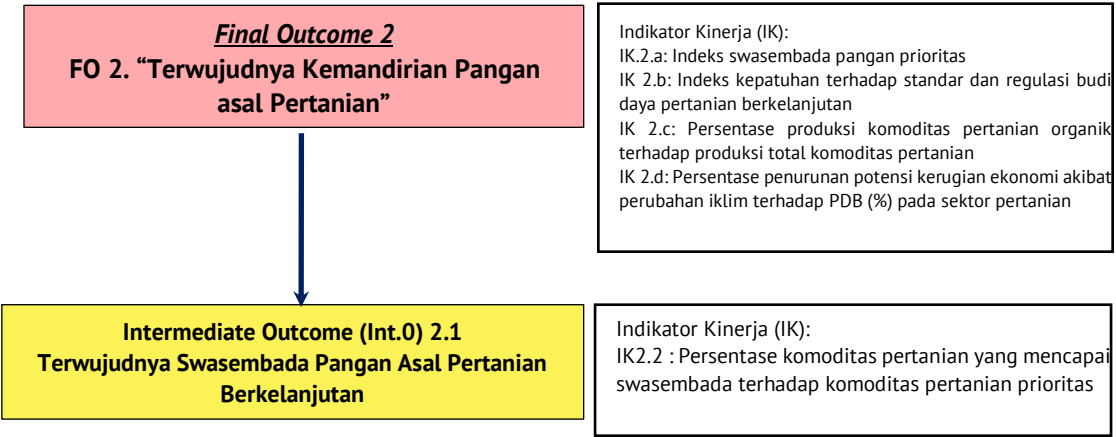
Gambar 2. 1 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 1

Outcome akhir (*final outcome*) 1 (FO.1) adalah meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator kinerja IK.1 Indeks Kesejahteraan Petani. CSF dalam mewujudkan FO.1 ini adalah *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1, yaitu Meningkatnya pendapatan petani, dengan 2 (dua) indikator kinerja, meliputi:

- *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.a: Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP).
- *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.b: Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Kesejahteraan petani merupakan salah satu hasil akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian, dimana langkah kritis keberhasilan yang perlu diwujudkan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan petani adalah dengan meningkatnya pendapatan petani. Hal ini karena salah satu faktor yang menunjang kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan.

Selanjutnya *outcome* akhir (*final outcome*) 2 (FO.2) dapat digambarkan berikut ini.



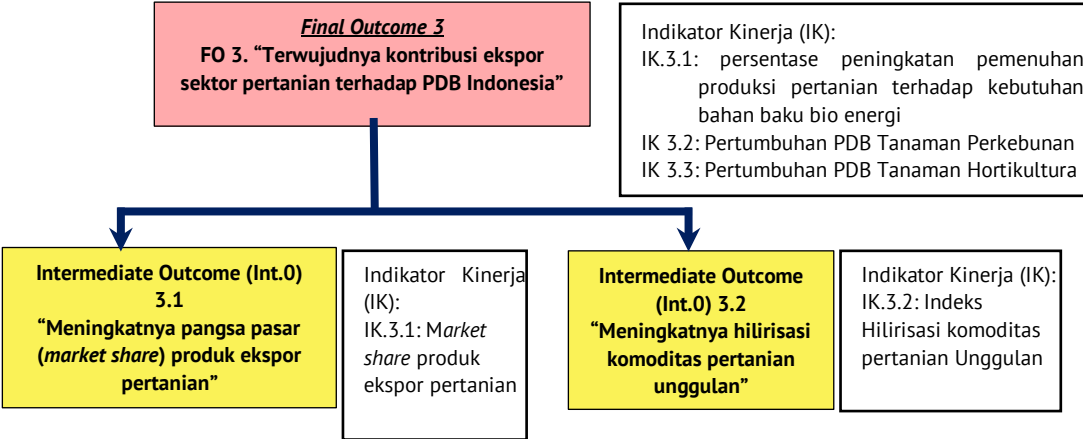
Gambar 2. 2 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 2

Outcome akhir kedua (FO.2) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya kemandirian pangan asal pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 2 adalah IK.2.a: Indeks swasembada pangan prioritas, IK 2.b: Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan IK 2.c: Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian, IK 2.d: Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian. CSF dari FO.2 ini, yaitu:

- *Intermediate Outcome* (Int.O) 2.1: Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas

Kemandirian pangan merupakan kemampuan bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dari produksi dalam negeri. Oleh karena itu, terdapat hal kritis dalam mewujudkan kemandirian pangan, yaitu terwujudnya swasembada pangan. Swasembada pangan mengukur sebagian besar kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari produksi pangan dalam negeri.

Selanjutnya *outcome* akhir (*final outcome*) 3 (FO.3) dapat digambarkan berikut ini.



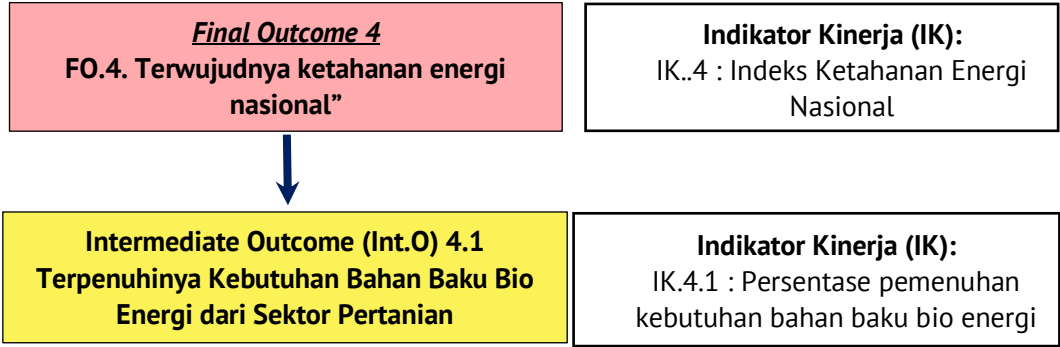
Gambar 2. 3 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 3

Outcome akhir ketiga (FO.3) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap PDB Indonesia, dengan Indikator Kinerja (IK) 3 Persentase kontribusi ekspor produk pangan asal pertanian terhadap PDB. Kinerja dan indikator kinerja ini mengukur seberapa besar kontribusi ekspor produk pangan dan pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). CSF dari FO.3 ini terdiri dari 2 (dua) CSF, yaitu:

- *Intermediate Outcome* (Int.O) 3.1 Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 3.1 *market share* produk ekspor pertanian.
- *Intermediate Outcome* (Int.O) 3.2 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, dengan Indikator Kinerja (IK) 3.2 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan.

Kontribusi ekspor produk pangan asal pertanian dapat meningkat melalui 2 (dua) langkah kritis keberhasilan, yaitu peningkatan pangsa pasar dan hilirisasi (termasuk kualitas) produk pangan asal pertanian. Ketersediaan produk pertanian unggulan berkualitas hasil hilirisasi akan dapat meningkatkan nilai tambah dan berpotensi meningkatkan daya saing. Sehingga, dengan ketersediaan akses pasar yang potensial, maka volume ekspor akan dapat meningkat sehingga meningkatkan kontribusi ekspor sektor pertanian.

Selanjutnya *outcome* akhir (*final outcome*) 4 (FO.4) dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2. 4 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 4

Outcome akhir keempat (FO.4) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya ketahanan energi nasional, dengan Indikator Kinerja (IK) 4 adalah Indeks ketahanan energi nasional. FO.4 sebenarnya merupakan *outcome* akhir dari sektor energi, khususnya terkait dengan ketersediaan energi non fosil dalam menjawab tantangan

krisis energi ke depan. Namun, bahan baku yang dibutuhkan dalam mewujudkan kedaulatan energi tersebut berasal dari komoditas pertanian, yaitu kelapa sawit untuk bahan baku Bio Diesel dan Bio Avtur, serta beberapa komoditas pertanian lainnya, sebagai bahan baku Bio-Ethanol. Sehingga, CSF dari FO.4 ini adalah *Intermediate Outcome* (Int.O) 4.1 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 4.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi.

Selanjutnya *outcome* akhir (*final outcome*) 5 (FO.5) dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2. 5 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 5

Outcome akhir kelima (FO.5) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, dengan Indikator Kinerja (IK) 5.1 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner yang melekat pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) akan terus berupaya dalam meningkatkan kesehatan hewan dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit hewan yang berdampak terhadap manusia. Selain itu, Kementerian Pertanian juga berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dari dampak penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat untuk semua (*one health*). *Intermediate Outcome* (Int.O) yang merupakan CSF dari FO.5 ini adalah Int.O 5.1 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia, dengan Indikator Kinerja (IK) 5.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia.

Selanjutnya *outcome* akhir (*final outcome*) 6 (FO.6) dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2. 6 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 6

Outcome akhir keenam (FO.6) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) 6 Persentase Peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian. Seperti telah diuraikan sebelumnya, RB merupakan upaya seluruh

Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilakukan serempak setiap tahun. Untuk itu, maka langkah kritis dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) adalah terwujudnya RB Kementerian Pertanian sesuai target yang dicanangkan. CSF untuk FO.6 ini adalah Int.O.6.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi dengan Indikator Kinerja (IK) 6.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Berdasarkan CSF pada masing-masing FO.1, FO.2, FO.3, FO.4, FO.5 dan FO.6 yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diterjemahkan *Intermediate Outcome* (Int.O) beserta indikator kinerjanya menjadi SS dan IKSS yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Penerjemahan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS.1 Meningkatnya pendapatan petani	IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
SS.2 Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas
SS.3 Meningkatnya pangsa pasar (<i>market share</i>) produk ekspor pertanian	IKSS 3.1 <i>Market share</i> produk ekspor pertanian
SS.4 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	IKSS 4.1 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan
SS.5 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	IKSS 5.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi
SS.6 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia	IKSS 6.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia
SS.7 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 7.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini kemudian diturunkan (*cascading*) menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga Output yang menjadi dasar dalam penentuan Kriteria Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). *Cascading* kinerja ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Detail pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi dokumen perencanaan untuk SP, IKP, SK, IKK dan Output disajikan dalam Lampiran 5.

2.4.1.1. Manajemen Risiko Pembangunan Pertanian

Untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, Kementerian Pertanian menerapkan pendekatan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan

Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur.

Pada periode 2025-2029, penerapan manajemen risiko difokuskan pada program-program prioritas Kementerian Pertanian yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN, seperti: Program Swasembada Pangan, Peningkatan Produksi Daging dan Susu Sapi, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), dan Hilirisasi. Selain pemetaan risiko pada Proyek Strategis Nasional (PSN), dilakukan pula identifikasi risiko secara menyeluruh berdasarkan sasaran strategis kementerian yang telah ditetapkan. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target-target PSN maupun sasaran strategis kementerian.

Manajemen risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis, perlakuan (mitigasi), serta pemantauan yang terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hasil identifikasi risiko berdasarkan sasaran strategis menunjukkan enam kelompok risiko utama yang perlu menjadi perhatian pada periode 2025–2029, sebagai berikut:

- Risiko Produksi dan Ketahanan Pangan

Perubahan iklim, kekeringan, banjir, serta serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan menular strategis berpotensi menurunkan produksi dan mengganggu stabilitas pasokan pangan. Perlakuan (mitigasi) dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas surveilans dan laboratorium veteriner, pengembangan varietas tahan cekaman iklim, serta penerapan teknologi budidaya adaptif dan ramah lingkungan.

- Risiko Ketersediaan dan Akses Input Produksi

Fluktuasi harga pupuk, benih, dan pestisida di pasar global serta ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin usaha tani. Distribusi input yang belum merata juga berisiko menunda masa tanam. Mitigasi ditempuh melalui penguatan sistem distribusi berbasis digital, pengembangan industri input dalam negeri, dan koordinasi kebijakan subsidi serta bantuan sarana produksi dengan kementerian terkait.

- Risiko Kelembagaan, SDM, dan Kapasitas Daerah

Keterbatasan kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan petani masih menjadi kendala dalam implementasi program. Kapasitas penyuluh di beberapa daerah belum merata, sementara kelembagaan petani belum sepenuhnya berorientasi bisnis. Mitigasi dilakukan melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, penguatan kelembagaan ekonomi petani, serta pemanfaatan sistem informasi dan monitoring digital untuk percepatan transfer pengetahuan.

- Risiko Infrastruktur dan Pembiayaan Pertanian

Sebagian infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan sarana pascapanen masih terbatas. Walaupun alokasi anggaran Kementerian Pertanian menunjukkan tren peningkatan, kebutuhan pengembangan infrastruktur di lapangan tetap tinggi. Mitigasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan alsintan, serta perluasan kerja sama pembiayaan dan kemitraan swasta.

- Risiko Pasar dan Nilai Tambah Produk Pertanian

Fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan kapasitas hilirisasi menurunkan daya saing dan pendapatan petani. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya integrasi rantai pasok dan keterbatasan diversifikasi produk olahan. Mitigasi diarahkan pada penguatan sistem informasi pasar, pengembangan kemitraan petani dan industri, peningkatan kapasitas pengolahan dan pascapanen, serta pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berorientasi nilai tambah dan ekspor.

- Risiko Tata Kelola, Kepatuhan, dan Pengelolaan Aset

Risiko pada aspek tata kelola mencakup potensi ketidaktepatan sasaran bantuan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan, serta kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Risiko ini berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas program. Mitigasi dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan audit berbasis risiko, digitalisasi pemantauan bantuan, serta peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset pertanian.

Melalui penerapan manajemen risiko yang adaptif dan terintegrasi dalam sistem perencanaan serta penganggaran, Kementerian Pertanian berkomitmen memperkuat ketahanan sektor pertanian terhadap berbagai tantangan internal maupun eksternal. Pendekatan ini memastikan setiap risiko dikelola secara proaktif, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, akuntabel, serta mendukung terwujudnya sistem pertanian nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pemetaan risiko dalam rangka pencapaian target-target PSN dan sasaran strategis kementerian dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi nasional merupakan gambaran besar mengenai arah pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan memuat prioritas pembangunan pertanian yang disusun untuk memecahkan permasalahan prioritas dan mendesak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penyelesaian masalah diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap capaian sasaran pembangunan sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan (Asta Cita). Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, atau dikenal dengan istilah Trisula Pembangunan. Trisula pembangunan tersebut akan terwujud jika didukung oleh pondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, pemerintah digital dan reformasi birokrasi.

Kementerian Pertanian mendukung Prioritas Nasional (PN) 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru); PN 3 (Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi); PN 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas); PN 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri); PN 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan); PN 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan); dan PN 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur).

Dari PN tersebut, Kementerian Pertanian berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan PN 2, PN 3 dan PN 5.

Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 2 terkait dengan pencapaian Swasembada Pangan maupun berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi dalam mewujudkan Swasembada Energi. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 3 melalui pelaksanaan brigade pangan yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya pertanian. Sedangkan kontribusi Kementerian Pertanian dalam PN 5 adalah melalui hilirisasi komoditas pertanian.

Prioritas Nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional yaitu Program Hasil Terbaik Cepat (*quick wins*) sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Program Terbaik Cepat terkait Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian berkontribusi terhadap Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima). Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu) melalui produksi pangan asal pertanian. Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 3 (tiga) melalui peningkatan produktivitas. Kontribusi terhadap jaminan kesejahteraan sosial melalui kredit usaha untuk mendukung dalam menghilangkan kemiskinan absolut. Detail masing-masing kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	1. Produksi pangan asal pertanian bergizi 2. Produksi Susu
Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	3. Swasembada Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, dan Tebu 4. Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, Tebu, dan Sagu
Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	5. Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian untuk Program Hasil Terbaik Cepat. Berikutnya yaitu program prioritas dengan orientasi jangka menengah. Terdapat sebanyak 17 Program Prioritas Presiden, sebanyak 3 (tiga) diantaranya terkait dengan pertanian sebagai berikut.



Gambar 3. 2 Program Prioritas Presiden terkait Pertanian

Berdasarkan gambar di atas, Kementerian Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan swasembada pangan, energi dan air; menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani; serta pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya. Pemetaan kontribusi Kementerian Pertanian terhadap ketiga program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Prioritas

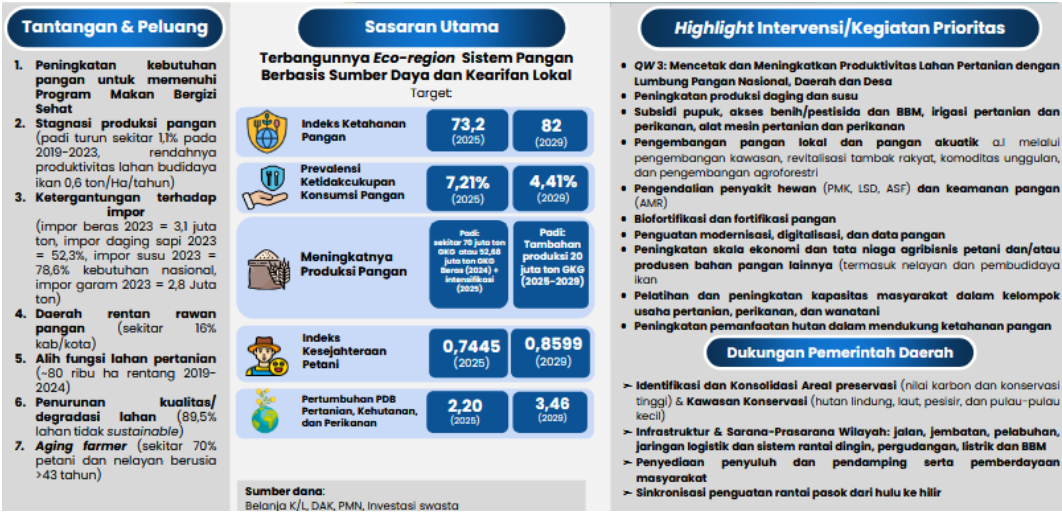
PROGRAM PRIORITAS	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	1. Swasembada Pangan 2. KSPP: Padi, Jagung, Hortikultura 3. Tambahan luas panen tanaman pangan minimal 4 Juta ha tercapai tahun 2029
Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	4. Menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih dan pestisida kepada Petani → Meningkatkan produksi dan produktivitas
Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya	5. Program Kredit Usaha Tani: Peternakan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat.

Berdasarkan tabel di atas, berhasil dipetakan sebanyak 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian terhadap program prioritas nasional. Masing-masing program prioritas tersebut dijabarkan menjadi program kerja. Berdasarkan hasil analisis, berikut program kerja terkait swasembada pangan.

- Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

- Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru
- Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN *holding* pangan ID FOOD, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen
- Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani
- Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian
- Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian
- Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.

Berdasarkan Rancangan RPJMN tahun 2025-2029, sasaran dan intervensi program swasembada pangan dalam Kerangka Prioritas Nasional 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 3. 3 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Pangan

Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional swasembada pangan dilakukan dalam mewujudkan beberapa sasaran, yaitu:

- Meningkatkan ketahanan pangan

Kontribusi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memastikan swasembada pangan dapat terwujud. Ketersediaan komoditas pangan strategis diprioritaskan berdasarkan konsumsi masyarakat, sehingga dapat memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi dari produksi dalam negeri.

- Memastikan kecukupan konsumsi pangan nasional

Ketersediaan pangan yang diupayakan sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia akan memastikan kecukupan pangan nasional, sehingga akan menurunkan angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan. Selain itu, kandungan gizi yang tersedia dalam setiap komoditas pangan juga menjadi perhatian sehingga masyarakat dapat mengonsumsi pangan bergizi yang beraneka ragam.

- **Meningkatkan produksi pangan**

Kementerian Pertanian akan berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan produksi pangan, khususnya komoditas pangan strategis nasional. Peningkatan produksi dilakukan baik dengan meningkatkan produktivitas dan potensi produksi, luas panen, memastikan tanaman yang tahan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, khususnya iklim ekstrim, ternak yang tahan terhadap penyakit hewan hingga memastikan optimalnya indeks pertanaman serta ketersediaan benih/bibit, pupuk, pestisida, lahan, air maupun prasarana dan sarana pertanian lainnya.

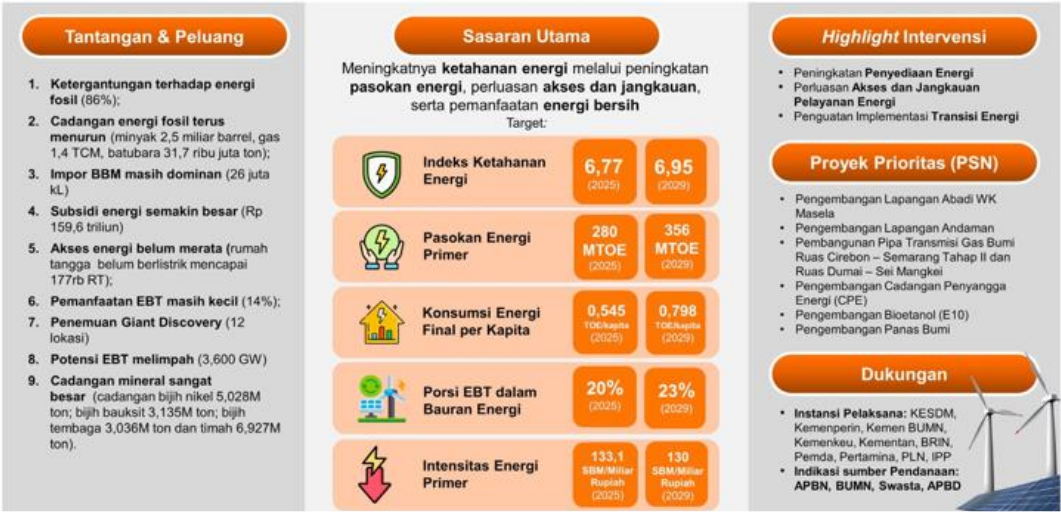
- **Mengurangi impor pangan**

Upaya Kementerian Pertanian dalam memastikan kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri terpenuhi melalui produksi dalam negeri secara otomatis akan dapat mengurangi impor. Kualitas pangan yang dihasilkan menjadi tantangan untuk memastikan komoditas pertanian yang dihasilkan bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

- **Meningkatkan kesejahteraan petani**

Kesejahteraan petani menjadi salah satu *highlight* nasional dan salah satu fokus Presiden di bidang pertanian. Seluruh upaya yang dilakukan dan telah dijelaskan sebelumnya tentunya akan memengaruhi kesejahteraan petani, terutama peningkatan nilai tukar petani.

Sedangkan kerangka program prioritas swasembada energi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 3. 4 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi

Kementerian Pertanian hanya berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi berupa bahan baku Bio-Avtur, Bio-Diesel maupun Bio-Ethanol dalam mewujudkan swasembada energi. Kerangka ini secara detail akan dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sedangkan sasaran dan intervensi Hilirisasi dan Industrialisasi dalam Kerangka Prioritas Nasional 5 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

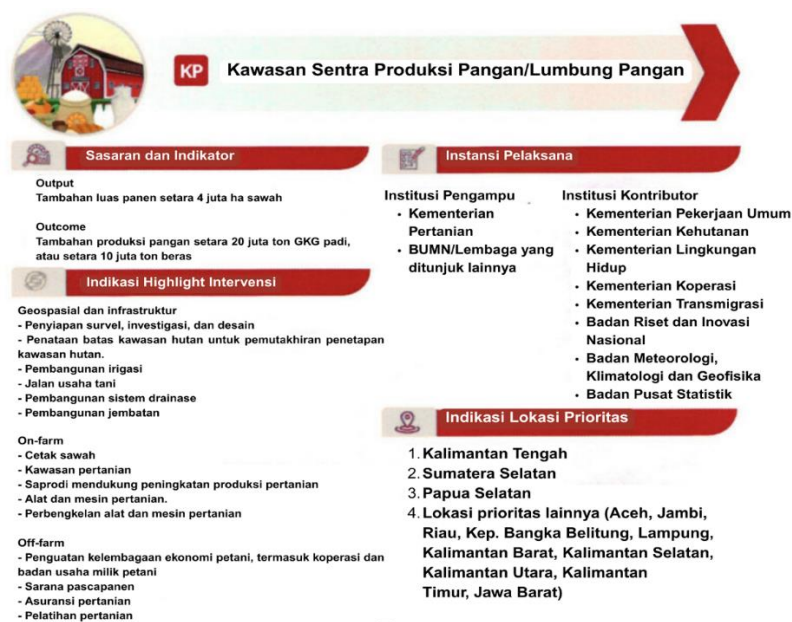


Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 3. 5 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi

Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional Hilirisasi dan Industrialisasi dilakukan dalam mewujudkan sasaran utama Meningkatkan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam bentuk intervensi pengembangan hilirisasi kelapa sawit dan pengembangan hilirisasi kelapa. Dalam rangka mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian Pertanian menempatkan hilirisasi komoditas pertanian sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan sektor pertanian lima tahun ke depan. Hilirisasi di sektor pertanian tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk primer, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural menuju pertanian yang modern, berbasis industri, dan berdaya saing global. Kebijakan hilirisasi nasional menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan keterkaitan antar sektor (*on farm–off farm*), serta peningkatan ekspor berbasis produk olahan. Menyikapi arah kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian akan mendorong hilirisasi secara lebih terstruktur dan terfokus pada komoditas strategis yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang kuat, baik di dalam maupun luar negeri. Komoditas prioritas dalam kebijakan hilirisasi Kementerian Pertanian 2025–2029 meliputi: ayam, kelapa dalam, jambu mete, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, ubi kayu, bawang putih, kapas, kacang tanah dan kacang hijau. Penyediaan *cold chain* juga dirancang sebagai bagian dari upaya hilirisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menjaga kualitas produk pertanian selama proses transportasi, penyimpanan dan distribusi.

Selain itu, RPJMN juga mencantumkan Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional yang merupakan implementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

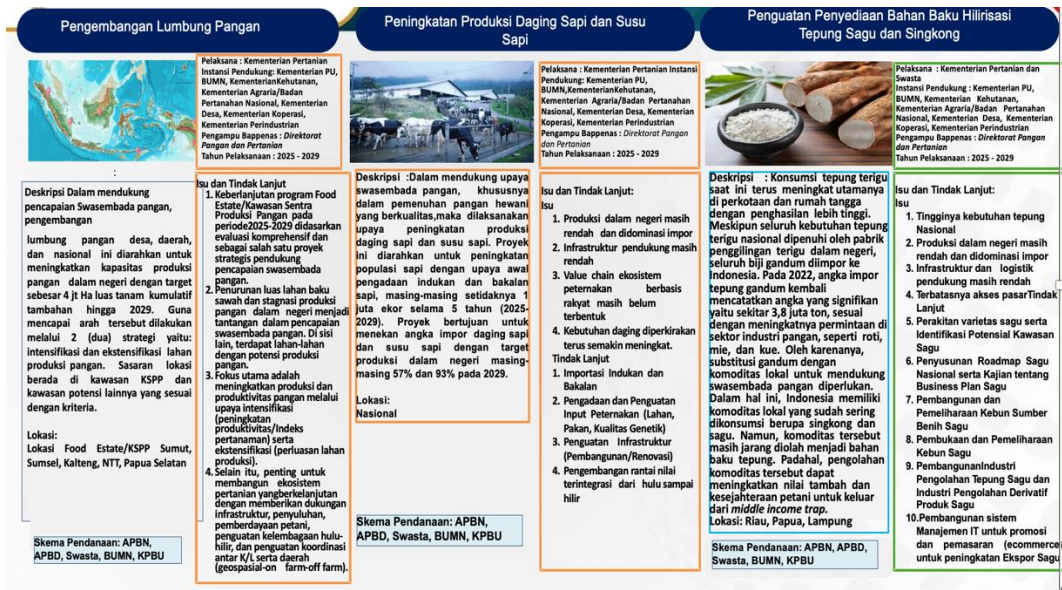


Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 3. 6 Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional

Baik sasaran, indikator maupun indikasi *highlight* intervensi sesuai kewenangan Kementerian Pertanian telah dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan dalam pohon kinerja pada Bab II maupun kerangka kinerja dan pendanaan pada Bab IV. Selain itu, indikasi lokasi prioritas juga telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan Kementerian Pertanian berdasarkan prioritas. Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan beberapa indikasi *highlight* intervensi pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

RPJMN tahun 2025-2029 juga memuat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 3. 7 Proyek Strategis Nasional (PSN) lingkup Pangan dan Pertanian

Berdasarkan gambar tersebut, PSN dalam RPJMN 2025-2029 lingkup pangan dan pertanian adalah:

- Pengembangan lumbung pangan
- Peningkatan produksi daging sapi dan susu sapi

- Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong dalam PSN Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu

Selain PSN yang sudah tercantum di dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Pertanian juga akan mengusulkan PSN lainnya dalam rangka mendukung peningkatan produksi untuk pencapaian swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian.

RPJMN Tahun 2025-2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

(i) Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan Inklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Strategi PUG dan Inklusi sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh dari semua Prioritas Nasional (PN) maupun non-PN untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang didahului dengan proses: (a) analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategis di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe) menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif; (b) analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah; dan (c) penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi institusi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut. Selanjutnya dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian target kesetaraan gender disusun strategi nasional/rencana aksi/dokumen kebijakan strategis lainnya di tingkat pusat dan daerah.

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi Gender dan Inklusi Sosial yaitu: (a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK); (b) Indeks Perlindungan Anak (IPA); (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); (d) Indeks Ketimpangan Gender (IKG); (e) Indeks Pembangunan Gender; (f) Mobilitas Penduduk Lanjut Usia; (g) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki

dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (*tagging*) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan Kementerian Pertanian lainnya, seperti penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian, dukungan peningkatan kapasitas dan bantuan alat dan bahan bagi perempuan petani.

(ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam RPJMN 2025-2029 disebutkan bahwa, pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (a) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam RPJMN dan RPJMD; (c) penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (d) pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) inklusi sosial dan keberlanjutan. Semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam pencapaian banyak tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, arah kebijakan pertanian difokuskan pada pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan bertujuan menciptakan pertanian yang produktif, inklusif, tangguh, dan ramah lingkungan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs. Pendekatan ini memerlukan sinergi antara kebijakan nasional, peran masyarakat, teknologi, dan keberpihakan terhadap petani kecil. Arah kebijakan pembangunan pertanian yang mendukung SDGs antara lain:

- (a) Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui peningkatan produksi pangan pokok secara berkelanjutan; diversifikasi pangan lokal dan pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan; serta penguatan cadangan pangan dan distribusi yang merata.
- (b) Pengentasan Kemiskinan Petani melalui peningkatan akses petani terhadap modal, pasar, teknologi, dan informasi; mendorong pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri; serta perlindungan harga dan jaminan usaha tani.
- (c) Pertanian Ramah Lingkungan dan Tanggap Iklim melalui penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan (ramah lingkungan, hemat air, minim pestisida); restorasi lahan pertanian kritis dan konservasi sumber daya

genetik lokal; serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui praktik pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*).

- (d) Penguatan Kelembagaan Petani dan Kemitraan melalui pembentukan dan penguatan kelompok tani, koperasi, dan kelembagaan ekonomi petani; kolaborasi antara petani, pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi; serta digitalisasi pertanian melalui sistem informasi pertanian modern.
- (e) Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Produksi melalui perbaikan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan hasil panen; serta akses sarana produksi yang berkualitas dan terjangkau (benih, pupuk, alat mesin pertanian).
- (f) Peningkatan Kualitas SDM Pertanian melalui pelatihan, penyuluhan, dan transfer teknologi kepada petani; regenerasi petani melalui melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian (petani milenial); dan inovasi berbasis riset dan teknologi lokal.

(iii) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dalam RPJMN 2025-2029 dilakukan melalui (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (b) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan pemanfaatan riset, pengembangan serta inovasi; (d) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*); serta literasi digital secara luas; (e) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (f) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (g) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Transformasi digital di sektor pertanian adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pengurangan risiko gagal panen, kemudahan akses informasi dan pasar, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan keterlibatan generasi muda dan keberlanjutan dalam kegiatan pertanian. Teknologi dalam transformasi digital pertanian antara lain penggunaan teknologi digital; *Internet of Things* (IoT); *drone* dan citra satelit; *Artificial Intelligence* (AI); aplikasi *mobile* dan *platform* digital; *big data* dan sistem pertanian presisi dalam budidaya dan pengolahan hasil pertanian. Hal ini merupakan bagian penting dari strategi modernisasi pertanian untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama dalam hal ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

(iv) Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim

Perubahan iklim sudah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Hal ini ditandai oleh suhu udara yang semakin panas, kejadian iklim ekstrem yang semakin sering, musim hujan dengan durasi semakin pendek dan musim kemarau yang semakin panjang di berbagai daerah. Awal musim hujan dan kemarau juga makin sulit diprediksi. Kenaikan muka air laut memengaruhi produktivitas lahan dekat akibat kenaikan salinitas tanah. Semua gejala perubahan iklim tersebut memengaruhi berbagai sektor, khususnya pertanian yang paling rentan dan mudah terpengaruh oleh cuaca ekstrem, yang berdampak pula terhadap ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan sangat fundamental bagi kemajuan pembangunan nasional karena berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup warga negara. Perwujudan ketahanan pangan pada tingkat makro (nasional dan global) ke depan akan semakin sulit karena permintaan pangan akan terus tumbuh sejalan dengan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, dan dinamika lingkungan strategis. Sementara pertumbuhan produksi atau pasokan pangan akan semakin sulit pula karena menghadapi ancaman dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya penguatan ketahanan pangan semakin penting mengingat krisis pangan dapat terjadi kapan saja di tengah kondisi perubahan iklim global yang berpotensi mengancam kehidupan.

Solusi inovatif untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan pangan nasional dan upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah dan panjang. Untuk itu, pembangunan pertanian berketahanan iklim dan rendah karbon menjadi salah satu prioritas dalam penanganan dampak negatif perubahan iklim dan pada waktu bersamaan diharapkan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi manfaat tambahan (*co-benefit*) dari berbagai aksi adaptasi.

Pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim sektor pertanian dapat diintegrasikan dengan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk menjadi koordinator terhadap Program Prioritas (PP) dan mengampu serta berkontribusi terhadap Kegiatan Prioritas (KP) seperti diuraikan pada Lampiran III Perpres nomor 12 tahun 2025. Namun terdapat satu indikator dimana Kementerian Pertanian tidak lagi menjadi pengampunya, yaitu indikator KP 05.01.05 Produksi bahan baku (*Crude Palm Oil*/CPO dan *Crude Palm Kernel Oil*/CPKO). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana produksi CPO dan CPKO sudah tidak menjadi tusi Kementerian Pertanian. Tusi Kementerian Pertanian hanya sampai Tandan Buah Segar (TBS). Kontribusi tersebut diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap PP dan KP sesuai Lampiran III RPJMN

NO	PN/PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
	Program Prioritas (PP) 10: Swasembada Pangan	
1	PP 02.10 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	SS.1, IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)
2	PP 02.10 Indeks Kesejahteraan Petani (%)	IT 1 Indeks Kesejahteraan Petani (%)
	Kegiatan Prioritas (KP) 01: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	
3	KP 02.10.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah (ton)	IKP 2.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah (ton)
4	KP 02.10.1 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah (Ha)	IKK 3.1 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah (Ha)

NO	PN/PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
	Kegiatan Prioritas (KP) 02: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Sumatera Utara	
5	KP 02.10.2 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton)	IKP 4.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton)
6	KP 02.10.2 Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (Ha)	IKK 2.1 Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (Ha)
	Kegiatan Prioritas (KP) 03: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Sumatera Selatan	
7	KP 02.10.3 Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan (Ton)	IKP 2.2 Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan (Ton)
8	KP 02.10.3 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan (Ha)	IKK 3.2 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan (Ha)
	Kegiatan Prioritas (KP) 04: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur	
9	KP 02.10.4 Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton)	IKP 2.3 Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton)
10	KP 02.10.4 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha)	IKK 3.3 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha)
11	KP 02.10.4 Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton)	IKP 2.4. Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton)
12	KP 02.10.4 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha)	IKK 3.4 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha)
	Kegiatan Prioritas (KP) 05: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Papua	
13	KP 02.10.5 Peningkatan Produksi Jagung KSPP Papua (Ton)	IKP 2.5. Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua (Ton)
14	KP 02.10.5 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Papua (Ha)	IKK 3.5 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Papua (Ha)
	Kegiatan Prioritas (KP) 06: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Papua Selatan	
15	KP 02.10.6 Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan (Ton)	IKP 2.6 Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan (Ton)
16	KP 02.10.6 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan (Ha)	IKK 3.6 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan (Ha)
	Kegiatan Prioritas (KP) 07: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan lainnya	
17	KP 02.10.7 Lahan baku sawah yang dicetak (ribu Ha)	IKK 1.2 Lahan baku sawah yang dicetak (ribu Ha)
18	KP 02.10.7 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman (ribu Ha)	IKK 1.1 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman (ribu Ha)
	Kegiatan Prioritas (KP) 10: Pengembangan Pangan Hewani	
19	KP 02.10.10 Produksi Daging (juta ton)	IKP 5.1 Produksi Daging (juta ton)
20	KP 02.10.10 Produksi Telur (juta ton)	IKP 5.2 Produksi telur (juta ton)
21	KP 02.10.10 Produksi Susu (ribu ton)	IKP 5.3 Produksi susu (ribu ton)

NO	PN/PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
	Kegiatan Prioritas (KP) 11: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	
22	KP 02.10.11 Produksi Padi (juta ton)	IKP 1.1 Produksi Padi (juta ton)
23	KP 02.10.11 Produksi Jagung (juta ton)	IKP 1.2 Produksi Jagung (juta ton)
24	KP 02.10.11 Produksi Aneka Kacang (ribu ton)	IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang (ribu ton)
25	KP 02.10.11 Produksi Sorghum (ribu ton)	IKP 1.4 Produksi Sorghum (ribu ton)
26	KP 02.10.11 Produksi Ubi jalar (ton)	IKP 1.5 Produksi Ubi jalar (ton)
27	KP 02.10.11 Produksi Kedelai (ton)	IKP 1.6 Produksi Kedelai (ton)
	Kegiatan Prioritas (KP) 13: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan keamanan Pangan	
28	KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu (%)	IKK1.1 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu (%)
29	KP 02.10.13 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan (%)	IKP 7.1 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan (%)
	Kegiatan Prioritas (KP) 14: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	
30	KP 02.10.14 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi (komoditas)	IKK 1.1 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi (komoditas)
	Kegiatan Prioritas (KP) 16: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif	
31	KP 02.10.16 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi (lembaga)	IKK2 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi (lembaga)
32	KP 02.10.16 Persentase petani muda terhadap jumlah petani (%)	IKK 2.1 Persentase petani muda terhadap jumlah petani (%)
	Kegiatan Prioritas (KP) 17: Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	
33	KP 02.10.11 Produksi buah dan sayur (juta ton)	IKP.3.1 Produksi buah dan sayur (juta ton)
34	KP 02.10.17 Produksi Tanaman obat (ton)	IKP 3.2 Produksi Tanaman obat (ton)
35	KP 02.10.17 Produksi Florikultura (ribu tangkai)	IKP 3.3 Produksi Florikultura (ribu tangkai)
36	KP 02.10.17 Produksi Vanili (ton)	IKP 9.7 Produksi Vanili (ton)
37	KP 02.10.17 Produksi Lada (ton)	IKP 9.4 Produksi Lada (ton)
38	KP 02.10.17 Produksi Pala (ton)	IKP 9.5 Produksi Pala (ton)
39	KP 02.10.17 Produksi Cengkeh (ton)	IKP 9.6 Produksi Cengkeh (ton)
40	KP 02.10.17 Produksi Kopi (ton)	IKP 9.8 Produksi Kopi (ton)
41	KP 02.10.17 Produksi Tebu (ton)	IKP 9.9 Produksi Tebu (ton)
42	KP 02.10.17 Produksi Karet (ton)	IKP 9.10 Produksi Karet (ton)
43	KP 02.10.17 Produksi Kakao (ton)	IKP 9.11 Produksi Kakao (ton)
44	KP 02.10.17 Produksi Teh (ton)	IKP 9.12 Produksi Teh (ton)

NO	PN/PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
45	KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan (%)	IT.7 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan (%)
46	KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura (%)	IT.8 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura (%)
	KP 18: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	
47	KP 02.10.18 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan (Indeks)	IT.3 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan (Indeks)
48	KP 02.10.18 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan (%)	IKK 4.1 Proporsi Lahan Pertanian yang termasuk kriteria lahan produktif dan berkelanjutan (%)
49	KP 02.10.18 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	IKK 4.2 Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)
50	KP 02.10.18 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian (%)	IT.4 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian (%)
51	KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (varietas dan/atau galur)	IKK 3 Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (varietas dan/atau galur)
52	KP 02.10.18 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (aksesi)	IKK 1.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (aksesi)
	PP 15: Ekosistem Ekonomi Sirkular	
	KP 02: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	
53	KP 02.15.02 Persentase penurunan susut pangan (%)	IKK 3.1 Persentase penurunan susut pangan (%)
	PN 05: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
	PP 01: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	
	KP 05: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	
54	KP 05.01.05 Produksi Kelapa sawit (ton)	IKP 9.1 Produksi Kelapa Sawit (ton)
55	KP 05.01.05 Produksi bahan baku (CPO dan CPKO) (ton)	<i>Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, Produksi CPO dan CPKO sudah tidak menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pertanian</i>
	KP 06: Pengembangan Hilirisasi Kelapa	
56	KP 05.01.06 Produktivitas kelapa (ton/hektar)	IKSK 1.2 Produktivitas kelapa (ton/hektar)
57	KP 05.01.06 Produksi kelapa (ton)	IKP 9.2 Produksi Kelapa (ton)
	KP 08: Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	
58	KP 05.01.08 Produksi Sagu (ton)	IKP 9.3 Produksi Sagu (ton)
59	KP 05.01.08 Produktivitas Sagu (ton/hektar)	IKK 1.3 Produktivitas Sagu (ton/hektar)
60	KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu (ton)	IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu (ton)
61	KP 05.01.08 Produktivitas Ubi Kayu (ton/hektar)	IKK 1.1 Produktivitas Ubi Kayu (ton/hektar)
	PP 14: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	

NO	PN/PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
	KP 01: Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/wabah dan Penanganan Bencana	
62	KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan (kab/kota)	IKK 2.2 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan (kab/kota)
	PP 03: Pembangunan Berketahanan Iklim	
	KP 03: Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim	
63	KP 08.03.03 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian (%)	IT.5 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian (%)

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Dalam periode 2025–2029, Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis guna memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029 menjadi dokumen pengarah yang konkret dalam mendukung pencapaian target swasembada, dengan fokus pada peningkatan produksi komoditas utama melalui pendekatan sistematis yang mencakup intervensi hulu dan hilir. Kementerian Pertanian akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui cetak sawah/perluasan areal tanam, peningkatan IP/optimasi lahan, penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, modernisasi alat mesin pertanian, dan peningkatan produksi susu dan daging nasional (P2SDN). Proyek strategis nasional seperti pencetakan sawah dan revitalisasi bendungan akan menjadi bagian integral dari upaya ini, yang juga sekaligus mendukung target nasional dalam mengurangi ketergantungan pada impor pangan pokok.

Dalam mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana dicanangkan pemerintah, peningkatan nilai tambah produk pertanian juga menjadi sasaran penting. Hilirisasi tidak hanya dipandang sebagai strategi peningkatan pendapatan petani dan kontribusi ekspor, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam arti luas. Produk-produk strategis seperti kopi, kelapa, kakao, kelapa sawit, dan ubi kayu akan didorong untuk memasuki rantai pasok industri melalui penguatan kapasitas pascapanen, fasilitasi investasi, serta integrasi dengan pelaku usaha dan UMKM. Hal ini sejalan dengan target RPJMN dalam pengembangan agroindustri berbasis wilayah.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani dan pangan bergizi, strategi peningkatan produksi susu dan daging menjadi bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong didorong melalui program pembibitan dan investasi peternakan yang ramah iklim dengan mendorong pihak swasta untuk berinvestasi pada subsektor peternakan. Pada saat yang sama, Kementerian Pertanian juga menjalankan strategi ketahanan pangan berbasis komunitas

melalui optimalisasi pekarangan sebagai sumber pangan bergizi, mendukung pengurangan angka *stunting* dan peningkatan ketahanan pangan keluarga sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN.

Selain itu, guna mendukung transisi energi nasional dan mengurangi tekanan pada ekspor bahan mentah, program mandiri energi berbasis biodiesel akan diakselerasi dengan target peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Upaya ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri dan menstabilkan harga komoditas sawit secara global, yang sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak nabati dunia.

Dengan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi, Kementerian Pertanian menargetkan tercapainya swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, yang tidak hanya mendukung ketahanan nasional tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi rakyat.



Gambar 3. 8 Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian.

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. 9 Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029, atap atau tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, Kementerian Pertanian perlu mencapai kelima tujuan antara sebagai berikut:

1. **Kemandirian pangan asal pertanian**

Kemandirian berarti 2 (dua) hal yaitu mengurangi ketergantungan impor dan kemampuan menyediakan kebutuhan pangan mandiri. Melepaskan ketergantungan impor dalam berbagai sektor merupakan isu strategis yang dibahas dan diupayakan, termasuk sektor pertanian. Kondisi geopolitik global yang memanas menyebabkan terganggunya rantai pasok dan perdagangan global serta berpotensi meningkatkan risiko fluktuasi harga pangan. Tantangan yang perlu dijawab untuk menurunkan risiko tersebut adalah bagaimana Indonesia secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional agar kemandirian dapat terwujud.
2. **Pertumbuhan volume usaha pertanian**

Kesejahteraan petani bergantung pada 2 (dua) hal yaitu pendapatan dan pengeluaran petani. Pertumbuhan volume usaha petani berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan petani dimana volume usaha pertanian yang meningkat berkorelasi positif dengan pendapatan petani.
3. **Bahan baku bio energi**

Isu terkait bahan baku bio energi adalah bagaimana sektor pertanian dapat berkontribusi dalam ketahanan energi melalui penyediaan sumber energi alternatif. Beberapa komoditas pertanian seperti komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura berkontribusi terhadap penyediaan bahan baku tersebut. Tersedianya bahan baku bio energi asal pertanian diharapkan dapat berkontribusi untuk membantu transisi penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan di tingkat nasional.
4. **Nilai tambah dan daya saing produk pertanian**

Hilirisasi merupakan upaya transformatif yang giat dilaksanakan di tingkat nasional. Indonesia tidak lagi diharapkan menjual bahan baku namun menjual produk yang jadi dan siap dikonsumsi masyarakat, termasuk produk pertanian. Proses pengolahan bahan baku pada rantai pasok hulu menjadi produk yang siap konsumsi pada rantai pasok hilir akan meningkatkan nilai ekonomis produk pertanian. Pengolahan yang

tepat adalah proses penting untuk mendekat ke pasar (*close to market*), namun efisiensi rantai pasok adalah isu strategis berbeda. Rantai pasok yang efisien dari petani menuju ke pengguna akhir (*end customer*) akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan petani karena proses distribusi yang berkurang dan kontrol terhadap harga jual yang meningkat.

Peningkatan daya saing produk pertanian menitikberatkan pada persaingan terhadap produk pertanian sejenis dari negara lain. Penerimaan negara tujuan ekspor terhadap produk pertanian nasional dibanding produk pertanian negara lain merupakan tolok ukur daya saing. Standar mutu yang ketat dan pemenuhan standar teknis lainnya yang diprasyarakatkan perlu menjadi perhatian dalam penyiapan dan pemilihan produk serta negara tujuan ekspor.

5. Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Agar dapat mewujudkannya, maka harus dilakukan upaya kesehatan, yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari wabah atau penyakit menular melalui kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan pasca-wabah. Salah satu penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah adalah penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia. Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada solidnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Poin tujuan antara di atas dapat terlaksana jika koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga berjalan dengan efektif dan efisien. Dari sudut pandang Kementerian Pertanian, untuk dapat mewujudkan tujuan antara tersebut, maka pilar penyokong harus berdiri tegak. Berikut penjelasan mengenai pilar-pilar tersebut.

1. Pilar 1: Prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi

Pilar 1 (satu) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Prasarana dan sarana pertanian meliputi lahan pertanian, air untuk pertanian, pupuk dan pestisida untuk pertanian, serta alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan pra panen dan pasca panen. Peran Kementerian Pertanian dalam menyediakan, mendistribusikan serta menjamin kualitas prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi. Orientasi berbasis kebutuhan produksi berarti setiap proses penyediaan harus tepat dan akurat sesuai kebutuhan komoditas pertanian strategis nasional. Pendistribusian berarti ketepatan waktu dan ketepatan penyaluran prasarana dan sarana pertanian berdasarkan jenis komoditas dan sebaran wilayah tanam maupun panen nasional. Penjaminan kualitas yaitu memastikan bahwa prasarana dan sarana pertanian telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. Pilar 2: Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan

Pilar 2 (dua) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Modern dalam produksi dan produktivitas adalah perubahan paradigma penyelenggaraan pertanian dalam menggunakan sumber daya sebagai input (baik hayati dan non hayati) yang tepat sesuai kebutuhan. Dalam metode pertanian saat ini, sering disebut dengan pertanian presisi, yaitu metode pertanian yang menghasilkan output maksimal dengan input yang minimal serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hal tersebut mustahil terwujud tanpa pemanfaatan teknologi pertanian termutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan. Tantangan yang terjadi adalah bagaimana Kementerian Pertanian dapat mengidentifikasi teknologi yang tepat sesuai karakteristik petani nasional, meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya teknologi pertanian tersebut, dan memastikan petani dapat beradaptasi dan mampu menggunakan teknologi tersebut.

3. Pilar 3: Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) menuju Lumbung Pangan Nasional

Pilar 3 (tiga) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Untuk mewujudkan kemandirian pangan maka kebutuhan masyarakat wajib terpenuhi melalui produksi dalam negeri. Orientasi produksi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun jugaantisipasi kebutuhan pangan di masa mendatang. Pemerintah Indonesia meluncurkan program KSPP yaitu sentra produksi terintegrasi pangan untuk mendorong terciptanya lumbung pangan nasional. Ketersediaan lumbung pangan nasional diharapkan dapat menghindari masyarakat dari kerawanan pangan yang disebabkan baik faktor dalam negeri maupun faktor global.

4. Pilar 4: Pemanfaatan teknologi pertanian modern

Pilar 4 (empat) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Perkembangan penyelenggaraan pertanian global yang telah memasuki era *agriculture* 4.0 didorong oleh perkembangan teknologi. Peran kecerdasan buatan, berbagai sensor yang dapat membantu pengambilan keputusan. Teknologi pertanian tersebut perlu didorong pemanfaatannya dalam penyelenggaraan pertanian berkelanjutan nasional. Kementerian Pertanian tidak hanya mengambil peran dalam penyediaan teknologi pertanian dalam bentuk prasarana dan sarana pertanian, namun juga mendorong penggunaan teknologi tersebut oleh para petani.

Pemanfaatan teknologi pertanian modern tentunya akan berdampak terhadap budi daya pertanian dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian, sehingga akan meningkatkan ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri.

5. Pilar 5: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani

Pilar 5 (lima) berkontribusi terhadap pertumbuhan volume usaha pertanian. Pertumbuhan volume usaha tani dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu SDM pertanian dan produk pertanian. Profesi petani bukan pilihan mayoritas generasi muda sehingga di masa mendatang, ancaman kurangnya kuantitas petani berpotensi terjadi. Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak masif karena kebutuhan produk komoditas pertanian yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi global maupun nasional, membutuhkan lebih banyak modal, termasuk modal manusia. Faktor berikutnya yaitu kualitas usaha tani yang dipengaruhi

oleh pengetahuan dan kemampuan petani. Penyuluh pertanian memainkan peran strategis untuk meningkatkan keduanya dengan memberikan informasi, edukasi dan mendorong meningkatnya peningkatan serta adopsi teknologi dan metode pertanian mutakhir.

6. Pilar 6: Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian

Pilar 6 (enam) berkontribusi terhadap pertumbuhan volume usaha pertanian. Perlindungan usaha merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu petani menghadapi kesulitan dalam penyelenggaraan usaha tani. Perlindungan dilakukan dengan memberikan asuransi tani yang dapat mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun gangguan OPT. Akses pembiayaan sendiri merupakan stimulus yang diberikan kepada petani untuk pengembangan usaha pertanian. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menyediakan akses perlindungan dan pembiayaan serta mendorong pemanfaatan keduanya oleh petani atau usaha tani.

7. Pilar 7: Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional

Pilar 7 (tujuh) berkontribusi terhadap nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Hilirisasi komoditas meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian strategis melalui sistem pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien. Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk tidak lagi menjual bahan baku maupun produk setengah jadi, namun menjual produk yang siap konsumsi. Dengan menghasilkan produk yang siap konsumsi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani maupun usaha tani

8. Pilar 8: Sistem kesehatan hewan nasional

Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit hewan melalui edukasi dan pengendalian penyakit menular.

Fungsi edukasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman masyarakat mengenai jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada masyarakat. Pelaksanaan edukasi mengisi kekosongan yang selama ini terjadi dikarenakan ketiadaan fungsi dari penyelenggara negara, dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Pengendalian penyakit hewan, khususnya penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner.

Delapan pilar di atas dapat berdiri tegak jika didukung oleh fondasi yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis, terdapat 4 (empat) fondasi yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian yang produktif

Ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku pertanian berkelanjutan merupakan aset berharga yang perlu dimiliki. Kelembagaan pertanian dapat berkembang jika SDM pertanian tersedia dan kompeten. Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM Pertanian serta memfasilitasi pembentukan kelembagaan pertanian.

2. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian

Implementasi RB Kementerian Pertanian adalah untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas yang dapat mendorong tercapainya pembangunan

sektor pertanian. Implementasi RB nasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB General dan RB Tematik. Kementerian Pertanian tidak hanya berkontribusi melaksanakan RB General namun juga RB Tematik untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret dari pembangunan sektor pertanian.

3. Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian

Standardisasi produk dan praktik pertanian merupakan penyeragaman spesifikasi berdasarkan standar baku yang telah ditetapkan melalui regulasi. Standar baku tersebut memuat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi produk pertanian serta panduan untuk melaksanakan setiap tahapan dalam praktik pertanian nasional. Penyeragaman dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas produk pertanian maupun menjaga konsistensi implementasi praktik pertanian. Sertifikasi merepresentasikan jaminan tertulis terkait produk maupun praktik pertanian yang menyatakan keduanya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menjamin ketersediaan standar produk dan standar praktik pertanian berkelanjutan serta melakukan sertifikasi terhadap produk dan praktik pertanian berkelanjutan.

4. Tata kelola pertanian berkelanjutan (*Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices, dll*)

Tata kelola pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan pertanian modern yang berupaya menjamin akses generasi mendatang terhadap komoditas pertanian serta peningkatan kualitas, mutu dan keamanan komoditas pertanian. Dengan persaingan global yang semakin ketat, ketiganya merupakan trilogi yang harus dimiliki secara bersamaan untuk menciptakan daya saing produk pertanian. Kementerian Pertanian berkewajiban untuk menciptakan instrumen, memberikan edukasi kepada petani maupun kelompok tani mengenai sistem pertanian berkelanjutan, hingga mendorong implementasi pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan rumah strategi di atas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029. Terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat mewujudkan visi **“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”** di akhir periode perencanaan jangka menengah.

1. Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- **Strategi 1:** Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian.
- **Strategi 2:** Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (*human capital*) pertanian berbasis kompetensi.
- **Strategi 3:** Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional.
- **Strategi 4:** Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif.

2. Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- **Strategi 5:** Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
 - **Strategi 6:** Menerapkan tata Kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
 - **Strategi 7:** Membangun Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri.
 - **Strategi 8:** Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian.
 - **Strategi 9:** Pemanfaatan teknologi pertanian modern.
3. **Arah Kebijakan 3 “Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 10** “Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian”.
4. **Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 11** “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”
5. **Arah Kebijakan 5 “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 12** “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”
6. **Arah Kebijakan 6 “Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 13** “Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan *good government governance*.”

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan alat strategis untuk mengarahkan dan mengatur pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bernegara dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Penyusunannya dilakukan secara strategis dan terukur dengan mempertimbangkan efektivitas regulasi yang ada. Fungsi penyusunan kerangka regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- b. Memberikan gambaran umum tentang regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- c. Menjelaskan peran Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
- d. Menjadi dasar penyusunan matriks kerangka regulasi yang memuat arah dan kebutuhan regulasi secara terperinci.

Adapun tujuan dari penyusunan kerangka regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
- b. Memenuhi kebutuhan regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri/Lembaga
- c. Mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN
- d. Menyelesaikan permasalahan penting, mendesak, dan berdampak besar pada pencapaian pembangunan nasional

Penyusunan kerangka regulasi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Sejalan dengan Kebijakan Nasional:** selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.
- b. **Berlandaskan Konstitusi:** berbasis pada UUD Tahun 1945, RPJPN Tahun 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029.
- c. **Memfasilitasi dan Mengatur Masyarakat dan Penyelenggara Negara:** mendukung peran masyarakat dan penyelenggara negara dalam mewujudkan pembangunan nasional.
- d. **Berdasarkan Analisis dan Evaluasi Regulasi:** mempertimbangkan efektivitas regulasi yang ada, dengan:
 1. Tidak perlu regulasi baru jika regulasi lama sudah efektif.
 2. Membentuk/mengubah regulasi jika regulasi lama belum efektif/optimal.
- e. **Analisis Biaya dan Manfaat:** melibatkan analisis dampak, biaya, dan manfaat regulasi (CBA) bagi semua pemangku kepentingan.
 - I. Regulasi dibuat jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, atau
 - II. Jika regulasi tersebut adalah satu-satunya solusi untuk mencapai tujuan.
- f. **Asas Pembentukan dan Materi Peraturan Perundang-undangan:** memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- g. **Format Narasi dan Matriks:** disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan dituangkan dalam matriks kerangka regulasi.

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, maka dibutuhkan penguatan regulasi yang terdiri dari:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K).
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Sub-urusan Penyuluhan).
3. Revisi UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).
5. Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao.
6. Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa.
7. RUU Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi.
9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/ /2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
10. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/ /2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

11. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/ /2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Penjelasan lebih rinci terkait kerangka regulasi dituangkan dalam matriks kerangka regulasi yang disajikan dalam Lampiran 3.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan landasan fundamental bagi organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya. Dengan merancang dan menerapkan kerangka kelembagaan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk didalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, sasaran strategis, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Terdapat beberapa elemen kunci dari kerangka kelembagaan, seperti:

- a. **Fungsi dan Struktur Organisasi:** menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar unit organisasi untuk memastikan kelancaran operasi dan pencapaian tujuan.
- b. **Tata Laksana Antar Unit Organisasi:** merumuskan proses dan prosedur kerja yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit.
- c. **Pengelolaan Sumber Daya Manusia:** Menentukan kebutuhan SDM, baik kualitas maupun kuantitas, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Adapun penyusunan Kerangka Kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berikut:

- a. **Sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan visi Presiden:** mempertimbangkan visi dan agenda pembangunan jangka panjang RPJPN, prioritas pembangunan RPJMN, dan visi - misi Presiden.
- b. **Berlandaskan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan:** memperhatikan kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. **Berbasis Prinsip Organisasi yang Efektif, Efisien, dan Transparan:** membangun organisasi yang mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja dengan mempertimbangkan:
 - I. Pencapaian visi dan misi Kementerian/Lembaga.
 - II. Struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya.
 - III. Ketersediaan anggaran Kementerian/Lembaga.
- d. **Melalui Proses Evaluasi:** melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.

Penyusunan kerangka kelembagaan Kementerian Pertanian untuk periode Renstra 2025-2029 dilakukan melalui proses evaluasi terhadap SOTK Kementerian Pertanian saat ini. Proses evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait SOTK saat ini dalam mendukung capaian visi-misi Kementerian untuk periode berikutnya. Permasalahan terkait SOTK tersebut kemudian disusun desain kriteria organisasi yang dibutuhkan untuk pencapaian visi-misi Kementerian

Pertanian Periode Renstra 2025-2029. Berikut adalah kerangka kelembagaan Kementerian Pertanian untuk periode Renstra 2025-2029:

Tabel 3.4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Pertanian Periode Renstra 2025-2029

No	Permasalahan SOTK	Desain Kriteria Organisasi yang Dibutuhkan
1	Belum ada unit kerja khusus dalam melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon I di bawah Menteri yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan
2	Belum ada unit kerja khusus yang menangani pemuliaan benih tanaman (benih berkelanjutan)	
3	Penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan secara desentralisasi di Direktorat PPH Ditjen Tanaman Pangan, Direktorat PPH Ditjen Hortikultura, dan Direktorat PPH Ditjen Perkebunan	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon II di bawah 1 (satu) unit kerja eselon I yang menangani penjaminan mutu dan keamanan pangan secara terpusat (sentralisasi)
4	2 Direktorat pada Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, serta Perkebunan didesain berdasarkan kelompok komoditas pertanian, sehingga berpotensi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya jika komoditas yang menjadi kewenangan Direktorat tersebut tidak menjadi prioritas Kementerian Pertanian di tahun berjalan	Unit kerja setingkat eselon II di keempat Ditjen Komoditas sebaiknya didesain berdasarkan proses: (1) Perbenihan/ pembibitan (2) Penanaman, (3) penerapan praktik budidaya pertanian modern dan berkelanjutan, (4) perlindungan tanaman dan hewan, (5) panen komoditas pertanian
5	Tugas dan Fungsi penyuluhan merupakan salah satu tugas dan fungsi di BPPSDMP, sedangkan kewenangan penyuluhan di daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah	Dibutuhkan unit kerja yang setingkat UKE 1 yang menangani penyuluhan dan pembinaan penyuluh nasional (<i>corporate university</i>)
6	Belum ada unit kerja yang khusus yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi secara umum	Butuh unit kerja setingkat eselon I yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi
7	Adanya tumpang tindih dalam pengembangan SDM pertanian	Biro OSDMA akan menangani pengembangan SDM ASN Pertanian (internal dan eksternal Kementerian Pertanian) BPPSDMP akan menangani pengembangan SDM pertanian eksternal
8	Ada UPT di satu UKE 1 yang memiliki tusi lintas UKE 1 (BP MPT, BB PPMB TPH, BB POPT)	Revitalisasi UPT berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki

No	Permasalahan SOTK	Desain Kriteria Organisasi yang Dibutuhkan
9	Belum ada unit kerja khusus yang menangani adopsi teknologi <i>digital farming</i> menuju pertanian maju dan modern	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon 1 yang menangani adopsi teknologi <i>digital farming</i> menuju pertanian maju dan modern
10	Belum ada unit kerja yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian, seperti: <i>green house</i>	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon II yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian, seperti: <i>green house</i>
11	Penyediaan pupuk dan pestisida dilakukan juga oleh unit teknis	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon II yang menangani penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida secara terpusat
13	Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak → belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE 1	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I sebagai Otoritas Veteriner Nasional
		Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I yang menangani budi daya peternakan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Pertanian menyusun 7 (tujuh) sasaran program teknis yaitu: Meningkatnya pendapatan petani, terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan, meningkatya cadangan pangan nasional, meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian, meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan, dan 1 (satu) sasaran program dukungan manajemen yaitu Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Program-program tersebut akan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil *intermediate outcome* level 1 dari suatu rencana strategi K/L dan merupakan representasi dari telah tercapainya suatu Sasaran Strategis (SS). Sedangkan untuk Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian *intermediate outcome* level 2 dari suatu program. IKP kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) yaitu indikator keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan. Tabel 4.1 memperlihatkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis serta Target tahun 2025 – 2029 terkait 7 (tujuh) sasaran program teknis maupun 1 (satu) sasaran program dukungan manajemen.

Tabel 4. 1 Tabel Sasaran, Indikator, dan Target Kementerian Pertanian Tahun 2025 – 2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS 1: Meningkatnya pendapatan petani	IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	123,64	125,02	126,42	127,84	129,27
	IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	3,5	3,8	4	3,6	3,3
SS 2: Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas (%)	66	68	68	70	72
SS 3: Meningkatnya pangsa pasar (<i>market share</i>) produk ekspor pertanian	IKSS 3.1: <i>Market share</i> produk ekspor pertanian (%)	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85
SS 4: Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	IKSS 4.1: Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan (Indeks)	0,23	0,41	0,66	0,84	1
SS 5: Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	IKSS 5.1: Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi (%)	90	92	92	93	95

SS 6: Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia	IKSS 6.1: Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia (%)	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7
SS 7: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 7.1: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	86,98	88,17	89,77	90,67	91,28

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian Pertanian. Pemenuhan kebutuhan pendanaan berasal dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan sumber dana lainnya. Berikut ini beberapa kerangka pendanaan yang biasa digunakan antara lain:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK terdiri dari:
 - a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
 - b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
 - c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi pendanaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembiayaan melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Pertanian untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber dana SBSN yang berbasis syariah.
3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
Sumber pendanaan lain untuk pembangunan pertanian adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Pendanaan melalui pinjaman luar negeri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang dapat memberikan nilai tambah utamanya, yaitu (1) pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; (2) transformasi ekonomi dan percepatan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing; (3) peningkatan ekspor, yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial; (4) penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), ketahanan air dan pangan (*water and*

food security); (5) mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi.

Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Pertanian dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam Kementerian Pertanian. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan pada lampiran 1.

BAB V

PENUTUP

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029 yang mengandung Visi dan Misi Presiden serta Prioritas Nasional. Rencana Strategis Kementerian Pertanian memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang pertanian. Renstra Kementerian Pertanian menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP, dan IKK, untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra Kementerian Pertanian ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang pertanian yang hendak dicapai pada Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi satuan kerja dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; dan (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral. Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana. Untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak yang terkait.

Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pembangunan pertanian dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra dilakukan melalui manajemen risiko pembangunan pertanian, kajian kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi. Evaluasi pelaksanaan renstra dilaksanakan pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra dan pada tahun ke-5 pelaksanaan renstra.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 5.1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan		Indeks	Indikator baru	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85						
SP.6	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel														Eselon I Teknis
IKP 6.1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH		Indeks	Indikator baru	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90						
SP.7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel														Direktorat Jenderal PSP
IKP 7.1	Indeks tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal PSP		Indeks	0,815	0,870	0,873	0,875	0,878	0,880						
SP.8	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel														
IKP 8.1	Indeks tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal LIP		Indeks	Indikator baru	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85						
SP.9	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel														Eselon I Teknis
IKP 9.1	Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		Indeks	Indikator baru	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80						
SP.10	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel														Eselon I Teknis
IKP 10.1	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP		Indeks	Indikator baru	0,7798	0,7800	0,7802	0,7804	0,7806						
018.WA - Program Dukungan Manajemen										1.286.557,41	3.763.351,14	3.876.251,68	3.992.539,23	4.112.315,41	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA.01.1746.EBA.Z0 1	957 Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1	1	3.801,94	636,70	655,80	675,48	695,74	
1747 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian										4.681,88	7.004,36				
SK.1	Terwujudnya Layanan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian yang Prima	Pusat													Biro Kerja Sama luar Negeri
IKK 1.1	Persentase Progres Capaian Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian		%	86	86	86									
IKK 1.2	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Kerja Sama Luar Negeri Pertanian		Skala Likert	3,23	3,23	3,24									
018.WA.01.1747.AEC	Kerja Sama														
018.WA.01.1747.AEC.10 1	Kerjasama Luar Negeri Bidang Pertanian		Kesepakat an	14	12	11				4.681,88	7.004,36				
1747 Fasilitasi Kerja Sama Bidang Pertanian												7.214,49	7.430,93	7.653,85	
SK.1	Terwujudnya Layanan Kerja Sama Bidang Pertanian yang Prima	Pusat													Biro Kerja Sama Pertanian
IKK 1.1	Persentase Progres Capaian Kesepakatan Kerja Sama Bidang Pertanian		%	Indikator baru			90	90	90						
IKK 1.2	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Kerja Sama Pertanian		Skala Likert	Indikator baru			3,24	3,25	3,25						
018.WA.01.1747.AEC	Kerja Sama			Indikator baru											
018.WA.01.1747.AEC.10 2	Kerja Sama Bidang Pertanian		Kesepakat an	RO Baru			11	12	12	4.681,88	7.004,36	7.214,49	7.430,93	7.653,85	
1749 Pengelolaan Organisasi dan SDM										8.265,59	8.784,38	9.047,91	9.319,35	9.598,93	
SK 1	Terwujudnya Struktur Organisasi yang agile dan tepat ukuran serta terwujudnya sistem kerja baru di Lingkungan Kementerian Pertanian	Pusat													OSDMA
IKK 1.1	Persentase penyederhanaan struktur organisasi		%	100	100	100	100	100	100						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.2	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi		Nilai	5	5	5	5	5	5						
018.WA.01.1749.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA.01.1749.EBA.Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1	1	886,88	730,50	752,42	774,99	798,24	
SK 2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Pertanian dan penerapan sistem nilai BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Pertanian	Pusat													OSDMA
IKK 2.1	Indeks BerAKHLAK Kementerian Pertanian		%	68,91	80,00	80,05	81,00	81,5	82,00						
IKK 2.2	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pertanian		Nilai	4,69	4,70	4,70	4,70	4,71	4,75						
IKK 2.3	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Nilai	90,50	90,50	90,50	91,00	91,50	92,00						
018.WA.01.1749.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.01.1749.EBD.Z31	Layanan Reformasi Kinerja		Layanan	1	1	1	1	1	1	1.134,46	592,20	609,97	628,26	647,11	
SK 3	Meningkatnya implementasi sistem merit di lingkungan Kementerian Pertanian	Pusat													OSDMA
IKK 3.1	Indeks sistem merit		Nilai	273,50	287,00	292,00	297,00	302,00	308,00						
018.WA.01.1749.EBC	EBC Layanan Manajemen SDM Internal														
018.WA.01.1749.EBC.Z11	954 Layanan Manajemen SDM		Layanan/O rang	14.807,00	14.807,00	42.841,00	42.841,00	42.841,00	42.841,00	6.244,25	7.461,68	7.685,53	7.916,09	8.153,58	
1753 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian										21.182,88	25.229,30	25.986,18	26.765,76	27.568,74	
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Pusat													PPVTTP
IKK 1.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian		Skala Likert (1-4)	3,50	3,55	3,58	3,61	3,64	3,67						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.2	Tingkat Kepuasan Unit Kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian		Skala Likert (1-4)	3,50	3,55	3,58	3,61	3,64	3,67						
018.WA.01.1753.ADC	Sertifikasi Produk														
018.WA.01.1753.ADC.11 1	Sertifikat Hak Pelindungan Varietas Tanaman Pertanian		produk	83,00	100	70	80	80	80	1.380,20	983,84	1.013,35	1.043,75	1.075,07	
018.WA.01.1753.ADC.11 2	Sertifikat Pendaftaran Varietas Tanaman Pertanian		produk	225,00	300	160	170	180	180	1.383,00	485,40	499,96	514,96	530,41	
018.WA.01.1753.AEA	Koordinasi				8	6	6	6	6			-	-	-	
018.WA.01.1753.AEA.00 1	Koordinasi Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian		kegiatan	3,00	4					5.652,84		-	-	-	
018.WA.01.1753.AEA.11 1	Koordinasi Pelindungan Varietas dan Perizinan Pertanian		kegiatan	3,00		3	3	3	3		8.322,50	8.572,18	8.829,34	9.094,22	
018.WA.01.1753.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											-	-	-	
018.WA.01.1753.EBB.95 1	Layanan Sarana Internal		Unit/Paket	37	37	7	7	7	7	750,13	200,00	206,00	212,18	218,55	
018.WA.01.1753.EBB.97 1	Layanan Prasarana Internal		Unit/Paket				2	2	2	-	-	-	-	-	
018.WA.01.1753.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA.01.1753.EBA.99 4	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	1	11.426,7 1	12.334,56	12.704,59	13.085,7 3	13.478,3 0	
018.WA.01.1753.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan														
018.WA.01.1753.FAB.11 1	Sistem Informasi Pertanian		Sistem Informasi	10	11	3	3	3	3	590,00	455,00	468,65	482,71	497,19	
018.WA.01.1753.EBD	layanan Manajemen Kinerja Internal												-	-	
018.WA.01.1753.EBD.Z2 4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Rekomend asi	12	-	12	12	12	12	-	2.448,00	2.521,44	2.597,08	2.675,00	
4576 Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum							5,00	5,00	5,00	1.171.17 4,71	3.656.310, 75	3.766.000, 07	3.878.98 0,07	3.995.34 9,48	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 1	Terwujudnya Tata kelola Perencanaan yang baik	Pusat													Biro Perencanaan
IKK 1.1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan		%	79,02	79,22	79,42	79,62	79,82	80,02						
IKK 1.2	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan Biro Perencanaan		Skala Likert	3,28	3,30	3,33	3,36	3,38	3,41						
018.WA.01.4576.AEA.11 1	Koordinasi Kebijakan, Keuangan dan Umum		Kegiatan	Ro baru	8	72	72	72	72	7.236,76	37.141,31	38.255,55	39.403,2 1	40.585,3 1	
018.WA.01.4576.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		layanan		13	12	12	12	12	11.712,4 9	7.389,81	7.611,51	7.839,85	8.075,05	
018.WA.01.4576.EBD.Z2 3	Layanan Perencanaan dan Penggangan		Dokumen/ Layanan	103	1	1	1	1	1	6.962,78	810,00	834,30	859,33	885,11	
018.WA.01.4576.EBD.Z2 4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	18	34	34	34	34	34	4.749,72	6.579,81	6.777,21	6.980,52	7.189,94	
SK 2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan akuntabel	Pusat													Biro Keuangan dan BMN
IKK 2.1	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian		Opini	⁴ (WTP)	⁴ (WTP)	⁴ (WTP)	⁴ (WTP)	⁴ (WTP)	⁴ (WTP)	20.449,0 0		21.694,00	22.345,0 0	23.015,0 0	
IKK 2.2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Nilai	89,82	89,84	89,86	89,88	89,90	89,92	103,00		109,00	112,00	116,00	
IKK 2.3	Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan Keuangan dan BMN		Skala Likert (1-4)	3,41	3,42	3,44	3,46	3,48	3,50	915,00		3.340.556, 00	3.342.55 6,00	3.345.55 6,00	
018.WA.01.4576.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan		1	1	1	1	1	1.021.37 2,86	3.454.094, 25	3.557.717, 07	3.664.44 8,59	3.774.38 2,04	
018.WA.01.4576.EBA.99 4	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	1	1.021.37 2,86	3.454.094, 25	3.557.717, 07	3.664.44 8,59	3.774.38 2,04	
018.WA.01.4576.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				57	56	1	1	1	8.141,52	508,00	523,24	538,94	555,11	
018.WA.01.4576.EBD.Z2 6	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen/ Layanan	55	57	56	1	1	1	8.141,52	508,00	523,24	538,94	555,11	
SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN Kementerian Pertanian	Pusat													Biro Keuangan dan BMN

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 7.1	Rasio Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan		%	95	95	95	95	95	95						
IKK 7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian		Skala Likert (1-4)	N/A (Indikator baru)	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20						
018.WA.01.4576.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				16	16	18	19	20	2.547,25	3.600,00	3.708,00	3.819,24	3.933,82	
018.WA.01.4576.ABR.111	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian		Rekomendasi	16,00	16	16	18	19	20	2.547,25	3.600,00	3.708,00	3.819,24	3.933,82	
018.WA.01.4576.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Orang		13.840	11.155	11.155	11.155	11.155	2.077,25	4.462,00	4.595,86	4.733,74	4.875,75	
018.WA.01.4576.AEF.I01	layanan sosialisasi		Orang	Ro baru	13.840	11.155	11.155	11.155	11.155	2.077,25	4.462,00	4.595,86	4.733,74	4.875,75	
4577 Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan, dan Perpustakaan Pertanian										76.801,32	61.480,13	63.324,53	65.224,27	67.181,00	
SK 1	Terwujudnya SPBE Kementerian Pertanian dalam mendukung tranformasi pemerintahan digital	Pusat													
IKK 1.1	Indeks SPBE Kementerian Pertanian		indeks	4,00	4,26										
IKK 1.2	Indeks pemerintah digital		indeks	Indikator Baru		1,80	1,90	2,00	2,10						
IKK 1.3	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE (%)		%	Indikator Baru	3	4	5	5	5						
IKK 1.4	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral		indeks	Indikator Baru	3,28	3,36	3,43	3,51	3,59						
IKK 1.5	Indeks kepuasan pengguna layanan pusat data dan sistem informasi pertanian		indeks	3,33	3,54	3,56	3,57	3,59	3,61						
018.WA.01.4577.AEA.111	Koordinasi Data dan Informasi				1	1	1	1	1	127,70	502,73	517,81	533,35	549,35	
018.WA.01.4577.AEA.111.051	Pelaksanaan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	1	1	1	1	1	1	127,70	502,73	517,81	533,35	549,35	
018.WA.01.4577.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		layanan		1	1	1	1	1	33.956,39	30.682,85	31.603,34	32.551,44	33.527,98	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA.01.4577.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		layanan	1	1	1	1	1	1	8.066,65	8.904,84	9.171,99	9.447,15	9.730,56	
018.WA.01.4577.EBA.994	Layanan Perkantoran		layanan	1	1	1	1	1	1	25.889,74	21.778,01	22.431,35	23.104,29	23.797,42	
018.WA.01.4577.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				144	8	10	10	10	1.771,26	200,00	206,00	212,18	218,55	
018.WA.01.4577.EBB.951	951 - Layanan Sarana Internal		Unit	169	20	8	10	10	10	1.671,26	200,00	206,00	212,18	218,55	
018.WA.01.4577.EBB.971	971 - Layanan Prasarana Internal		M2	Ro baru	124	-	-	-	-	100,00	-				
018.WA.01.4577.FAB	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan				17	7	10	10	10	28.523,99	4.957,00	5.105,71	5.258,88	5.416,65	
018.WA.01.4577.FAB.971	001 - Sistem Informasi Pertanian		Sistem Informasi	Ro baru	17	7	10	10	10	28.523,99	4.957,08	5.105,79	5.258,96	5.416,73	
SK 2	Meningkatnya citra positif Kementerian Pertanian	Pusat													
IKK 2.1	Indeks citra positif Kementerian Pertanian		indeks	3,63	3,63	3,64	3,65	3,66	3,67			-	-	-	Biro Humas dan Informasi Publik
018.WA.01.4577.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				1	1	1	1	1	4.597,76	8.125,70	8.369,47	8.620,56	8.879,17	
018.WA.01.4577.EBA.Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1	1	4.597,76	8.125,71	8.369,48	8.620,56	8.879,18	
BAA.111	Layanan Publik Kepada Masyarakat				1										
BAA.	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		layanan	1	1					67,91					
BAB.	Pelayanan Publik Kepada Lembaga				1										
BAB.111	Layanan Publik Kepada Lembaga		layanan	1	1					22,43					
SK 3	Meningkatnya kepuasan Sakeholder terhadap Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	Pusat													
IKK 3.1	Indeks kepuasan Stakeholder terhadap layanan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi		Skala Likert	3,02	3,10	3,12	3,14	3,16	3,18			-	-	-	
018.WA.01.4577.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				1	1	1	1	1	7.733,90	17.011,85	17.522,20	18.047,87	18.589,31	
018.WA.01.4577.EBA.959	Layanan Protokol		layanan	1	1	1	1	1	1	7.733,90	17.011,85	17.522,20	18.047,87	18.589,31	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4578 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian										83.764,00	79.376,04	80.169,80	80.971,50	81.781,22	
SK 1	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I/II/III/IV	Pusat								33.080,49	36.725,23	37.092,48	37.463,40	37.838,04	Inspektorat I/II/III/IV
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I/II/III/IV		%	90	90	90,5	91	91,5	92	33.080,49	36.725,23	37.092,48	37.463,40	37.838,04	
4578.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										8.941,57	9.030,98	9.121,29	9.212,51	
4578.EBD.U10	Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat I		Laporan	50	26	30	30	30	30	2.205,51	2.633,90	2.660,24	2.686,84	2.713,71	
4578.EBD.U11	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan lingkup mitra Inspektorat I		Laporan	24	108	56	56	56	56	9.439,20	4.871,16	4.919,87	4.969,07	5.018,76	
4578.EBD.U12	Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat I		Laporan	2	4	6	6	6	6	998,81	1.436,51	1.450,87	1.465,38	1.480,04	
4578.EBD.U16	Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat II		Laporan	50	26	30	30	30	30	2.205,51	2.576,90	2.602,67	2.628,70	2.654,98	
4578.EBD.U17	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan lingkup mitra Inspektorat II		Laporan	24	70	56	56	56	56	6.118,00	4.871,16	4.919,87	4.969,07	5.018,76	
4578.EBD.U18	Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat II		Laporan	2	4	6	6	6	6	998,81	1.333,91	1.347,25	1.360,72	1.374,33	
4578.EBD.U22	Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat III		Laporan	51	23	31	31	31	31	1.877,87	2.706,16	2.733,22	2.760,55	2.788,15	
4578.EBD.U23	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan lingkup mitra Inspektorat III		Laporan	24	10	60	60	60	60	874,00	5.097,76	5.148,74	5.200,22	5.252,23	
4578.EBD.U24	Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat III		Laporan	3	5	8	8	8	8	788,46	1.335,58	1.348,93	1.362,42	1.376,05	
4578.EBD.U28	Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat IV		Laporan	51	26	31	31	31	31	2.205,51	2.763,16	2.790,79	2.818,69	2.846,88	
4578.EBD.U29	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan lingkup mitra Inspektorat IV		Laporan	24	50	60	60	60	60	4.370,00	5.097,76	5.148,74	5.200,22	5.252,23	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4578.EBD.U30	Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat IV		Laporan	4	4	10	10	10	10	998,81	2.001,28	2.021,29	2.041,51	2.061,92	
SK 2	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV									4.005,56	3.172,31	3.204,03	3.236,07	3.268,43	Inspektorat I/II/III/IV
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV		%	85	80	80,5	81	81,5	82	4.005,56	3.172,31	3.204,03	3.236,07	3.268,43	
4578.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
4578.EBD.U13	Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat I		Laporan	12	36	16	16	16	16	1.394,80	693,65	700,59	707,59	714,67	
4578.EBD.U19	Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat II		Laporan	12	24	16	16	16	16	929,87	605,11	611,16	617,27	623,45	
4578.EBD.U25	Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat III		Laporan	18	19	24	24	24	24	751,02	542,34	547,76	553,24	558,77	
4578.EBD.U31	Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat IV		Laporan	21	24	31	31	31	31	929,87	1.331,21	1.344,52	1.357,97	1.371,55	
SK 3	Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, IV, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV									41.488,6 7	29.100,00	29.391,00	29.684,9 1	29.981,7 6	
IKK 3.1	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, IV, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV.		Skala Likert	3,25	3,25	3,26	3,27	3,28	3,29						
4578.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal									41.488,6 7					
4578.EBD.015	Layanan Audit Internal Inspektorat I		Laporan	12	11					20.617,7 4					

[illegible]

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1760.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	24	1	1	1	1	1	873,04	2.077,95	2.119,93	2.161,82	2.204,70	
SK 2	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas intern									2.852,56	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	Sekretariat Inspektorat Jenderal
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal		%	90	90	90,5	91	91,5	92	2.852,56	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	Sekretariat Inspektorat Jenderal
1760.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1760.EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen/ Rekomend asi	46	25	18	18	18	18	2.852,56	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	
SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian									2.760,10	2.049,83	2.080,67	2.112,12	2.144,21	Sekretariat Inspektorat Jenderal
IKK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal		Nilai	95,07	95,07	95,12	95,17	95,22	95,27	2.760,10	2.049,83	2.080,67	2.112,12	2.144,21	Sekretariat Inspektorat Jenderal
1760.AEA	Koordinasi														
1760.AEA.952	Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran		Kegiatan	RO Baru		6,00	6,00	6,00	6,00		1.541,83	1.572,67	1.604,12	1.636,21	
1760.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1760.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penggangan		Dokumen	23	5					2.010,10	-	-	-	-	
1760.EBD.Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	1	1	1	1	1	1	750,00	508,00	508,00	508,00	508,00	
SK 4	Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian									3.600,00	3.511,44	2.910,60	3.205,56	3.213,88	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.1	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian		Nilai	3,00	3,25	3,26	3,27	3,28	3,29	3.600,00	3.511,44	2.910,60	3.205,56	3.213,88	Sekretariat Inspektorat Jenderal
1760.	Kerja sama														
1760.AEC.001	Kerja Sama Pengawasan		Kesepakatan	RO Baru	1	2	2	2	2		399,84	408,00	416,16	424,48	
1760.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1760.EBA.Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	RO Baru	1	1	1	1	1	198,32	781,20	781,20	781,20	781,20	
1760.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
1760.EBC.Z10	Layanan Manajemen SDM		Orang	RO Baru	58	291	292	293	294	161,97	814,80	851,20	851,20	851,20	
1760.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	RO Baru	480	240	120	180	180	3.000,00	1.318,20	672,80	959,60	959,60	
1760.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1760.EBD.Z31	Layanan Reformasi Kinerja		Layanan	RO Baru	1	1	1	1	1	239,71	197,40	197,40	197,40	197,40	
SK 5	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDitjen/Setba/Setlitjen									34.386,8 1	39.027,23	39.527,00	38.027,0 0	39.527,0 0	Sekretariat Inspektorat Jenderal
IKK 5.1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal		Skala Likert	3,25	3,25	3,26	3,27	3,28	3,29	34.386,8 1	39.027,23	41.027,23	38.027,2 3	39.527,2 3	Sekretariat Inspektorat Jenderal
1760.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
1760.CAN.036	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengawasan		Unit	1	1	1	1	-	-	4.775,10	4.500,00	4.500,00	-	-	
1760.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1760.EBA.Z01	Layanan Hukum		Layanan	12	1	1	1	1	1	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1760.EBA.Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	12	1	1	1	1	1	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	
1760.EBA.Z06	Layanan BMN		Layanan	12	1	1	1	1	1	139,00	480,00	480,00	480,00	480,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1760.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	24	1	1	1	1	1	28.089,8 1	30.569,03	32.069,03	33.569,0 3	35.069,0 3	
1760.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1760.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	2	2	297	297	297	297	724,90	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1760.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1760.EBD.Z33	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Layanan			1	1	1	1		120,20	120,20	120,20	120,20	
1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan										128.107,02	106.811,27	144.407,45	149.080,74	154.793,21	Setdirjen TP
SK 1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal									10.668,79	1.958,00	11.722,30	11.870,62	12.026,35	
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TP		%	90	90	91	92	93	94,00	1.912,78	1.450,00	2.966,30	3.114,61	3.270,34	
018.WA.1766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.1766.EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Rekomendasi	54	44	8	44	44	44,00	1.912,78	1.450,00	2.966,30	3.114,61	3.270,34	
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TP		%	85	85	86	87	88	89,00	8.756,01	508,00	8.756,01	8.756,01	8.756,01	
018.WA.1766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.1766.EBD.Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	68	84	1	84	84	84,00	8.756,01	508,00	8.756,01	8.756,01	8.756,01	
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian									14.826,18	13.331,65	21.816,33	22.721,92	23.672,72	
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TP		Nilai	87,25	87,70	88,15	88,60	89,05	89,50	14.826,18	13.331,65	21.816,33	22.721,92	23.672,72	
018.WA.1766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.1766.EBD.Z23	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	67	35	17	17	17	17,00	10.900,41	-	18.112,11	19.017,70	19.968,50	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA.1766.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA.1766.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	2	3	1	3	3	3,00	3.925,77	13.331,65	3.704,22	3.704,22	3.704,22	
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan									349,97	458,00	458,00	458,00	458,00	
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen TP		Likert	3,60	3,60	3,65	3,68	3,70	3,72	349,97	458,00	458,00	458,00	458,00	
018.WA.1766.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA.1766.EBA.Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	349,97	458,00	458,00	458,00	458,00	
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal									102.262,09	91.063,62	110.410,81	114.030,20	118.636,14	
IKK 4.1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen TP		Likert	3,28	3,28	3,29	3,30	3,31	3,32	102.262,09	91.063,62	110.410,81	114.030,20	118.636,14	
018.WA.1766.ACD	Perizinan Lembaga														
018.WA.1766.ACD.001	Perizinan Lembaga Bidang Tanaman Pangan		Badan Usaha	RO Baru	3	4	4	5	5,00	449,69	750,00	750,00	750,00	750,00	
018.WA.1766.AEC	Kerja Sama														
018.WA.1766.AEC.001	Pengelolaan Layanan Kerja Sama		Kesepakatan	15	2	5	4	4	4,00	500	2.674	750	750	750	
018.WA.1766.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA.1766.EBA.Z06	Layanan BMN		Layanan	4	1	1	1	1	1,00	143	480	480	480	480	
018.WA.1766.EBA.Z01	Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1	1,00	588,61	648,80	750,00	750,00	750,00	
018.WA.1766.EBA.Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1	1,00	178,40	135,41	178,40	178,40	178,40	
018.WA.1766.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	RO Baru	34	1	1	1	1,00	11.681,73	800,00	11.681,73	11.681,73	11.681,73	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA.1766.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	3	5	3	5	5	5,00	78.561,2 3	83.180,21	83.180,21	86.533,6 5	90.860,3 3	
018.WA.1766.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
018.WA.1766.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	329	125	3	128	128	128,00	5.921,41	185,23	5.921,41	5.921,41	5.921,41	
018.WA.1766.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	14	17	3	17	17	17,00	3.059,31	214,77	3.372,88	3.541,53	3.718,60	
018.WA.1766.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
018.WA.1766.EBC.Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang	RO Baru	562	642	562	562	562,00	1.158,36	1.075,00	1.946,19	2.043,50	2.145,67	
018.WA.1766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.1766.EBD.Z33	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Layanan	RO Baru	1	1	1	1	1,00	20,07	120,20	600,00	600,00	600,00	
018.WA.1766.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan														
018.WA.1766.FAB.001	Sistem Informasi Tanaman Pangan		Sistem Informasi	RO Baru	-	1	1	1	1	-	800	800	800	800	
1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura										57.810,3 5	75.204,48	67.486,00	70.486,0 0	73.286,0 0	Setditjen Hortikultura
SK.1	Ditindaklanjuti nya hasil temuan pengawas internal dan eksternal														Setditjen Hortikultura
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura		%	92,82	92,83	92,84	92,85	92,86	92,87						Setditjen Hortikultura
018.WA.1774.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.1774.EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	10	15	38	38	38	38						
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura		%	-	87	87	88	88	89						Setditjen Hortikultura

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA.1774.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1	1						
018.WA.1774.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	1						
018.WA.1774.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
018.WA.1774.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1	1						
018.WA.1774.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1	1						
018.WA.1774.AEA	Koordinasi														
018.WA.1774.AEA.021	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan		Kegiatan	-	15	15	20	20	20						
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan										108.999,40	127.716,38	128.216,38	128.216,38	128.216,38	Ditjen Perkebunan
SK 1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawasan internal dan eksternal														Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan		%	-	85	85	88	88	90						
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan		%	-	90	90	90	90	90						
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1780.EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	2	7	22	22	22	22						
1780.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat		Dokumen	4	5	26	26	26	26						
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1780.EBA.Z06	- Layanan BMN		Layanan	1	1	1	1	1	1						
1780.EBA.Z07	- Layanan BMN UPT Pusat		Layanan	4	4	4	4	4	4						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan														Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan		Nilai	89,70	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00						
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	89,00	11,00	-	-	-	-						
1780.EBD.Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	1	9	1	1	1	1						
1780.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan UPT Pusat		Dokumen	4	4	4	4	4	4						
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan														Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan		Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3	3	3	3	3						
IKK 3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya		Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3						
IKK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon		Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3						
IKK 3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan		Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak		Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3						
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1780.EBA.Z01	Layanan Hukum		Layanan	2	2	3	3	3	3						
1780.EBA.Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1	1						
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1	1						
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan														Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKK 4.1	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan		Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3						
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1780.EBA.Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1	1						
1780.EBA.994	Layanan perkantoran		Layanan	5	5	5	5	5	5						
1780.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	5	5	5	5	5	5						
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1780.EBD.Z33	- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Dokumen	1	1	1	1	1	1						
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
1780.EBC.Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang	840	759	991	991	991	991						
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	3	1	2	2	2	2						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1780.EBB.952	Layanan Prasarana Internal		Unit	2	-	-	1	1	1						
1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan			Satuan	Baseline						486.232,71	560.150,54	651.619,82	696.115,69	704.729,66	Sekretariat Ditjen PKH
SK 1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal									2.129,83	3.262,41	3.563,37	3.564,18	3.764,21	
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH		%	94,15	94,15	94,25	94,35	94,45	94,50						
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH		%	85	85	86	86	87	87						
018.06.WA.1787.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.06.WA.1787.EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		dokumen	126	11	15	15	15	15	2.129,83	2.927,74	2.969,48	2.969,48	2.969,48	
018.06.WA.1787.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah		dokumen	RO baru	-	56	56	56	56		334,67	593,89	594,71	794,73	
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian									13.704,85	1.859,00	2.643,22	4.365,28	5.575,22	
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH		Nilai	90,67	90,70	90,75	90,80	90,85	90,90						
018.06.WA.1787.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.06.WA.1787.EBD.Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	239	1	1	1	1	1	7.078,71	400,00	450,00	460,00	470,00	
018.06.WA.1787.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan Kantor Daerah/Provinsi		Layanan	RO baru	-	61	61	61	61	-	1.159,00	1.564,33	2.876,39	3.876,33	
018.06.WA.1787.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	396	13	-	-	-	-	6.138,64					
018.06.WA.1787.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.06.WA.1787.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	131	240	-	-	-	-	487,50					
018.06.WA.1787.EBA.Z06	Layanan BMN		Layanan	RO baru	1	1	1	1	1	-	300,00	628,89	1.028,89	1.228,89	
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen/Badan di lingkungan Kementerian Pertanian									450.699,73	545.355,29	627.961,38	666.734,38	671.828,38	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.24	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen PKH		Skala likert	4	4	4	4	4	4						
018.06.WA.1787.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.06.WA.1787.EBA 957	Layanan Hukum		Layanan	1	1	-	-	-	-	3.060,49					
018.06.WA.1787.EBA Z01	Layanan Hukum		Layanan	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
018.06.WA.1787.EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	5	1	-	-	-	-	133,21					
018.06.WA.1787.EBA Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	RO baru	-	1	1	1	1		276,16	471,86	321,86	521,86	
018.06.WA.1787.EBA 963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	37	39	39	39	39	39	3.239,50	3.340,09	3.647,35	6.757,35	6.875,35	
018.06.WA.1787.EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	23	1	-	-	-	-	950,00					
018.06.WA.1787.EBA Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	RO baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.06.WA.1787.EBA 969	Layanan Bantuan Hukum		Layanan	1	6	-	-	-	-	150,42	-	-	-	-	
018.06.WA.1787.EBA 994	Layanan Perkantoran		Layanan	47	45	1	1	1	1	443.166,12	541.739,04	623.842,17	659.655,17	664.431,17	
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH									19.698,30	9.673,85	17.451,85	21.451,85	23.561,85	
IKK 4.1	Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH		Skala likert	3,28	3,28	3,30	3,35	3,40	3,45						
018.06.WA.1787.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.06.WA.1787.EBA 962	Layanan Umum		Layanan	2	28	1	1	1	1	15.921,76	8.673,85	13.405,29	14.405,29	15.515,29	
018.06.WA.1787.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
018.06.WA.1787.EBB 951	Layanan Sarana Internal		Unit	14	1	3	6	6	6	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
018.06.WA.1787.EBC	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal														
018.06.WA.1787.EBC 954	Layanan Manajemen SDM		Orang	RO baru	1.823					2.276,55					
018.06.WA.1787.EBC Z13	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia		Orang	RO baru	-	125	3.040	3.133	3.236		500,00	2.546,56	5.546,56	6.546,56	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	018.WA.1797 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian									138.382	70.737	183.344	186.834	190.484	Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
SK 1	Ditindaklanjuti nya hasil temuan pengawas internal dan eksternal														Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		%	95,5	95,5	96	96	96,5	97						
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		%	91,6	91,6	92	92	92,5	93						
018.WA.1797.EBD	Layanan manajemen kinerja internal														
018.WA.1797.EBD.Z24	Layanan pemantauan dan evaluasi		Dokumen	0	0	48	49	50	52	0	6.230	7.865	7.905	8.040	
018.WA.1797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan	13	23	0	0	0	0	6.493	0	0	0	0	
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian														Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Nilai	85,8	86	87	88	89	90						
018.WA.1797.EBA	Layanan dukungan manajemen internal														
018.WA.1797.EBA.994	Layanan perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	1	41.306	41.792	48.379	48.979	49.228	
018.WA.1797.EBD	Layanan manajemen kinerja internal														
018.WA.1797.EBD.Z26	Layanan manajemen keuangan		Dokumen	0	0	15	15	16	16	0	8.978	49.376	49.576	50.434	
018.WA.1797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	94	30	0	0	0	0	49.251	0	0	0	0	
018.WA.1797.EBD.Z27	Layanan manajemen keuangan daerah		Dokumen	RO Baru	0	73	75	77	79	0	5.598	6.581	6.981	7.028	
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal PSP di lingkungan Kementerian Pertanian														Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Skala Likert (1-4)	3,29	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5						
018.WA.1797.FAB	Sistem informasi pemerintahan														
018.WA.1797.FAB.001	Sistem informasi prasarana dan sarana pertanian		Layanan	5	1	1	1	1	1	500	300	580	680	705	
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PSP														Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
IKK 4.1	Tingkat kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Skala Likert (1-4)	3,34	3,34	3,4	3,4	3,4	3,5						
018.WA.1797.EBA	Layanan dukungan manajemen internal														
018.WA.1797.EBA.Z01	Layanan hukum		Layanan		0	7	1	1	1	0	193	3.520	3.920	4.058	
018.WA.1797.EBA.957	Layanan hukum		Layanan	2	1	0	0	0	0	800	0	0	0	0	
018.WA.1797.EBA.Z02	Layanan hubungan masyarakat dan informasi		Layanan		0	6	6	6	6	0	458	4.026	4.126	4.295	
018.WA.1797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	6	0	0	0	0	979	0	0	0	0	
018.WA.1797.EBA.Z08	Layanan organisasi dan tata kelola internal		Layanan		0	1	1	1	1	0	699	7.186	7.386	7.625	
018.WA.1797.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	0	0	0	0	3.497	0	0	0	0	
018.WA.1797.EBA.962	Layanan umum		Layanan	2	2	2	2	2	2	22.046	4.791	30.353	31.353	32.324	
018.WA.1797.EBA.963	Layanan data dan informasi		Layanan	2	2	2	2	2	2	2.997	817	6.346	6.446	6.963	
018.WA.1797.EBA.Z06	Layanan BMN		Layanan	RO Baru	0	1	1	1	1	0	480	766	866	951	
018.WA.1797.EBB	Layanan sarana dan prasarana internal														
018.WA.1797.EBB.951	Layanan sarana internal		Unit	7	7	7	7	7	7	1.000	400	2.000	2.150	2.323	
018.WA.1797.EBD	Layanan manajemen kinerja internal														
018.WA.1797.EBD.Z23	Layanan perencanaan dan penganggaran		Dokumen	0	0	0	13	13	13	0	0	16.366	16.466	16.513	
018.WA.1797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan	14	13	0	0	0	0	9.514	0	0	0	0	
7924 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen LIP			Layanan		1					26.590,50	53.368,28	49.093,00	53.330,95	53.328,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 1	Ditindaklanjuti hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal									4.407,21	14.940,40	14.780,15	19.663,09	19.660,14	
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen LIP		%		65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	1.069,78	3.940,40	3.780,15	3.663,09	3.660,14	
018.WA .03.7924.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA .03.7924.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	722,27	2.640,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
018.WA .03.7924.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA .03.7924.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Layanan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	347,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
018.WA .03.7924.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan														
018.WA .03.7924.FAB.999	Sistem Informasi Lahan dan Irigasi Pertanian		Sistem Informasi		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	100,40	180,15	63,09	60,14	
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen LIP		%		85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	3.337,44	11.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	
018.WA .03.7924.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA .03.7924.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	3.337,44	11.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen LIP									3.334,30	3.315,00	3.315,00	2.670,00	2.670,00	
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen LIP		Nilai		85,00	85,00	85,50	85,50	86,00	3.334,30	3.315,00	3.315,00	2.670,00	2.670,00	
018.WA .03.7924.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA .03.7924.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3.334,30	3.315,00	3.315,00	2.670,00	2.670,00	
018.WA .03.7924.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-	16.000,00	-	16.000,00	
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen LIP									296,00	458,00	458,00	458,00	458,00	
IKK 3.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen LIP		Skala Likert		3,00	3,20	3,30	3,40	3,50	296,00	458,00	458,00	458,00	458,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA .03.7924.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA .03.7924.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	296,00	458,00	458,00	458,00	458,00	
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen LIP									18.552,99	34.654,88	30.539,86	30.539,86	30.539,86	
IKK 4.1	Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen LIP		Skala Likert	3,20	3,30	3,30	3,40	3,40	3,50	18.552,99	34.654,88	30.539,86	30.539,86	30.539,86	
018.WA .03.7924.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA .03.7924.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	536,02	874,25	874,25	874,25	874,25	
018.WA .03.7924.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
018.WA .03.7924.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	7.323,67	1.600,00	420,00	420,00	420,00	
018.WA .03.7924.EBB.9xx	Layanan Prasarana Internal		m2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.WA .03.7924.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA .03.7924.EBA.962	Layanan Hukum		Layanan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	192,50	192,50	192,50	192,50	
018.WA .03.7924.EBA.957	Layanan Umum		Layanan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.832,94	8.298,64	5.363,62	5.363,62	5.363,62	
018.WA .03.7924.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.660,35	23.689,49	23.689,49	23.689,49	23.689,49	
6918 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		Pusat								735.488,64	760.935,21	966.779,64	1.015.119,37	1.065.877,29	
SK 1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal														SetDitjen/ SetBadan/ Setltjen Biro/Pusat dibawah koordinasi Setjen

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian														
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		Nilai	3,60	3,60	3,65	3,69	3,74	3,78	94.793,5 1	25.450,47	31.174,48	32.734,0 5	34.371,3 5	BRMP
018.WA.09.6918.AEA	Koordinasi														
018.WA.09.6918.AEA.001	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		Kegiatan	63,00	63,00	-	-	-	-	75.042,9 8	-	-	-	-	
018.WA.09.6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA.09.6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	4,00	64,00	-	-	-	-	2.135,95	-	-	-	-	
018.WA.09.6918.EBA.Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon I)		Layanan	4,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	458,00	458,00	458,00	458,00	
018.WA.09.6918.EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)		Layanan	4,00	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	1.165,60	6.156,00	6.487,00	6.834,00	
018.WA.09.6918.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	998,36	1.039,00	1.091,48	1.146,05	1.203,35	
018.WA.09.6918.AEC	Kerja sama														
018.WA.09.6918.AEC.502	Layanan Kerjasama		Kegiatan	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	16.616,2 2	22.787,87	23.469,00	24.643,0 0	25.876,0 0	
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian														SetDitjen/ SetBadan/ SetItjen
IKK 4.1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP		Nilai	Indikator Baru	3,26	3,28	3,30	3,32	3,34	630.404, 43	728.474,63	910.141,1 7	955.648, 33	1.003.43 1,94	BRMP
018.WA.09.6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA.09.6918.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	15,00	64,00	-	-	-	-	1.110,00	-	-	-	-	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA.09.6918.EBA.Z06	Layanan BMN (Eselon I)		Layanan	15,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	480,00	480,00	480,00	480,00	
018.WA.09.6918.EBA.Z07	Layanan BMN (Eselon II ke bawah)		Layanan	15,00	-	64,00	64,00	64,00	64,00	-	628,00	744,00	805,00	869,00	
018.WA.09.6918.EBA.957	Layanan Hukum		Layanan	1,00	1,00	-	-	-	-	321,49	-	-	-	-	
018.WA.09.6918.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1,00	1,00	-	-	-	-	310,50	-	-	-	-	
018.WA.09.6918.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	16.477,75	61.513,07	60.199,17	63.208,33	66.368,94	
018.WA.09.6918.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	605.980,63	657.735,02	755.129,00	792.885,00	832.530,00	
018.WA.09.6918.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
018.WA.09.6918.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	64,00	-	212,00	223,00	234,00	246,00	-	3.540,18	29.390,00	30.860,00	32.403,00	
018.WA.09.6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	64,00	-	-	64,00	64,00	64,00	-	-	50.101,00	52.606,00	55.237,00	
018.WA.09.6918.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
018.WA.09.6918.EBC.Z12	Layanan Manajemen SDM		Orang	721,00	3.501,00	4.632,00	4.863,60	5.106,78	5.362,12	3.100,00	1.803,59	10.791,00	11.331,00	11.897,00	
018.WA.09.6918.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	57,00	26,00	490,00	515,00	541,00	568,00	2.500,00	2.577,37	2.756,00	2.894,00	3.039,00	
018.WA.09.6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.09.6918.EBD.Z31	Layanan Reformasi Kinerja		Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	429,06	197,40	551,00	579,00	608,00	
018.WA.09.6918.EBD.974	Penyelenggaraan Kearsipan		Layanan	RO Baru	1,00	-	-	-	-	175,00	-	-	-	-	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian										303.688,924	3.310.859,797	3.866.553,010	4.235.848,511	4.667.956,018	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas intern	Pusat								1.912,54	-	-	-	-	Sekretariat Badan PPSDMP
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP		%	90	90,00	90,40	90,60	90,80	91,00						
018.WA.1813.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.1813.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	21	15	-	-	-	-	1.912,54	-	-	-	-	
SK 2	Ditindaklanjuti hasil temuan BPK	Pusat								2.223,77	-	-	-	-	Sekretariat Badan PPSDMP
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP		%	85,00	87,00	87,40	87,60	87,80	88,00						
018.WA.1813.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.1813.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	3	22	-	-	-	-	2.223,77	-	-	-	-	
SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BPPSDMP	Pusat								10.144,2 2	8.542,04	9.396,01	10.335,5 1	11.369,4 0	Sekretariat Badan PPSDMP
IKK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan PPSDMP		%	94,09	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA.1813.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
018.WA.1813.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan	7	10	-	-	-	-	10.144,2 2	-	-	-	-	
018.WA.1813.EBD.Z35	Layanan Manajemen Kinerja		Layanan	Ro baru	-	10	10	10	10	-	8.542,04	9.396,01	10.335,5 1	11.369,4 0	
SK 4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP	Pusat								877,00	1.458,00	4.604,00	4.964,00	5.341,00	Sekretariat Badan PPSDMP
IKK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan PPSDMP		Skala Likert (1-4)	Indikator baru	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64						
018.WA.1813.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat														
018.WA.1813.BAA.003	Layanan Publik BPPSDMP Kepada Masyarakat		Layanan	Ro baru	-	-	1	1	1	-	-	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
018.WA.1813.BAB	Pelayanan Publik kepada Lembaga														
018.WA.1813.BAB.002	Layanan Publik BPPSDMP Kepada Lembaga		Layanan	Ro baru	-	-	1	1	1	-	-	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
018.WA.1813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA.1813.EBA.957	Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1	1	725,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA.1813.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	325	1.275	170	170	170	170	15.659,4 9	13.000,00	15.800,00	16.030,0 0	17.803,0 0	
018.WA.1813.AEA	Koordinasi														
018.WA.1813.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	Ro baru	-	1	1	1	1	-	5.958,00	8.500,00	9.300,00	9.500,00	
SK 6	Terlaksananya Rencana Aksi RB oleh Badan PPSDMP	Pusat								748,74	1.000,00	2.100,00	2.210,00	2.331,00	Sekretariat Badan PPSDMP
IKK 6.1	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB terhadap total Rencana Aksi RB sesuai kewenangan Badan PPSDMP		%	Indikator baru	100	100	100	100	100						
018.WA.1813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
018.WA.1813.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1,00	1	1	1	1	1	748,74	1.000,00	2.100,00	2.210,00	2.331,00	
SK 7	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian	UPT								4.005,20	1.771,00	12.648,00	17.759,0 0	19.470,0 0	Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
IKK 7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian		Skala Likert (1-4)	Indikator baru	3,56	3,58	3,60	3,62	3,66						
018.WA.1813.AEA	Koordinasi														
018.WA.1813.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	Ro baru	1	-	1	1	1	266,20	-	2.250,00	3.250,00	4.000,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA.1813.AEC	Kerja Sama														
018.WA.1813.AEC.001	Kerja sama di bidang perpustakaan dan literasi pertanian		Kegiatan	Ro baru	-	-	1	1	1	-	-	2.360,00	3.866,00	4.112,00	
018.WA.1813.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat														
018.WA.1813.BAA.001	Layanan Publik BB Pustaka Kepada Masyarakat		Orang	Ro baru	100.00 0	100.00 0	100.00 0	100.00 0	100.00 0	3.539,00	1.606,00	5.606,00	6.693,00	7.138,00	
018.WA.1813.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga														
018.WA.1813.BAB.001	Layanan Publik BB Pustaka Kepada Lembaga		Layanan	Ro baru	6	5	5	5	5	200,00	165,00	2.432,00	3.950,00	4.220,00	
SK 8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian	UPT		Indikator baru						1.189,00	886,00	7.267,00	9.888,00	13.521,0 0	Museum Tanah dan Pertanian
IKK 8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian		Skala Likert (1-4)	Indikator baru	3,56	3,58	3,60	3,62	3,66						
IKK 8.2	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan museum tanah yang dikelola		Orang	Indikator baru	12.200	10.000	25.000	27.000	30.000						
018.WA.1813.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat														
018.WA.1813.BAA.002	Layanan Publik Museum Tanah dan Pertanian Kepada Masyarakat		Orang	Ro baru	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	989,00	886,00	2.275,00	3.072,00	4.579,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 8.3	Jumlah koleksi museum yang dikelola		Unit	Indikator Baru	1	2	2	2	3						
IKK 8.4	Jumlah koleksi museum yang dilindungi		Unit	Indikator Baru	3	5	5	5	5						
018.WA.1813.AEA	Koordinasi														
018.WA.1813.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	Ro baru	1	-	1	1	1	200,00	-	2.482,00	3.700,00	4.620,00	
018.WA.1813.AEC	Kerja Sama														
018.WA.1813.AEC.002	Kerja sama di bidang museum tanah dan pertanian		Kegiatan	Ro baru	-	-	1	1	1	-	-	2.510,00	3.116,00	4.322,00	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS										23.344.029,58	23.814.710,21	41.940.154,08	42.934.701,11	43.988.922,61	
SP.1	Terpenuhinya Produksi Komoditas Tanaman Pangan dalam negeri														Ditjen TP (Akabi dan Serealia)
IKP 1.1	Produksi Padi		Juta Ton	53,98	54,45	54,85	55,27	55,68	56,05						
IKP 1.2	Produksi Jagung		Juta Ton	19,56	21,48	22,51	23,58	24,71	25,89						
IKP 1.3	Produksi Aneka Kacang		Ribu Ton	516,11	540,28	552,84	565,70	578,86	592,32						
IKP 1.4	Produksi Sorghum		Ribu Ton	17,34	18,21	18,40	18,58	18,77	18,95						
IKP 1.5	Produksi Ubi jalar		Ton	1.430.341,00	1.517.449	1.562.972	1.609.861	1.658.157	1.707.902						
IKP 1.6	Produksi Kedelai		Ton	349.099,00	370.359	381.470	392.914	404.701	416.842						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 1.7	Produksi Ubi Kayu		Ribu Ton	16.764.2 27,00	17.270 ,93	17.529, 99	17.792 ,94	18.059 ,83	18.330 ,73						
SP. 2	Meningkatnya produksi komoditas TP prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian														Ditjen TP (Serealia)
IKP 2.1	Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah		Ton	Indikator Baru	196.98 4	844.36 2	1.332. 808	1.821. 255	2.309. 701						
IKP 2.2	Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan		Ton	Indikator Baru	65.724	443.78 4	1.375. 883	2.307. 982	3.240. 081						
IKP 2.3	Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur		Ton	Indikator Baru	33.624	71.324	126.88 9	182.45 4	238.02 0						
IKP 2.4	Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur		Ton	Indikator Baru	49.100	60.687	81.260	117.17 7	181.03 8						
IKP 2.5	Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua		Ton	Indikator Baru	1.310	3.847	6.535	9.382	12.393						
IKP 2.6	Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan		Ton	Indikator Baru	-	964.00 0	2.121. 000	3.168. 000	3.719. 000						
SP.3	Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri														
IKP 3.1	Produksi Buah dan Sayur		Juta Ton	28,52	30,66	31,85	33,04	34,25	35,47						
IKP 3.2	Produksi Tanaman obat		Ton	495.767, 00	529.52 3,45	532.17 1,06	534.83 1,92	537.50 6,08	540.19 3,61						
IKP 3.3	Produksi Florikultura		Ribu Tangkai	667.755, 00	597.62 2,50	597.45 9,16	597.29 5,82	597.13 2,48	596.96 9,14						
SP.4	Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian														Ditjen Hortikultura
IKP 4.1	Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara		ton	481,00	25.840	33.440	41.040	48.640	56.240						
SP.5	Terpenuhinya produksi komoditas peternakan														Ditjen PKH
IKP 5.1	Produksi Daging		Juta Ton	4,81	4,97	5,12	5,28	5,44	5,60						
IKP 5.2	Produksi Telur		Juta ton	6,67	7,44	7,75	8,08	8,43	8,79						
IKP 5.3	Produksi Susu		ribu ton	808,35	866,29	893,96	922,45	939,55	943,64						

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.1761.AEA.619	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Aneka Kacang dan Umbi		Kegiatan	1,00	11,00	43,00	43,00	43,00	43,00	3.193,55	7.170,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
018.HA.1761.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
018.HA.1761.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Aneka Kacang dan Umbi		NSPK	RO Baru	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	99,83	399,33	299,50	299,50	299,50	
SK 2	Terpenuhinya luas panen komoditas aneka kacang dan umbi prioritas									6.170,15	117.730,98	177.850,8 1	247.677, 06	318.388, 31	Dit Akabi
IKK 2.1	Luas Panen Kedelai		Hektar	137.049	228.92 8	234.89 1	241.31 4	248.46 1	255.99 0	153,95	78.416,80	111.350,0 0	121.350, 00	121.350, 00	
IKK 2.2	Luas Panen Ubi Kayu		Hektar	565.593	588.71 9	592.23 5	595.77 1	599.32 9	602.90 7	-	4.766,90	40.075,00	73.325,0 0	110.075, 00	
IKK 2.3	Luas Panen Ubi Jalar		Hektar	63.712	66.484	67.069	67.659	68.254	68.855	-	10.909,72	10.150,81	29.785,8 1	47.550,8 1	
IKK 2.4	Luas Panen Aneka Kacang		Hektar	346.381	403.23 4	409.50 0	415.86 5	422.33 1	428.90 0	-	10.041,74	10.150,00	17.091,2 5	33.287,5 0	
IKK 2.5	Luas Panen Talas Beneng		Hektar	474	574	-	-	-	-	1.437,00	-	-	-	-	
018.HA.1761.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.1761.RAI.611	Kawasan Kedelai		Hektar	RO Baru	115	75.000	95.000	105.00 0	105.00 0	153,95	78.416,80	111.350,0 0	121.350, 00	121.350, 00	
018.HA.1761.RAI.613	Kawasan Ubi Jalar		Hektar	RO Baru	-	2.778	2.778	8.028	12.778	-	10.909,72	10.150,81	29.785,8 1	47.550,8 1	
018.HA.1761.RAI.612	Kawasan Ubi Kayu		Hektar	RO Baru	-	1.429	11.429	20.929	31.429	-	11.952,00	40.075,00	73.325,0 0	110.075, 00	
018.HA.1761.RAI.614	Kawasan Kacang Tanah		Hektar	RO Baru	-	1.302	1.302	2.802	6.302	-	4.766,90	5.075,00	10.835,0 0	24.275,0 0	
018.HA.1761.RAI.615	Kawasan Kacang Hijau		Hektar	RO Baru	-	6.349	6.349	7.849	11.349	-	5.274,84	5.075,00	6.256,25	9.012,50	
018.HA.1761.RAI.616	Kawasan Aneka Umbi Lainnya		Hektar	RO Baru	-	-	500	500	500	-	-	1.050,00	1.050,00	1.050,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.1761.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.1761.CAI.620	Kawasan Talas Beneng		Hektar	RO Baru	100	-	-	-	-	1.437,00	-	-	-	-	
018.HA.1761.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
018.HA.1761.QDD.001	Pekarangan Ubi Jalar		Klp. Masyarakat	RO Baru	1.500	1.736	1.736	1.736	1.736	4.579,20	6.410,72	5.075,00	5.075,00	5.075,00	
1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan										2.145.097,04	2.587.082,93	2.556.882,73	2.802.129,10	2.750.544,22	
SK 1	Terwujudnya komoditas serealia yang terfortifikasi									21.000,00	43.355,86	43.355,86	43.355,86	43.355,86	Dit Serealia
IKK 1.1	Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi		komoditas	1	1	1	1	1	1	21.000,00	43.355,86	43.355,86	43.355,86	43.355,86	
018.HA.1762.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.1762.RAI.625	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)		Hektar	200.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	21.000,00	43.260,00	43.260,00	43.260,00	43.260,00	
018.HA.1762.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
018.HA.1762.AFA.629	Peraturan/Norma/Pedoman Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)		NSPK	1	-	1	1	1	1	-	95,86	95,86	95,86	95,86	
SK 2	Terpenuhinya luas panen komoditas serealia prioritas									2.124.056,27	2.543.436,51	2.327.751,22	2.532.464,01	2.436.100,95	Dit Serealia
IKK 2.1	Luas Panen Padi		Hektar	10.046.136	10.270.117	10.289.066	10.377.700	10.474.611	10.555.687	867.713,13	1.587.856,00	1.410.523,68	1.518.856,00	1.449.856,00	
IKK 2.2	Luas Panen Jagung		Hektar	2.548.654	2.644.228	2.743.387	2.846.264	2.952.999	3.063.736	640.002,76	909.000,00	827.100,00	922.878,18	894.676,29	
IKK 2.3	Luas Panen Sorgum		Hektar	6.936	7.049	7.162	7.274	7.387	7.500	102,50	1.262,50	2.387,50	3.012,50	3.762,50	
018.HA.1762.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.1762.RAI.621	Kawasan Padi		Hektar	862.290	1.550.000	2.600.000	2.177.780	2.435.714	2.271.428	867.713,13	1.587.856,00	1.410.523,68	1.518.856,00	1.449.856,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.1762.RAI.622	Kawasan Jagung		Hektar	255.600	300.00 0	1.000.0 00	909.00 0	1.015. 420	984.08 4	640.002, 76	909.000,00	827.100,0 0	922.878, 18	894.676, 29	
018.HA.1762.RAI.626	Kawasan Sorgum		Hektar	RO Baru	500	5.000	9.500	12.000	15.000	102,50	1.262,50	2.387,50	3.012,50	3.762,50	
018.HA.1762.RAI.628	Kawasan Gandum		Hektar	RO Baru	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	32.190,49	75.000,00	75.000,0 0	75.000,0 0	
018.HA.1762.RAI.627	Kawasan Padi (QW)		Hektar	RO Baru	1.076. 000	-	-	-	-	601.572, 00	-	-	-	-	
018.HA.1762.AEA	Koordinasi														
018.HA.1762.AEA.624	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan		Kegiatan	42	93	60	60	60	60	14.665,8 8	13.127,52	12.740,04	12.717,3 3	12.806,1 6	
SK 3	Tercapainya luas panen komoditas serealia prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian									40,77	290,57	185.775,6 6	226.309, 24	271.087, 42	
IKK 3.1	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah		Hektar	Indikator Baru	146.80 6	590.87 2	941.63 7	1.292. 402	1.643. 167	-	-	17.499,68	26.303,1 3	36.100,0 0	
IKK 3.2	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan		Hektar	Indikator Baru	28.568	309.17 9	1.072. 532	1.835. 886	2.599. 240	-	-	25.690,78	40.552,2 9	57.104,7 0	
IKK 3.3	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur		Hektar	Indikator Baru	10.930	38.435	86.660	134.88 6	183.11 1	-	-	1.897,04	2.903,03	4.022,91	
IKK 3.4	Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur		Hektar	Indikator Baru	9.048	10.857	14.114	19.760	29.640	-	-	119.678,0 3	124.277, 28	129.076, 54	
IKK 3.5	Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua		Hektar	Indikator Baru	189	539	889	1.239	1.589	-	-	2.144,19	2.448,10	2.750,16	
IKK 3.6	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan		Hektar	Indikator Baru	-	665.00 0	1.330. 000	1.900. 000	1.900. 000	-	-	18.575,36	29.534,8 3	41.742,5 6	
018.HA.1762.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.1762.RAI.629	Kawasan Padi KSPP Kalimantan Tengah		Hektar	RO Baru	152.06 8	539.56 5	927.06 3	1.314. 561	1.702. 058	-	-	17.499,68	26.303,1 3	36.100,0 0	
018.HA.1762.RAI.630	Kawasan Padi KSPP Sumatera Selatan		Hektar	RO Baru	29.592	695.29 3	1.360. 994	2.026. 696	2.692. 397	-	-	25.690,78	40.552,2 9	57.104,7 0	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.1762.RAI.631	Kawasan Padi KSPP Nusa Tenggara Timur		Hektar	RO Baru	11.322	55.910	100.49 ₈	145.08 ₆	189.67 ₄	-	-	1.897,04	2.903,03	4.022,91	
018.HA.1762.RAI.632	Kawasan jagung KSPP Nusa Tenggara Timur		Hektar	RO Baru	122.08 ₈	127.42 ₁	132.75 ₃	138.08 ₆	143.41 ₈	-	-	119.678,0 ₃	124.277, ₂₈	129.076, ₅₄	
018.HA.1762.RAI.633	Kawasan jagung KSPP Papua		Hektar	RO Baru	1.222	1.688	2.382	2.720	3.056	-	-	2.144,19	2.448,10	2.750,16	
018.HA.1762.RAI.634	Kawasan Padi KSPP Papua Selatan		Hektar	RO Baru	-	492.02 ₄	984.04 ₈	1.476. ₀₇₂	1.968. ₀₉₆	-	-	18.575,36	29.534,8 ₃	41.742,5 ₆	
018.HA.1762.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
018.HA.1762.AFA.627	Peraturan/Norma/Pedoman Padi		NSPK	1	1	1	1	1	1	18,99	96,86	96,86	96,86	96,86	
018.HA.1762.AFA.628	Peraturan/Norma/Pedoman Jagung		NSPK	1	1	1	1	1	1	21,79	96,86	96,86	96,86	96,86	
018.HA.1762.AFA.630	Peraturan/Norma/Pedoman Sereal Lain		NSPK	1	-	1	1	1	1	-	96,86	96,86	96,86	96,86	
4579 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan										29.910,9 ₇	37.905,98	33.997,04	33.997,0 ₄	33.997,0 ₄	
SK 1	Tersedianya benih TP berdasarkan kebutuhan produksi TP									27.910,9 ₇	35.365,98	31.457,04	31.457,0 ₄	31.457,0 ₄	Dit Perbenihan TP
IKK 1.1	Persentase ketersediaan benih TP terhadap kebutuhan produksi TP		%	80,81	84,59	85,71	86,82	87,94	89,05	7.249,94	10.823,27	9.254,10	9.254,10	9.254,10	
018.HA.4579.PDC	Sertifikasi Produk														
018.HA.4579.PDC.001	Sertifikasi benih padi		Produk	31.658	30.000	18.800	18.800	18.800	18.800	7.249,94	7.763,27	6.194,10	6.194,10	6.194,10	
018.HA.4579.PDC.002	Sertifikasi benih Jagung		Produk	10.187	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	400,00	400,00	400,00	400,00	
018.HA.4579.PDC.003	Sertifikasi benih kedelai		Produk	RO Baru	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
018.HA.4579.PDC.004	Sertifikasi benih aneka umbi		Produk	RO Baru	-	500	500	500	500	-	200,00	200,00	200,00	200,00	
018.HA.4579.PDC.005	Sertifikasi benih aneka kacang		Produk	RO Baru	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	400,00	400,00	400,00	400,00	
018.HA.4579.PDC.006	Sertifikasi benih sereal lainnnya		Produk	RO Baru	-	200	200	200	200	-	60,00	60,00	60,00	60,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.2	Persentase Wilayah mandiri benih insitu terhadap total Wilayah tanaman pangan		%	10,53	13,16	15,79	18,42	21,05	23,68	6.667,50	12.420,88	10.330,00	10.330,00	10.330,00	
018.HA.4579.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.4579.RAG.011	Pengembangan Produsen Benih Tanaman Pangan		unit	RO Baru	95	162	162	162	162	6.667,50	12.420,88	10.330,00	10.330,00	10.330,00	
018.HA.4579.QKB	Pemantauan produk														
018.HA.4579.QKB.001	Peredaran Benih Tanaman Pangan yang diawasi		Laporan	32	1.890	5.500	5.500	5.500	5.500	11.509,84	9.750,13	9.750,13	9.750,13	9.750,13	
018.HA.4579.AEA	Koordinasi														
018.HA.4579.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		kegiatan	35	11	12	12	12	12	2.163,05	1.974,64	1.725,75	1.725,75	1.725,75	
018.HA.4579.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
018.HA.4579.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		NSPK	4	4	4	4	4	4	320,65	397,06	397,06	397,06	397,06	
SK 2	Terwujudnya metode Pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura									2.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	BB PPMB TPH
IKK 2.1	Persentase metode pengujian mutu benih TP dan hortikultura yang diterapkan		%	50	50	55	60	65	70	2.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
018.HA.4579.SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa														
018.HA.4579.SDB.004	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih		Purwarupa	6	5	5	5	5	5	2.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
4580 Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan										26.867,52	50.514,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
SK 1	Terlindunginya komoditas pertanian tanaman pangan dari OPT dan dampak perubahan iklim									21.498,92	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	Dit Perlindungan TP

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI		%	87,95	88,19	88,44	88,68	88,93	89,18	21.498,9 2	44.500,00	44.500,00	44.500,0 0	44.500,0 0	
018.HA.4580.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.4580.RAI.001	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan		Hektar	50.000	7.787	12.000	12.000	12.000	12.000	17.256,5 2	32.878,70	33.878,70	33.878,7 0	33.878,7 0	
018.HA.4580.RAI.002	Areal Penanganan DPI		Hektar	25.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.200,00	3.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
018.HA.4580.AEA	Koordinasi														
018.HA.4580.AEA.001	Koordinasi Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan		kegiatan	14	18	53	53	53	53	2.848,69	8.223,88	8.223,88	8.223,88	8.223,88	
018.HA.4580.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
018.HA.4580.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan		NSPK	1	2	4	4	4	4	193,71	387,42	387,42	387,42	387,42	
SK 2	Terwujudnya Layanan pengujian mutu produk tanaman									2.368,60	3.014,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	BPMPPT
IKK 2.1	Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman		Layanan	3	3	3	3	3	3	2.368,60	3.014,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
018.HA.4580.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk														
018.HA.4580.QJA.001	Layanan Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pupuk dan Pestisida		Produk	2.200	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.368,60	3.014,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
SK 3	Meningkatnya pemanfaatan informasi hasil peramalan OPT									3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	BB Peramalan OPT (TP)
IKK 3.1	Persentase informasi hasil peramalan OPT yang dimanfaatkan		%	32	32	56	74	88	100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
018.HA.4580.BMA	Data dan Informasi Publik														
018.HA.4580.BMA.001	Informasi Peramalan OPT		Layanan	10	8	8	8	8	8	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.4580.SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa														
018.HA.4580.SDB.001	Model Pertanian Modern		Purwarupa	1	1	1	1	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura										500,00	55.400,00	86.730,00	98.730,00	121.230,00	
SK 1	Terpenuhinya luas panen komoditas buah dan florikultura prioritas									500,00	55.400,00	86.730,00	98.730,00	121.230,00	Dit Buah dan Florikultura
IKK 1.1	Rata-rata luas panen komoditas buah prioritas		Ha	77.349	80.104	80.793	81.097	81.846	82.683						
IKK 1.2	Rata-rata luas panen florikultura prioritas		m2	2.907.143	2.936.214	2.965.576	2.995.233	3.025.185	3.055.437						
018.HA.5886.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.5886.RAI.012	Kawasan Durian		Ha	300	-	4.510	5.500	6.000	7.000						
018.HA.5886.RAI.013	Kawasan Mangga		Ha	428	-	200	200	300	1.000						
018.HA.5886.RAI.014	Kawasan Kelengkeng		Ha	300	-	-	100	300	500						
018.HA.5886.RAI.015	Kawasan Alpukat		Ha	330	-	-	100	300	1.000						
018.HA.5886.RAI.016	Kawasan Manggis		Ha	240	-	-	100	300	500						
018.HA.5886.RAI.017	Kawasan Buah Terna		Ha	-	-	-	100	100	100						
018.HA.5886.RAI.018	Kawasan Buah Merambat		Ha	-	-	1	50	50	100						
018.HA.5886.RAI.020	Kawasan Buah Perdu		Ha	-	-	200	200	200	200						
018.HA.5886.RAI.019	Kawasan Florikultura		m2	-	-	-	72.400	72.400	72.400						
018.HA.5886.AEA	Koordinasi														
018.HA.5886.AEA.021	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Buah dan Florikultura		Kegiatan	20	38	-	38	38	38						
1773 Pelindungan Hortikultura										954,00	14.360,00	45.132,00	50.110,00	68.110,00	
SK 1	Terlindunginya komoditas pertanian hortikultura dari OPT dan dampak perubahan iklim									954,00	14.360,00	45.132,00	50.110,00	68.110,00	Dit Pelindungan Hortikultura

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Persentase area/ wilayah hortikultura yang terkendali terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terserang OPT		%	99,69	99,70	99,71	99.72	99.73	99.74						
018.HA.1773.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.1773.RAI.010	Area pengendalian OPT Hortikultura		Ha	2.500	40	3.000	4.417	6.500	12.000						
018.HA.1773.RAI.014	Sarana Perlindungan Hortikultura		unit	50	-	56	100	100	200						
018.HA.1773.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
018.HA.1773.QDD.010	Kelompok Tani terlatih PHT		Kelompok masyarakat	-	-	-	80	80	100						
IKK 1.2	Persentase area/ wilayah hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terkena DPI		%	93,05	93,06	93,07	93,08	93,09	93,10						
018.HA.1773.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.1773.RAI.013	Area penanganan DPI Hortikultura		Ha	200	-	32	140	140	200						
018.HA.1773.AEA	Koordinasi														
018.HA.1773.AEA.013	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pelindungan Hortikultura		kegiatan	24	38	-	38	38	38						
4581 Perbenihan Hortikultura										18.167,37	92.445,00	256.050,00	343.600,00	396.600,00	
SK 1	Tersedianya benih hortikultura berdasarkan kebutuhan produksi hortikultura									18.167,37	92.445,00	256.050,00	343.600,00	396.600,00	Dit Perbenihan Hortikultura
IKK 1.1	Persentase ketersediaan benih hortikultura terhadap kebutuhan produksi hortikultura		%	-	39,80	40,10	40,42	40,76	41,10						
018.HA.4581.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.4581.RAI.010	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura		Ha	218	460	1.000	2.000	2.700	2.800						
018.HA.4581.RAI.011	Benih Sebar Batang Hortikultura		batang	-	-	482.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.4581.PDC	Sertifikasi Produk														
018.HA.4581.PDC.021	Sertifikat Tanda Daftar Varietas Hortikultura		produk	-	-	33	35	35	38						
018.HA.4581.QKB	Pemantauan produk														
018.HA.4581.QKB.011	Peredaran benih hortikultura yang diawasi		laporan	-	-	100	100	100	200						
018.HA.4581.AEA	Koordinasi														
018.HA.4581.AEA.020	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perbenihan Hortikultura		Kegiatan	24	38	-	38	38	38						
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat										185.550,30	73.709,00	427.200,00	459.200,00	497.200,00	
SK 1	Terpenuhinya luas panen komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas									185.550,30	73.709,00	377.200,00	384.200,00	397.200,00	Dit Sayuran dan Tanaman Obat
IKK 1.1	Rata-rata luas panen komoditas sayuran prioritas		Ha	90.592	93.383	94.142	94.901	95.627	96.377						
IKK 1.2	Rata-rata luas panen komoditas tanaman obat prioritas		Ha	7.021	7.031	7.056	7.091	7.126	7.162						
018.HA.1771.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.HA.1771.RAI.010	Kawasan Bawang Merah		Ha	6.210	-	250	6.800	6.800	7.000						
018.HA.1771.RAI.011	Kawasan Aneka Cabai		Ha	3.000	40	3.000	4.200	4.200	4.500						
018.HA.1771.RAI.012	Kawasan Bawang Putih		Ha	76	20	300	1.000	1.000	2.000						
018.HA.1771.RAI.013	Kawasan Tanaman Obat		Ha	100	-	-	100	100	1.000						
<u>018.HA.1771.RAI.XXX</u>	Kawasan Sayuran Umbi		Ha	-	-	-	100	100	100						
<u>018.HA.1771.RAI.xxx</u>	Kawasan Sayuran Buah		Ha	-	-	-	100	100	100						
018.HA.1771.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
018.HA.1771.QDD.011	Pekarangan Hortikultura		Kelompok Masyarakat	-	13.500	700	13.500	13.500	20.000						
018.HA.1771.AEA	Koordinasi														
018.HA.1771.AEA.020	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Sayuran dan Tanaman Obat		Kegiatan	24	38	-	38	38	38						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.EC.1771.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
<u>018.EC.1771.RBK.xxx</u>	Prasarana Budidaya Sayuran		Unit	-	-	-	-	10,00	25,00						
SK 2	Tercapainya luas panen komoditas hortikultura prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian									-	-	50.000,00	75.000,00	100.000,00	Dit Sayuran dan Tanaman Obat
IKK 2.1	Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara		Ha	16.02	1.700	2.200	2.700	3.200	3.700						
018.HA.1771.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
<u>018.HA.1771.RAI.XXX</u>	Kawasan Hortikultura KSPP		Ha	-	-	-	2.000	2.000	2.250						
1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak				Baseline						5.929,21	14.620,34	1.043.739,60	1.048.860,88	1.072.143,72	Direktorat Pakan
SK.1	Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman untuk produksi daging, telur dan susu									1.294,71	3.047,34	835.189,60	844.255,88	822.283,72	
IKK1.1	Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi daging	Pusat	%	93,45	93,94	94,29	94,64	95,01	95,34	1.294,71	3.047,34	373.900,00	400.340,00	359.118,51	
IKK1.2	Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi telur	Pusat	%	100	100	100	100	100	100	-	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
IKK1.3	Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi susu	Pusat	%	85,26	85,43	86,60	87,90	88,50	89,94	-	-	446.372,99	427.995,88	445.415,00	
IKK1.4	Persentase pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan terhadap total pakan ternak untuk produksi daging, telur dan susu	Pusat	%	86.21	100	100	100	100	100	-	-	12.316,61	13.320,00	15.150,21	
018.06.HA.1783.QEG	Bantuan Peralatan/Sarana									-	-	708.472,99	753.599,68	713.718,51	
018.06.HA.1783.QEG.001	Bantuan Hijauan Pakan Ternak		Ha	RO baru	-	-	760	800	975	-	-	690.972,99	745.059,68	703.043,51	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1783.QEG.00 2	Bantuan pakan olahan/bahan pakan		Ton	RO baru	-	-	2.500	1.220	2.525	-	-	17.500,00	8.540,00	10.675,0 0	
018.06.HA.1783.RAG	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan									-	-	88.900,00	55.000,0 0	60.250,0 0	
018.06.HA.1783.RAG.00 3	Hijauan Pakan Ternak		unit	RO baru	-	-	15	15	10	-	-	43.900,00	27.500,0 0	29.900,0 0	
018.06.HA.1783.RAG.00 4	Pakan Olahan dan Bahan Pakan		unit	RO baru	-	-	15	10	10	-	-	42.500,00	25.000,0 0	27.500,0 0	
018.06.HA.1783.RAG.00 5	Sarana penjaminan mutu dan keamanan pakan		Unit	RO baru	-	-	5	5	5	-	-	2.500,00	2.500,00	2.850,00	
018.06.HA.1783.AEA	Koordinasi									1.119,01	2.647,34	13.940,00	14.770,0 0	15.600,0 0	
018.06.HA.1783.AEA.00 1	Koordinasi pakan		kegiatan	1	5	3	4	4	4	1.119,01	2.647,34	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
018.06.HA.1783.AEA.00 2	Koordinasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		kegiatan	RO baru	-	2	21	21	21	-	-	11.540,00	12.370,0 0	13.200,0 0	
018.06.HA.1783.AFA	Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria									175,70	400,00	1.727,00	1.900,00	2.100,00	
018.06.HA.1783.AFA.00 1	NSPK pakan		NSPK	4	4	-	-	-	-	175,70	-	-	-	-	
018.06.HA.1783.AFA.00 2	NSPK bidang pakan/bahan pakan		NSPK	RO baru	-	4	6	6	6	-	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
018.06.HA.1783.AFA.00 3	NSPK penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		NSPK	RO baru	-	-	10	10	10	-	-	227,00	400,00	600,00	
018.06.HA.1783.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat									-	-	21.900,00	18.736,2 0	30.365,0 0	
018.06.HA.1783.QDC.00 1	Fasilitasi dan pembinaan produsen pakan/bahan pakan		produsen	RO baru	-	-	125	125	145	-	-	18.900,00	15.736,2 0	26.915,0 0	
018.06.HA.1783.QDC.00 2	Fasilitasi dan pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pakan		Produsen	RO baru	-	-	20	20	20	-	-	3.000,00	3.000,00	3.450,00	
018.06.HA.1783.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan									-	-	249,61	250,00	250,21	
018.06.HA.1783.ABR.00 2	Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		Rekomend asi	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	249,61	250,00	250,21	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2	Terpenuhinya bahan pakan sumber energi dalam negeri berdasarkan kebutuhan bahan pakan untuk produksi Daging dan Telur									-	-	1.550,00	1.605,00	1.860,00	
IKK.2.1	Persentase bahan pakan sumber energi dalam negeri terhadap total bahan pakan untuk produksi Daging dan Telur		%	72	73	75	76	78	79	-	-	1.550,00	1.605,00	1.860,00	
018.06.HA.1783.AEA	Koordinasi									-	-	500,00	500,00	700,00	
018.06.HA.1783.AEA.003	Koordinasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri		Kegiatan	RO baru	-	-	10	10	10	-	-	500,00	500,00	700,00	
018.06.HA.1783.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan									-	-	500,00	500,00	500,00	
018.06.HA.1783.ABR.001	Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		Rekomendasi Kebijakan	RO baru	-	-	2	2	2	-	-	500,00	500,00	500,00	
018.06.HA.1783.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah									-	-	550,00	605,00	660,00	
018.06.HA.1783.FBA.001	Fasilitasi dan pembinaan Pemda dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri		Daerah (Prov/Kab/Kota)	RO baru	-	-	11	11	11	-	-	550,00	605,00	660,00	
SK.3	Terpenuhinya mutu dan Keamanan Pakan Ternak									4.634,50	3.563,00	30.000,00	33.000,00	34.000,00	BPMSP Bekasi
IKK.3.1	Persentase pengujian mutu dan keamanan pakan ternak yang dapat diselesaikan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian		%	75	78	81	84	87	90	4.634,50	3.563,00	30.000,00	33.000,00	34.000,00	
018.06.HA.1783.QJA	QJA Penyidikan dan Pengujian Produk									4.634,50	3.563,00	30.000,00	33.000,00	34.000,00	
018.06.HA.1783.QJA.001	QJA 001 Pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		Produk	343	3.887	1.782	5.000	5.500	6.000	4.634,50	3.563,00	30.000,00	33.000,00	34.000,00	
SK.4	Tersedianya hijauan pakan ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak									-	-	77.000,00	70.000,00	84.000,00	UPT

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.1	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Indrapuri		%	Indikator Baru	75	80	85	90	95	-	-	11.000,00	10.000,00	12.000,00	
IKK 4.2	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Padang Mangatas		%	Indikator Baru	75	80	85	90	95	-	-	11.000,00	10.000,00	12.000,00	
IKK 4.3	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT SiborongBorong		%	Indikator Baru	75	80	83	85	90	-	-	11.000,00	10.000,00	12.000,00	
IKK 4.4	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Sembawa		%	Indikator Baru	75	80	85	90	95	-	-	11.000,00	10.000,00	12.000,00	
IKK 4.5	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTUHPT Baturaden		%	Indikator Baru	75	80	83	86	90	-	-	11.000,00	10.000,00	12.000,00	
IKK 4.6	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Denpasar		%	Indikator Baru	75	80	85	90	95	-	-	11.000,00	10.000,00	12.000,00	
IKK 4.7	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Pelaihari		%	Indikator Baru	75	80	85	90	95	-	-	11.000,00	10.000,00	12.000,00	
018.06.HA.1783.RAG	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup									-	-	77.000,00	70.000,00	84.000,00	
018.06.HA.1783.RAG.002	Hijauan Pakan Ternak di UPT		Unit	7	-	-	7	7	7	-	-	77.000,00	70.000,00	84.000,00	
SK.5	Tersedianya pakan ternak yang bermutu dan aman dalam memenuhi kebutuhan pakan				-					-	8.010,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	UPT

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.1	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Indrapuri		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	890,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
IKK 5.2	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Padang Mangatas		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	795,21	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
IKK 5.3	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Siborongborong		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	1.813,50	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
IKK 5.4	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Sembawa		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	465,49	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
IKK 5.5	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBPTU HPT Baturraden		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	980,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
IKK 5.6	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Denpasar		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	832,20	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
IKK 5.7	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Pelaihari		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	602,52	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
IKK 5.8	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BIB Lembang		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	716,08	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
IKK 5.9	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBIB Singosari		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	500,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.10	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BET Cipelang		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	-	415,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
018.06.HA.1783.RAG	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup										8.010,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	
018.06.HA.1783.RAG.001	Sarana Pakan/bahan pakan		Unit	10	-	281	50	60	70	-	8.010,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	
1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan										337.690,94	463.614,60	2.153.659,68	2.233.306,99	2.310.000,00	
SK.1	Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS									235.566,43	430.552,69	785.688,98	846.623,80	920.966,81	
IKK 1.1	Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging	Pusat	%		72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	233.869,36	429.380,33	761.814,18	813.346,50	882.689,01	
IKSK1.2	Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu	Pusat	%	76.29	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	848,00	636,18	22.862,40	32.264,90	37.265,40	
IKSK1.3	Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur	Pusat	%	95.5	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	849,07	536,18	1.012,40	1.012,40	1.012,40	
018.06.HA.1784.AEA	Koordinasi		%							2.245,07	2.180,91	12.414,80	12.814,80	12.914,80	
018.06.HA.1784.AEA.001	Koordinasi Kesehatan Hewan		Kegiatan	6	6	5	6	6	6	2.245,07	2.180,91	1.696,00	1.696,00	1.696,00	
018.06.HA.1784.AEA.002	Koordinasi Kesehatan Ternak		Kegiatan	RO baru	-	-	94	94	94	-	-	9.418,80	9.418,80	9.418,80	
018.06.HA.1784.AEA.003	Koordinasi deteksi dan respon cepat		Kegiatan	RO baru	-	-	3	3	3	-	-	1.300,00	1.700,00	1.800,00	
018.06.HA.1784.AEA.004	Koordinasi pengawasan mutu dan keamanan obat hewan yang beredar		Kegiatan	RO baru											
018.06.HA.1784.AFA	Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria									300,00	500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
018.06.HA.1784.AFA.001	NSPK Kesehatan Hewan		NSPK	7	3	2	4	4	4	300,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
018.06.HA.1784.AFA.002	NSPK pengendalian dan penanggulangan penyakit		NSPK	RO baru	-	-	2	2	2	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.AFA.003	NSPK deteksi dan respon cepat kejadian penyakit hewan		NSPK	RO baru	-	-	2	2	2	-	-	400,00	400,00	400,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1784.AFA.00 4	NSPK layanan kelembagaan dan sumberdaya kesehatan hewan		NSPK	RO baru	-	-	2	2	2	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.AFA.00 5	NSPK perlindungan hewan ternak dari PHMS		NSPK	RO baru	-	-	2	2	2	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.AFA.00 6	NSPK obat hewan dan alat kesehatan hewan		NSPK	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	200,00	200,00	200,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									103.627,80	125.000,00	217.696,00	278.242,14	352.485,05	
018.06.HA.1784.QAH.00 1	Layanan Kesehatan Hewan		Layanan	4.506.784	492.923	4.219.411	8.953.000	10.949.320	14.860.150	103.627,80	125.000,00	216.491,00	277.034,64	351.277,05	
018.06.HA.1784.QAH.00 2	Layanan pencegahan dan pemberantasan PHMS pada ternak		Layanan	RO baru	-	-	102	152	162	-	-	805,00	807,50	808,00	
018.06.HA.1784.QAH.00 3	Layanan pengawasan obat hewan		Layanan	RO baru	-	-	4	4	4	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.RAG										34.127,78	99.492,04	536.000,00	536.000,00	536.000,00	
018.06.HA.1784.RAG.00 1	Sarana Bidang Kesehatan Hewan		Unit	2	-	-	1	1	1	-	-	268.000,00	268.000,00	268.000,00	
018.06.HA.1784.RAG.00 4	Sarana Laboratorium Kesehatan Hewan Infeksi RO baru dan zoonosis untuk kesehatan semua		Unit	RO baru	-	1	-	-	-	-	41.113,27	-	-	-	
018.06.HA.1784.RAG.00 5	Sarana laboratorium terpadu produksi dan pengembangan obat hewan nasional		Unit	RO baru	-	1	-	-	-	-	58.378,77	-	-	-	
018.06.HA.1784.RAG 007	SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia		Unit	1	1	-	-	-	-	16.466,58	-	-	-	-	
018.06.HA.1784.RAG 008	SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah		Unit	1	1	-	-	-	-	17.661,20	-	-	-	-	
018.06.HA.1784.RAG.01 0	Sarana SBSN di UPT Kesehatan Hewan		Unit	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	268.000,00	268.000,00	268.000,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1784.RBK	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup									95.265,7 8	203.379,75	16.478,18	16.466,8 6	16.466,9 6	
018.06.HA.1784.RBK.004	Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan. Infeksi RO baru dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua		unit	RO baru	-	1	-	-	-	-	73.064,75	-	-	-	
018.06.HA.1784.RBK 005	Prasarana Laboratorium Terpadu Produksi dan Pengembangan Obat Hewan Nasional		Unit	RO baru	-	1	-	-	-	-	130.315,00	-	-	-	
018.06.HA.1784.RBK 007	SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia		Unit	1	1	-	-	-	-	55.533,4 2	-	-	-	-	
018.06.HA.1784.RBK 008	SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah		Unit	1	1	-	-	-	-	35.838,8 0	-	-	-	-	
018.06.HA.1784.RBK 009	Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia		Unit	1		-	-	-	-	3.893,56	-	-	-	-	
018.06.HA.1784.RBK.010	Prasarana SBSN di UPT Kesehatan Hewan		Unit	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	16.478,18	16.466,8 6	16.466,9 6	
SK. 2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap wabah penyakit Hewan									-	-	154.857,5 1	172.120, 00	172.120, 00	
IKK 2.1	Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan	Pusat	indeks	0,48	0,60	0,64	0,67	0,71	0,74	-	-	72.509,80	76.972,0 0	76.972,0 0	
IKK 2.2	Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	Pusat	Kabupaten /Kota		100	200	300	400	514	-	-	82.347,71	95.148,0 0	95.148,0 0	
018.06.HA.1784.AFA	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria									-	-	600,00	600,00	600,00	
018.06.HA.1784.AFA 007	NSPK pelaporan dan deteksi dini potensi wabah penyakit hewan		NSPK	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	200,00	200,00	200,00	
018.06.HA.1784.AFA 008	NSPK respon potensi wabah penyakit hewan		NSPK	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	200,00	200,00	200,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1784.AFA 009	NSPK Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan		NSPK	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	200,00	200,00	200,00	
018.06.HA.1784.AEA	Koordinasi									-	-	1.496,00	1.496,00	1.496,00	
018.06.HA.1784.AEA 005	Koordinasi deteksi dini potensi wabah penyakit hewan		Laporan	RO baru	-	-	2	2	2	-	-	748,00	748,00	748,00	
018.06.HA.1784.AEA 006	Koordinasi respon potensi wabah penyakit hewan		Laporan	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	374,00	374,00	374,00	
018.06.HA.1784.AEA 007	Koordinasi Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan		Kegiatan	RO baru	-	-	1	1	1	-	-	374,00	374,00	374,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan publik lainnya									-	-	152.761,5 1	170.024,00	170.024,00	
018.06.HA.1784.QAH 005	Layanan untuk deteksi dini potensi wabah penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	11	11	11	-	-	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
018.06.HA.1784.QAH 006	Layanan untuk respon potensi wabah penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
018.06.HA.1784.QAH.00 7	Layanan untuk Pemberantasan penyakit hewan		Layanan	RO baru			2.160. 950	3.000. 000	3.000. 000	-	-	72.637,51	89.900,00	89.900,00	
018.06.HA.1784.QAH 008	Layanan surveilans penyakit untuk pemberantasan penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	11	11	11	-	-	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
018.06.HA.1784.QAH 009	layanan unit pelayanan kesehatan hewan dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	38	38	38	-	-	73.074,00	73.074,00	73.074,00	
018.06.HA.1784.QAH 010	Layanan Penyidikan Penyakit dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	1.500	1.500	1.500	-	-	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
SK.3	Tersedianya obat hewan sesuai kebutuhan									50.669,19	10.060,65	47.669,19	47.669,19	47.669,19	
IKK 3.1	Persentase ketersediaan obat hewan terhadap kebutuhan		%	100	95	95	95	95	95	50.669,19	10.060,65	47.669,19	47.669,19	47.669,19	
018.06.HA.1784.RAG	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup									50.669,19	10.060,65	47.669,19	47.669,19	47.669,19	
018.06.HA.1784.RAG 003	Obat Hewan dan Bahan Biologik		unit	7.655.850	7.175.105	1.000.000	5.610.250	6.817.775	9.120.300	50.669,19	10.060,65	47.669,19	47.669,19	47.669,19	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.4	Terjaminnya mutu dan keamanan obat hewan yang beredar									7.759,18	2.083,70	15.919,00	16.919,00	17.919,00	
IKK 4.1	Persentase obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap obat hewan yang beredar		%	90	90	91	92	93	94	7.759,18	2.083,70	15.919,00	16.919,00	17.919,00	
018.06.HA.1784.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk									7.759,18	2.083,70	15.919,00	16.919,00	17.919,00	
018.06.HA.1784.QJA 001	Hasil mutu dan sertifikasi obat hewan		Produk	1.350	2.500	621	2.000	2.000	2.000	7.759,18	2.083,70	8.386,00	8.386,00	8.386,00	
018.06.HA.1784.QJA 002	Layanan Mutu Obat Hewan dan Pengujian Obat Hewan		Produk	RO baru	-	-	700	800	900	-	-	7.533,00	8.533,00	9.533,00	
SK.5	Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja UPT Veteriner				77.675	52.163	339.750	339.750	339.750	43.696,15	20.917,56	1.124.775,00	1.124.775,00	1.124.775,00	
IKK 5.1	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Maros		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	-	124.975,00	124.975,00	124.975,00	
IKK 5.2	- Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Denpasar		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	-	124.975,00	124.975,00	124.975,00	
IKK 5.3	- Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVET Wates		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	-	124.975,00	124.975,00	124.975,00	
IKK 5.4	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Medan		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	-	124.975,00	124.975,00	124.975,00	
IKK 5.5	- Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bukit Tinggi		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	-	124.975,00	124.975,00	124.975,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.6	- Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bandar Lampung		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	-	124.975,00	124.975,00	124.975,00	
IKK 5.7	- Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Subang		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	-	124.975,00	124.975,00	124.975,00	
IKK 5.8	- Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner BanjarRO baru		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	-	124.975,00	124.975,00	124.975,00	
IKK 5.9	- Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Jayapura		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	-	124.975,00	124.975,00	124.975,00	
018.06.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit									-	-	124.575,00	124.575,00	124.575,00	
018.06.HA.1784.QJC 001	sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi		Sampel	574	-	-	339.750	339.750	339.750	-	-	93.431,25	93.431,25	93.431,25	
018.06.HA.1784.QJC 002	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua		Sampel	RO baru	-	-	113.250	113.250	113.250	-	-	31.143,75	31.143,75	31.143,75	
018.06.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit									-	-	124.575,00	124.575,00	124.575,00	
018.06.HA.1784.QJC 001	sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi		Sampel	574	-	-	339.750	339.750	339.750	-	-	93.431,25	93.431,25	93.431,25	
018.06.HA.1784.QJC 002	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua		Sampel	RO baru	-	-	113.250	113.250	113.250	-	-	31.143,75	31.143,75	31.143,75	
018.06.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit									-	-	124.575,00	124.575,00	124.575,00	
018.06.HA.1784.QJC 001	sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi		Sampel	574	66.433	-	339.750	339.750	339.750	-	-	93.431,25	93.431,25	93.431,25	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1784.QJC 002	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua		Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.25 0	113.25 0	-	-	31.143,75	31.143,7 5	31.143,7 5	
018.06.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit									-	-	124.575,0 0	124.575, 00	124.575, 00	
018.06.HA.1784.QJC 001	sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi		Sampel	574	-	-	339.75 0	339.75 0	339.75 0	-	-	93.431,25	93.431,2 5	93.431,2 5	
018.06.HA.1784.QJC 002	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua		Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.25 0	113.25 0	-	-	31.143,75	31.143,7 5	31.143,7 5	
018.06.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit									-	-	124.575,0 0	124.575, 00	124.575, 00	
018.06.HA.1784.QJC 001	sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi		Sampel	574	-	-	339.75 0	339.75 0	339.75 0	-	-	93.431,25	93.431,2 5	93.431,2 5	
018.06.HA.1784.QJC 002	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua		Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.25 0	113.25 0	-	-	31.143,75	31.143,7 5	31.143,7 5	
018.06.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit									-	-	124.575,0 0	124.575, 00	124.575, 00	
018.06.HA.1784.QJC 001	sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi		Sampel	574	-	-	339.75 0	339.75 0	339.75 0	-	-	93.431,25	93.431,2 5	93.431,2 5	
018.06.HA.1784.QJC 002	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua		Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.25 0	113.25 0	-	-	31.143,75	31.143,7 5	31.143,7 5	
018.06.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit									-	-	124.575,0 0	124.575, 00	124.575, 00	
018.06.HA.1784.QJC 001	sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi		Sampel	574	-	-	339.75 0	339.75 0	339.75 0	-	-	93.431,25	93.431,2 5	93.431,2 5	
018.06.HA.1784.QJC 002	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua		Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.25 0	113.25 0	-	-	31.143,75	31.143,7 5	31.143,7 5	
018.06.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit									-	-	124.575,0 0	124.575, 00	124.575, 00	
018.06.HA.1784.QJC 001	sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi		Sampel	574	-	-	339.75 0	339.75 0	339.75 0	-	-	93.431,25	93.431,2 5	93.431,2 5	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1784.QJC 002	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua		Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.25 0	113.25 0	-	-	31.143,75	31.143,7 5	31.143,7 5	
018.06.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit									-	-	124.575,0 0	124.575, 00	124.575, 00	
018.06.HA.1784.QJC 001	sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi		Sampel	574	-	-	339.75 0	339.75 0	339.75 0	-	-	93.431,25	93.431,2 5	93.431,2 5	
018.06.HA.1784.QJC 002	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua		Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.25 0	113.25 0	-	-	31.143,75	31.143,7 5	31.143,7 5	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH 004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH 004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH 004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH 004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH 004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH 004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH 004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH 004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	400,00	400,00	400,00	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	-	400,00	400,00	400,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1784.QAH 004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	-	400,00	400,00	400,00	
SK 6	Tersedianya informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi									-	-	24.750,00	25.200,00	26.550,00	
IKSK 6.1	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVet Maros		%	73	81	82	83	84	85	-	-	2.750,00	2.800,00	2.950,00	
IKSK 6.2	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVet Denpasar		%	81	81	82	83	84	85	-	-	2.750,00	2.800,00	2.950,00	
IKSK 6.3	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVET Wates		%	81	81	82	83	84	85	-	-	2.750,00	2.800,00	2.950,00	
IKSK 6.4	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Medan		%	80	81	82	83	84	85	-	-	2.750,00	2.800,00	2.950,00	
IKSK 6.5	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Bukittinggi		%	81	81	82	83	84	85	-	-	2.750,00	2.800,00	2.950,00	
IKSK 6.6	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Lampung		%	81	81	82	83	84	85	-	-	2.750,00	2.800,00	2.950,00	
IKSK 6.7	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Subang		%	81	81	82	83	84	85	-	-	2.750,00	2.800,00	2.950,00	
IKSK 6.8	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Banjar RO baru		%	80	81	82	83	84	85	-	-	2.750,00	2.800,00	2.950,00	
IKSK 6.9	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Jayapura		%	70	81	82	83	84	85	-	-	2.750,00	2.800,00	2.950,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya														
018.06.HA.1784.QAH.004	Layanan Investigasi Penyakit hewan		Layanan	RO baru	-	-	45	45	45	-	-	24.750,00	25.200,00	26.550,00	
1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak										394.855,00	128.322,25	2.451.152,90	2.455.462,00	2.529.546,51	
SK.1	Terpenuhinya potensi produksi ternak untuk produksi daging, telur dan susu									171.519,86	69.322,72	809.465,00	809.840,00	908.465,00	
IKK 1.1	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging	Pusat	%	Indikator Baru	94,92	95,12	95,32	95,53	95,76	6.457,19	38.513,08	607.060,00	607.435,00	685.760,00	
IKSK1.2	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur	Pusat	%	Indikator Baru	102,10	102,14	102,18	102,22	102,26	164.962,68	30.802,50	78.705,00	78.705,00	88.705,00	
IKSK1.3	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas susu	Pusat	%	Indikator Baru	21,03	25,17	29,03	33,69	39,08	100,00	7,13	123.700,00	123.700,00	134.000,00	
018.06.HA.1785.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									-	14.269,00	438.750,00	439.125,00	509.500,00	
018.06.HA.1785.QAH.001	Layanan Optimalisasi Reproduksi		Layanan	1.547.009	-	500.011	2.750.000	2.750.000	3.000.000	-	14.269,00	398.750,00	399.125,00	462.000,00	
018.06.HA.1785.QAH.002	Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak		Layanan	RO baru	1.499.878	-	1.600.000	1.600.000	1.900.000	-	-	40.000,00	40.000,00	47.500,00	
018.06.HA.1785.RAG	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup									-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
018.06.HA.1785.RAG.006	Sarana Penandaan dan Pendataan Ternak		Unit	1.011.145	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
018.06.HA.1785.AFA	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria									500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	
018.06.HA.1785.AFA.001	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak		NSPK	5	6	2	7	7	7	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	
018.06.HA.1785.AEA	Koordinasi									1.850,00	2.619,62	25.050,00	25.050,00	25.050,00	
018.06.HA.1785.AEA.001	Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak		Kegiatan	3	6	4	7	7	7	1.850,00	2.619,62	4.550,00	4.550,00	4.550,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1785.AEA 002	Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah		Kegiatan	RO baru	-	-	86	86	86	-	-	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
018.06.HA.1785.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat									-	-	6.715,00	6.715,00	6.715,00	
018.06.HA.1785.QDD.00 1	Fasilitasi dan pembinaan penguatan uji zuriat sapi perah untuk kelompok peternak		Kelompok Masyarakat	RO baru	-	-	25	25	25	-	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
018.06.HA.1785.QDD.00 2	Fasilitasi dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak		Kelompok masyarakat	RO baru	-	-	13	13	13	-	-	4.615,00	4.615,00	4.615,00	
018.06.HA.1785.QEO	Bantuan Produk dan Peralatan				-	-				169.169,86	52.234,10	334.750,00	334.750,00	363.000,00	
018.06.HA.1785.QEO 002	Ternak Ruminansia Perah		Ekor	RO baru	1.438	-	2.500	3.000	4.000	-	-	87.500,00	87.500,00	94.550,00	
018.06.HA.1785.QEO 003	Ternak Ruminansia Potong		Ekor	RO baru	1.000	5.200	15.000	15.500	16.000	3.060,04	20.800,00	130.000,00	130.000,00	138.500,00	
018.06.HA.1785.QEO.00 4	Ternak Unggas		Ekor	RO baru	7.500	92.500	200.000	350.000	400.000	164.862,68	30.802,50	70.000,00	70.000,00	80.000,00	
018.06.HA.1785.QEO 005	Ternak Lainnya		Ekor	RO baru	100	50	3.500	3.600	3.700	1.247,15	631,60	47.250,00	47.250,00	49.950,00	
SK.2	Tersedianya bibit/benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi daging, telur dan susu									-	-	3.405,00	3.405,00	4.105,00	
IKK 2.1	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi daging	Pusat	%	67,30	86,87	87,34	88,26	88,59	88,92	-	-	2.400,00	2.400,00	3.100,00	
IKK 2.2	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi telur	Pusat	%		102,10	102,14	102,18	102,22	102,26	-	-	620,00	620,00	620,00	
IKK 2.3	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu	Pusat	%		0,21	0,28	0,37	0,50	0,68	-	-	385,00	385,00	385,00	
018.06.HA.1785.PDC	Sertifikasi produk									-	-	2.805,00	2.805,00	3.505,00	
018.06.HA.1785.PDC.00 1	Sertifikasi benih/bibit ternak		Sertifikat	RO baru	-	-	30	35	40	-	-	1.575,00	1.575,00	2.275,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1785.PDC.002	Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practice		Sertifikat	RO baru	-	-	15	15	15	-	-	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
018.06.HA.1785.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk									-	-	600,00	600,00	600,00	
018.06.HA.1785.QIA.001	Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak		Laporan	RO baru	-	-	3	3	3	-	-	600,00	600,00	600,00	
SK.3	Terlindunginya varietas unggul tanaman dan hewan									-	-	900,00	900,00	900,00	
IKK3	Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Pusat	Galur		38	41	44	47	50	-	-	900,00	900,00	900,00	
018.06.HA.1785.REB	Konservasi Jenis / Spesies		Galur							-	-	900,00	900,00	900,00	
018.06.HA.1785.REB.001	Pengelolaan SDGH		Jenis	RO baru	-	-	3	3	3	-	-	600,00	600,00	600,00	
018.06.HA.1785.REB.002	Rumpun/Galur yang dilepas		Jenis	RO baru	-	-	2	2	2	-	-	300,00	300,00	300,00	
SK.4	Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak/instansi pemerintah di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak									147.921,70	-	1.259.391,60	1.241.439,35	1.194.257,61	
IKK 4.1	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU-HPT Indrapuri		%	Indikator Baru	77	80	82	84	85	1.693,82	-	38.840,70	100.550,40	114.650,00	
IKK 4.2	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Siborongborong		%	Indikator Baru	70	75	78	82	85	3.940,46	-	39.650,00	149.650,00	149.650,00	
IKK 4.3	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Padang Mangatas		%	Indikator Baru	72	74	76	78	80	1.425,42	-	39.650,00	109.650,00	109.650,00	
IKK 4.4	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Sembawa		%	Indikator Baru	95	96	97	98	98	3.478,28	-	214.650,00	162.150,00	158.150,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.5	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBPTUHPT Baturaden		%	Indikator Baru	64	75	83	87	90	4.249,76	-	84.650,00	174.662,00	175.745,15	
IKK 4.6	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Denpasar		%	Indikator Baru	90	91	92	93	95	2.959,04	-	174.650,00	104.650,00	104.650,00	
IKK 4.7	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Pelaihari		%	Indikator Baru	70	73	75	78	80	1.165,52	-	174.650,00	157.150,00	157.149,51	
IKK 4.8	Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BIB Lembang		%	Indikator Baru	95	96	97	98	98	3.806,70	-	289.650,00	92.650,00	85.921,95	
IKK 4.9	Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBIB Singosari		%	Indikator Baru	95	96	97	98	98	120.576,17	-	29.650,00	94.900,00	59.041,00	
IKK 4.10	Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang		%	Indikator Baru	90	91	93	94	95	4.626,54	-	163.350,90	55.426,95	39.650,00	
IKK 4.11	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang		%	Indikator Baru	75	80	82	85	85	-	-	10.000,00	40.000,00	40.000,00	
018.06.HA.1785.RAG	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup									50.616,60	-	426.500,00	911.439,35	81.500,00	
018.06.HA.1785.RAG.001	Sarana Perbibitan Ternak		unit	1	36.912	-	11	11	11	28.608,40	-	151.500,00	911.439,35	81.500,00	
018.06.HA.1785.RAG.007	SBSN Sarana UPT		unit	-	1.155		1			22.008,20		275.000,00			

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1785.RBK	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup									97.305,1 0	-	832.891,6 0	330.000, 00	330.000, 00	
018.06.HA.1785.RBK.00 1	Prasarana Perbibitan Ternak		unit	-	28	-	11	11	11	11.971,1 0	-	214.190,7 0	330.000, 00	330.000, 00	
018.06.HA.1785.RBK.00 6	SBSN Prasarana UPT		unit	-			1			85.334,0 0		618.700,9 0			
SK.5	Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan Produksi Ternak									75.413,4 3	58.999,53	377.991,3 0	399.877, 65	421.818, 90	
IKK 5.1	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Indrapuri		%		77	80	82	84	85	1.358,69	728,00	4.170,00	4.672,50	5.242,50	
IKK 5.2	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Siborongborong		%		81	84	85	86	87	1.021,35	673,53	7.466,00	9.338,00	11.222,0 0	
IKK 5.3	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Padang Mangatas		%		85	86	87	88	90	2.332,23	1.786,15	2.775,00	2.925,00	3.075,00	
IKK 5.4	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Sembawa		%		95	96	97	98	98	7.484,82	2.045,00	144.521,5 0	155.577, 70	166.658, 20	
IKK 5.5	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BBPTU-HPT Baturaden		%		80	82	83	84	85	10.007,2 9	6.170,00	10.945,00	11.515,0 0	11.885,0 0	
IKK 5.6	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Denpasar		%		90	91	92	93	95	1.811,35	893,25	2.010,00	2.092,50	2.175,00	
IKK 5.7	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Pelaihari		%		75	80	85	88	88	5.056,99	5.210,00	139.253,8 0	146.189, 95	153.473, 20	
IKK 5.8	Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BIB Lembang		%		95	96	97	98	98	19.626,1 6	18.726,49	22.225,00	22.325,0 0	22.425,0 0	
IKK 5.9	Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BBIB Singosari		%		95	96	97	98	98	21.083,9 8	21.594,23	36.275,00	36.780,0 0	37.025,0 0	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.10	Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BET Cipelang		%		90	92	93	94	95	5.358,34	947,39	7.725,00	7.837,00	8.013,00	
IKK 5.11	Persentase bibit ternak unggul bermutu terhadap ketersediaan bibit yang beredar di wilayah kerja BET Cipelang		%		80	80	80	85	85	272,23	225,50	625,00	625,00	625,00	
018.06.HA.1785.PDA	Standardisasi Produk							7.820.582	7.977.490	75.413,43	58.999,53	372.321,30	394.207,65	416.148,90	
018.06.HA.1785.PDA.001	Benih Ternak Unggul		Produk	5.455.732	6.400.800	4.840.075	5.745.900	5.806.414	5.840.936	46.068,48	41.268,10	64.650,00	65.367,00	65.888,00	
018.06.HA.1785.PDA.002	Bibit Ternak Unggul		Produk	586.407	1.790.184	583.276	1.887.132	2.007.548	2.130.431	29.344,95	17.731,43	307.671,30	328.840,65	350.260,90	
018.06.HA.1785.PDC	Sertifikasi produk											2.170,00	2.170,00	2.170,00	
018.06.HA.1785.PDC.003	Sertifikasi benih/bibit ternak UPT		Produk	RO baru	-	-	7.050	6.620	6.123	-	-	2.170,00	2.170,00	2.170,00	
018.06.HA.1785.AEA	Koordinasi									-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
018.06.HA.1785.AEA.003	Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT		Kegiatan	RO baru	-	-	10	10	10	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner										16.305,2090	8.162,1550	150.303,0000	160.008,0000	174.645,0000	
SK.1	Terpenuhinya persyaratan keamanan komoditas produk peternakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku									-	-	20.344,00	21.161,00	22.182,00	
IKK 1.1	Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan keamanan komoditas pangan terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	Pusat	%	90	90,50	91	91,50	92	92,50	-	-	20.344,00	21.161,00	22.182,00	
018.06.HA.1786.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga									-	-	20.344,00	21.161,00	22.182,00	
018.06.HA.1786.QIC 001	Pengawasan unit usaha, peredaran dan lalu lintas produk hewann produk hewan		Lembaga	RO baru	-	-	39,00	39,00	39,00	-	-	20.344,00	21.161,00	23.127,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap zoonosis, keamanan dan kesehatan produk hewan									1.761,22	2.609,00	99.016,00	104.922,00	115.192,00	
IKK 2.1	Indeks keamanan dan kesehatan produk hewan	Pusat	Indeks	0,51	0.54	0.56	0.58	0.61	0.63	1.561,22	1.809,00	74.544,00	77.736,00	84.928,00	
IKK 2.2	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Pusat	%	65	70	75	80	85	90	100,00	400,00	8.900,00	9.750,00	10.600,00	
IKK 2.3	Tingkat kepatuhan terhadap kesejahteraan hewan nasional	Pusat	%	58	60	62	65	67	70	100,00	400,00	15.572,00	17.436,00	19.664,00	
018.06.HA.1786.AFA	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria									500,00	500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	
018.06.HA.1786.AFA 001	NSPK Kesehatan masyarakat veteriner		NSPK	6	5	5	10	10	10	500,00	500,00	6.000,00	6.200,00	1.800,00	
018.06.HA.1786.AEA	Koordinasi									1.261,22	2.109,00	19.500,00	19.550,00	19.600,00	
018.06.HA.1786.AEA 001	Koordinasi kesehatan masyarakat veteriner		Kegiatan	1	5	6	11	11	11	1.261,22	2.109,00	19.500,00	19.550,00	19.600,00	
018.06.HA.1786.UAC	Peningkatan Kapasitas aparatur negara									-	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
018.06.HA.1786.UAC 001	Bimbingan Teknis SDM Penjaminan Keamanan Produk Hewan		Orang	RO baru	-	-	1.200	1.200	1.200	-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
018.06.HA.1786.UAC 002	Bimbingan Teknis SDM Zoonosis		orang	RO baru	-	-	100	100	100	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
018.06.HA.1786.UAC 003	Bimbingan Teknis SDM Kesmavet		Orang	RO baru	-	-	100	100	100	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
018.06.HA.1786.PDF	Sertifikasi Lembaga									-	-	8.000,00	10.000,00	14.000,00	
018.06.HA.1786.PDF 001	Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan		Lembaga	RO baru	70	-	400	500	700	-	-	8.000,00	10.000,00	14.000,00	
018.06.HA.1786.QAH	Pelayanan publik lainnya									-	-	1.164,00	1.166,00	1.168,00	
018.06.HA.1786.QAH 001	Pelayanan publik penjaminan keamanan produk hewan		Layanan	RO baru	-	-	3.500	3.516	3.533	-	-	1.164,00	1.166,00	1.168,00	
018.06.HA.1786.PCA	Perijinan Produk									-	-	880,00	920,00	960,00	
018.06.HA.1786.PCA 001	Registrasi Produk hewan		Produk	RO baru	-	-	110	115	120	-	-	880,00	920,00	960,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.HA.1786.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									-	-	36.000,00	37.000,0 0	40.000,0 0	
018.06.HA.1786.RAG 001	Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner		Unit		13	-	10	10	10	-	-	36.000,00	37.000,0 0	40.000,0 0	
018.06.HA.1786.QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat									-	-	2.400,00	3.200,00	4.000,00	
018.06.HA.1786.QKA 001	Pemantauan dugaan kejadian penyakit pada manusia yang berasal dari hewan dan/atau produk hewan		Kelompok Masyaraka t	RO baru	-	-	24	32	40	-	-	2.400,00	3.200,00	4.000,00	
018.06.HA.1786.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat									-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
018.06.HA.1786.QDC 001	Masyarakat yang teredukasi keamanan produk hewan dan zoonosis		Orang	RO baru	150	-	500	500	1.000	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
018.06.HA.1786.QDC 002	Masyarakat yang teredukasi kesejahteraan hewan		Orang	RO baru	-	-	500	500	500	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
018.06.HA.1786.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga									-	-	9.072,00	10.886,0 0	13.064,0 0	
018.06.HA.1786.QIC 002	Pengawasan unit usaha penanganan hewan		Lembaga	RO baru	-	-	39	39	39	-	-	9.072,00	10.886,0 0	13.064,0 0	
SK.3	Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan									14.543,9 9	5.553,16	30.943,00	33.925,0 0	37.271,0 0	
IKK 3.1	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di BPMSPH		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.2	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Wates		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.3	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Maros		%		98	98	98	98	98						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.4	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Denpasar		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.5	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Medan		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.6	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bukittinggi		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.7	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bandar Lampung		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.8	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Subang		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.9	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner BanjarRO baru		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.10	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Jayapura		%		98	98	98	98	98						
018.06.HA.1786.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk									14.543,9 9	5.553,16	30.943,00	33.925,0 0	37.271,0 0	
018.06.HA.1786.QJA 001	Layanan Pengujian Keamanan Produk Hewan		Produk	2.921	37.915	12.796	72.802	79.890	87.720	14.543,9 9	5.553,16	30.943,00	33.925,0 0	37.271,0 0	
018.HA.1794 - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian										100.687					

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.3994.ABR.001	Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha pertanian		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	0	0	1	1	1	0	0	330	363	399	
018.HA.3994.BDB	Fasilitasi dan pembinaan lembaga														
018.HA.3994.BDB.001	Fasilitasi akses pembiayaan LKMA		Lembaga	RO Baru	0	0	120	120	120	0	0	4.950	5.445	5.990	
018.HA.3994.BDB.002	Fasilitasi akses pembiayaan koperasi pertanian		Lembaga	RO Baru	0	0	12	12	12	0	0	2.200	2.420	2.662	
018.HA.3994.BDC	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat														
018.HA.3994.BDC.001	Fasilitasi akses pembiayaan petani		Orang	RO Baru	0	0	1.682.588	1.682.588	1.682.588	0	0	5.500	6.050	6.655	
018.HA.3994.RBK	Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
018.HA.3994.RBK.003	Pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan		Unit	-	317	3.000	3.300	3.630	3.993	2.434	10.460	11.506	12.657	13.922	
018.HA.1796 - Pengelolaan Alat Mesin Pertanian	Sistem Penyediaan dan Pengawasan									0	1.500	22.537	22.576	22.615	
SK 3	Terkendalnya susut pangan														Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen
IKK 3.1	Persentase penurunan susut pangan		%	Indikator Baru	3	3	3	3	3	0	1.500	22.537	22.576	22.615	
	O.1 Susut pangan pasca panen asal pertanian														
018.HA.1796.AEA	Koordinasi														
018.HA.1796.AEA.001	Koordinasi penghitungan susut pangan pasca panen asal pertanian		Kegiatan	RO Baru	0	0	1	1	1	0	1.500	21.537	21.576	21.615	
018.HA.1796.ABR	Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
018.HA.1796.ABR.001	Kajian penghitungan susut pangan pasca panen asal pertanian		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	0	0	1	1	1	0	0	1.000	1.000	1.000	
018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida										632.079	111.720	1.069.590	1.069.615	1.069.715	
SK 4	Tersedianya pupuk berdasarkan kebutuhan produksi pertanian														Direktorat Pupuk
IKK 4.1	Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan produksi pertanian		%	Indikator Baru	90	90,5	91	91,5	92	632.079	111.720	1.069.590	1.069.615	1.069.715	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.3993.BDD.001	Fasilitasi kelompok petani untuk pemanfaatan pupuk		Kelompok Masyarakat	RO Baru	0	0	100	100	100	0	0	700	700	700	
018.HA.3993.RAG	Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
018.HA.3993.RAG.001	Rumah pengolah pupuk organik (RPPO)		Unit	-	0	100	150	150	150	0	10.609	11.000	11.000	11.000	
018.HA.3993.RAG.003	Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW)		Unit	76.588	1.076.000	0	212.750.000	212.750.000	212.750.000	222.216	0	531.875	531.875	531.975	
018.HA.3993.RAG.004	Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian		Unit	-	125.000.000	0	0	0	0	319.821	0	0	0	0	
018.HA.3993.RAG.005	Bantuan Pembenah Tanah		Unit	-	0	0	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	430.821	430.821	430.821	
018.HA.3993.FAB	Sistem informasi pemerintahan														
018.HA.3993.FAB.001	Sistem informasi pupuk bersubsidi		Layanan	1	1	0	0	0	0	2.570	0	0	0	0	
018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida										233.249	59.438	1.026.889	1.029.010	1.031.286	
SK 5	Tersedianya pestisida berdasarkan kebutuhan produksi pertanian														Direktorat Pestisida
IKK 5.1	Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan produksi pertanian		%	Indikator Baru	93	93	94	94	95	233.249	59.438	1.026.889	1.029.010	1.031.286	
	O.2 Pestisida untuk produksi pertanian														
018.HA.3993.ABR	Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
018.HA.3993.ABR.001	Kebijakan pendaftaran pestisida untuk produksi pertanian		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	0	0	4	4	4	0	0	600	600	600	
018.HA.3993.ABR.002	Kebijakan pengawasan pestisida untuk produksi pertanian		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	0	0	6	6	6	0	0	366	366	366	
018.HA.3993.AEA	Koordinasi														
018.HA.3993.AEA.001	Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida		Kegiatan		1	0	1	1	1	2.674	0	2.941	3.236	3.559	
018.HA.3993.AEA.001	Koordinasi pengawasan pestisida		Kegiatan	RO Baru	0	0	2	2	2	0	0	1.337	1.337	1.337	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.1796.AEA.001	Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen		Kegiatan		0	0	1	1	1	0	0	12.773	13.601	14.662	
018.HA.1796.AEA.001	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian		Kegiatan	38	1	0	0	0	0	8.485	0	0	0	0	
018.HA.1796.AFA	Norma, standar, prosedur, dan kriteria														
018.HA.1796.AFA.001	NSPK pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen		NSPK	RO Baru	0	0	2	2	2	0	0	600	720	864	
018.HA.1796.ABR	Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
018.HA.1796.ABR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	0	0	2	2	2	0	0	1.200	1.440	1.728	
018.HA.1796.BDB	Fasilitasi dan pembinaan lembaga														
018.HA.1796.BDB.001	Bimbingan teknis kelembagaan alat dan mesin pertanian		Lembaga	RO Baru	0	0	20	20	20	0	0	480	576	691	
018.HA.1796.BDD	Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat														
018.HA.1796.BDD.001	Bimbingan teknis kelompok tani pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen		Kelompok Masyarakat	RO Baru	0	0	30	30	30	0	0	360	432	518	
018.HA.1796.RAG	Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
018.HA.1796.RAG.001	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan		Unit	91.108	63.582	22.156	34.120	35.826	37.618	5.513.673	1.403.834	2.602.104	2.617.133	2.632.168	
018.HA.1796.RAG.002	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura		Unit	-	0	553	2.220	2.120	2.120	0	6.370	11.559	11.849	12.759	
018.HA.1796.RAG.003	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan		Unit	-	0	0	3.240	3.407	3.582	0	0	59.000	59.232	59.480	
018.HA.1796.RAG.004	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan		Unit	-	0	0	3.240	3.407	3.582	0	0	59.000	59.232	59.480	
018.HA.1796.RAG.005	Perbengkelan alsintan		Unit	-	0	50	99	104	109	0	25.000	41.000	42.407	43.200	
018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian										0	993.295	2.735.583	2.815.313	2.876.328	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 7	Meningkatnya pemanfaatan alsintan pasca panen untuk hilirisasi pertanian														Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
IKK 7.1	Persentase alsintan pasca panen yang dimanfaatkan terhadap alsintan pasca panen yang disediakan untuk hilirisasi pertanian		%	Indikator Baru	90,5	91	91,5	92	92,5	0	993.295	2.735.583	2.815.313	2.876.328	
	O.4 Alsintan pasca panen untuk produksi pertanian														
018.HA.1796.AEA	Koordinasi														
018.HA.1796.AEA.001	Koordinasi pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen		Kegiatan	RO Baru	0	0	1	1	1	0	0	19.500	20.475	21.499	
018.HA.1796.ABR	Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
018.HA.1796.ABR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	0	0	1	1	1	0	0	1.500	1.575	1.654	
018.HA.1796.AFA	Norma, standar, prosedur, dan kriteria														
018.HA.1796.AFA.001	NSPK pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen		NSPK	RO Baru	0	0	1	1	1	0	0	144	151	159	
018.HA.1796.RAG	Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
018.HA.1796.RAG.007	Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor tanaman pangan		Unit	-	0	2.978	4.079	4.283	4.498	0	913.608	2.468.933	2.540.879	2.572.923	
018.HA.1796.RAG.009	Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor hortikultura		Unit	RO Baru	0	94	115	121	127	0	6.045	26.021	26.497	28.497	
018.HA.1796.RAG.010	Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor perkebunan		Unit	RO Baru	0	100	142	149	156	0	13.378	31.570	32.624	36.551	
018.HA.1796.RAG.011	Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor peternakan		Unit	RO Baru	0	2	2	3	3	0	3.429	17.401	18.121	18.854	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.1796.RBK	Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
018.HA.1796.RBK.001	Bangunan mesin pengering (vertical dryer) sub sektor tanaman pangan		Unit	-	0	140	186	195	205	0	50.631	154.743	158.731	177.918	
018.HA.1796.RBK.002	Bangsai pasca panen hortikultura		Unit	-	0	50	69	72	76	0	6.204	15.771	16.260	18.273	
018.HA.1796 - Pengelolaan Alat Mesin Pertanian	Sistem Penyediaan dan Pengawasan									1.124.68 4	1.074.861	1.734.577	1.795.67 1	1.860.36 0	
SK 8	Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan														Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
IKK 8.1	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan		%	Indikator Baru	90,5	91	91,5	92	92,5	1.124.68 4	1.074.861	1.734.577	1.795.67 1	1.860.36 0	
	O.1 Alsintan pra panen untuk lumbung pangan														
018.HA.1796.RAG	Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
018.HA.1796.RAG.xxx	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan untuk lumbung pangan		Unit	RO Baru	12.149	16.813	20.175	24.211	29.053	1.124.68 4	1.074.861	1.731.577	1.792.67 1	1.857.36 0	
018.HA.1796.RAG.xxx	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura untuk lumbung pangan		Unit	RO Baru	0	0	100	100	100	0	0	1.000	1.000	1.000	
018.HA.1796.RAG.xxx	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan untuk lumbung pangan		Unit	RO Baru	0	0	100	100	100	0	0	1.000	1.000	1.000	
018.HA.1796.RAG.xxx	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan untuk lumbung pangan		Unit	RO Baru	0	0	100	100	100	0	0	1.000	1.000	1.000	
018.HA.1796 - Pengelolaan Alat Mesin Pertanian	Sistem Penyediaan dan Pengawasan									0	0	3.456.727	3.594.16 1	3.761.16 9	
SK 9	Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan														Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
IKK 9.1	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan		%	Indikator Baru	90,5	91	91,5	92	92,5	0	0	3.456.727	3.594.16 1	3.761.16 9	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	O.2 Alsintan pasca panen untuk lumbung pangan														
018.HA.1796.RAG	Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
018.HA.1796.RAG.xxx	Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor tanaman pangan		Unit	RO Baru	0	0	5.079	5.283	5.498	0	0	3.291.727	3.421.161	3.579.769	
018.HA.1796.RAG.xxx	Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor hortikultura untuk lumbung pangan		Unit	RO Baru	0	0	215	221	227	0	0	160.000	168.000	176.400	
018.HA.1796.RAG.xxx	Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor perkebunan untuk lumbung pangan		Unit	RO Baru	0	0	14	14	15	0	0	2.500	2.500	2.500	
018.HA.1796.RAG.xxx	Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor peternakan untuk lumbung pangan		Unit	RO Baru	0	0	2	2	2	0	0	2.500	2.500	2.500	
018.HA.3993 - Fasilitas Pupuk dan Pestisida										793.126	642.904	1.289.995	1.290.095	1.290.095	
SK 10	Meningkatnya ketersediaan pupuk untuk lumbung pangan														Direktorat Pupuk
IKK 10.1	Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan		%	Indikator Baru	90	90,5	91	91,5	92	793.126	642.904	1.289.995	1.290.095	1.290.095	
	O.3 Pupuk untuk lumbung pangan														
018.HA.3993.AEA	Koordinasi														
018.HA.3993.AEA.001	Koordinasi pengelolaan pupuk dan pembenah tanah untuk lumbung pangan		Kegiatan	RO Baru	0	0	1	1	1	0	0	2.026	2.026	2.026	
018.HA.3993.RAG	Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
018.HA.3993.RAG.xxx	Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW)		Unit	-	281.250.000	0	0	0	0	793.126	0	0	0	0	
018.HA.3993.RAG.xxx	Bantuan Pembenah Tanah			-	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	642.904	1.287.969	1.288.069	1.288.069	
018.HA.3993 - Fasilitas Pupuk dan Pestisida										53.800	28.058	19.908	20.908	21.908	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.03.HA.7922.RBK.006	Pengembangan jaringan irigasi pertanian		Unit	Usulan RO Baru	-	-	3.000	3.000	2.643	-	-	-	-	-	
SK.2	Tersedianya sumber pengairan pertanian terhadap kebutuhan pengairan lahan pertanian non irigasi dan rawan kekeringan									92.587,12	3.264.341,80	1.118.680,00	961.000,00	1.155.280,00	
IKK 2.1	Persentase ketersediaan sumber pengairan pertanian terhadap kebutuhan		%		36,53	37,04	37,41	37,78	38,16	92.587,12	3.264.341,80	1.118.680,00	961.000,00	1.155.280,00	
018.03.HA.7922.AEA	Koordinasi														
018.03.HA.7922.AEA.001	Monitoring dan Evaluasi lingkup Irigasi Pertanian		Paket	1,00	1	1	1	1	1	1.814,82	500,00	500,00	500,00	500,00	
018.03.HA.7922.AEA.002	Monitoring dan Evaluasi lingkup Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Untuk Pertanian		Paket	RO Baru	1	1	1	1	1	1.988,80	500,00	500,00	500,00	500,00	
018.03.HA.7922.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.03.HA.7922.RBK.xxx	Embung pertanian		Unit	Usulan RO Baru	-	-	750	750	750	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
018.03.HA.7922.RBK.003	Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim		Unit	415,00	165	3.000	1.000	1.000	1.000	15.244,32	392.751,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
018.03.HA.7922.RBK.011	Irigasi Perpompaan		Unit	9.487,00	775	15.000	4.173	3.775	3.783	47.811,24	2.464.106,00	667.680,00	560.000,00	605.280,00	
018.03.HA.7922.RBK.012	Irigasi Perpipaan		Unit	5.053,00	-	3.000	1.000	1.000	1.000	-	307.950,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00	
018.03.HA.7922.RBK.111	Irigasi Hortikultura		Unit	RO Baru		1.250					38.534,80				
018.03.HA.7922.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
018.03.HA.7922.QDD.001	Pengembangan sistem pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (Upland)		Kelompok Masyarakat	22,00	22	22				25.727,94	60.000,00	-	-	-	
SK 3	Meningkatnya ketersediaan irigasi pertanian pada lumbung pangan									-	207.765,00	114.450,00	114.450,00	113.505,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.1	Presentase ketersediaan Jaringan Irigasi pada Lumbung Pangan		%	Indikator Baru	-	1,56	3,11	4,67	6,15	-	207.765,00	18.800,00	18.800,00	17.880,00	
018.03.HA.7922.RDK	OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.03.HA.7922.RDKxxx	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Pada Lumbung Pangan		Unit	Usulan RO Baru	-	940	940	940	894	-	207.765,00	18.800,00	18.800,00	17.880,00	
IKK 2.2	Persentase ketersediaan irigasi pertanian terhadap total kebutuhan irigasi pertanian untuk lumbung pangan		%	Indikator Baru	-	-	14,06	28,11	41,96	-	-	95.650,00	95.650,00	95.625,00	
018.03.HA.7922.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.03.HA.7922.RBK.xxx	Pengembangan jaringan irigasi pertanian		Unit	Usulan RO Baru	-	-	170	170	170	-	-	95.650,00	95.650,00	95.625,00	
SK 4	Meningkatnya ketersediaan air untuk lahan pertanian pada lumbung pangan									-	-	1.209.900,00	1.209.900,00	1.209.900,00	
IKK 2.1	Persentase lahan pertanian yang mendapatkan air terhadap total kebutuhan lahan pertanian untuk lumbung pangan		%		-	-	40,17	40,18	40,19	-	-	1.209.900,00	1.209.900,00	1.209.900,00	
018.03.HA.7922.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.03.HA.7922.RBK.XX X	Irigasi perpompaan pada lumbung pangan		Unit	Usulan RO Baru	-	-	6.000	6.000	6.000	-	-	960.000,00	960.000,00	960.000,00	
018.03.HA.7922.RBK.XX X	Irigasi perpipaan pada lumbung pangan		Unit	Usulan RO Baru	-	-	2.499	2.499	2.499	-	-	249.900,00	249.900,00	249.900,00	
7923 Pelindungan dan Penyediaan Lahan			Kegiatan		1	1	1	1	1	10.518.672,86	11.369.987,01	12.845.686,00	13.461.354,00	14.077.022,00	
SK.1	Terpenuhinya kebutuhan luas tanam komoditas pertanian prioritas									10.356.550,09	10.953.962,43	10.875.000,00	11.475.000,00	12.075.000,00	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.03.HA.7923.QEH.00 2	Bantuan Olah Lahan Pasca Cetak Sawah		Ha	RO Baru		225.00 0					207.765,00				
	Konsultan Pengawas Eksternal Cetak Sawah		Paket			1					87.500,00				
SK.2	Tersedianya lahan pertanian berdasarkan kebutuhan produksi pertanian									147.412,15	231.075,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
IKK 2.1	Persentase ketersediaan tambahan lahan baku terhadap kebutuhan produksi (hanya untuk sawah)		%	Indikator Baru	2	2	2	2	2	147.412,15	231.075,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
018.03.HA.7923.RBR	Dukungan Teknis														
018.03.HA.7923.RBR.00 1	Dokumen SID Cetak Sawah		Dokumen	2	25	25	25	25	25	147.412,15	231.075,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
SK.3	Dimanfaatkannya informasi hasil pemetaan lahan dan irigasi pertanian									3.003,95	10.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
IKK 3.1	Indeks pemanfaatan informasi hasil pemetaan lahan dan irigasi pertanian		Indeks	Indikator Baru	100	100	100	100	100	3.003,95	10.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
018.03.HA.7923.AEA	Koordinasi														
018.03.HA.7923.AEA.00 1	Monitoring dan Evaluasi lingkup Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian		Paket	RO Baru	1	1	1	1	1	943,22	500,00	500,00	500,00	500,00	
018.03.HA.7923.QMA	Data dan Informasi Publik														
018.03.HA.7923.QMA.00 1	Data Lahan Pertanian		Dokumen	RO Baru	3	3	3	3	3	2.060,73	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
SK.4	Meningkatnya produktivitas dan perlindungan lahan pertanian									11.706,68	174.449,58	192.186,00	207.854,00	223.522,00	
IKK 4.1	Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan		%	RPJMN 2025 - 2029	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	-	154.500,00	169.950,00	185.400,00	200.850,00	
018.03.HA.7923.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan														
018.03.HA.7923.RBO.00 1	Rehabilitasi lahan sawah		Ha	RO Baru	-	10.000	11.000	12.000	13.000	-	149.775,00	164.450,00	178.900,00	194.250,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.03.HA.7923.RBR.003	Dokumen SID Rehabilitasi Lahan Sawah		Dokumen			11	11	11	11		4.725,00	5.500,00	6.500,00	6.600,00	
IKK 4.2	Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		%	RPJMN 2025 - 2029	75	78	81	84	87	11.706,68	19.949,58	22.236,00	22.454,00	22.672,00	
018.03.HA.7923.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
018.03.HA.7923.PBR.002	Rekomendasi Pelindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	62	63	64	65	66	11.706,68	19.949,58	22.236,00	22.454,00	22.672,00	
SK 5	Meningkatnya ketersediaan lahan pertanian untuk lumbung pangan									-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
IKK 5.1	Persentase ketersediaan tambahan lahan baku pertanian untuk lumbung pangan		%	Indikator Baru	-	-	5	5	5	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
018.03.HA.7923.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan														
018.03.HA.7923.RBO.xxX	Cetak Sawah		Ha	RO Baru	-	-	50.000	50.000	50.000	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
7912 Perakitan dan Modernisasi Pertanian		Pusat								47.015,42	188.433,93	406.696,64	425.273,64	444.783,64	
SK.1	Terlindunginya sumber daya genetik tanaman pertanian										-				BBPM Biogen
IKK 1.1	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia		aksesi	4.250,00	4.700,00	4.725,00	4.750,00	4.775,00	4.800,00	-	260,00	26.683,00	28.015,00	29.417,00	
018.HA.09.7912.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk														
018.HA.09.7912.DDA.XX X	Produk Varietas Tanaman Pangan		Produk	RO Baru	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	2.205,00	2.315,00	2.431,00	
018.HA.09.7912.DDA.001	Produk Varietas Hortikultura		Produk	RO Baru	-	4,00	5,00	6,00	7,00	-	260,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
018.HA.09.7912.DDA.XX X	Produk Varietas Perkebunan		Produk	RO Baru	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	2.205,00	2.315,00	2.431,00	
018.HA.09.7912.DDA.XX X	Produk Varietas Tanaman Pakan Ternak		Produk	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.09.7912.DDA.XX X	Produk Varietas Bioteknologi Pertanian		Produk	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
018.HA.09.7912.DDA.XX X	Produk Galur Ternak		Produk	RO Baru	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	3.308,00	3.473,00	3.647,00	
018.HA.09.7912.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.RAG.XX X	Sumber Daya Genetik Pertanian yang Dikonsumsi dan Dimanfaatkan		Unit	4.250,00	-	-	4.250, 00	4.250, 00	4.250, 00	-	-	15.656,00	16.438,0 0	17.260,0 0	
SK.2	Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan														PPMP Tanaman Pangan
IKK 2.1	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan (%)		%	Indikator Baru	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	4.834,58	9.921,18	16.162,00	18.928,0 0	21.715,0 0	
018.HA.09.7912.SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk														
018.HA.09.7912.SDA.00 1	Produk Teknologi Terapan Tanaman Pangan Modern		Produk	RO Baru	-	4,00	6,00	8,00	10,00	-	4.664,00	6.996,00	9.328,00	11.660,0 0	
018.HA.09.7912.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.RAG.10 1	Benih Sumber Tanaman Pangan		Unit	1.149,00	234,00	-	-	-	-	4.834,58	-	-	-	-	
018.HA.09.7912.RAG.00 2	Benih Sumber Kedelai		Unit	RO Baru	-	35,00	37,00	39,00	41,00	-	849,73	893,00	938,00	985,00	
018.HA.09.7912.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.CAG.00 1	Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya		Unit	RO Baru	-	800.11 5,00	840.12 1,00	882.12 8,00	926.23 5,00	-	4.407,46	4.628,00	4.860,00	5.103,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.09.7912.CAG.XX X	Sarana Benih Sumber Tanaman Pangan		Unit	RO Baru	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
018.HA.09.7912.CAG.XX X	Produk Modernisasi Tanaman Pangan		Unit	RO Baru	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	500,00	500,00	500,00	
018.HA.09.7912.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.CBK.XX X	Prasarana Benih Sumber Tanaman Pangan		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
018.HA.09.7912.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
018.HA.09.7912.ABR.XX X	Rekomendasi Kebijakan Tanaman Pangan Modern		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	221,00	232,00	243,00	
018.HA.09.7912.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi														
018.HA.09.7912.AEF.XX X	Sosialisasi Teknologi Tanaman Pangan Modern		Orang	RO Baru	-	-	359,00	370,00	390,00	-	-	718,00	754,00	792,00	
SK.3	Meningkatnya adopsi teknologi digital dan smart farming dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Hortikultura														PPMP Hortikultura
IKK 3.1	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Hortikultura (%)		%	Indikator Baru	7,41	14,81	22,22	25,93	29,63	2.604,40	36.067,194	48.056,53	50.983,24	54.027,94	
018.HA.09.7912.SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk														
018.HA.09.7912.SDA.00 2	Produk Teknologi Terapan Tanaman Hortikultura Modern		Produk	RO Baru	-	8,00	10,00	12,00	14,00	-	2.798,82	3.498,53	4.198,24	4.897,94	
018.HA.09.7912.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.RAG.10 2	Benih Sumber Tanaman Hortikultura		Unit	RO Baru	52,00	-	-	-	-	2.604,40	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.09.7912.AEF.XX X	Sosialisasi Teknologi Perkebunan Modern		Orang	RO Baru	-	-	275,00	290,00	300,00	-	-	550,00	580,00	600,00	
SK.5	Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Peternakan														PPMP Peternakan dan Kesehatan Hewan
IKK 5.1	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Peternakan (%)		%	Indikator Baru	8,33	16,67	20,83	25,00	29,17	-	12.231,08	14.303,50	15.358,00	16.431,50	
018.HA.09.7912.SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk														
018.HA.09.7912.SDA.00 4	Produk Teknologi Terapan Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern		Produk	RO Baru	-	8,00	10,00	12,00	14,00	-	2.590,00	3.237,50	3.885,00	4.532,50	
018.HA.09.7912.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.CAG.00 4	Bibit Sumber Ternak		Unit	RO Baru	-	355.550,00	395.000,00	415.000,00	435.000,00	-	5.381,33	5.651,00	5.934,00	6.231,00	
018.HA.09.7912.CAG.00 5	Benih Sumber Tanaman Pakan Ternak		Unit	RO Baru	-	394.286,00	394.286,00	394.286,00	394.286,00	-	135,66	143,00	151,00	159,00	
018.HA.09.7912.CAG.01 1	Sarana Bibit Sumber Ternak		Unit	RO Baru	-	54,00	54,00	54,00	54,00	-	1.124,09	1.181,00	1.241,00	1.304,00	
018.HA.09.7912.CAG.XX X	Produk Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan		Unit	RO Baru	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	500,00	525,00	552,00	
018.HA.09.7912.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.CBK.00 4	Prasarana Bibit Sumber Ternak		Unit	RO Baru	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.09.7912.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
018.HA.09.7912.ABR.XX X	Rekomendasi Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	221,00	232,00	243,00	
018.HA.09.7912.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi														
018.HA.09.7912.AEF.XX X	Sosialisasi Teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern		Orang	RO Baru	-	-	185,00	195,00	205,00	-	-	370,00	390,00	410,00	
SK.6	Terwujudnya pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian														BBPM Mekanisasi Pertanian
IKK 6.1	Indeks pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian		Nilai Indeks	Indikator Baru	51,00	55,00	60,00	65,00	70,00	-	4.862,00	6.694,00	7.903,00	9.348,00	
018.HA.09.7912.SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk														
018.HA.09.7912.SDA.00 8	Produk Teknologi Terapan Mekanisasi Pertanian Modern		Produk	RO Baru	-	11,00	13,00	15,00	17,00	-	4.862,00	5.835,00	7.002,00	8.403,00	
018.HA.09.7912.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.CAG.XX X	Produk Modernisasi Mekanisasi Pertanian		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	500,00	525,00	552,00	
018.HA.09.7912.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
018.HA.09.7912.ABR.XX X	Bahan Rekomendasi Kebijakan Mekanisasi Pertanian Modern		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	221,00	232,00	243,00	
018.HA.09.7912.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi														
018.HA.09.7912.AEF.XX X	Sosialisasi Teknologi Mekanisasi Pertanian Modern		Orang	RO Baru	-	-	69,00	72,00	75,00	-	-	138,00	144,00	150,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.09.7912.SDC.00 1	Model Pertanian modern		Produk	RO Baru	-	2,00	34,00	34,00	34,00	-	495,64	521,00	548,00	576,00	
018.HA.09.7912.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
018.HA.09.7912.ABR.XX X	Bahan Rekomendasi Kebijakan Pertanian Modern		Rekomend asi Kebijakan	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	441,00	463,00	486,00	
018.HA.09.7912.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.CAG.XX X	Produk Modernisasi Pertanian		Produk	RO Baru	-	-	34,00	34,00	34,00	-	-	7.497,00	7.572,00	7.648,00	
018.HA.09.7912.CAG.XX X	Sarana Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi		Unit	RO Baru	-	-	34,00	34,00	34,00	-	-	18.191,00	18.373,0 0	18.557,0 0	
018.HA.09.7912.CAG.10 6	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi		Unit	1.962,00	1.962, 00	-	-	-	-	32.163,6 4	-	-	-	-	
018.HA.09.7912.CAG.00 6	Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	RO Baru	-	587,00	617,00	648,00	681,00	-	11.220,48	12.282,00	12.372,0 0	12.491,0 0	
018.HA.09.7912.CAG.10 7	Benih Sumber Tanaman Hortikultura Spesifik Lokasi		Unit	RO Baru	148,00	-	-	-	-	7.412,80	-	-	-	-	
018.HA.09.7912.CAG.00 7	Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	RO Baru	-	298.79 9,00	313.73 9,00	329.42 6,00	345.89 8,00	-	5.011,53	5.463,00	5.527,00	5.604,00	
018.HA.09.7912.CAG.00 8	Benih Sumber Tanaman Perkebunan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	RO Baru	-	65.500, 00	68.775 ,00	72.214 ,00	75.825 ,00	-	1.635,70	1.818,00	1.804,00	1.895,00	
018.HA.09.7912.CAG.XX X	Benih Sumber Tanaman Pakan Ternak Spesifik Lokasi		Unit	RO Baru	-	-	100,00	105,00	111,00	-	-	500,00	525,00	552,00	
018.HA.09.7912.CAG.00 9	Bibit Sumber Peternakan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	RO Baru	-	144.00 0,00	151.20 0,00	158.76 0,00	166.69 8,00	-	3.893,74	4.189,00	4.294,00	4.309,00	
018.HA.09.7912.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.HA.09.7912.RAG.00 5	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi		Unit	RO Baru	-	2.186,0 0	2.296, 00	2.411, 00	2.532, 00	-	37.262,37	39.226,00	40.111,9 0	40.138,0 0	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 4.1	Indeks hilirisasi komoditas tanaman pangan unggulan		Nilai	indikator baru	0,43	0,57	0,71	0,86	1,00						
SP.5	Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura														Ditjen Hortikultura
IKP 5.1	indeks harga yang diterima petani Hortikultura		Nilai	141,82	141,83	141,84	141,85	141,86	141,87						
SP.6	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura														Ditjen Hortikultura
IKP 6.1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura		Nilai	indikator baru	0,80	0,82	0,85	0,87	0,90						
SP.7	Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura														Ditjen Hortikultura
IKP 7.1	Volume ekspor komoditas hortikultura		Ribu Ton	354	360	370	380	390	400						
SP.8	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi														Ditjen Hortikultura
IKP.8.1	Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan		%	indikator baru	0,07	0,27	0,67	0,87	1,00						
SP.9	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan														
IKP 9.1	Produksi Kelapa Sawit		Ton	235.421.494	239.646.870	243.241.575	245.432.325	253.040.740	257.074.690						
IKP 9.2	Produksi Kelapa		Ton	2.792.228	2.880.690	2.890.917	2.901.144	2.911.371	2.936.021						
IKP 9.3	Produksi Sagu		Ton	393.284	393.623	413.304	433.969	455.667	478.451						
IKP 9.4	Produksi Lada		Ton	58.897	64.408	64.408	64.537	64.601	64.666						
IKP 9.5	Produksi Pala		Ton	39.558	41.527	41.568	41.610	41.652	41.693						
IKP 9.6	Produksi Cengkeh		Ton	133.408	133.570	133.703	133.837	133.971	134.105						
IKP 9.7	Produksi Vanili		Ton	1.212	1.582	1.585	1.585	1.587	1.588						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 9.8	Produksi Kopi		Ton	758.725	780.95 7	786.11 9	791.43 4	796.77 6	802.21 0						
IKP 9.9	Produksi Tebu		Ton	33.216.6 12	36.813 .539	39.555. 979	42.478 .762	60.450 .243	84.714 .460						
IKP 9.10	Produksi Karet		Ton	2.132.08 8	2.496. 364	2.470.6 76	2.756. 865	2.917. 026	3.080. 114						
IKP 9.11	Produksi Kakao		Ton	617.112	632.78 7	633.29 0	633.79 2	634.29 4	634.79 6						
IKP 9.12	Produksi Teh		Ton	116.418	116.55 5	116.57 9	116.60 2	116.62 4	116.64 8						
IKP 9.13	Produksi Jambu Mete		Ton	136.505	136.64 2	136.91 5	137.25 7	137.60 0	138.01 3						
IKP 9.14	Produksi Tanaman Palma Lainnya		Ton	186.765	188.23 6	189.89 9	192.27 0	194.17 3	195.95 3						
IKP 9.15	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya		Ton	283.070	317.79 0	383.71 9	400.83 1	417.94 6	435.06 5						
SP.10	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi														Ditjen. Perkebunan
IKP.10.1	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi		Juta Ton	Indikator Baru	66,37	87,35	89,97	93,67	98,78						
SP 11	Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun														Ditjen Perkebunan
IKP 11.1	Indeks harga yang diterima Pekebun		Nilai	Indikator Baru	154,80	160,10	165,70	171,40	177,30						
SP 12	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan														Ditjen Perkebunan
IKP 12.1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan		Nilai	Indikator Baru	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85						
SP 13	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan														Ditjen Perkebunan
IKP 13.1	Volume ekspor komoditas perkebunan		ribu ton	38.034,0 0	38.224 ,00	38.415, 00	38.607 ,00	38.800 ,00	38.994 ,00						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SP.14	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi														Ditjen Perkebunan
IKP 14.1	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan		Nilai	Indikator Baru	1,30	1,50	1,80	2,00	2,20						
SP.15	Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak														
IKP 15.1	Indeks Harga yang diterima peternak		indeks	122,91	124,75	126,62	128,52	130,45	132,41						
SP.16	Terjaminnya mutu komoditas peternakan														
IKP 16.1	Indeks Mutu komoditas peternakan		indeks	-	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57						
SP.17	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan														
IKP 17.1	volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan		Ton	489.639	499.43 2	514.41 5	540.13 6	567.14 3	595.50 0						
SP.18	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi														
IKP 18.1	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan		indeks	-	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00						
SP.19	Meningkatnya sertifikasi usahatani nasional														BRMP
IKP 19.1	Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi (%)		%	Indikator Baru	13,07	28,76	30,72	53,59	55,00						
5885 Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan										1.291.11 2,91	6.000,00	7.346,58	7.775,93	8.248,22	
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan usaha tani									1.560	2.000	2.200	2.420	2.662	Dit HH TP
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani Tanaman Pangan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani tanaman pangan		%	100	95	95	95	95	95	1.560	2.000	2.200	2.420	2.662	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.EC.5885.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, keamanan dan mutu, serta pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan		NSPK	1	1	1	4	4	4	27,85	96,79	449,79	449,79	449,79	
018.EC.5885.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.5885.CAG.002	Sarana pengolahan hasil tanaman pangan		Unit	RO Baru	1,00	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	
018.EC.5885.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.5885.RAG.001	Sarana pascapanen tanaman pangan		Unit	1.407,00	2.622,00	-	-	-	-	654.182,25	-	-	-	-	
018.EC.5885.RAG.003	Sarana pascapanen tanaman pangan (QW)		Unit	1,00	2.295,00	-	-	-	-	619.416,17	-	-	-	-	
5887 Hilirisasi Hasil Hortikultura										185.098,00	157.615,44	443.522,00	713.522,00	174.497,00	
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas hortikultura yang dapat dimanfaatkan usaha tani									-	400,00	500,00	600,00	600,00	Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani hortikultura terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani hortikultura		%	-	80,00	85,00	87,50	90,00	95,00						
018.EC.5887.PEH	Promosi														
018.EC.5887.PEH.020	Promosi Produk Hortikultura		Promosi	5	-	4	5	6	20						
SK.2	Terwujudnya komoditas pertanian Hortikultura bermutu dan aman									-	9.700,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura
IKK 2.1	Persentase komoditas pertanian Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian Hortikultura		%	-	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.EC.5887.PDA	Standarisasi Produk														
018.EC.5887.PDA.010	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura		produk	1.000	-	1.780	1.800	1.800	3.600						
018.EC.5887.PDC	Sertifikasi Produk														
018.EC.5887.PDC.010	Sertifikat Produk Hortikultura		produk	100	-	150	150	150	300						
SK.3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas pertanian hortikultura siap ekspor									184.598,00	144.961,90	430.272,00	700.172,00	161.098,00	Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura
IKK 3.1	Persentase produk komoditas hortikultura siap ekspor terhadap total potensi ekspor hortikultura		%	-	5	5	5	5	5						
018.EC.5887.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
018.EC.5887.QDD.021	Kelompok Tani terlatih GAP		Kelompok masyarakat	110	-	135	140	140	300						
018.EC.5887.QDD.022	Kelompok Tani Terlatih GHP		Kelompok masyarakat	40	-	40	50	50	100						
018.EC.5887.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
018.EC.5887.RAI.010	<i>Horticulture Development of Dryland Areas Project</i>		Unit	1	500	887	2.000	2.000	1.500						
SK.4	Meningkatnya komoditas hortikultura unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing									500,00	2.554,00	3.000,00	3.000,00	3.049,00	Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura
IKK 4.1	Persentase komoditas hortikultura yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas hortikultura unggulan		%	-	66,67	73,33	80,00	86,67	100						
018.EC.5887.AEA	Koordinasi														
018.EC.5887.AEA.011	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Hilirisasi Hasil Hortikultura		Kegiatan	40	38	38	38	38	38						
018.EC.5887.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
018.EC.5887.ABR.012	Rekomendasi Kebijakan Hilirisasi Hasil Hortikultura		Rekomendasi Kebijakan	-	-	5	5	5	5						

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1777.QDC.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma		Orang	-	-	3.800	4.600	5.200	6.000						
SK.2	Tersedianya komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi														Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan
IKK 2.1	Persentase ketersediaan komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi		%	Indikator Baru	28	36	37	37	38						
1777.AEA	Koordinasi														
1777.AEA.002	Koordinasi, Bimtek, Pembinaan, Monev dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit untuk mendukung Bio Energi		Kegiatan	-	1	1	1	1	1						
5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim Dan Tahunan										1.811.29 1,96	1.721.379, 76	1.970.829, 86	1.868.69 6,68	1.884.90 8,80	
SK.1	Terpenuhinya produktivitas tanaman semusim dan tahunan														Dit Tan Semusim dan Tahunan
IKK 1.1	Produktivitas Lada		Ton/Ha	0,62	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68						
IKK 1.2	Produktivitas Pala		Ton/Ha	0,38	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43						
IKK 1.3	Produktivitas Cengkeh		Ton/Ha	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40						
IKK 1.4	Produktivitas Vanili		Ton/Ha	0,31	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39						
IKK 1.5	Produktivitas Kopi		Ton/Ha	0,79	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82						
IKK 1.6	Produktivitas Kakao		Ton/Ha	0,71	0,71	0,71	0,72	0,72	0,72						
IKK 1.7	Produktivitas Tebu		Ton/Ha	63,78	69,98	73,42	75,82	83,50	87,40						
IKK 1.8	Produktivitas Karet		Ton/Ha	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95						
IKK 1.9	Produktivitas Teh		Ton/Ha	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62						
IKK 1.10	Produktivitas Jambu Mete		Ton/Ha	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53						
IKK 1.11	Produktivitas tanaman semusim dan tahunan lainnya		Ton/Ha	3,34	3,34	3,45	3,47	3,50	3,51						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5888.AEA	Koordinasi														
5888.AEA.001	Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan budidaya Tanaman Semusim dan Tahunan		Kegiatan	7	6	-	34	34	34						
5888.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan		NSPK	11	16	-	15	15	15						
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan														
5888.RAI.001	Kawasan Lada		Ha	200	1.200	3.438	2.362	3.000	3.100						
5888.RAI.002	Kawasan Pala		Ha	1.000	8.000	14.800	22.200	9.000	9.000						
5888.RAI.003	Kawasan Cengkeh		Ha	700	-	-	9.500	9.500	9.500						
5888.RAI.004	Kawasan Tebu		Ha	4.700	100.45 ₃	99.547	24.000	24.000	24.000						
5888.RAI.005	Kawasan Vanili		Ha	15	-	-	50	50	50						
5888.RAI.006	Kawasan Kopi		Ha	11.600	17.900	86.000	15.000	15.000	15.000						
5888.RAI.007	Kawasan Kakao		Ha	1.350	8.716	175.50 ₀	68.734	15.000	15.000						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5888.RAI.008	Kawasan Karet		Ha	1.200	-	-	15.000	15.000	15.000						
5888.RAI.009	Kawasan Jambu Mete		Ha	3.700	1.800	48.200	6.000	6.000	6.000						
5888.RAI.010	Kawasan Teh		Ha	-	-	-	4.950	4.950	4.950						
5888.CAI.001	Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya		Ha	-	-	-	1.350	1.450	1.550						
5888.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
5888.QDC.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Semusim dan Tahunan		Orang	-	-	38.200	32.200	32.200	32.200						
1779 Pelindungan Perkebunan										10.541,17	5.049,51	92.007,60	106.203,92	109.567,48	
SK.1	Terlindunginya komoditas perkebunan dari OPT dan dampak perubahan iklim														Dit Pelindungan Bun
IKSK 1.1	- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kelapa Sawit		%	71	75	75	76	76	76						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK 1.2	- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kelapa		%	31	35	35	36	36	36						
IKSK 1.3	- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Sagu		%	45	45	45	46	46	46						
IKSK 1.4	- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Lada		%	25	25	25	26	26	26						
IKSK 1.5	- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Pala		%	20	20	20	21	21	21						
IKSK 1.6	- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Cengkeh		%	40	40	40	41	41	41						
IKSK 1.7	- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Vanili		%	48	60	60	61	61	61						
IKSK 1.8	- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kopi		%	77	77	77	78	78	78						
IKSK 1.9	- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tebu		%	15	35	35	36	36	36						

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun		Ha	81	-	22	400	400	400						
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan		Ha	4.045	-	450	5.350	6.275	6.275						
1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
1779.QDD.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan		Kelompok Masyarakat	51	23	4	23	23	23						
1779.QDD.002	Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		Kelompok Masyarakat	-	-	13	210	260	257						
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan		Unit	61	62	-	62	62	62						
SK.2	Terwujudnya layanan perlindungan perkebunan														UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKSK 2.1	persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.2	persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.3	persentase layanan perlindungan komoditas Sagu di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.4	persentase layanan perlindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK 2.5	persentase layanan perlindungan komoditas Pala di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.6	persentase layanan perlindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.7	persentase layanan perlindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.8	persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.9	persentase layanan perlindungan komoditas Tebu di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.10	persentase layanan perlindungan komoditas Karet di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.11	persentase layanan perlindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.12	persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.13	persentase layanan perlindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.14	persentase layanan perlindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.15	persentase layanan perlindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.16	persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.17	persentase layanan perlindungan komoditas Tebu di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK 2.18	persentase layanan perlindungan komoditas Karet di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.19	persentase layanan perlindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.20	persentase layanan perlindungan komoditas Teh di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.21	persentase layanan perlindungan komoditas Jambu Mete di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.22	persentase layanan perlindungan komoditas semusim dan tahunan lainnya di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.23	persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.24	persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.25	persentase layanan perlindungan komoditas Sagu di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.26	persentase layanan perlindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.27	persentase layanan perlindungan komoditas Pala di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.28	persentase layanan perlindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.29	persentase layanan perlindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK 2.30	persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	100	100	100	100	100	100						

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK 1.1	- Persentase ketersediaan benih kelapa sawit terhadap kebutuhan produksi kelapa sawit		%	Indikator Baru	80	80	85	85	90						
IKSK 1.2	- Persentase ketersediaan benih kelapa terhadap kebutuhan produksi kelapa		%	Indikator Baru	75	75	80	80	80						
IKSK 1.3	- Persentase ketersediaan benih sagu terhadap kebutuhan produksi sagu		%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						
IKSK 1.4	- Persentase ketersediaan benih lada terhadap kebutuhan produksi lada		%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						
IKSK 1.5	- Persentase ketersediaan benih pala terhadap kebutuhan produksi pala		%	Indikator Baru	70	72	75	78	80						
IKSK 1.6	- Persentase ketersediaan benih cengkeh terhadap kebutuhan produksi cengkeh		%	Indikator Baru	70	72	75	78	80						
IKSK 1.7	- Persentase ketersediaan benih vanili terhadap kebutuhan produksi vanili		%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						
IKSK 1.8	- Persentase ketersediaan benih kopi terhadap kebutuhan produksi kopi		%	Indikator Baru	75	75	80	80	80						
IKSK 1.9	- Persentase ketersediaan benih tebu terhadap kebutuhan produksi tebu		%	Indikator Baru	75	75	80	80	80						
IKSK 1.10	- Persentase ketersediaan benih karet terhadap kebutuhan produksi karet		%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						
IKSK 1.11	- Persentase ketersediaan benih kakao terhadap kebutuhan produksi kakao		%	Indikator Baru	75	75	80	80	80						
IKSK 1.12	- Persentase ketersediaan benih teh terhadap kebutuhan produksi teh		%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						
IKSK 1.13	- Persentase ketersediaan benih jambu mete terhadap kebutuhan produksi jambu mete		%	Indikator Baru	60	60	65	65	70						

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5890.RAG.001	Benih Komoditas Perkebunan Siap Salur		Unit (Batang)	-	-	291.04 2.800	81.642 .250	-	-						
SK.2	Terjaminnya mutu benih Perkebunan yang beredar														UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKSK 2.1	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa sawit yang beredar diwilayah BBPPTP Medan		%	Indikator Baru	80	80	80	80	80						
IKSK 2.2	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih aren yang beredar diwilayah BBPPTP Medan		%	Indikator Baru	80	80	80	80	80						
IKSK 2.3	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar diwilayah BBPPTP Medan		%	Indikator Baru	80	80	80	80	80						
IKSK 2.4	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih karet yang beredar diwilayah BBPPTP Medan		%	Indikator Baru	80	80	80	80	80						
IKSK 2.5	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kakao yang beredar diwilayah BBPPTP Medan		%	Indikator Baru	80	80	80	80	80						
IKSK 2.6	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kopi yang beredar diwilayah BBPPTP Medan		%	Indikator Baru	80	80	80	80	80						
IKSK 2.7	- Persentase benih bermutu terhadap total benih pala yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	Indikator Baru	80	80	85	85	90						
IKSK 2.8	- Persentase benih bermutu terhadap total benih cengkeh yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	Indikator Baru	80	80	85	85	90						
IKSK 2.9	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	Indikator Baru	75	80	80	85	85						
IKSK 2.10	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	Indikator Baru	80	80	85	85	85						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK 2.11	- Persentase benih bermutu terhadap total benih sagu yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	Indikator Baru	75	80	80	85	85						
IKSK 2.12	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa sawit yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.13	- Persentase benih bermutu terhadap total benih tebu yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.14	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kopi yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.15	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.16	- Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.17	- Persentase benih bermutu terhadap total benih jambu mete yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.18	- Persentase benih bermutu terhadap total benih pala yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.19	- Persentase benih bermutu terhadap total benih lada yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.20	- Persentase benih bermutu terhadap total benih vanili yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.21	- Persentase benih bermutu terhadap total benih teh yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						
IKSK 2.22	- Persentase benih bermutu terhadap total benih tanaman semusim lainnya yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	Indikator Baru	80	80	80	85	85						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk														
5890.BJA.001	Layanan Pengujian Mutu Benih		Produk (Batang)	12.589.7 40	12.589 .740	5.527.0 84	12.589 .740	12.589 .740	12.589 .740						
5890.BJA.002	Layanan Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan		Produk (Batang)	61.659.6 00	61.409 .600	50.334. 580	61.659 .600	61.659 .600	61.659 .600						
5890.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
5890.RDK.003	Layanan Operasional laboratorium pengujian perbenihan tanaman perkebunan		Unit	-	-	3	4	4	5						
5889. Hilirisasi Hasil Perkebunan										27.061,6 9	4.956,00	9.876,38	10.736,3 8	11.496,3 8	
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas perkebunan yang dapat dimanfaatkan usaha tani														Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani perkebunan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani perkebunan (%)		%	Indikator Baru	82	84	86	88	90						
5889.BMA	Data dan Informasi Publik														
5889.BMA.001	Informasi Pasar Komoditas Perkebunan		Dokumen	-	-	38	38	38	38						
5889.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
5889.QDD.001	Layanan Pengawasan Usaha Perkebunan		Kelompok Masyarakat	15	-	10	16	16	16						
5889.AEA	Koordinasi														
5889.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Hilirisasi Hasil Perkebunan		Kegiatan	57	17	-	-	-	-						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2	Terwujudnya komoditas perkebunan bermutu bermutu dan aman														Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan
IKK 2.1	Persentase komoditas pertanian perkebunan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian perkebunan		%	Indikator Baru	70	70	75	80	80						
5889.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk														
5889.BIA.001	Pengawasan dan pengendalian Mutu dan keamanan produk perkebunan		Laporan	-	-	-	12	15	17						
5889.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
5889.QDD.002	Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan komoditas Perkebunan kelompok masyarakat		Kelompok Masyarakat		-	-	7	7	7						
				-											
SK.3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas perkebunan siap ekspor														Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan
IKK 3.1	Persentase produk komoditas perkebunan siap ekspor terhadap total potensi ekspor perkebunan		%	Indikator Baru	70	73	76	80	83						
5889.AEH	Promosi														
5889.AEH.001	Promosi Produk Hasil Perkebunan		Promosi	15	-	5	5	5	5						
SK.4	Meningkatnya komoditas perkebunan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing														Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan
IKK 4.1	Persentase komoditas perkebunan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas perkebunan unggulan		%	Indikator Baru	72	74	76	78	80						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5889.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
5889.QDD.003	Pembinaan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan		Kelompok Masyarakat	-	-	-	5	5	5						
5889.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/ Pedoman Hilirisasi Hasil Perkebunan		NSPK	8	14	-	14	14	14						
5889.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
5889.ABR.001	Kebijakan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan (Hilirisasi Bidang Perkebunan)		Rekomendasi kebijakan	-	-	12	10	10	10						
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	-	Unit	45	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	-	Unit	50	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-		-						-	-	-	-	-	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	-	Unit	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5889.PDA	Standarisasi Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	-	STDB	42.001	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5891 Hilirisasi Hasil Peternakan										4.500,00	25.000,00	80.377,00	81.524,00	84.471,00	
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan									300,00	400,00	600,00	700,00	1.000,00	
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan	Pusat	%	100	100	100	100	100	100	300,00	400,00	600,00	700,00	1.000,00	
018.06.EC.5891.AFA	Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur									300,00	400,00	600,00	700,00	1.000,00	
018.06.EC.5891.AFA 001	NSPK Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan		NSPK	RO baru	3	4	4	4	4	300,00	400,00	600,00	700,00	1.000,00	
SK.2	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor									-	860,00	3.077,00	3.474,00	3.750,00	
IKK 2.1	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan	Pusat	%	40	45	50	55	60	65	-	860,00	3.077,00	3.474,00	3.750,00	
018.06.EC.5891.PEH	Promosi									-	860,00	3.077,00	3.474,00	3.750,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.06.EC.5891.PEH 001	Promosi produk dan usaha peternakan		Promosi	RO baru	-	5	6	7	8	-	860,00	3.077,00	3.474,00	3.750,00	
SK.3	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing									2.276,81	1.970,00	4.800,00	4.800,00	5.280,00	
IKK 3.1	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan	Pusat	%	-	20	40	60	80	100	2.276,81	1.970,00	4.800,00	4.800,00	5.280,00	
018.06.EC.5891.AEA	Koordinasi									2.276,81	1.970,00	4.800,00	4.800,00	5.280,00	
018.06.EC.5891.AEA 001	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan		Kegiatan	4	4	-	-	-	-						
018.06.EC.5891.AEA 002	Koordinasi Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan		Kegiatan	RO baru	-	10	12	14	16	2.276,81	1.970,00	4.800,00	4.800,00	5.280,00	
018.06.EC.5891.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									-	-	-	-	-	
018.06.EC.5891.RAG 001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan		Unit	41	-	-	7	7	10		-				
018.06.EC.5891.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									-	-	-	-	-	
018.06.EC.5891.RBK 001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan		Unit	38	-	-	7	7	10		-				
SK.4	Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan									-	21.500,00	66.500,00	66.800,00	67.921,00	
IKK 4.1	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pusat	%	15,76	16,26	16,76	17,26	17,76	18,26	-	21.500,00	66.500,00	66.800,00	67.921,00	
018.06.EC.5891.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga									-	21.500,00	66.500,00	66.800,00	67.921,00	
018.06.EC.5891.QDB 003	Fasilitasi dan Pembinaan Investasi Peternakan		Lembaga	RO baru	-	274	274	274	274	-	21.500,00	66.500,00	66.800,00	67.921,00	
SK.5	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu									1.923,19	270,00	5.400,00	5.750,00	6.520,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.1	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	Pusat	%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	1.923,19	220,00	4.900,00	5.000,00	5.320,00	
IKK 5.2	Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian di BPMSPH		%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	50,00	500,00	750,00	1.200,00	
018.06.EC.5891.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				20	6	8	10	12	1.923,19	220,00	4.900,00	5.000,00	5.320,00	
018.06.EC.5891.QDB 001	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor		Lembaga	43	20	-	-	-	-	1.923,19	0	0	0	0	
018.06.EC.5891.QDB 002	Fasilitasi dan Pembinaan Mutu, Pasca Panen, dan Pengolahan Hasil Peternakan		Lembaga	RO baru	-	6	8	10	12	-	220,00	4.900,00	5.000,00	5.320,00	
018.06.EC.5891.QIC	Pengawasan dan pengendalian lembaga									-	50,00	500,00	750,00	1.200,00	
018.06.EC.5891.QIC 001	Pengawasan Penerapan Jaminan Mutu pada Unit Usaha Produk Hasil Peternakan		Lembaga	RO baru	-	4	6	8	10	-	50,00	500,00	750,00	1.200,00	
7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian		Pusat								149.364,75	564.676,60	599.210,11	146.526,73	153.873,46	
SK.1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman pangan														PPMP – Tanaman Pangan
IKK 1.1	Persentase produk usaha tani tanaman pangan yang tersertifikasi (%)		%	Indikator Baru	6,67	13,33	20,00	26,67	33,33	3.754,28	1.849,51	7.833,00	8.225,00	8.635,00	
018.EC.09.7911.ADA	Standarisasi Produk														
018.EC.09.7911.ADA.XX X	Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan		Standar	5,00	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	662,00	695,00	729,00	
018.EC.09.7911.ADA.XX X	Konsep Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan		Standar	11,00	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	662,00	695,00	729,00	
018.HA.09.7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi														
018.EC.09.7911.AEF.XX X	Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan yang disebarluaskan		Orang	1.690,00	-	-	3.583,00	3.763,00	3.950,00	-	-	1.433,00	1.505,00	1.580,00	

[illegible]

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.EC.09.7911.CBK.XX X	Prasarana Laboratorium Perkebunan Modern		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
SK.4	Meningkatnya kualitas produk usahatani peternakan dan kesehatan hewan														PPMP – Peternakan dan Kesehatan Hewan
IKK 4.1	Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi (%)		%	Indikator Baru	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00	2.791,53	1.682,55	28.354,00	29.772,0 0	31.260,0 0	
018.EC.09.7911.ADA	Standarisasi Produk														
018.EC.09.7911.ADA.XX X	Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan		Standar	8,00	-	-	15,00	16,00	16,00	-	-	5.788,00	6.078,00	6.381,00	
018.EC.09.7911.ADA.XX X	Konsep Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan		Standar	8,00	-	-	15,00	16,00	16,00	-	-	1.985,00	2.084,00	2.188,00	
018.HA.09.7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi														
018.EC.09.7911.AEF.00 4	Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disebarluaskan		Orang	1.043,00	-	-	1.860, 00	1.953, 00	2.050, 00	-	-	744,00	781,00	820,00	
018.EC.09.7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk														
018.EC.09.7911.BJA.004	Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan		Produk	500,00	2.259, 00	995,00	2.491, 00	2.616, 00	2.747, 00	2.791,53	990,51	3.079,00	3.233,00	3.395,00	
018.HA.09.7911.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CAG.00 6	Sarana Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern		Unit	15,00	-	3,00	5,00	5,00	5,00	-	692,05	15.655,00	16.438,0 0	17.260,0 0	
018.HA.09.7911.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CBK.XX X	Prasarana Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.EC.09.7911.CBK.XX X	Prasarana Laboratorium Pertanian Modern		Unit	RO Baru	-	-	34,00	38,00	38,00	-	-	39.966,00	41.964,00	44.062,00	
SK.6	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian tanaman padi														BB Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi
IKK 6.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Padi (Indeks)		Nilai	Indikator Baru	3,20	3,25	3,30	3,40	3,45	-	-	2.731,00	2.868,00	3.012,00	
018.EC.09.7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk														
018.EC.09.7911.BJA.XX X	Laporan Hasil Uji Instrumen Tanaman Padi		Produk	RO Baru	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	525,00	552,00	580,00	
018.HA.09.7911.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CAG.XX X	Sarana Laboratorium Padi Modern		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
018.HA.09.7911.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CBK.XX X	Prasarana Laboratorium Padi Modern		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
SK.7	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian veteriner														BB Perakitan dan Modernisasi Veteriner
IKK 7.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Veteriner (Indeks)		Nilai	Indikator Baru	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	-	-	2.731,00	2.868,00	3.012,00	
018.EC.09.7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk														
018.EC.09.7911.BJA.XX X	Laporan Hasil Uji Instrumen Veteriner		Produk	RO Baru	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	525,00	552,00	580,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.HA.09.7911.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CAG.XX X	Sarana Laboratorium Veteriner Modern		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
018.HA.09.7911.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CBK.XX X	Prasarana Laboratorium Veteriner Modern		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
SK.8	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumber daya lahan pertanian														BB Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
IKK 8.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian (Indeks)		Nilai	Indikator Baru	3,20	3,20	3,30	3,30	3,40	2.035,53	1.899,29	7.772,00	8.165,00	8.577,00	
018.EC.09.7911.ADA	Standarisasi Produk														
018.EC.09.7911.ADA.XX X	Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian		Standar	8,00	-	-	10,00	10,00	11,00	-	-	3.722,00	3.908,00	4.104,00	
018.EC.09.7911.ADA.XX X	Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian		Standar	8,00	-	-	10,00	10,00	11,00	-	-	606,00	637,00	669,00	
018.EC.09.7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk														
018.EC.09.7911.BJA.007	Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian		Produk	18.979,0 0	23.768 ,00	19.990, 00	26.205 ,00	27.516 ,00	28.892 ,00	1.985,30	1.842,93	2.190,00	2.300,00	2.415,00	
018.HA.09.7911.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CAG.00 4	Sarana Laboratorium SDLP Modern		Unit	14,00	9,00	19,00	27,00	29,00	31,00	50,22	56,36	151,00	162,00	173,00	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.10	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian mekanisasi pertanian														BB Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
IKK 10.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Mekanisasi Pertanian (Indeks)		Nilai	Indikator Baru	3,20	3,22	3,24	3,26	3,28	1.962,94	2.012,01	9.496,00	9.972,00	10.470,00	
018.EC.09.7911.ADA	Standarisasi Produk														
018.EC.09.7911.ADA.XX X	Rancangan Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian		Standar	12,00	-	-	12,00	13,00	13,00	-	-	4.683,00	4.918,00	5.163,00	
018.EC.09.7911.ADC	Sertifikasi Produk														
018.EC.09.7911.ADC.XX X	Sertifikasi Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian		Sertifikat	RO Baru	-	-	9,00	10,00	10,00	-	-	441,00	463,00	486,00	
018.EC.09.7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk														
018.EC.09.7911.BJA.008	Laporan Hasil Uji Instrumen Mekanisasi Pertanian		Produk	112,00	125,00	146,00	154,00	162,00	171,00	1.962,94	1.817,01	2.166,00	2.275,00	2.389,00	
018.HA.09.7911.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CAG.007	Sarana Laboratorium Alat dan Mesin Pertanian Modern		Unit	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	195,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
018.HA.09.7911.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CBK.XX X	Prasarana Laboratorium Mekanisasi Pertanian Modern		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
SK.11	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian bioteknologi dan SDG pertanian														BB Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 11.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan SDG Pertanian (Indeks)		Nilai	Indikator Baru	3,20	3,25	3,30	3,40	3,45	62,42	41,25	2.856,00	2.998,00	3.149,00	
018.EC.09.7911.ADA	Standarisasi Produk														
018.EC.09.7911.ADA.XX X	Rancangan Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian		Standar	2,00	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	881,00	925,00	971,00	
018.EC.09.7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk														
018.EC.09.7911.BJA.005	Laporan Hasil Uji Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian		Produk	11,00	15,00	10,00	11,00	12,00	13,00	62,42	41,25	100,00	105,00	111,00	
018.HA.09.7911.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CAG.XX X	Sarana Laboratorium Sumber Daya Genetik Pertanian Modern		Unit	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	772,00	810,00	851,00	
018.HA.09.7911.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.EC.09.7911.CBK.XX X	Prasarana Laboratorium Sumber Daya Genetik Pertanian Modern		Unit	RO Baru	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1.103,00	1.158,00	1.216,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI										554.766, 45	747.692,74	3.789.387, 09	3.954.38 8,15	4.140.07 0,22	BPPSDMP
SP 1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani			Indikator baru						554.766, 45	747.692,74	3.789.387, 09	3.954.38 8,15	4.140.07 0,22	BPPSDMP
IKP 1.1	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas		%		1	1	1	1	1						
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN										72.190,6 1	72.723,84	353.846,6 9	374.178, 75	395.073, 82	
SK.1	Meningkatnya kompetensi petani	Pusat		Indikator baru						19.500,2 2	1.240,00	13.958,00	15.171,0 0	16.494,0 0	Pusat Pelatihan Pertanian
IKK 1.1	SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%)	Pusat	%	Indikator Baru	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50						

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.DL.1810.AEA	Koordinasi														
018.DL.1810.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	1	-	1	1	1	500,22	-	3.473,00	3.647,00	3.829,00	
018.DL.1810.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
018.DL.1810.AFA.001	Peraturan /norma /pedoman pelatihan pertanian		NSPK	6	6	-	8	8	8	9.000,00	-	8.470,00	9.317,00	10.249,00	
018.DL.1810.BMA	Data dan Informasi Publik														
018.DL.1810.BMA.001	Data dan informasi pelatihan pertanian		Dokumen	Ro baru	-	-	1	1	1	-	-	1.815,00	1.997,00	2.196,00	
018.DL.1810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
018.DL.1810.QDB.001	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	10	10	10	10	-	190,00	200,00	210,00	220,00	
018.DL.1810.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
018.DL.1810.QDD.001	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani		Kelompok Masyarakat	1.691	1.691	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	
018.DL.1810.AEC	Kerja Sama														
018.DL.1810.AEC.001	Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian		Kegiatan	Ro baru	-	10	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	
SK.2	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan)			Indikator baru						500,00	2.957,50	13.397,00	14.322,00	15.434,00	Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian
IKK 2.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur)	UPT	%	Indikator Baru	20,00	18,00	16,00	14,00	12,00						

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.DL.1810.PDI.002	Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian		Orang	Ro baru	-	-	120	150	180	-	-	363,00	499,00	659,00	
018.DL.1810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
018.DL.1810.QDB.001	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	4	74	72	72	-	80,00	4.079,00	4.167,00	4.376,00	
018.DL.1810.AEA	Koordinasi														
018.DL.1810.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	1	-	1	1	1	250,00	-	1.000,00	1.200,00	1.400,00	
018.DL.1810.AEC	Kerja Sama														
018.DL.1810.AEC.001	Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian		Kegiatan	Ro baru	-	-	1	1	1	-	-	110,00	116,00	122,00	
SK.3	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)			Indikator baru						32.856,38	57.834,20	296.491,69	314.685,75	333.145,82	- Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) - Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan)
IKK 3.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	UPT	%	Indikator Baru	20	18	16	14	12						
018.DL.1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
018.DL.1810.SCC.001	Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur		Orang	2.328	2.028	18.567	31.258	33.258	35.258	8.249,85	20.716,66	127.156,74	135.292,69	143.428,64	
018.DL.1810.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM														
018.DL.1810.PDI.001	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		Orang	630	211	1.000	1.386	1.722	2.058	483,78	2.879,00	4.211,00	5.750,00	7.555,00	
018.DL.1810.AEA	Koordinasi														
018.DL.1810.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	8	-	9	9	9	2.000,00	-	7.814,25	7.814,25	7.814,25	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.DL.1810.AEC	Kerja Sama														
018.DL.1810.AEC.001	Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian		Kegiatan	Ro baru	-	-	9	9	9	-	-	992,57	992,57	992,57	
IKK 3.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)		%	Indikator Baru	25	23	21	19	17						
018.DL.1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
018.DL.1810.SCC.002	Pelatihan pertanian bagi non aparatur		Orang	15.409	72.171	33.685	35.685	37.685	39.685	20.122,74	33.558,55	124.897,50	131.897,50	138.897,50	
018.DL.1810.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM														
018.DL.1810.PDI.001	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		Orang	Ro baru	-	-	2.000	2.500	3.000	-	-	6.076,48	7.595,60	9.114,72	
018.DL.1810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
018.DL.1810.QDB.001	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	34	514	514	514	-	680,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	
018.DL.1810.AEA	Koordinasi														
018.DL.1810.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	7	-	9	9	9	2.000,00	-	8.930,57	8.930,57	8.930,57	
018.DL.1810.AEC	Kerja Sama														
018.DL.1810.AEC.001	Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian		Kegiatan	Ro baru	-	-	9	9	9	-	-	992,57	992,57	992,57	
SK.4	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan			Indikator Baru						19.334,01	10.692,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	- BBPMKP - BBPP - Bapeltan
IKK 4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	UPT	Skala Likert (1-5)	Indikator baru	4	4,1	4,2	4,3	4,4						

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.DL.1812.BMA.001	Data dan informasi penyuluhan pertanian		Dokumen	Ro baru	-	39	39	39	39	-	2.280,00	2.730,00	2.925,00	3.120,00	
018.DL.1812.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.DL.1812.CAG.001	Sarana Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian		Unit	Ro baru	-	38	38	38	38	-	2.280,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
018.DL.1812.CAG.002	Sarana Kerja Penyuluh Pertanian		Unit	Ro baru		10.000	10.000	10.000	10.000	-	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
018.DL.1812.CAG.003	Sarana Operasional Swasembada Pangan dan Hilirisasi		Unit	Ro baru	-	20	-	-	-	-	11.900,00	-	-	-	
018.DL.1812.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
018.DL.1812.CAN.001	Sarana TIK penyuluhan pertanian		Unit	Ro baru	-	38	39	39	39	27.700,00	2.280,00	24.618,00	24.618,00	24.618,00	
018.DL.1812.FBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
018.DL.1812.FBA.001	Fasilitas dan pembinaan Pemerintah Provinsi		Provinsi	38	39	38	38	38	38		2.850,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
018.DL.1812.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
018.DL.1812.PBR.001	Rekomendasi kebijakan terhadap pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di bawah Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian		Provinsi	Ro baru	-	1	1	-	-	-	300,00	7.600,00	-	-	
SK.2	Meningkatnya jumlah petani milenial			Indikator baru						-	12.500,00	1.010.200,00	1.011.700,00	1.013.200,00	Pusat Penyuluhan Pertanian
IKK 2.1	Persentase petani muda terhadap jumlah petani	Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekon	%	Indikator baru	22,03	22,13	22,23	22,33	22,43	-					

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		sentra si													
018.DL.1812.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
018.DL.1812.QDD.053	Fasilitasi dan pembinaan Brigade Pangan		Kelompok Masyarakat	Ro baru	-	-	5.000	5.000	5.000	-	-	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
018.DL.1812.QDD.051	Percontohan penerapan Teknologi Pertanian		Kelompok Masyarakat	420	-	1.250	5.829	5.829	5.829	-	12.500,00	582.900,00	582.900,00	582.900,00	
018.DL.1812.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
018.DL.1812.AFA.002	Peraturan /norma /pedoman regenerasi petani dan Brigade Pangan		NSPK	Ro baru	-	-	2	2	2	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
018.DL.1812.AEA	Koordinasi														
018.DL.1812.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kelompok Masyarakat	6	-	-	39	39	39	-	-	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
IKK 2.2	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekon sentra si	Kelompok Masyarakat	Indikator Baru	125	130	135	140	145	-	-	20.250,00	21.000,00	21.750,00	
018.DL.1812.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
018.DL.1812.QDD.003	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi		Kelompok Masyarakat	Ro baru	-	-	135	140	145	-	-	20.250,00	21.000,00	21.750,00	
018.DL.1812.AEA	Koordinasi														
018.DL.1812.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kelompok Masyarakat	6	-	-	1	1	1	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN										375.052,00	238.230,00	809.131,22	898.682,22	1.000.688,22	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian			Indikator Baru						375.052,00	238.230,00	809.131,22	898.682,22	1.000.688,22	- Pusat Pendidikan Pertanian - Polbangtan - SMK-PP
IKSK 1.1	Persentase SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian	Pusat dan UPT	%	Indikator Baru	80,00	80,10	80,20	80,20	80,20						
018.DL.5892.SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan														
018.DL.5892.SAC.001	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV)	UPT	Unit	4.476	4.886	4.960	5.100	5.200	5.300	109.201,00	161.500,00	195.415,00	214.957,00	236.452,00	
018.DL.5892.SAC.002	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma Tiga (D-III)	UPT	Unit	925	908	950	990	1.100	1.200	16.521,00	27.138,00	32.836,00	36.119,00	39.731,00	
018.DL.5892.SAC.003	Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian	UPT	Unit	1.209	1.053	950	1.053	1.053	1.053	12.007,00	18.475,00	24.020,22	24.020,22	24.020,22	
018.DL.5892.DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan														
018.DL.5892.DDD.001	Pendaftaran HKI Paten Inovasi Hasil Penelitian Politeknik bidang pertanian di bawah Kementerian Pertanian dalam rangka Tri Dharma PT	UPT	Kekayaan Intelektual	Ro baru	-	-	80	80	80	-	-	7.260,00	7.986,00	8.785,00	
018.DL.5892.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			Ro baru											
018.DL.5892.BDC.001	Pengabdian kepada masyarakat	Pusat dan UPT	Orang	Ro baru	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	10.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	
018.DL.5892.BDC.002	Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Muda Pertanian	UPT	Orang	Ro baru	83.780	-	-	-	-	128.810,00	-				
018.DL.5892.BDC.003	Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas petani	UPT	Orang	Ro baru	10.000	-	10.000	10.000	10.000	42.823,55	-	184.000,00	220.000,00	266.000,00	
018.DL.5892.AEA	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
018.DL.5892.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Pusat dan UPT	Kegiatan	12	8	-	12	12	12	5.750,00	-	44.600,00	56.100,00	67.700,00	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.DL.5892.PEA	Koordinasi														
018.DL.5892.PEA.001	Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS)		Kegiatan	1	1	-	-	-	-	12.359,45					
018.DL.5892.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
018.DL.5892.AFA.001	Peraturan /norma/ pedoman pendidikan pertanian	Pusat		6	6	-	7	7	7	10.000,00	-	23.000,00	26.000,00	29.000,00	
018.DL.5892.BMA	Data dan Informasi Publik														
018.DL.5892.BMA.001	Data dan informasi pendidikan pertanian	Pusat dan UPT	Dokumen	Ro baru	-	1	12	12	12	-	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
018.DL.5892.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
018.DL.5892.BDB.001	Fasilitasi Perguruan Tinggi Mitra dan SMK-PP Binaan	Pusat dan UPT	Dokumen	Ro baru	-	100	12	12	12	-	1.130,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
018.DL.5892.BDB.002	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Pertanian	Pusat dan UPT	Dokumen	Ro baru	-	1	12	12	12	-	1.070,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
018.DL.5892.CAA	Sarana Bidang Pendidikan														
018.DL.5892.CAA.001	Sarana pendidikan tinggi vokasi pertanian	UPT	Unit	11	8	8	8	8	8	1.462,00	2.113,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
018.DL.5892.CAA.002	Sarana bidang pendidikan menengah vokasi pertanian	UPT	Unit		3	3	3	3	3	890,00	1.715,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
018.DL.5892.CBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah														
018.DL.5892.CBI.001	Prasarana pendidikan menengah vokasi pertanian	UPT	Unit	Ro baru	1	3	3	3	3	228,00	3.789,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	
018.DL.5892.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi														
018.DL.5892.CBJ.002	Prasarana pendidikan tinggi vokasi pertanian	UPT	Unit	Ro baru	1	7	8	8	8	35.000,00	10.300,00	16.000,00	20.000,00	24.000,00	

[illegible]

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.DL.7930.AEC.001	Kerjasama penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian	Pusat	Kegiatan	Ro baru	-	-	1	1	1	-	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
018.DL.7930.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.DL.7930.CAG.001	Sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian	Pusat	Unit	Ro baru	3	1	1	1	1	57,10	1.146,90	1.000,00	1.500,00	2.000,00	
018.DL.7930.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
018.DL.7930.CBK.001	Prasarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian	Pusat	Unit	Ro baru	-	1	1	1	1	-	1.894,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	

Lampiran 2 Matrik Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Pertanian

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	PP 02.10 Pertumbu han nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian , kehutana n dan perikana n	SS.1, IKSS 1.2 Pertumbu han nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian , kehutana n dan perikana n	%	3,5	3,8	4,0	3,6	3,3	%	3,5	3,8	4,0	3,6	3,3											BPSDM
2	PP 02.10 Indeks Kesejaht eraan Petani (IKP)	IT.1 Indeks Kesejaht eraan Petani (IKP)	%	0,7445	0,7731	0,8038	0,8324	0,8599	%	0,7445	0,7731	0,8038	0,8324	0,8599	0	0	0	0	0						
3	KP 02.10.1 Peningka tan Produksi beras KSPP Kalimant an Tengah	IKP 2.1 Peningka tan Produksi beras KSPP Kalimant an Tengah	ton	196.98 4	844.36 2	1.332. 808	1.821.2 55	2.309. 701	ton	196.98 4	844.362	1.332.8 08	1.821.2 55	2.309.7 01	0,00	0,00	17.499, 68	26.303, 13	36.100 ,00						TP
4	KP 02.10.1 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Kalimant an Tengah	IKK 3.1 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Kalimant an Tengah	Ha	146.80 6	590.87 2	941.63 7	1.292.4 02	1.643. 167	Ha	146.80 6	590.872	941.637	1.292.4 02	1.643.1 67	-	-	17.499, 68	26.303, 13	36.100 ,00						TP
5	KP 02.10.2 Peningka tan Produksi Hortikultu ra KSPP	IKP 4.1 Peningka tan Produksi Hortikultu ra KSPP Sumatera Utara	Ton	25.840	33.440	41.040	48.640	56.240	Ton	25.840	33.440	41.040	48.640	56.240	0	0	50.000	75.000	100.00 0						HORTI

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sumatera Utara																								
6	KP 02.10.2 Peningka tan Luas panen Hortikultu ra KSPP Sumatera Utara	IKK 2.1 Peningka tan Luas panen Hortikultu ra KSPP Sumatera Utara	Ha	1.700	2.200	2.700	3.200	3.700	Ha	1.700	2.200	2.700	3.200	3.700	0	0	50.000	75.000	100.000						
7	KP 02.10.3 Peningka tan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan	IKP 2.2 Peningka tan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan	Ton	65.724	443.784	1.375.883	2.307.982	3.240.081	Ton	65.724	443.784	1.375.883	2.307.982	3.240.081	0,00	0,00	25.690,78	40.552,29	57.104,70						TP
8	KP 02.10.3 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan	IKK 3.2 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan	Ha	28.568	309.179	1.072.532	1.835.886	2.599.240	Ha	28.568	309.179	1.072.532	1.835.886	2.599.240	-	-	25.690,78	40.552,29	57.104,70						TP
9	KP 02.10.4 Peningka tan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	IKP 2.3 Peningka tan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	Ton	33.624	71.324	126.889	182.454	238.020	Ton	33.624	71.324	126.889	182.454	238.020	0	0	1.897	2.903	4.022,91						TP
10	KP 02.10.4 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	IKK 3.3 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	Ha	10.930	38.435	86.660	134.886	183.111	Ha	10.930	38.435	86.660	134.886	183.111	-	-	1.897,04	2.903,03	4.022,91						TP

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1 1	KP 02.10.4 Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	IKP 2.4. Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	Ton	49.100	60.687	81.260	117.177	181.038	Ton	49.100	60.687	81.260	117.177	181.038	0,00	0,00	119.678,03	124.277,28	129.076,54						TP
1 2	KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	IKK 3.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	Ha	9.048	10.857	14.114	19.760	29.640	Ha	9.048	10.857	14.114	19.760	29.640	-	-	119.678,03	124.277,28	129.076,54						TP
1 3	KP 02.10.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	IKP 2.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	Ton	1.310	3.847	6.535	9.382	12.393	Ton	1.310	3.847	6.535	9.382	12.393	0,00	0,00	2.144,19	2.448,10	2.750,16						TP
1 4	KP 02.10.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	IKK 3.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	Ha	189	539	889	1.239	1.589	Ha	189	539	889	1.239	1.589	-	-	2.144,19	2.448,10	2.750,16						TP
1 5	KP 02.10.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	IKP 2.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	Ton	-	964.000	2.121.000	3.168.000	3.719.000	Ton	-	964.000	2.121.000	3.168.000	3.719.000	0,00	0,00	18.575,36	29.534,83	41.742,56						
1 6	KP 02.10.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	IKK 3.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	Ha	-	665.000	1.330.000	1.900.000	1.900.000	Ha	-	665.000	1.330.000	1.900.000	1.900.000	-	-	18.575,36	29.534,83	41.742,56						TP

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I	
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Papua Selatan																									
17	KP 02.10.7 Lahan baku sawah yang dicetak	IKK 1.2 Lahan baku sawah yang dicetak	ribu ha	42,00	79,81	79,81	79,81	79,81	ribu ha	42,00	79,81	79,81	79,81	79,81	7.675.905,90	9.054.362,43	7.875.000,00	7.875.000,00	7.875.000,00							LIP
18	KP 02.10.7 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman	IKK 1.1 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman	ribu ha	6,90	12,12	12,12	12,12	12,12	ribu ha	6,90	12,12	12,12	12,12	12,12	2.680.644,18	1.899.600,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.200.000,00							LIP
19	KP 02.10.16 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	IKK 2.2 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	Lembaga	125	130	135	140	145	Lembaga	125	130	135	140	145	0	0	20.250	21.000	21.750							BPSDM
20	KP 02.10.16 Persentase petani muda terhadap jumlah petani	IKK 2.1 Persentase petani muda terhadap jumlah petani	%	22,03	22,13	22,23	22,33	22,43	%	22,03	22,13	22,23	22,33	22,43	0	12.500	1.010.200	1.011.700	1.013.200							BPSDM
21	KP 02.10.10 Produksi Daging	IKP 5.1 Produksi Daging	Juta Ton	4,96	5,10	5,25	5,41	5,56	Juta Ton	4,972	5,122	5,277	5,437	5,602	571.715,40	574.575,19	4.817.436,88	4.898.226,69	5.029.567,43							PKH
22	KP 02.10.10 Produksi Telur	IKP 5.2 Produksi telur	Juta Ton	7,43	7,75	8,04	8,43	8,79	Juta Ton	7,436	7,753	8,085	8,432	8,795	165.811,75	31.338,68	82.937,40	82.937,40	92.937,40							
23	KP 02.10.10 Produksi Susu	IKP 5.3 Produksi susu	Ribu Ton	855,57	866,43	877,53	888,85	900,40	Ribu Ton	866,285	893,960	922,448	939,554	943,637	948,00	643,32	593.320,39	584.345,78	617.065,40							

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
24	KP 02.10.11 Produksi Padi	IKP 1.1 Produksi Padi	Juta Ton	54,45	54,85	55,27	55,68	56,05	Juta Ton	54,45	54,85	55,27	55,68	56,05	867.713,13	1.587.856,00	1.410.523,68	1.518.856,00	1.449.856,00						TP
25	KP 02.10.11 Produksi Jagung	IKP 1.2 Produksi Jagung	Juta Ton	21,48	22,51	23,58	24,71	25,89	Juta Ton	21,48	22,51	23,58	24,71	25,89	640.002,76	909.000,00	827.100,00	922.878,18	894.676,29						TP
26	KP 02.10.11 Produksi Aneka Kacang	IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang	Ribu Ton	540,28	552,84	565,70	578,86	592,32	Ribu Ton	540,28	552,84	565,7	578,86	592,32	-	10.150,00	10.150,00	17.091,25	33.287,50						TP
27	KP 02.10.11 Produksi Sorghum	IKP 1.4 Produksi Sorghum	Ribu Ton	18,21	18,40	18,58	18,77	18,95	Ribu Ton	18,21	18,4	18,58	18,77	18,95	102,50	1.262,50	2.387,50	3.012,50	3.762,50						TP
28	KP 02.10.11 Produksi Ubi jalar	IKP 1.5 Produksi Ubi jalar	Ton	1.517.449	1.562.972	1.609.861	1.658.157	1.707.902	Ton	1.517.449	1.562.972	1.609.861	1.658.157	1.707.902	-	10.150,81	10.150,81	29.785,81	47.550,81						TP
29	KP 02.10.11 Produksi Kedelai	IKP 1.6 Produksi Kedelai	Ton	370.359	381.470	392.914	404.701	416.842	Ton	370.359	381.470	392.914	404.701	416.842	153,95	91.350,00	111.350,00	121.350,00	121.350,00						TP
30	KP 02.10.11 Produksi buah dan sayur	IKP 3.1 Produksi buah dan sayur	Juta Ton	30,66	31,85	33,04	34,25	35,47	Juta Ton	30,66	31,85	33,04	34,25	35,47	205.171,67	235.914,00	760.127,00	871.655,00	960.155,00						Horti
31	KP 02.10.14 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	IKK 1.1 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	komoditas	3	3	3	4	4	Komoditas	1	1	1	1	1	21.000,00	43.355,86	43.355,86	43.355,86	43.355,86						TP
32	KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	IKK 5.1 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	%	100	100	100	100	100	%	100	100	100	100	100	1.923,19	220,00	4.900,00	5.000,00	5.320,00						

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
33	KP 02.10.13 Persentase wilayah/kawasan terkontrol dari penyakit hewan	IKP 7.1 Persentase wilayah/kawasan terkontrol dari penyakit hewan	%	70	75	80	85	90	%	80	80,3	80,6	85	90	-	-	154.857,51	172.120,00	172.120,00						pkh
34	KP.02.10.17 Produksi Tanaman obat	IKP 3.2 Produksi Tanaman obat	Ton	529.523,45	532.171,06	534.831,92	537.506,08	540.193,61	Ton	529.523,45	532.171,06	534.831,92	537.506,08	540.193,61	0	0	2.000	2.000	20.000						HORTIKULTURA
35	KP.02.10.17 Produksi Florikultura	IKP 3.3 Produksi Florikultura	Ribu Tangkai	597.622,50	597.459,16	597.295,82	597.132,48	596.969,14	Ribu Tangkai	597.622,50	597.459,16	597.295,82	597.132,48	596.969,14	0	0	2.985	2.985	2.985						HORTIKULTURA
36	KP 05.01.05 Produksi Kelapa sawit	IKP 9.1 Produksi Kelapa Sawit	Ton	239.646.870	243.241.575	245.432.325	253.040.740	257.074.690	Ton	239.646.870	243.241.575	245.432.325	253.040.740	257.074.690						1.612.500	2.250.000	2.887.500	3.225.000	3.525.000	PERKEBUNAN
37	KP 05.01.05 Produksi bahan baku (CPO dan CPKO)	Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, Produksi CPO dan CPKO sudah tidak menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pertanian	ton/hektar																						
38	KP 05.01.06 Produksi kelapa	IKP 9.2 Produksi Kelapa	Ton	2.880.690	2.890.917	2.901.144	2.911.371	2.936.021	Ton	2.880.690	2.890.917	2.901.144	2.911.371	2.936.021	82.136,75	460.889,56	191.889,99	87.573,00	87.573,00						
39	KP 05.01.08 Produksi Sagu	IKP 9.3 Produksi Sagu	Ton	393.623	413.304	433.969	455.667	478.451	Ton	393.623	413.304	433.969	455.667	478.451	5.946,30	12.811,49	17.645,00	17.645,00	17.645,00						

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
40	KP 02.10.17 Produksi Lada	IKP 9.4 Produksi Lada	Ton	64.408	64.408	64.537	64.601	64.666	Ton	64.408	64.408	64.537	64.601	64.666	15.630,21	11.571,70	11.677,73	51.131,84	51.131,84						
41	KP 02.10.17 Produksi Pala	IKP 9.5 Produksi Pala	Ton	41.527	41.568	41.610	41.652	41.693	Ton	41.527	41.568	41.610	41.652	41.693	43.047,68	48.271,68	73.171,20	38.739,20	38.739,20						
42	KP 02.10.17 Produksi Cengkeh	IKP 9.6 Produksi Cengkeh	Ton	133.570	133.703	133.837	133.971	134.105	Ton	133.570	133.703	133.837	133.971	134.105	-	-	15.674,00	15.674,00	15.674,00						
43	KP 02.10.17 Produksi Vanili	IKP 9.7 Produksi Vanili	Ton	1.582	1.585	1.585	1.587	1.588	Ton	1.582	1.585	1.585	1.587	1.588	-	-	5.912,50	5.912,50	5.912,50						
44	KP 02.10.17 Produksi Kopi	IKP 9.8 Produksi Kopi	Ton	780.957	786.119	791.434	796.776	802.210	Ton	780.957	786.119	791.434	796.776	802.210	181.696,49	142.416,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00						
45	KP 02.10.17 Produksi Tebu	IKP 9.9 Produksi Tebu	Ton	36.813.539	39.555.979	42.478.762	60.450.243	84.714.460	Ton	36.813.539	39.555.979	42.478.762	60.450.243	84.714.460	1.446.411,65	1.033.124,58	908.301,79	908.301,79	908.301,79						
46	KP 02.10.17 Produksi Karet	IKP 9.10 Produksi Karet	Ton	2.496.364	2.470.676	2.756.865	2.917.026	3.080.114	Ton	2.496.364	2.470.676	2.756.865	2.917.026	3.080.114	-	-	153.012,17	153.012,17	153.012,17						
47	KP 02.10.17 Produksi Kakao	IKP 9.11 Produksi Kakao	Ton	632.787	633.290	633.792	634.294	634.796	Ton	632.787	633.290	633.792	634.294	634.796	113.310,51	290.628,00	357.527,92	241.880,75	252.150,00						
48	KP 02.10.17 Produksi Teh	IKP 9.12 Produksi Teh	Ton	116.555	116.579	116.602	116.624	116.648	Ton	116.555	116.579	116.602	116.624	116.648	-	-	121.590,52	125.182,44	124.992,87						
49	KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu	IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu	Ton	17.270,930	17.529,990	17.792,940	18.059,830	18.330,730		17.270,926	17.529,990	17.792,940	18.059,834	18.330,731	0	5.075	40.075	73.325	110.075						TP
50	KP 05.01.08 Produktivitas Ubi Kayu	IKK 1.1 Produktivitas Ubi Kayu	Ton/Hektar	27,81	28,25	28,69	29,12	29,56	Ton/ha	27,81	28,25	28,69	29,12	29,56	3.293	3.499	3.499	3.499	3.499						TP
51	KP 05.01.06 Produktivitas kelapa	IKK 1.2 Produktivitas Kelapa	Ton/Hektar	1,13	1,14	1,16	1,18	1,21	Ton/hektar	1,13	1,14	1,16	1,18	1,21	0	0	0	0	0						

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5 2	KP 05.01.06 Produktivitas sagu	IKK 1.3 Produktivitas sagu	Ton/Hektar	3,12	3,14	3,16	3,18	3,19	Ton/Hektar	3,12	3,14	3,16	3,18	3,19	0	0	0	0	0						
5 3	KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Perkebunan	IT.7 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan	%	1,94	2,04	2,32	2,43	3,03	%	1,94	2,04	2,32	2,43	3,03	0	0	0	0	0						PERKEBUNAN
5 4	KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura	IT.8 Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura	%	1,36	1,77	2,35	2,65	3,04	%	1,36	1,77	2,35	2,65	3,04	0	0	0	0	0						HORTI
5 5	KP 02.10.18 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan	IT.3 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan	indeks	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	indeks	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	0	0	0	0	0						
5 6	KP 02.10.18 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	IKK 4.1 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	%	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	%	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	0	154.500	169.950	185.400	200.850						LIP
5 7	KP 02.10.18 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan	IKK 4.2 Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan	%	75	78	81	84	87	%	75	78	81	84	87	11.706,68	19.949,58	22.236,00	22.454,00	22.672,00						LIP

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan (LP2B)	pertanian Pangan Berkelanj utan (LP2B)																							
5 8	KP 02.10.18 Persenta se produksi komodita s pertanian organik terhadap produksi total komodita s pertanian	IT.4 Persenta se produksi komodita s pertanian organik terhadap produksi total komodita s pertanian	%	1,47	1,49	1,51	1,53	1,55	%	1,47	1,49	1,51	1,53	1,55	0	0	0	0	0						
5 9	KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	IKK 3 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	variet as dan/a tau galur	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	varieta s dan/at au galur/r umpu n	38	41	44	47	50	0	0	900	900	900	0	0	0	0	0	PKH
6 0	KP 02.10.18 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindun gi/tersedi a	IKK 1.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindun gi/tersedi a	akse si	4.700	4.725	4.750	4.775	4.800	aksesi	4.700	4.725	4.750	4.775	4.800	0	260	26.683	28.015	29.417	0	0	0	0	0	BRMP
6 1	KP 02.15.02 Persenta se penuruna	IKK 3.1 Persenta se penuruna	%	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	%	3	3	3	3	3	0	1.500	22.537	22.576	22.615						PSP

N O	kegiatan prioritas/ proyek prioritas	Penugas an Indikator	Satu an	TARGET RPJMN					Satua n	TARGET RENSTRA 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELO N I	
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	n susut pangan	n susut pangan																								
6 2	KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	IKK 2.2 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	kab/kota	100	200	300	400	514	Kab/kota	100	200	300	400	514	0,00	0,00	82.347,71	95.148,00	95.148,00							PKH
6 3	KP 08.03.03 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	IT.5 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	%	0,091	0,187	0,276	0,360	0,439	%	0,091	0,187	0,276	0,360	0,439	0	0	0	0	0							

Lampiran 3 Matrik Kerangka Regulasi

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
1	RUU tentang Perubahan UU 16/2006 tentang SP3K (Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan)	Uke I: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan Pertanian Uke II: Pusat Penyuluhan Pertanian	Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyuluhan pertanian dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas guna mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga diperlukan pengaturan yang lebih holistik dan sistemik. Muatan Substansi Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yaitu bentuk kelembagaan penyuluh secara spesifik sudah ditetapkan pada tiap tingkatan pemerintahan: a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di tingkat Pusat; b. Badan Koordinasi Penyuluhan di Tingkat Provinsi; c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota; dan d. Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan	1. Penataan pengelolaan Penyuluhan Pertanian, (Kelembagaan dan Ketenagaan) untuk mendukung pewujudan swasembada pangan. 2. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian memperkuat pengembangan pertanian untuk semakin adaptif, maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan dalam menjamin ketersediaan, kelayakan dan kemandirian pangan. 3. Harmonisasi dan Kolaborasi kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pertanian pada Suburusan Penyuluhan Pertanian agar peningkatan produktivitas pertanian optimal	a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). b. Kementerian Dalam Negeri. c. Kementerian Hukum. d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. e. Badan Kepegawaian Negara. f. Organisasi Profesi Penyuluh Pertanian. g. Komisi Penyuluhan Pertanian.	1. Penyusunan Kajian dan Naskah Akademik Tahun 2025 2. Penyusunan Draf dan Rapat PAK Tahun 2026 3. Pembahasan dengan DPD dan DPR Tahun 2027 4. Pembahasan dengan DPD dan DPR Tahun 2028

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
			ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar pembentukan perangkat daerah (tatacara, jenis dan kriteria tipologi perangkat daerah), yang mengakibatkan berubahnya kelembagaan Penyuluhan pertanian pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menjadikan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 menjadi tidak efektif.			

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Suburusan Penyuluhan)	Kementerian Pertanian (BPPSDMP)	Dengan dialihkannya Penyuluh Pertanian ASN dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Penyuluh Pertanian di Kementerian Pertanian diperlukan pengaturan yang komprehensif dengan melakukan penambahan urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanian (Suburusan Penyuluhan Pertanian) yang belum tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut penambahan urusan konkuren ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.	1. Menyelaraskan dengan Pengaturan pada Undang-Undang 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Substansi pada Rancangan Perpres memuat pembagian Suburusan Penyuluhan Pertanian pada Aspek Kebijakan, Aspek Ketenagaan, Aspek Kelembagaan, dan Sasaran Penyuluhan Pertanian. 3. Harmonisasi dan Kolaborasi kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pertanian pada Suburusan Penyuluhan Pertanian agar peningkatan produktivitas pertanian optimal	1. Kementerian Sekretariat Negara 2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6. Badan Kepegawaian Negara 7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Pembentukan Panitia Antar Kementerian 7 Maret 2025 2. Pembahasan Draft oleh Panitia Antar Kementerian (Maret sd September) 3. Harmonisasi (Oktober) 4. Penetapan (November)

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
3	Revisi UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap perencanaan/non-pemrakarsa) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap penyusunan)	Diversifikasi Pengaturan Hewan/Ternak/ Unggas Memberikan kepastian hukum dalam rangka diversifikasi sumber negara produsen sapi manakala Indonesia terjadi keadaan dalam hal tertentu (akibat bencana, perlunya cadangan stok ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga) serta membatasi dominasi suatu negara eksportir sapi. Selain itu memberikan kesempatan yang sama bagi bagi Pelaku Usaha Lainnya dalam melakukan pemasukan/ importasi ternak ke Indonesia. Pelibatan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan Ternak diharapkan dapat mengakselerasi penambahan populasi dan kecukupan produk hewan, di samping dampak positif dari kebijakan dan regulasi yang membuka alternatif pasokan ternak dari negara yang tidak bebas hama dan penyakit hewan karantina dengan dilakukan tindakan karantina pengamanan maksimal. Penguatan hilirisasi peternakan Pentingnya penguatan hilirisasi peternakan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan lapangan	Regulasi ini akan mendukung PP No.5/2025 tentang Perubahan Kedua PP No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, PP No. 29/2023 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pepres No. 66/2021 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional, PP No. 25/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, PP No.3/2017 tentang Otoritas Veteriner jo PP No.34/2024.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Karantina Indonesia, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Kementerian Perdagangan, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia.	2026: Penyusunan Kajian/NA 2027-2028: tahap penyusunan RUU (penyusunan DIM, Rapat PAK, Harmonisasi, dan partisipasi publik (sosialisasi, FGD, danlokakarya) 2028: diusulkan sebagai Prolegnas Prioritas.

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
			kerja, dan membuka peluang ekonomi baru bagi Masyarakat, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan peternak dan mendukung ketahanan pangan nasional. Hilirisasi peternakan dilakukan dengan menghasilkan produk akhir bernilai tambah, seperti daging, susu, dan produk olahan lainnya. Penguatan Otoritas Veteriner antara lain Dengan Membentuk VSB VSB merupakan salah satu upaya untuk menguatkan otoritas veteriner di Indonesia guna melindungi hewan, tumbuhan, dan Masyarakat dari risiko tersebarnya penyakit hewan menular. One Health Pentingnya one health dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan yakni untuk mengatasi potensi penyebaran penyakit hewan dari hewan ke manusia atau dari hewan ke hewan serta mendukung Pembangunan berkelanjutan. Pengaturan Profesi Bidang Peternakan Dalam penyelenggaraan peternakan bahwa profesi-profesi di bidang peternakan			

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
			terlibat dalam berbagai aspek penyelenggaraan peternakan, mulai dari pemeliharaan, pembiakan, hingga pemasaran. Kolaborasi lintas profesi di bidang peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendorong kemajuan peternakan nasional.			

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
4	RPerpres tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN)	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap perencanaan/non-pemrakarsa) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap penyusunan)	Peningkatan populasi & produksi dalam rangka mendukung Makan Bergizi dan menciptakan lapangan pekerjaan.	Untuk mendukung strategi P2SDN perlu dukungan pembiayaan, jaminan lahan, infrastruktur, jaminan pasar, pembiayaan, perkarantinaan, dan perizinan dari kementerian/lembaga sehingga swasembada pangan yang menjadi Asta Cita Presiden terwujud.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Bank Tanah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perdagangan.	Thn 2025: Draft RPerpres, Partisipasi Publik (sosialisasi, FGD, dan lokakarya)
5	Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao	Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan	Amanat Pasal 17 Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.	Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kakao, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kakao; 2. Kementerin Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerin Koordinator Bidang Pangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. BRIN; 6. Perusahaan Perkebunan kakao; 7. Pekebun kakao.	2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi.

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
6	Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa	Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Amanat Pasal 17 Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.	Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kelapa, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. BRIN; 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa; 7. Pekebun Kelapa.	2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi.
7	RUU Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian (cq Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian	mewujudkan swasembada pangan dengan menetapkan KP2B dan LP2B melalui pengecualian lahan baku sawah/lahan sawah produktif untuk dialihfungsikan oleh PSN atau kepentingan umum.	pengendalian alih fungsi lahan serta penetapan LBS non KP2B dan LP2B menjadi LBS peruntukkan KP2b dan LP2B. koordinasi dengan K/L untuk dukungan penetapan LBS dan pengendalian alih fungsi lahan serta pengawasan bersama dengan pemerintah daerah	Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian ATR/BPR, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2026-2029
8	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi	Kementerian PU	1. pembagian tugas dan kewenangan jaringan irigasi antara pusat dan daerah; 2. pengaturan air irigasi; 3. Pembentukan UPT Irigasi Pertanian; 4. tata cara persetujuan pemanfaatan irigasi; dan 5. pembinaan P3A 6. pelaksanaan pengelolaan aset 7. pengawasan pengembangan	1. mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan 2. pembagian tugas dan kewenangan jaringan irigasi antara pusat dan daerah 3. Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi kewenangan pusat dilakukan oleh Menteri PU paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2025-2026, draft telah siap harmonisasi, namun terdapat perubahan organisasi kementerian masing-masing berdasarkan Perpres, draft dikembalikan oleh Kementerian Hukum untuk dikaji kembali

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
			8. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier			
9	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian	1. Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan; 2. Evaluasi terhadap tata cara alih fungsi LP2B di tingkat Pusat dan daerah; dan 3. Peningkatan Pengawasan LP2B.	mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2025, telah ditetapkan dalam prolegtan 2025 melalui Permentan No 22/Kpts /HK.140/M/01/2025.
10	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian	1. Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan; 2. Evaluasi terhadap tata cara penetapan LP2B di tingkat Pusat dan daerah; dan 3. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Nasional; 4. mekanisme insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2026, diusulkan dit teknis dengan dilengkapi naskah kebijakan dan berkas public hearing
11	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian	1. Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan; 2. evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan jaringan irigasi tingkat usaha tani	mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan penyesuaian kewenangan Kementan dalam bidang irigasi	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2027, diusulkan dit teknis dengan dilengkapi naskah kebijakan dan berkas public hearing

Lampiran 4 Manajemen Risiko

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	Anjloknya harga produk pertanian	Terbatasnya sistem penyangga harga komoditas pertanian	Penguatan mekanisme penyerapan dan pemasaran hasil pertanian melalui pengembangan kemitraan, cadangan pangan pemerintah, dan penguatan kelembagaan petani.	Ditjen Tanaman pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, BPPSDMP
					Overproduksi akibat tidak seimbangnya pola tanam dan permintaan pasar	Pengaturan pola tanam dan distribusi produks	
2				Kenaikan harga input produksi	Kenaikan harga bahan baku global	Fasilitasi subsidi dan bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) melalui koordinasi kebijakan anggaran dengan Kemenkeu.	Ditjen PSP, Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, dan Ditjen perkebunan
4			Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian	Terbatasnya akses petani terhadap teknologi pertanian	Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan teknologi	Penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian untuk memperkenalkan dan	BPPSDMP

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
						meningkatkan adopsi teknologi tepat guna	
				Terbatasnya akses petani terhadap inovasi pertanian	Kurangnya diseminasi hasil riset dan inovasi dari lembaga penelitian ke tingkat petani.	Penguatan penyuluhan dan diseminasi hasil riset melalui koordinasi dengan BRIN untuk meningkatkan adopsi inovasi pertanian.	BPPSDMP
5		Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	Perubahan iklim ekstrem	Perubahan pola curah hujan dan suhu yang memengaruhi musim tanam.	Penyusunan kalender tanam adaptif berbasis prakiraan cuaca (kerja sama BMKG).	Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Perkebunan
				Serangan organisme pengganggu tumbuhan/hewan	Kelemahan dalam sistem deteksi dini dan pengendalian hama/penyakit.	Penguatan sistem monitoring dan deteksi dini OPT/OPH., Pelatihan petani dalam pengendalian hama terpadu (PHT).	Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Perkebunan, BRMP
6				Kenaikan harga input produksi	Fluktuasi harga bahan baku pupuk, benih, dan pestisida di pasar global	Fasilitasi subsidi dan bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) melalui koordinasi kebijakan anggaran dengan Kemenkeu.	Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Sekretariat Jenderal

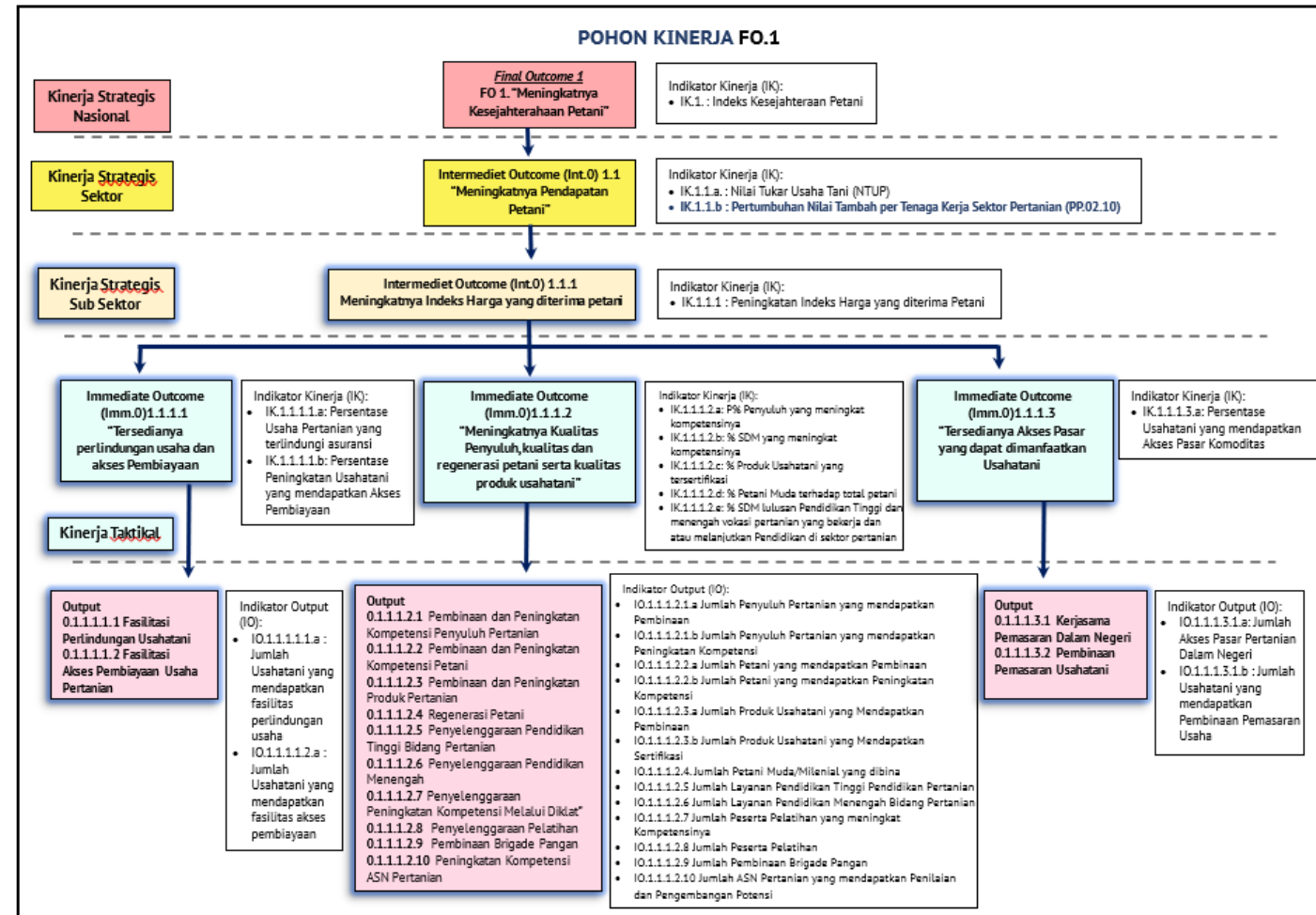
No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
				Keterbatasan infrastruktur pertanian	Belum optimalnya pembangunan, pemeliharaan, dan pemerataan infrastruktur pertanian	Pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan jalan usaha tani.	Ditjen PSP, LIP
				Degradasi dan konversi lahan	Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.	Pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), konservasi tanah dan air, serta penguatan pengawasan dan penegakan regulasi alih fungsi lahan melalui koordinasi lintas sektor	Ditjen PSP
12		Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian	Market share produk ekspor pertanian (%)	Belum meratanya penerapan standar mutu dan keamanan pangan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/petani terhadap standar mutu dan keamanan pangan	Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi standar mutu	Dit.Hilirisasi lingkup Kementan
13				Kapasitas produksi berstandar ekspor yang belum stabil	ketersediaan bahan baku berfluktuasi	Mengembangkan kemitraan antara petani dan industri pengolahan	Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
					Keterbatasan teknologi produksi dan pengolahan	Meningkatkan adopsi teknologi produksi dan pascapanen modern melalui pelatihan, demplot, dan fasilitasi alat mesin pertanian (alsintan) serta unit pengolahan hasil (UPH)	BPPSDMP, Ditjen PSP
						Mendorong sertifikasi produk berstandar ekspor	Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan
14		Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Ketersediaan bahan baku yang tidak konsisten	Musim tanam/panen yang tidak seragam	Pengembangan sistem rantai pasok terintegrasi	Ditjen TP, Hortikultura, Perkebunan, PKH
15				Rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan dan pascapanen	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha	Pelatihan dan pendampingan teknologi pengolahan	BPPSDMP, Dit Hilirisasi lingkup Kementan
16				Terbatasnya infrastruktur pendukung hilirisasi	Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian PUPR dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi	Ditjen PSP, Ditjen LIP

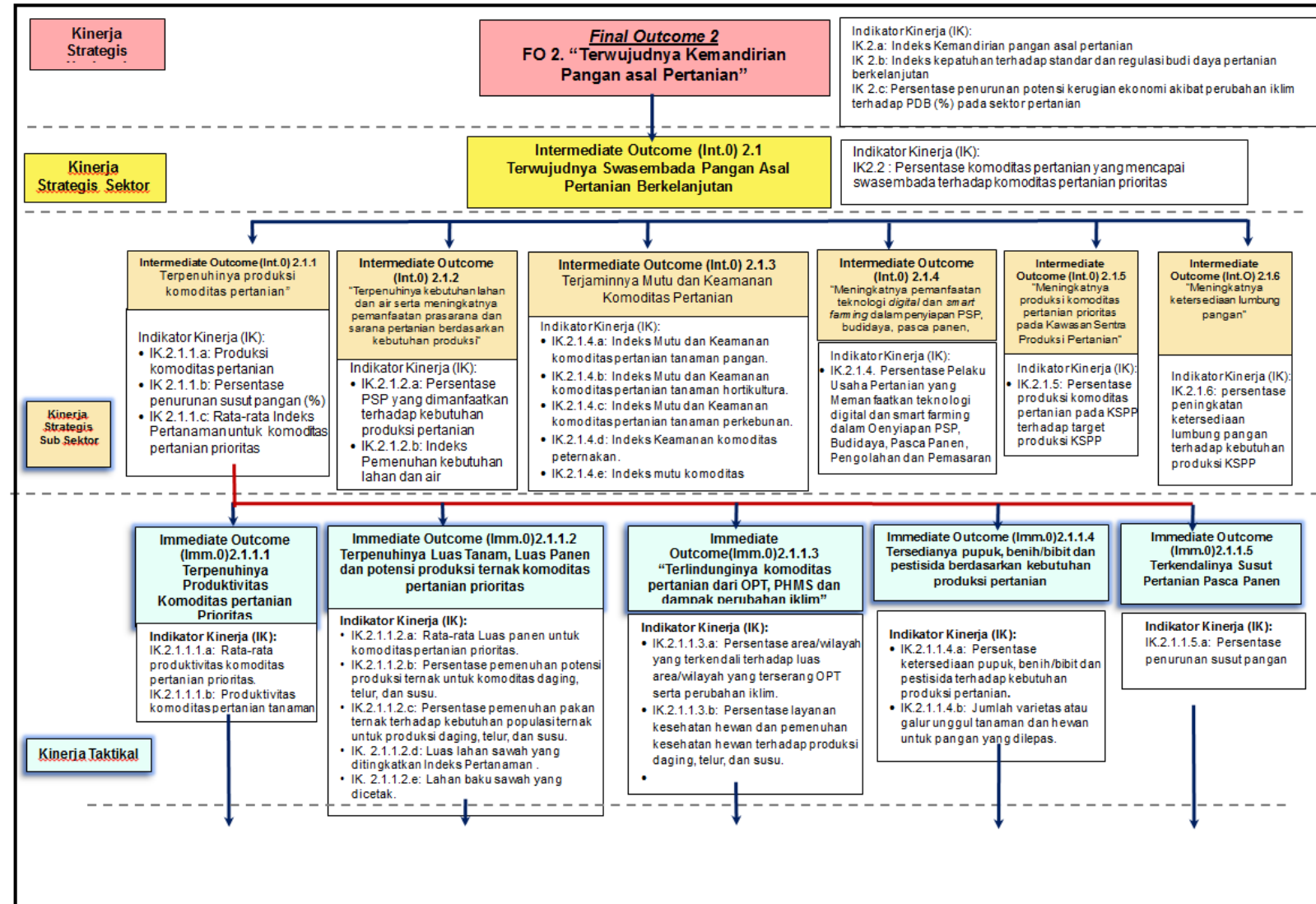
No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
17		Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi	Perubahan iklim ekstrem dan serangan hama penyakit	curah hujan tidak menentu, gelombang panas, kekeringan, banjir	Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tahan iklim dan hama (varietas unggul tahan panas, tahan penyakit)	Ditjen Perkebunan, BRMP
18				Keterbatasan fasilitas pengolahan bahan baku bio energi	Investasi infrastruktur pengolahan yang renda	Mendorong investasi dan kemitraan untuk pengembangan fasilitas pengolahan bio energi	Ditjen Perkebunan
19		Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia	Munculnya wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis	Terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan hewan serta fasilitas laboratorium veteriner.	Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan hewan melalui rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan.	Ditjen PKH
20					Perubahan iklim yang memicu munculnya vektor atau pola penyebaran penyakit baru.	Penerapan sistem pemantauan dan deteksi dini penyakit hewan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Ditjen PKH
21					Minimnya kepatuhan peternak/ pelaku usaha terhadap standar biosekuriti dan sanitasi.	Kampanye dan sosialisasi peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar biosekuriti dan sanitasi.	Ditjen PKH

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
23		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Kegiatan pengawasan tidak efektif dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan anggaran	Keterbatasan SDM auditor yang berkompeten dan tersertifikasi	Membangun sistem pengawasan terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi penyimpangan secara real-time.	Inspektorat Jenderal
25				Lemahnya keamanan siber	Minimnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola keamanan siber	Penguatan kapasitas SDM khususnya di bidang keamanan siber melalui pelatihan teknis dan sertifikasi profesional.	Sekretariat Jenderal
26				Ketidaktertiban dan inefisiensi dalam pengelolaan aset	Lemahnya koordinasi antara unit kerja pemilik aset dan pengelola aset pusat	Menyusun dan menerapkan prosedur pengelolaan aset yang tertib dan efisien, serta rutin melakukan audit aset.	Sekretariat Jenderal

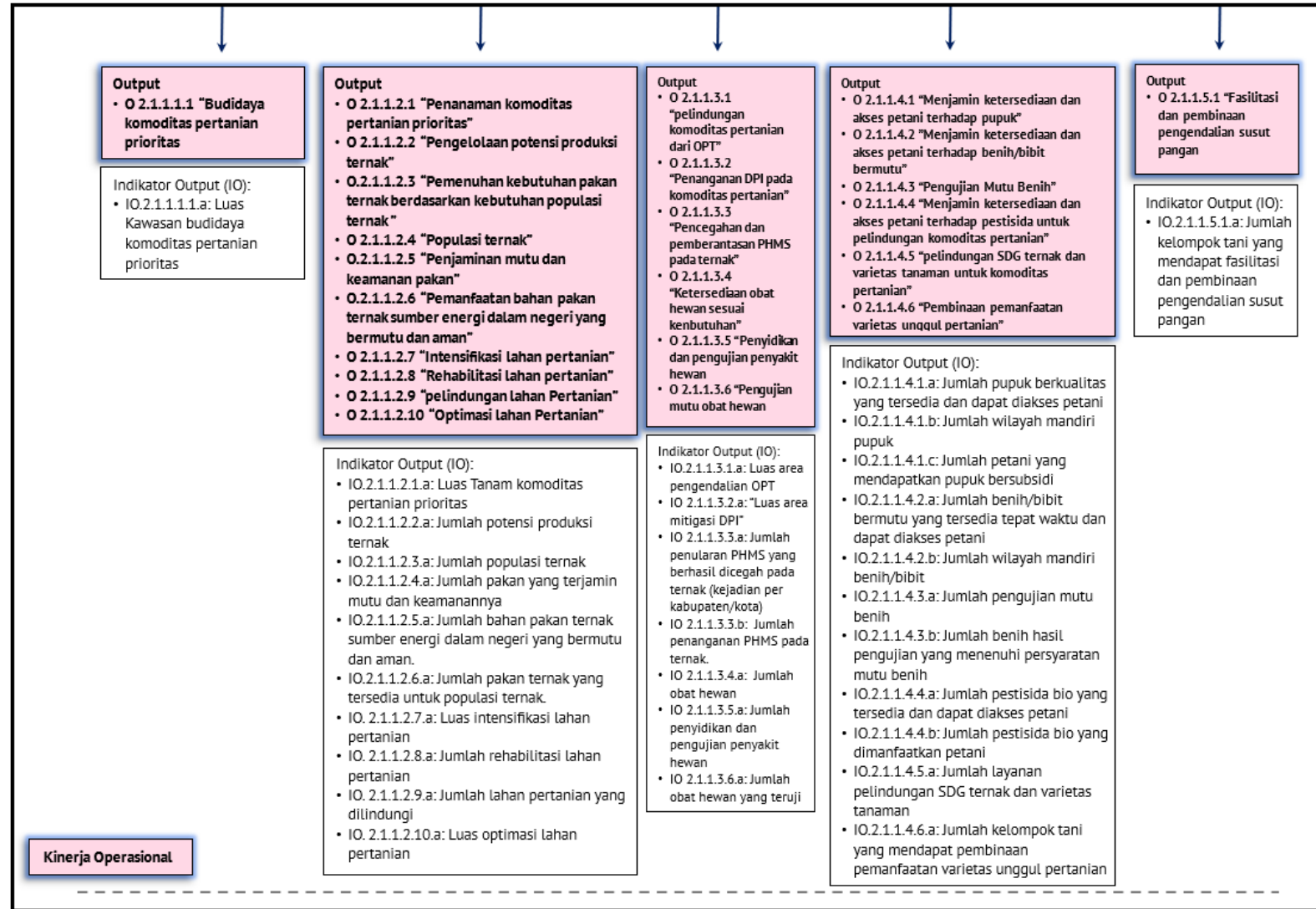
Lampiran 5 Pohon Kinerja



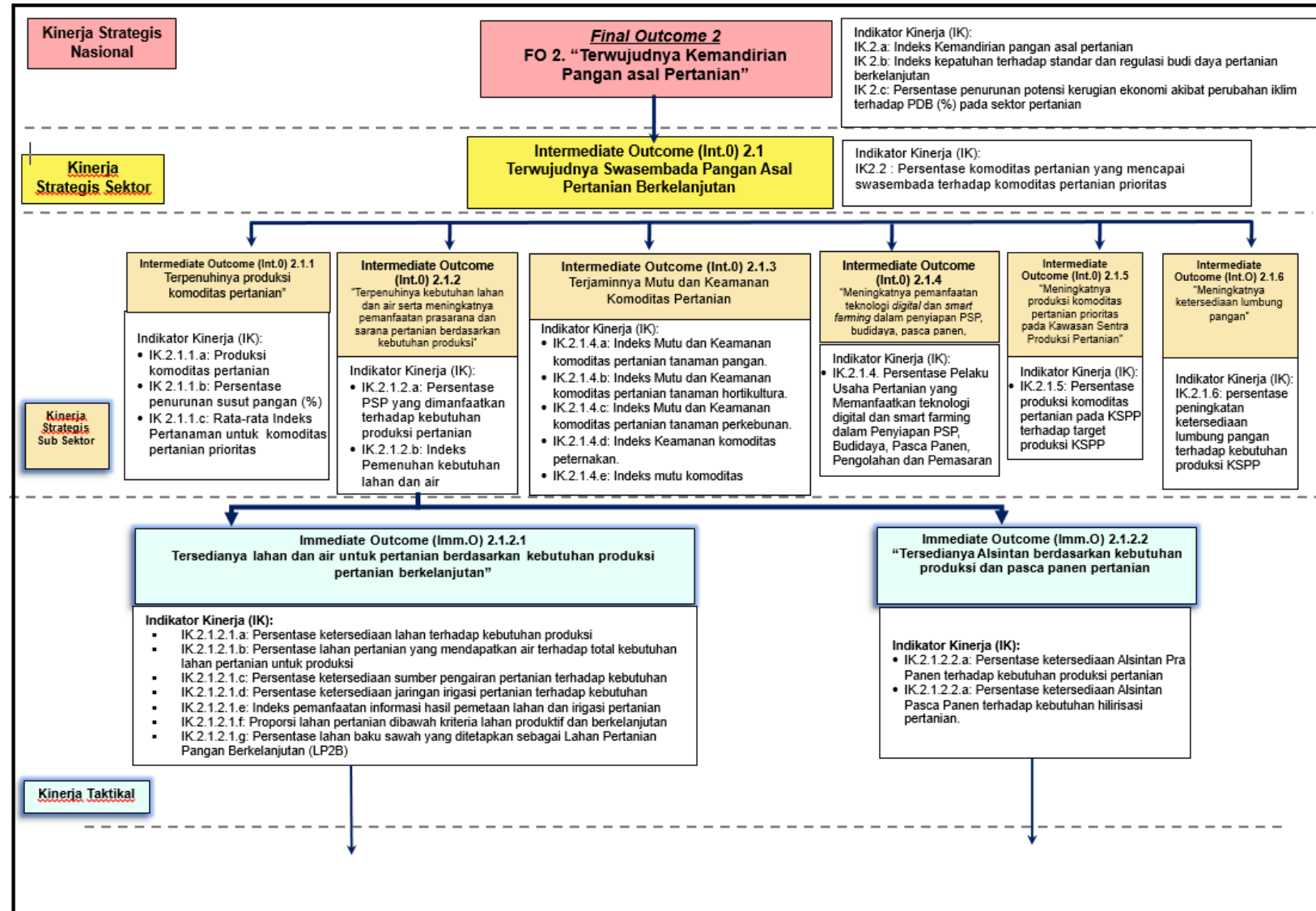
POHON KINERJA FO.2



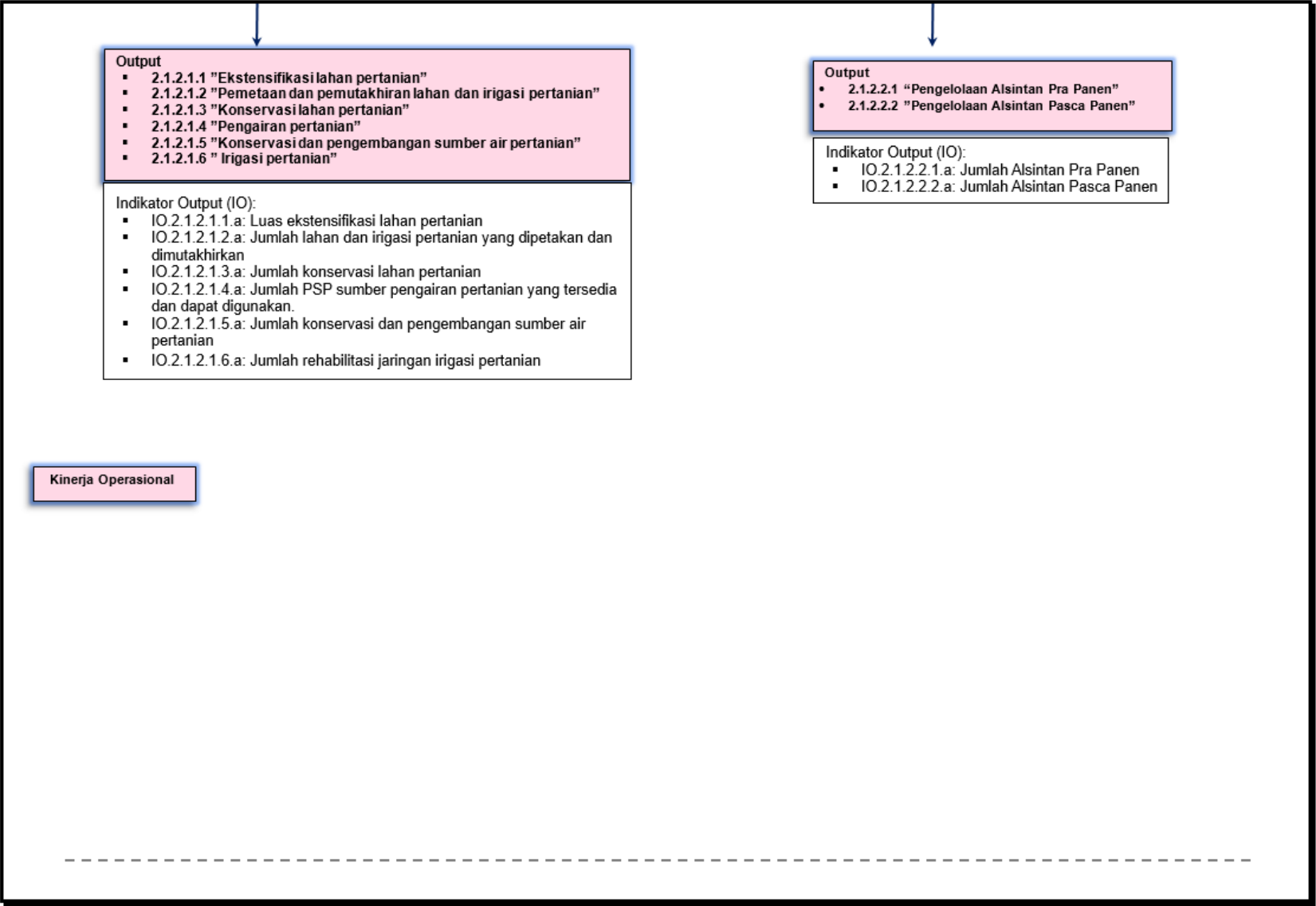
LANJUTAN POHON KINERJA



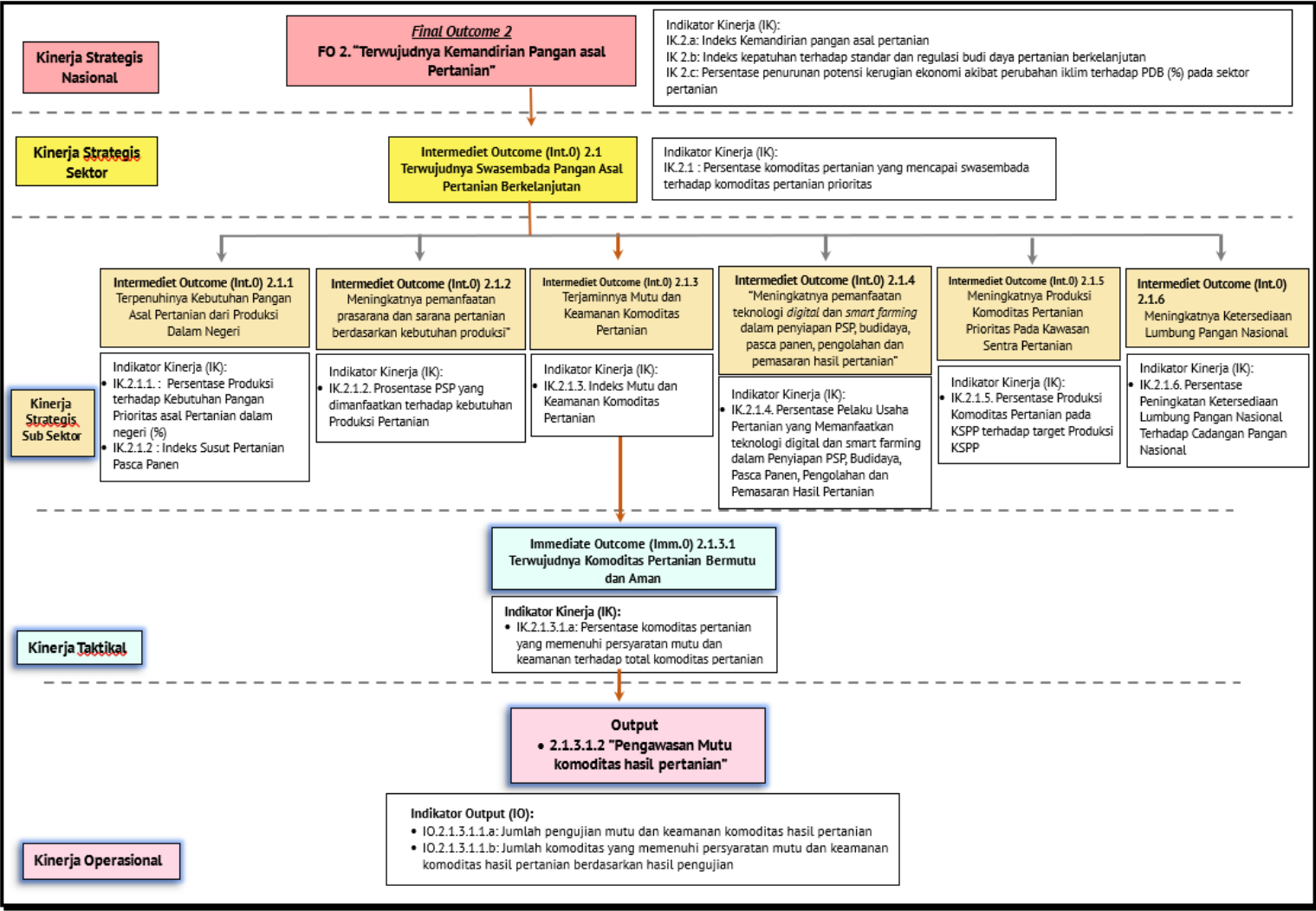
POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.2



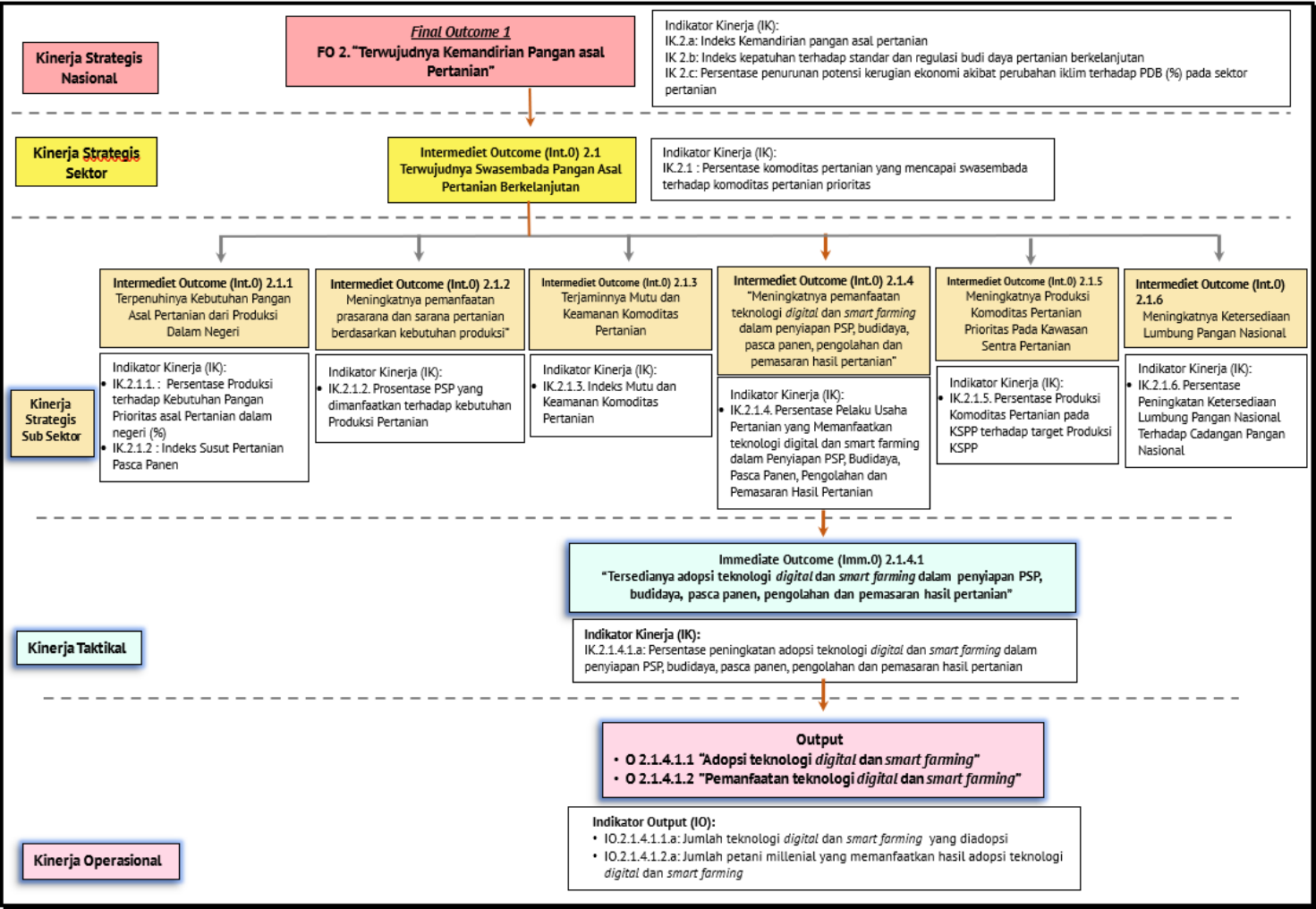
LANJUTAN INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.2



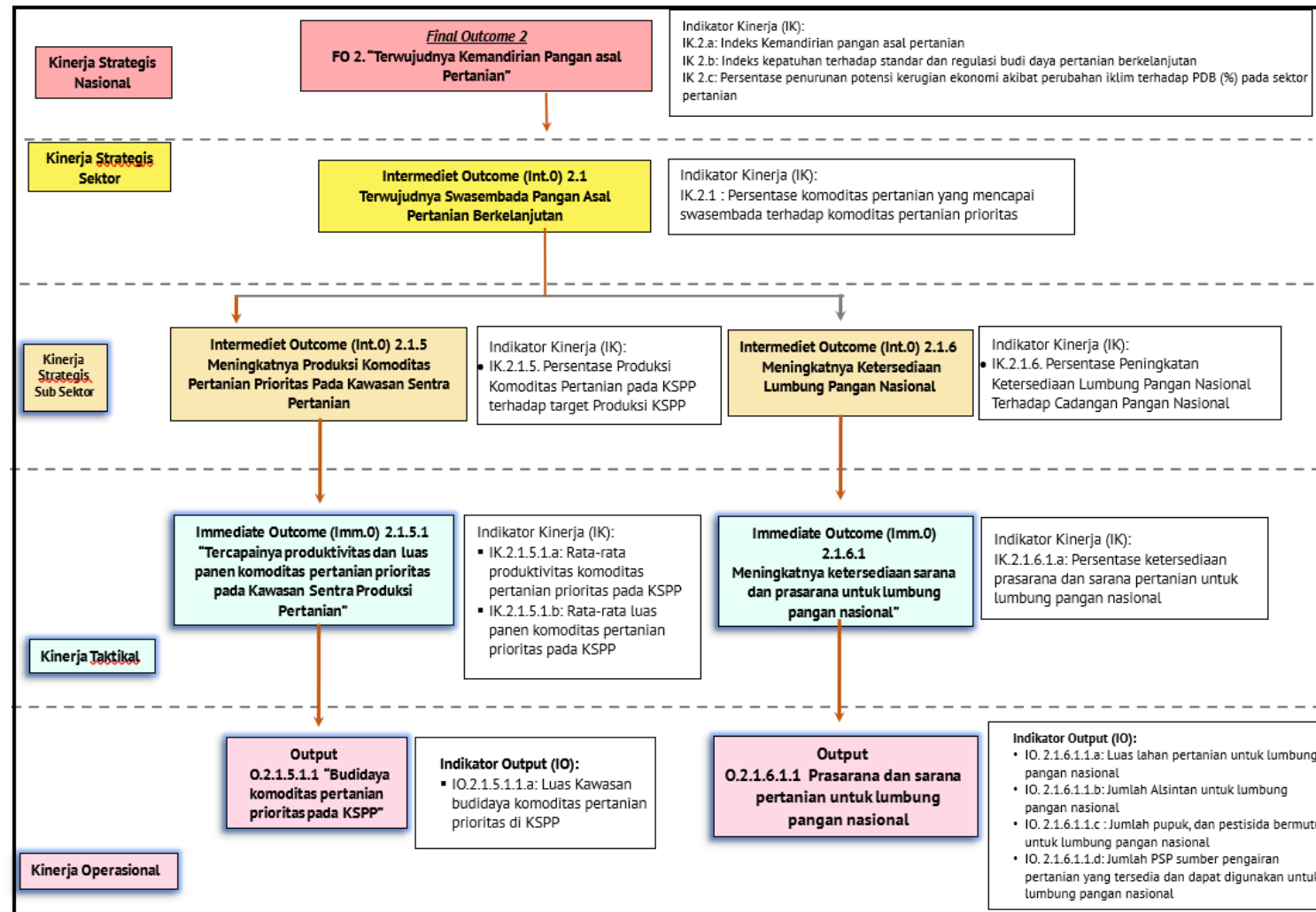
POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.3



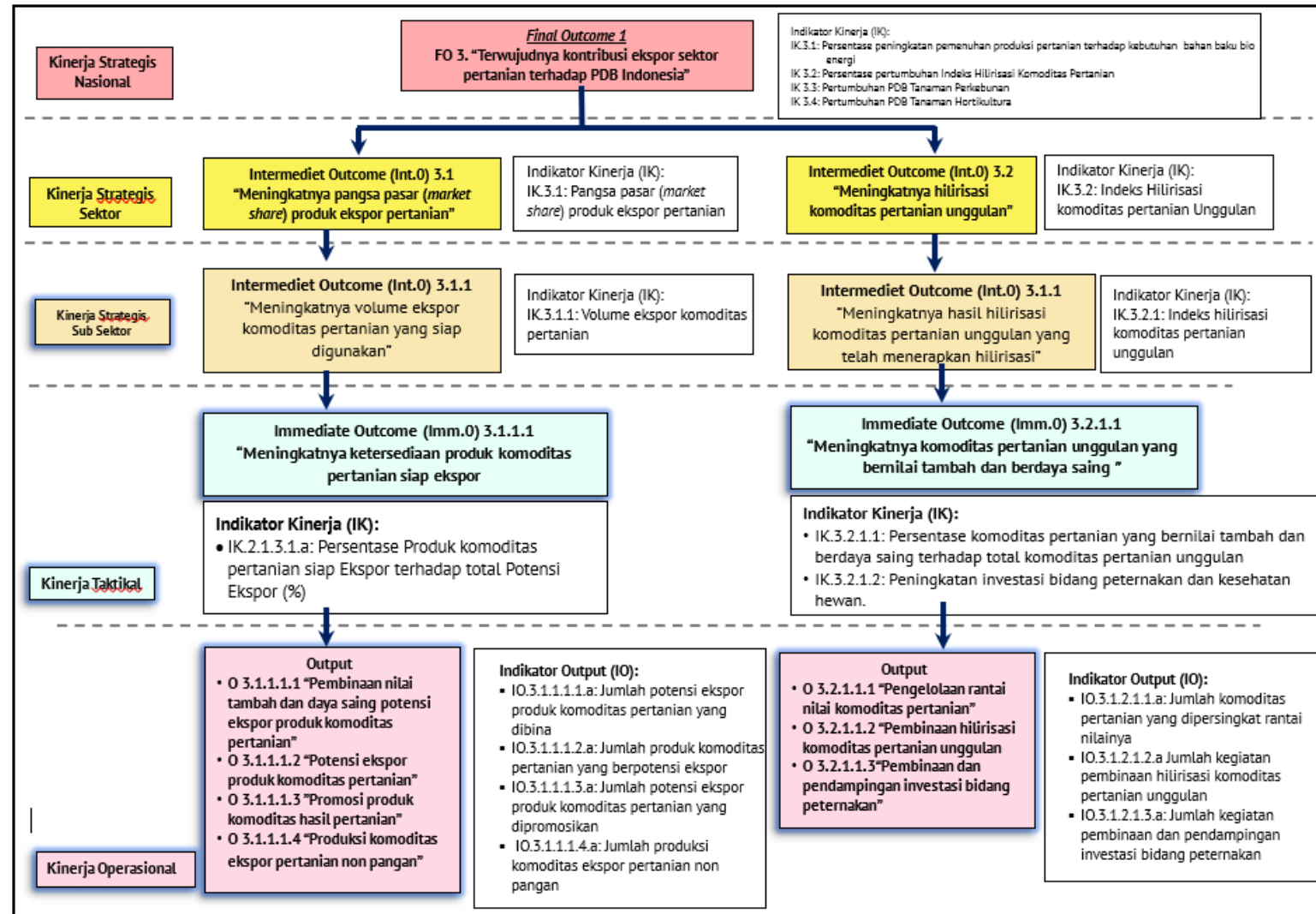
POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.4



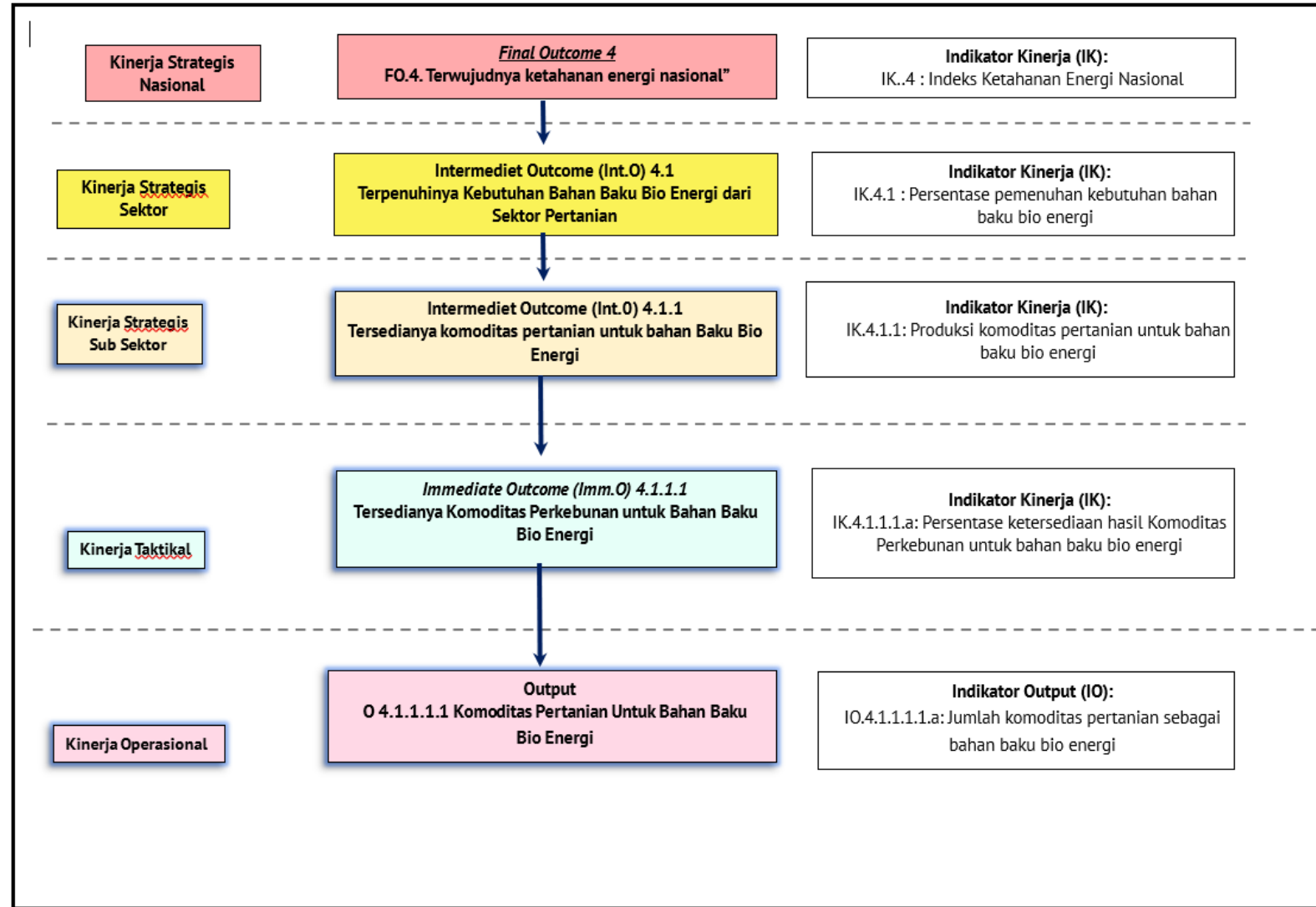
POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.5 DAN INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.6



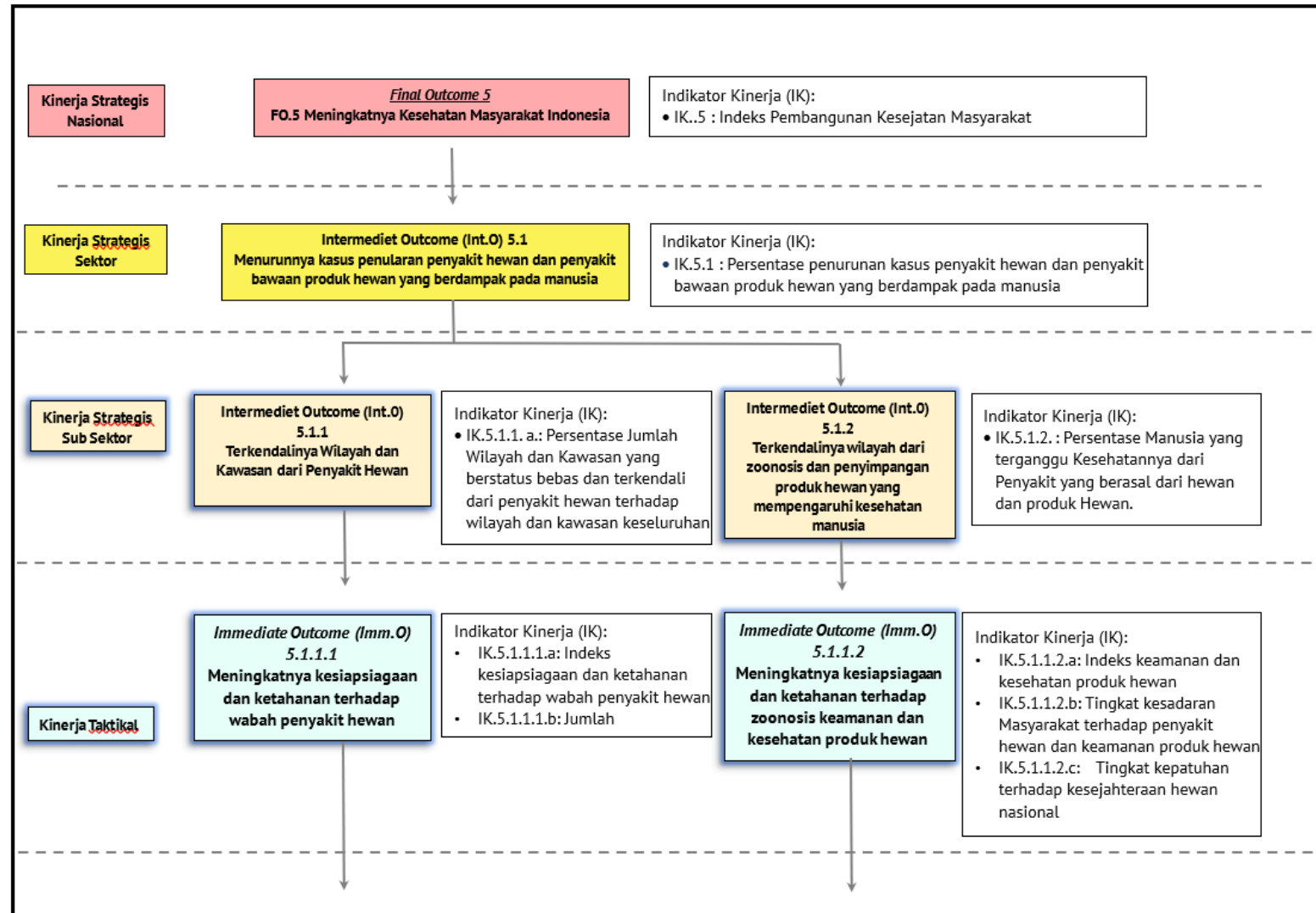
POHON KINERJA FO.3



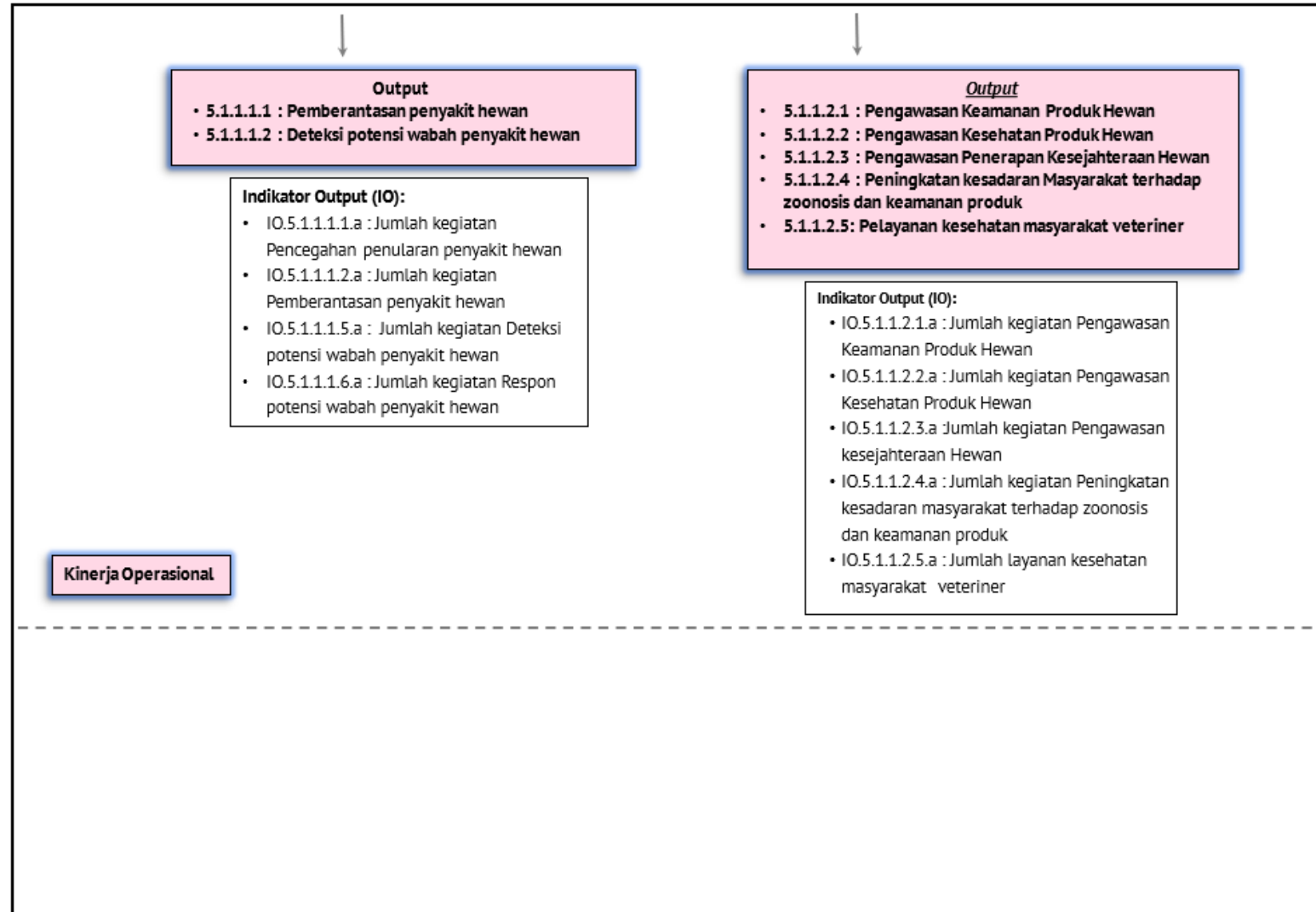
POHON KINERJA FO.4



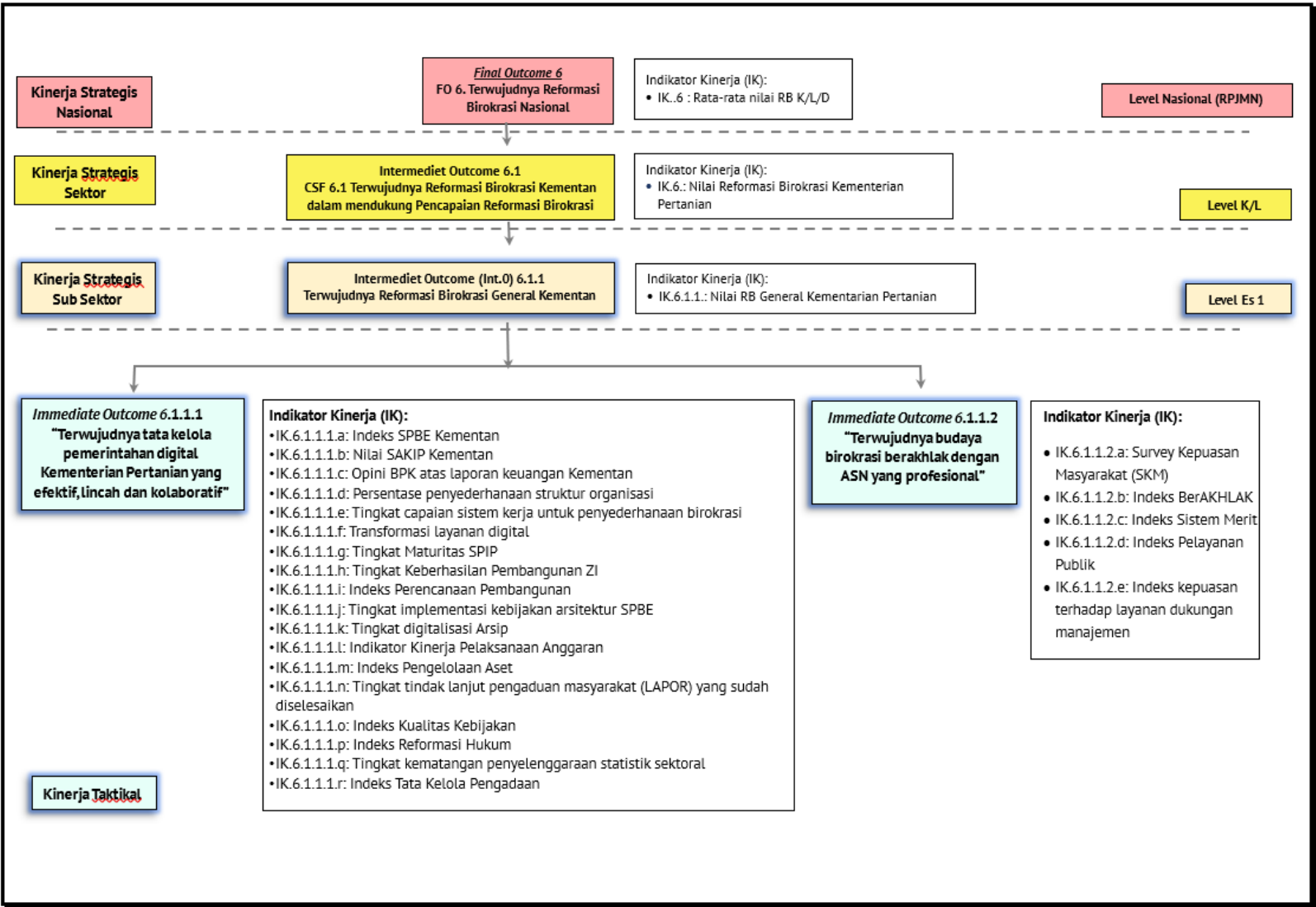
POHON KINERJA FO.5



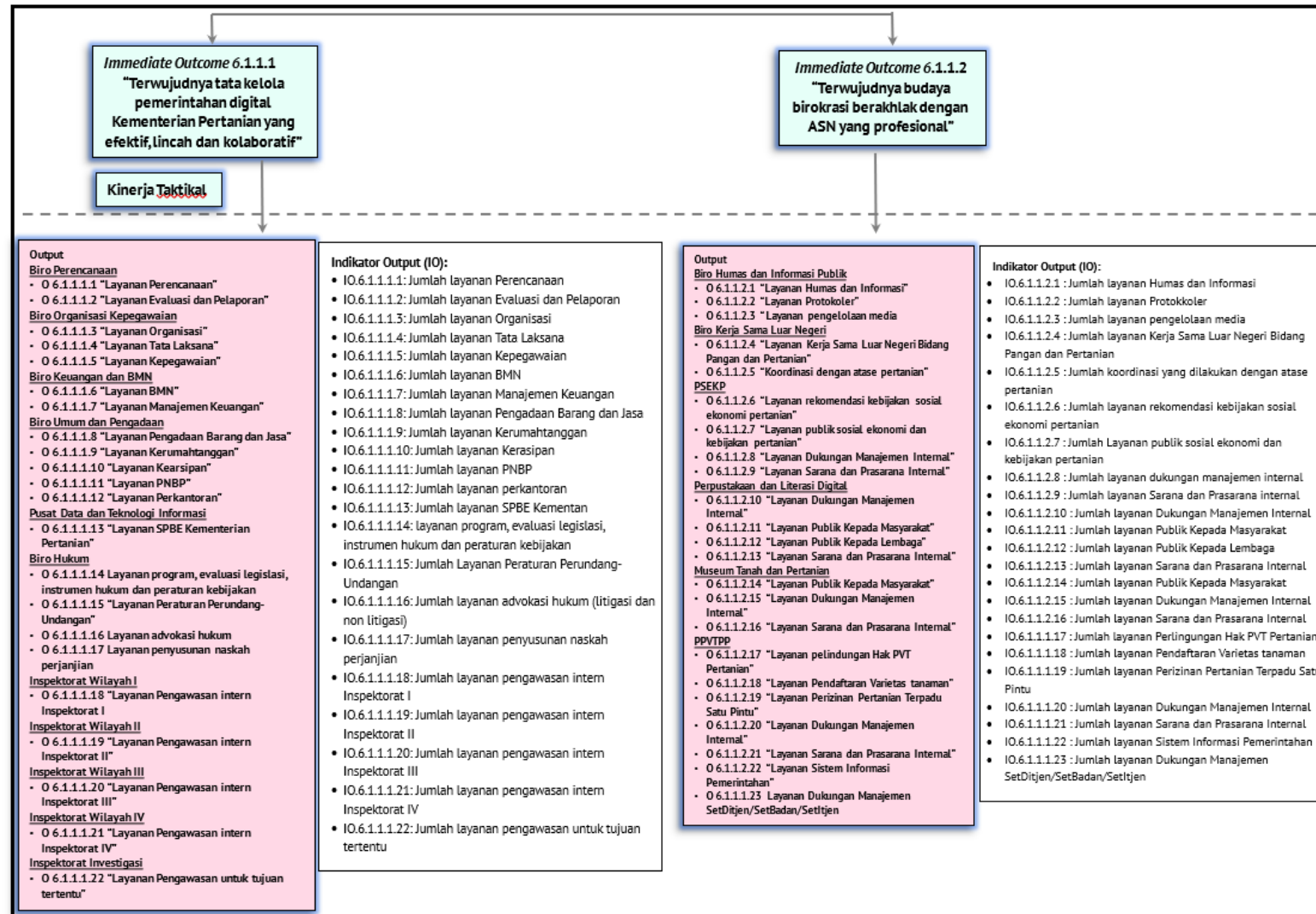
LANJUTAN POHON KINERJA FO.5



POHON KINERJA FO.6



LANJUTAN POHON KINERJA FO.6



Lampiran 6. Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1. Meningkatnya kesejahteraan petani	IT1 Indeks Kesejahteraan Petani	Indeks	0,7445	0,7731	0,8038	0,8324	0,8599
2. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas	IT2 Indeks swasembada pangan prioritas	Indeks	0,66	0,68	0,68	0,7	0,72
	IT3 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan	Indeks	3	3,1	3,2	3,3	3,4
	IT4 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	Persen	1,47	1,49	1,51	1,53	1,55
	IT5 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	Persen	0,091	0,187	0,276	0,36	0,439
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat	IT6 persentase peningkatan pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energi	Persen	0	29	33	37	41
	IT7 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan	Persen	1,94	2,04	2,32	2,43	3,03
	IT8 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura	Persen	1,36	1,77	2,35	2,65	3,04
4. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan	IT9 Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner	Indeks	0,605	0,609	0,613	0,617	0,621
5. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian pertanian yang transparan akuntabel dan professional	IT10 Persentase peningkatan nilai RB Kementerian Pertanian	Persen	2.76%	1.41%	3.02%	3.32%	4.52%

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN